

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	I-3
1.3. Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.....	I-5
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-7
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-9
BAB II Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-10
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-12
2.1.1.4. Demografi	II-14
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-18
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-28
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-36
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-36
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-69
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-95
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-95
2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi	II-96
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-98
2.1.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah.....	II-108
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD 2014-2015	II-110
2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2015.....	II-102
2.2.2. Review Capaian Kinerja terhadap RPJMD.....	II-143
2.2.3. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi	II-157
2.2.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	II-160
2.3. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-160
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Capaian Tahun 2016.....	III-1
3.1.2. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017	III-18
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-19

3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-20
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-23
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-28
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara	IV-1
4.2.	Prinsip Dasar Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.....	IV-3
4.3.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-4
4.4.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-16
4.5.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	IV-28
4.6.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	IV-31
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
5.1.	Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan	V-1
5.2.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	V-14
5.3.	Pagu Indikatif untuk Tiap SKPD	V-14
5.4.	Kaidah Pelaksanaan.....	V-17
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	II-1
Tabel 2.2. Potensi Minyak Bumi Tahun 2015	II-5
Tabel 2.3. Potensi Gas Bumi Tahun 2015	II-6
Tabel 2.4. Potensi Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara	II-7
Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan Penduduk per Provinsi di Indonesia 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025.....	II-16
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	II-18
Tabel 2.7. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional.....	II-19
Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK dan Sisi produksi Tahun 2011-2015	II-20
Tabel 2.9. Struktur PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015	II-20
Tabel 2.10. Struktur PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2015 ADHK Tahun 2000	II-21
Tabel 2.11. Nilai PDRB se Inonesia Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku	II-22
Tabel 2.12. Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku	II-23
Tabel 2.13. Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku	II-23
Tabel 2.14. Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011-2015 Provsu	II-24
Tabel 2.15. PDRB Perkapita Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Utara	II-24
Tabel 2.16. Tipologi Klassen 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014.....	II-25
Tabel 2.17. Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014.....	II-26
Tabel 2.18. Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2010-2014 menurut Indeks Ketimpangan Williamson.....	II-27
Tabel 2.19. Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012	II-35
Tabel 2.20. Capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014	II-36
Tabel 2.21. Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang Pendidikan Tahun 2010-2014	II-38
Tabel 2.22. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara	II-38
Tabel 2.23. Ratio Jenjang Pendidikan/Ratio Pendidikan Tahun 2010-2014.....	II-39
Tabel 2.24. Perkembangan Angka Kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan dasar.....	II-41
Tabel 2.25. Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi	II-41
Tabel 2.26. Proporsi Jalan Nasional Dalam Kondisi Mantap Provsu Tahun 2010-2014	II-48
Tabel 2.27. Proporsi Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Provsu Tahun 2010-2014	II-48
Tabel 2.28. Luas Irigasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	II-49
Tabel 2.29. Status Legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota	II-50
Tabel 2.30. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-54
Tabel 2.31. Perkembangan Koperasi di Sumatera Utara Tahun 2014-2015.....	II-55
Tabel 2.32. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Utara Tahun 2014-2015.....	II-56
Tabel 2.33. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011-2015	II-57
Tabel 2.34. Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 - 2015	II-58
Tabel 2.35. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA) Tahun 2011 - 2015	II-59
Tabel 2.36. Aspek Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	II-63
Tabel 2.37. Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara	II-64
Tabel 2.38. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	II-65
Tabel 2.39. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara	II-66
Tabel 2.40. Jumlah Arsip Statis yang dikelola Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	II-67
Tabel 2.41. Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Provinsi Sumut	II-69
Tabel 2.42. Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut jenis komoditi dan Pengusaha Tahun 2011-2015	II-70
Tabel 2.43. Produksi Komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 ...	II-73

Tabel 2.44. Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2011-2015.....	II-76
Tabel 2.45. Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2011-2015.....	II-77
Tabel 2.46. Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2011-2015.....	II-78
Tabel 2.47. Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2013-2014.....	II-78
Tabel 2.48. Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2011-2015	II-80
Tabel 2.49. Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2011-2015	II-80
Tabel 2.50. Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2011-2015	II-81
Tabel 2.51. Produksi daging, telur dan susu Provsu Tahun 2011-2015	II-81
Tabel 2.52. Produktivitas Bahan Pangan Utama, Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK.....	II-83
Tabel 2.53. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2006 - 2015 (Ha).....	II-83
Tabel 2.54. Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi Tahun 2011-2015.....	II-84
Tabel 2.55. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2008-2012.....	II-86
Tabel 2.56. Unit pembangkit di sub sistem Sumut tahun 2015	II-86
Tabel 2.57. Inventarisasi pembangkit listrik terpasang yang memasok energi listrik Ke sistem sumbagut sampai dengan Tahun 2014	II-87
Tabel 2.58. Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air Yang dikelola PLN Persero Wilayah Sumut Status Tahun 2014	II-88
Tabel 2.59. Pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalan tahun 2011-2015 (yoy)	II-89
Tabel 2.60. Wisatawan Mancanegara yang datang Ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk Tahun 2010-2014	II-90
Tabel 2.61. Jumlah Hotel Menurut Kelas di Sumatera Utara dari Tahun 2010 - 2014	II-91
Tabel 2.62. Rata-rata lama inap tamu hotel tahun 2011-2015	II-91
Tabel 2.63. Kondisi Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010-2014.....	II-92
Tabel 2.64. Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2010-2014.....	II-92
Tabel 2.65. Produksi Ekspor, Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2010-2014	II-93
Tabel 2.66. Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara	II-93
Tabel 2.67. Kontribusi kategori Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2014	II-94
Tabel 2.68. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2010-2014 Provsu	II-94
Tabel 2.69. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB Provinsi Sumatera Utara 2010-2014	II-95
Tabel 2.70. Angka Konsumsi RT perkapita Tahun 2009 - 2013.....	II-95
Tabel 2.71. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010 - 2014	II-96
Tabel 2.72. Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2009-2013 Provinsi Sumatera Utara	II-96
Tabel 2.73. Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara 2009-2013.....	II-97
Tabel 2.74. Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara 2009-2012	II-98
Tabel 2.75. Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara	II-98
Tabel 2.76. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	II-99
Tabel 2.77. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	II-108
Tabel 2.78. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara.....	II-112
Tabel 2.79. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2009-2013`	II-142
Tabel 2.80. Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	II-157

Tabel 2.81.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara	II-161
Tabel 3.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Periode 2016-2017	III-2
Tabel 3.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 (persen)	III-5
Tabel 3.3.	Struktur PDRB Sumatera Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha/Sektor 2015..	III-6
Tabel 3.4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sumut menurut penggunaan tahun 2015	III-7
Tabel 3.5.	PDRB Perkapita Sumut Tahun dasar 2010, Tahun 2013-2015	III-8
Tabel 3.6.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Sepanjang Tahun 2015 di Sumatera Utara	III-9
Tabel 3.7.	Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan utama 2014-2015	III-10
Tabel 3.8.	Besaran agregat PDRB Sumut tahun 2016 dan 2017 ADHB dan ADHK (Rp.M)..	III-13
Tabel 3.9.	Laju pertumbuhan serta kontribusi PDRB Sumut menurut lapangan usaha Tahun 2016 dan 2017 ADHB dan ADHK (Rp.M)	III-14
Tabel 3.10.	Besaran agregat PDRB Sumut menurut pengeluaran tahun 2016 dan 2017 ADHB dan ADHK (Rp.M)	III-15
Tabel 3.11.	Laju dan kontribusi PDRB Sumut menurut pengeluaran tahun 2016-2017	III-15
Tabel 3.12.	Kondisi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka Provsu tahun 2013-2015 serta proyeksi tahun 2016 dan 2017	III-17
Tabel 3.13.	Proyeksi persentase penduduk miskin terhadap pendidikan Sumut tahun 2016 dan 2017	III-17
Tabel 3.14.	Target makro ekonomi Provsu tahun 2016-2017	III-18
Tabel 3.15.	Tabel realisasi dan proyeksi target pendapatan Provsu tahun 2014-2016	III-22
Tabel 3.16.	Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018	III-28
Tabel 3.17.	Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018	III-30
Tabel 4.1.	Isu Strategis Provinsi.....	IV-12
Tabel 4.2.	Identifikasi Permasalahan	IV-17
Tabel 4.3.	Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2014-2015 dan Estimasi Tahun 2016-2017.	IV-29
Tabel 5.1.	Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017	V-15

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. 1. Bagan Alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi	I-2
Gambar 1. 2. Poses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.....	I-6
Gambar 1. 3. Bagan keterkaitan RKPD Provinsi dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.	I-7

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2. 1. Kondisi dan estimasi jumlah penduduk Sumatera Utara Periode 1980-2035	II-5
Grafik 2. 2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara	II-15
Grafik 2. 3. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Rasio Jenis Kelamin – se Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	II-16
Grafik 2. 4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2015 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional	II-21
Grafik 2. 5. Perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Sumatera Utara 2010-2015	II-28
Grafik 2. 6. Perkembangan Angka Melek Huruf Sumatera Utara	II-28
Grafik 2. 7. Perkembangan rata-rata sekolah Provinsi Sumatera Utara	II-29
Grafik 2. 8. Angka Partisipasi Kasar Provinsi Sumatera Utara	II-30
Grafik 2. 9. Angka partisipasi murni Provinsi Sumatera Utara	II-31
Grafik 2. 10. Jumlah Angka Kematian Bayi di Provsu tahun 2009-2013	II-32
Grafik 2. 11. Jumlah Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara 2008-2014	II-32
Grafik 2. 12. Persentase Gizi kurang dan buruk Provinsi Indonesia 2007-2013	II-33
Grafik 2. 13. Perkembangan angka dan jumlah penduduk miskin Sumut 2010-2014	II-34
Grafik 2. 14. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Sumut 2009-2014	II-35
Grafik 2. 15. Persentasi Partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Utara	II-37
Grafik 2. 16. Persentase Perkembangan Angka Putus Sekolah Pada berbagai Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2013.....	II-41
Grafik 2. 17. Persentase Persalinan yang ditangani oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2009-2014	II-42
Grafik 2. 18. Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2009 – 2014.....	II-43
Grafik 2. 19. Jumlah RSUD mampu PONEK dan Puskesmas mampu PONED di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2014	II-43
Grafik 2. 20. Tenaga kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014	II-44
Grafik 2. 21. Persentasi gizi kurang dan buruk yang ditangani Provsu tahun 2010-2014 ...	II-45
Grafik 2. 22. Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014	II-45
Grafik 2. 23. Persentase Angka Kematian (CFR) akibat Diare pada KLB Tahun 2010-2014	II-45
Grafik 2. 24. Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2014.....	II-46
Grafik 2. 25. Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010–2014.....	II-46
Grafik 2. 26. Jumlah Kasus HIV/AIDS Tahun 2000-2014	II-46
Grafik 2. 27. Kondisi jalan mantap di Provsu tahun 2014 (status jalan nasional, provinsi Dan kabupaten/kota).....	II-49
Grafik 2. 28. Kondisi ketenagakerjaan Provsu dan nasional tahun 2010-2014.....	II-55
Grafik 2. 29. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 – 2015 Provinsi Sumatera Utara	II-57
Grafik 2. 30. Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 – 2015 Provinsi Sumatera Utara (Rp. Juta).....	II-59
Grafik 2. 31. Rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN selama 2011-2015	II-60
Grafik 2. 32. Jumlah pengunjung museum negeri Sumatera Utara tahun 2011-2015	II-61
Grafik 2. 33. Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun (dalam ribuan) 2010-2014.....	II-65
Grafik 2. 34. Grafik perkembangan jumlah dan judul buku 2009-2013	II-66
Grafik 2. 35. Pertumbuhan luas areal perkebunan di Sumatera Utara tahun 2011-2015.....	II-72

Grafik 2. 36. Komposisi luas areal perkebunan di Sumatera Utara tahun 2015 berdasarkan perusahaan	II-72
Grafik 2. 37. Produksi tahun 2011-2015 dan persentase produksi komoditi perkebunan di Sumatera Utara tahun 2015 berdasarkan perusahaan	II-75
Grafik 2. 38. Kondisi rasio elektrifikasi tahun 2011-2015	II-89
Grafik 2. 39. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara tahun 2011-2015	II-90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Pokok-pokok Pikiran DPRD/Hasil Reses DPRD Provsu Tahun 2015 dan 2016
- Lampiran 2. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Pagu Indikatif RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
- Lampiran 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

LAMPIRAN - I

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2017



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2017**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2016**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan system perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan dan mengedepankan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi, waktu dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas :perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun berkenaan.

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum (KUA)serta penentuan Prioritasdan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 ini merupakan RKPD tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Dokumen ini memuat tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.

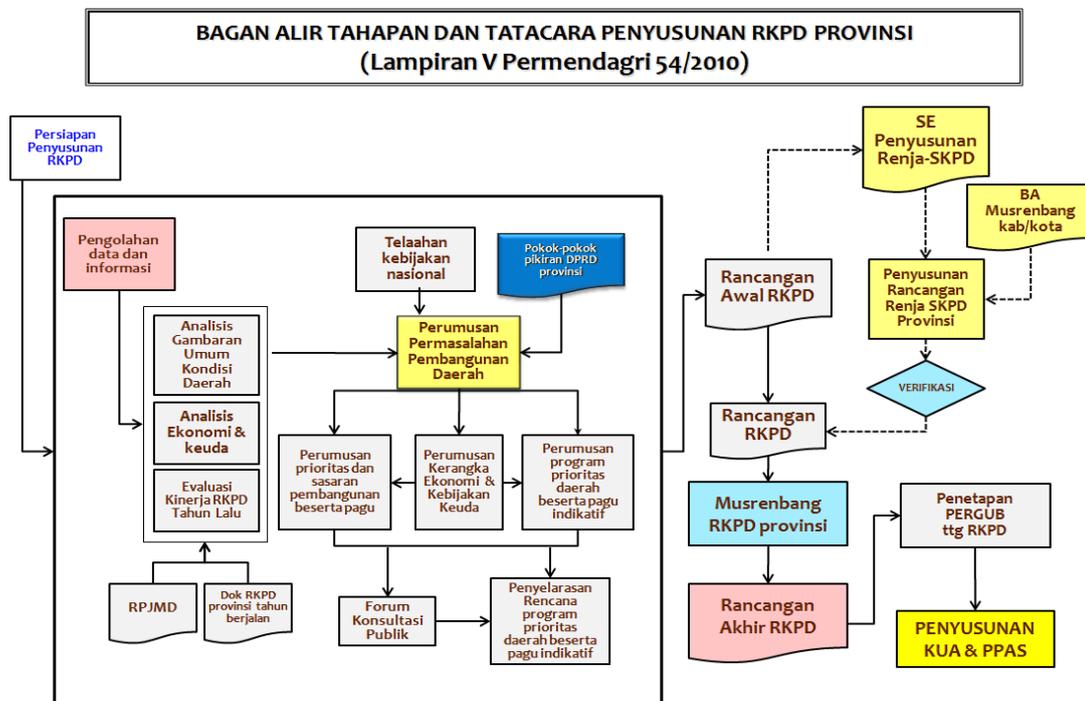
Tahapan penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Persiapan penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan rancangan awal RKPD;
- 3) Penyusunan rancangan RKPD;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 5) Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- 6) Penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi, pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Adapun perumusan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu (n-2);
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah Provinsi;
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi dapat dilihat pada **Gambar 1.1** berikut ini:



Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi

Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka keberadaan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 ini merupakan bagian dari rencana pembangunan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018. Oleh karenanya, RKPD Tahun 2017 ini menjadi sangat penting karena sekaligus sebagai bahan evaluasi atas kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun keempat RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, disamping pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22).

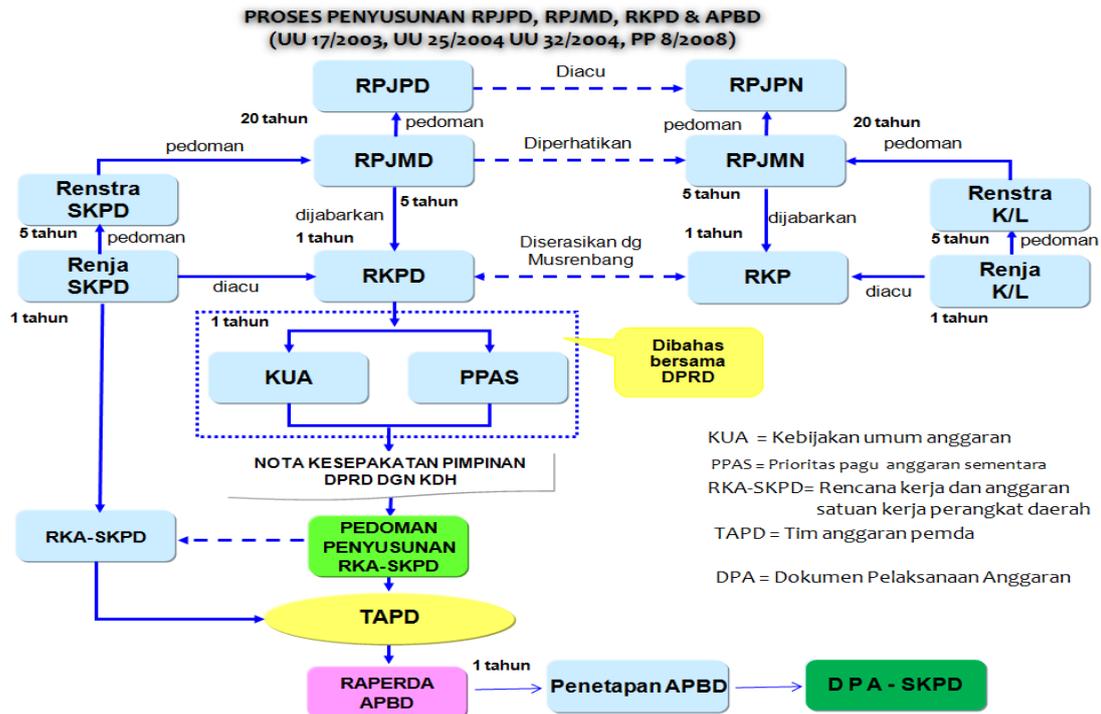
1.3 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan (RKPD) dan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD); (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1.2** berikut ini :



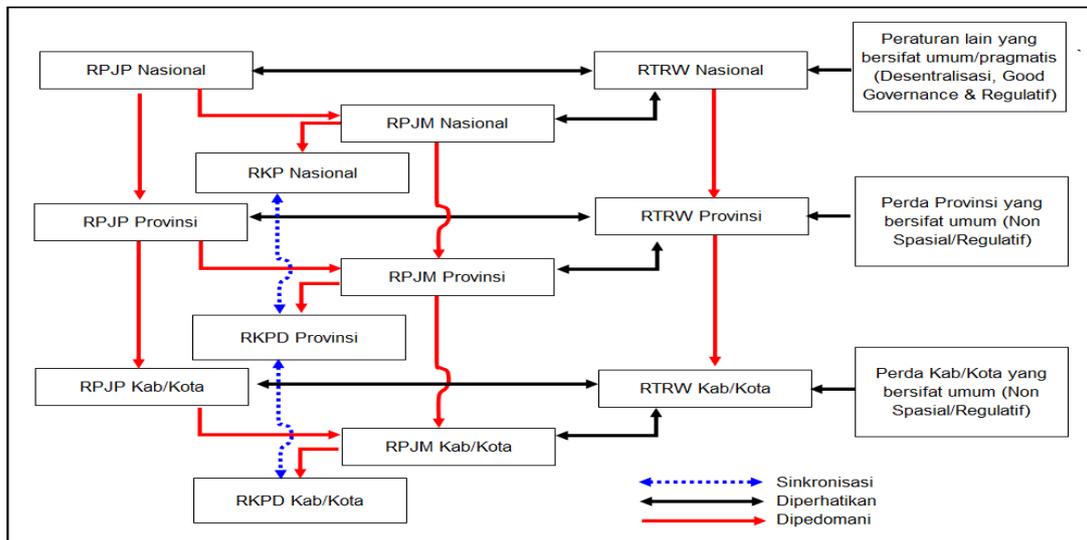
Gambar 1.2.
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKP dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengacu pada **Gambar. 1.2** dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKP dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : RKP disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJPN Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKP disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKP ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. RKP ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKP menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan R.APBD berpedoman kepada RKP dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,
2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKP, sebagai landasan penyusunan R.APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan,
3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD,
4. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKP menjadi pedoman penyusunan R.APBD.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKP Nasional dan Renja K/L dan juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1.3.** berikut ini:



Gambar 1.3. Bagan Keterkaitan RKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.4 Sistematika Dokumen RKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Susunan Dokumen RKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang, terdiri dari pengertian ringkas tentang RKP, proses penyusunan RKP, kedudukan RKP tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKP dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan, terdiri dari uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran.
- 1.3. Hubungan antar Dokumen, menjelaskan tentang hubungan RKP dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.
- 1.4. Sistematika Dokumen RKP, mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKP terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.
- 1.5. Maksud dan Tujuan, memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisikan uraian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan (2015) dan Realisasi RPJMD Tahun 2013-2018, mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu (2015) dan realisasi RPJMD 2013-2018 mencakup telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah, berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan sesuai urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, berisikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan, berisi rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017, berisikan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 yang menggambarkan prioritas pembangunan tahun 2017 yang berkaitan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD Tahun 2017) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antarwilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahap-IV, yaitu RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013–2018.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, adalah sebagai berikut :

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi
2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km² yang terdiri dari daratan seluas 72.981,23 km² atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan luas perairan sebesar 110.000,65 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Perkembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2015, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 436 Kecamatan dan 5.418 Desa/Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.134,00 Km² (8,40%). Sedangkan luas terkecil adalah Kota Tebing Tinggi yaitu 31,00 km² (0,04%). Data selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1.** dibawah ini :

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)*
1	Kota Medan	Medan	21	265
2	Kota Binjai	Binjai	5	59.19
3	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	31
4	Kota Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	55.66
5	Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai	6	107.83
6	Kota Padangsidempuan	Padangsidempuan	6	114.66
7	Kota Sibolga	Sibolga	4	41.31
8	Kota Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	6	280.78
9	Kab. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	2241.68
10	Kab. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	1900.22
11	Kab. Langkat	Stabat	23	6262
12	Kab. Asahan	Kisaran	25	3702.21
13	Kab. Dairi	Sidikalang	15	1927.8
14	Kab. Karo	Kabanjahe	17	2127
15	Kab. Labuhan Batu	Rantau Prapat	9	2156.02

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)*
16	Kab. Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan	8	3570.98
17	Kab. Labuhan Batu Selatan	Kota Pinang	5	3596
18	Kab. Simalungun	Pamatang Raya	31	4369
19	Kab. Tapanuli Utara	Tarutung	15	3791.64
20	Kab. Tapanuli Tengah	Pandan	20	2188
21	Kab. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	6030.47
22	Kab. Toba Samosir	Balige	16	2328.89
23	Kab. Mandailing Natal	Panyabungan	23	6134
24	Kab. Pakpak Bharat	Salak	8	1218.3
25	Kab. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	2335.33
26	Kab. Samosir	Pangururan	9	2069.05
27	Kab. Nias	Gido	10	1842.51
28	Kab. Nias Utara	Lotu	11	1202.78
29	Kab. Nias Selatan	Teluk Dalam	31	1825.2
30	Kab. Nias Barat	Lahomi	8	473.73
31	Kab. Batu Bara	Limapuluh	7	922.2
32	Kab. Padang Lawas	Sibuhuan	12	3892.74
33	Kab. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	9	3918.05
	Provinsi Sumatera Utara	Medan	436	72.981,23*

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 0° - 4°33' Lintang Utara dan 96°50' - 100°52' Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km, Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dalam kondisi baik seluas : 27.019,57 Ha dan 36.447,83 Ha dalam kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya.

Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan

Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Banyak terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Pantai barat ini juga memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter. Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

2.1.1.3 Topografi

21 Kemiringan Lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0% - 2% seluas 17,8% dari luas wilayah, 2%-15 % seluas 49,2% dari luas wilayah, 15% - 25% seluas 8,8%, 25% - 40% seluas 10,8% dan diatas 40% seluas 11,3% dari luas wilayah, sedangkan luas wilayah perairan Danau Toba sekitar 112.986 Ha atau 1,6% dari luas wilayah.

22 Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 - 2200 m dpl. terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km² atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah Daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km² atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

2.1.1.4 Geologi

1. Struktur dan Karakteristik

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi

dan tanah longsor. Jalur patahan (*subduction*) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 18 wilayah kabupaten dan 1 kota (menurut keadaan tahun 2005) merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

2. Potensi Sumber Energi

Sumber daya energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Mengingat arti penting sumber daya energi, Pemerintah perlu menyusun rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang berdasarkan kebijakan pengelolaan energi jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dibentuk Undang-Undang tentang Energi sebagai landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi.

Dalam Undang-undang no 30 Tahun 2007 dijelaskan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Sedangkan Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Dibedakan dengan sumber daya energi, dalam Undang-undang ini sumber daya energi diartikan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.

Kondisi saat ini energi telah berubah menjadi suatu hal yang sangat urgen dan mendesak, dan kondisi ini telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Energi (khususnya fosil) masih diperlakukan sebagai komoditi dagang yang memberikan nilai tambah yang rendah.
- b. Tidak mencukupinya pasokan energy untuk kebutuhan energy domestik, namun produksi energi diekspor dalam jumlah yang besar.
- c. Pemanfaatan energi tidak efisien.
- d. Harga energy belum memenuhi harga keekonomian.
- e. Iklim investasi energy masih rendah.
- f. Kapasitas industri energi nasional masih rendah.
- g. Terbatasnya akses masyarakat terhadap energi.

Cadangan energi yang bersumber dari energi tak terbarukan sangatlah terbatas. Produksi energi fosil cenderung mengalami penurunan sedangkan kebutuhan energi semakin meningkat. Seiring dengan UU no. 30 thn 2007 tentang energi telah mengamanatkan untuk meningkatkan pengelolaan energi. Pasal 20 dalam UU tersebut menekankan untuk meningkatkan energi terbarukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah khususnya di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat khususnya energi terbarukan. Pasal 21 UU itu juga menyebutkan bahwa pengelolaan energi terbarukan lebih ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah dapat memulai dengan melakukan inventarisasi sumber energi, diversifikasi, dan pemberian insentif bagi pengembangan energi baru terbarukan. Dari sisi pengembangan tenaga listrik telah ditetapkan Peraturan Pemerintah no. 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Pada pasal 25 PP itu Pemerintah memberikan peluang pemberian tenaga listrik terbarukan melalui penunjukan langsung. Pemerintah telah melakukan langkah konkrit dengan menerbitkan kebijakan tarif dan pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan seperti tenaga air, biomassa, sampah kota, tenaga surya, dan lainnya.

Sektor energi memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional. Ketersediaan energi primer menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penyediaan energi. Salah satu energi yang langsung dapat digunakan adalah energi listrik. Ketersediaan energi listrik yang berkualitas adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Penyediaan energi listrik telah mampu berperan dalam infrastruktur ekonomi suatu daerah.

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Terdapat 4 (empat) Kabupaten / kota penghasil minyak dan gas yang ada di Sumatera Utara, yaitu : Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Padang Lawas, dan Kota Binjai dengan realisasi Lifting Minyak Bumi pada tahun 2013 sebesar 339.120 barel dan pada tahun 2014 sebesar 509.077 barel. Dengan potensi/cadangan minyak bumi Sumatera Utara sampai dengan akhir 2015 sebesar 46.431,88 MSTB. Untuk jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.2.** dibawah ini:

Tabel 2.2.
Potensi Minyak Bumi Tahun 2015

KABUPATEN	CADANGAN (MSTB)* MINYAK BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	19.466	6.884	3.310
DELI SERDANG	7.551	31	27
BINJAI	5.207	0	0
MEDAN	674	686	594
PADANG LAWAS	2.000	0	0
TOTAL	34.898	7.602	3.931

*MSTB = Thousand stock tank barrel / ribu barrel tanki pengumpul

Sumber : Dinas Pertambangan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2015

Potensi / cadangan Gas Bumi Sumatera Utara yang terdata sampai dengan akhir 2014 adalah sebesar 556.219 MMSCF (536.2 BCF) yang terdiri dari Potensi / cadangan terbukti sebesar 472.399 MMSCF , potensi / cadangan mungkin sebesar 56.478 MMSCF dan Potensi / cadangan harapan sebesar 27.342 MMSCF. Sedangkan untuk realisasi Lifting Gas Bumi pada tahun 2013 sebesar 3.888,1 ribu MMBTU dan pada tahun 2014 sebesar 4.822,4 MMBTU. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3.** berikut ini:

Tabel 2.3.
POTENSI GAS BUMI TAHUN 2015

KABUPATEN	CADANGAN (MMSCF)* GAS		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	233.591	54.797	25.893
DELI SERDANG	143.065	0	0
BINJAI	37.810	0	0
MEDAN	3.933	1.681	1.449
OFFSHORE MEDAN - LANGKAT	54.000	0	0
TOTAL	472.399	56.478	27.342

*MMSCF = Million Standart Cubic Feet / Juta kaki kubik

Sumber : Dinas Pertambangan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2015

Cadangan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Di Provinsi Sumatera Utara sebaran lokasi potensinya berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1°45'03,3" LU 99°08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF dan Desa Hatapang Kecamatan Na-IX-X Kabupaten Labuhanbatu. Serta beberapa wilayah lain yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan) dimana hingga saat ini dalam tahap Penyelidikan Umum. Terdapat juga indikasi potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Kelurahan Aekhabil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

3. Bahan Tambang Mineral Logam dan Bukan Logam

Bahan tambang mineral di Sumatera Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) jenis berupa Antimoni, Arsen, Barit, Bauksit, Belerang, Besi, Bismutih, Kromium, Emas, Perak, Tembaga, Florit, Mangan, Merkuri, Molibdenum, Niobium, Platina, Tellurium, Seng, Timbal dan Wolfram. Selain itu pula terdapat juga bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara antara lain : Bentonit, Zeolit, Dolomit, Travertin, Diatomea, Trass, Andesit, Granit, Feldspar, Marmer, Kaolin, Batumulia, Batu Gamping, Batu Apung, Perlit, Kalsit, Kukarsit, Phospat, Lempung, Pasir Kuarsa, Mika, Grafit, Oker, Talk, Sirtu, dan Serpentin.

Provinsi Sumatera Utara mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam, emas, timah hitam (galena), seng, tembaga, besi dan mineral non logam : batu gamping, dolomit, bentonit, zeolit, kaolin, feldspar, marmer, granit, belerang, andesit, serpentinit, pasir kwarsa, perlit serta bahan galian energi : gambut, batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumber daya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.4.** berikut ini:

Tabel: 2.4.
Potensi Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara

NO	SUMBER DAYA	DEPOSIT	LOKASI
V	PERTAMBANGAN		
1	Batubara	23,45 juta ton	Langkat, Lab.Batu, Nias
2	Geothermal	1.380 MW	Tapsel, Madina, Tapteng , Karo, Taput
3	Bauksit	27,6 juta ton	Lab.Batu
4	Andesit	58,2 juta ton	Deli serdang
5	Batu Gamping	1.678 juta ton	Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Taput, Nias, Humbahas
6	Bentonit	80,8 juta ton	Langkat, Tapsel
7	Dolomite	11,5 juta ton	Karo
8	Feldspar	117 juta ton	Taput, Simalungun, Langkat
9	Granit	951,3 juta ton	Taput, Tapteng, Lab.Batu
10	Marmer	32,5 juta ton	Madina, Karo, Dairi
11	Trust	32,9 juta ton	Simalungun, Karo, Langkat
12	Emas	Eksplorasi pendahuluan	Tapsel, Madina, Deli Serdang, Dairi, Humbahas
13	Seng	Eksplorasi Umum	Madina, Tapteng, Tapsel, Dairi

Sumber : Dinas Pertambangan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2015

2.1.1.5 Hidrologi

1. Daerah aliran sungai

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 DAS dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

2. Sungai, Danau dan Rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas

provinsi dengan Sumatera Barat dan WS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumon – Kualuh adalah, WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas Kab/Kota.

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang potensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Di Provinsi Sumatera Utara luas baku daerah rawa adalah sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

3. *Debit*

Beberapa sungai utama di Propinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disini lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu Danau Siais dan Danau Marsabut di Kabupaten Tapanuli Selatan, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) kabupaten dengan luas sekitar 110.260 ha.

2.1.1.6 **Klimatologi**

1. *Tipe*

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2. *Curah hujan*

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

3. *Suhu*

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80°C, sebagian daerah berbukit dengan

kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C.

4. Kelembaban

Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

1. Kawasan Lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.055.795,00 ha atau 42,63 % dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha). Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

- ✓ Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.633.889,00 ha), terbagi atas :
 - a. Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru(TB) : 427.008,00 Ha
 - b. Hutan Lindung (HL) : 1.206.881,00 Ha
- ✓ Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.421.905,00 ha) :
 - a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 641.769,00 Ha
 - b. Hutan Produksi Tetap (HP) : 704.452,00 Ha
 - c. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) : 75.684,00 Ha

Di Provinsi Sumatera utara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung adalah kawasan berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar dari sekitar 45 %, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiliki curah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias).

2. Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang teridentifikasi hingga Tahun 2012 seluas 380.201 Ha. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas ± 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif berimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km² atau 36,8% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Untuk perkebunan, luas areal perkebunan rakyat sampai tahun 2015 sekitar 1,13 juta hektar, dengan total produksi sebesar ± 6,53 juta ton dengan komoditi kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa dan komoditi lainnya.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan, dengan luas laut 110.000 Km² dan panjang pantai 1.300 Km meliputi Pantai Timur (WPP 571) sepanjang 545 Km dan Pantai Barat, Nias, Pulau-Pulau Batu (WPP572) sepanjang 755 Km. Potensi perikanan tangkap sebesar 841.200 ton/tahun terdiri dari potensi perikanan tangkap di WPP 571 Selat Malaka (Pantai Timur) sebanyak 276.00 ton/tahun dan WPP 572 Samudera Hindia (Pantai Barat) sebanyak 565.200 ton/tahun serta penangkapan di perairan umum sebesar 155.797 hektar. Potensi perikanan budidaya terdiri dari Budidaya laut seluas 100.000 hektar, budidaya air tawar seluas 18.647,5 hektar dan air payau seluas 20.000 ha.

Pariwisata di Sumatera Utara sangat beragam, dari wisata alam. Wisata budaya dan wisata minat khusus. Danau Toba, Kawasan Ekosistem Gunung Leuser Brastagi, pantai-pantai di Pulau Nias adalah beberapa destinasi wisata alam yang dibanggakan di Sumatera Utara. Selain itu wisata budaya di Sumatera Utara juga tidak kalah menarik antara lain, Istana Maimun, Peninggalan Megalit di Pulau Nias, Komplek Makam Raja Batak dan masih banyak lagi. Wisata minat khusus juga menjadi potensi pariwisata di Sumatera Utara yaitu, Arung Jeram Sei Asahan, Taman Iman di Dairi, Paralayang di Sitopsi, dan lain-lain.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Sumatera Utara berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berdasarkan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota di Sumatera Utara yang diwujudkan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan lokal saling terkoneksi.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi: (a) untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (b) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan (c) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi di Provinsi Sumatera ditetapkan berdasarkan kepentingan: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- A. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;**
 1. Merek, Kabupaten Karo;
 2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 5. Harian, Kabupaten Samosir;
 6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar

 - B. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi:**
 1. Kawasan Tanjungbalai – Asahan;
 2. Kawasan Simalungun – Batubara; dengan fokus Kawasan Pengembangan Industri Berbasis Aluminium dan Diversifikasi Aluminium yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan didukung oleh Global Hubungan Internasional Kuala Tanjung ;
 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangkei khusus pengembangan cluster sawit dan cluster karet;

 - C. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.**

 - D. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi :**
 1. Kawasan Labuan Angin – Sibolga;
 2. Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan; dan
 3. Kawasan Perkotaan Padangsidimpuan dan sekitarnya.
 4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.
- Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
- A. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi:**
 1. Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;
 2. Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 3. Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

 - B. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;**

 - C. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;**

- D. Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
- E. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- A. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
- B. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
- C. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Di tingkat nasional, beberapa wilayah/kawasan di Sumatera Utara juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu:

- A. Dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut RI dengan Malaysia;
- B. Dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
- C. Dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Serta Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. Pada Tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya sesuai ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada prosesnya hingga saat ini, telah mulai inisiasi untuk pengembangan koridor antar kawasan, yaitu Belawan-Kuala Namu- Kuala Tanjung serta pengembangan konsep *aerotropolis* di kawasan Bandara Kuala Namu yang terintegrasi dengan sektor ekonomi pertanian unggulan serta pengembangan kawasan *Agrotechnopark* dan kawasan sosial religi terpadu di sekitar bandara Kuala Namu.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Kawasan Rawan Massa Gerakan Tanah/Tanah Longsor

Bencana longsor disertai dengan banjir bandang sudah sering terjadi di Sumatera Utara antara lain longsor dan banjir bandang Sibolangit (Deli Serdang, 22 November 1994), Dolok - Saipar Dolok Hole di DAS Bilah (Tapanuli Selatan -

Labuhan Batu, Mei 1995), Perbaungan - Lubuk Pakam (Deli Serdang, Januari 2002), Nias (31 Juli 2001 dan 2 Januari 2003), Bahorok (Langkat, 2 Nopember 2003). Berbagai longsor dan banjir bandang dalam ukuran kecil juga telah sering terjadi di berbagai lokasi di Sumatera Utara sebagai contoh Berastagi yang berada di pegunungan di Karo beberapa waktu yang lalu dilanda banjir bandang.

Kawasan ini terletak pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara - Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsor, gelombang pasang dan banjir bandang.

Termasuk dalam kawasan ini Kabupaten Tapanuli Utara pada Kecamatan Muara, Sipoholon, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Baki, Raja, Siborong-borong, Pagaran, Onan Ganjang, Tarutung, Adian Koting, Pahae Julu, Pahae Jae; Kabupaten Samosir pada Kecamatan Simanindo, Pangururan, Sianjur Mula-Mula, Harian Boho, Palipi, Onan Runggu, Kabupaten Toba Samosir pada Kecamatan Laguboti, Porsea, Habinsaran; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Barus, Kolang, Tapian Nauli, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batang Natal, Kotanopan; Kabupaten Pakpak Bharat pada Kecamatan Sitelu Taliutang Jahe, Sitelu Taliutang Julu, Taliutang Salak, Taliutang PGGs, Kerajaan; Kabupaten Dairi pada Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Pegagan, Sumbul, Sidikalang, Parbuluan; Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Dolok Silau, Silimakuta, Dolok Pardamean, Sidamanik, Dolok Panribuan, Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Namorambe, STM Hilir, Biru-biru, Sibolangit, STM Hulu, Bangun Purba, Kabupaten Karo pada Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, Lau Baleng, Tiga Binanga, Simpang Empat, Kabanjahe, Barusjahe, Merek; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Padang Tualang, Bahorok, Salopian, Kwala, Sei Bingai; Termasuk Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah yaitu: Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe serta Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunung Sitoli.

2. Kawasan Rawan zona Patahan Aktif

Posisi wilayah Sumatera Utara terhadap Pulau Sumatera yang terletak diantara Lempeng Asia dan Lempeng Australia mengakibatkan terdapatnya kawasan rawan pada zona tumbukan lempeng di wilayah pantai barat, wilayah daratan Sumatera Utara, dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Air Laut, Abrasi dan Tsunami; Gelombang Pasang; Rawan Abrasi

Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, seperti yang terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami yang menerjang pantai barat Aceh dan Sumatera Utara terjadi 20 menit sampai 5 jam setelah gempa tektonik. Kecepatan gelombang tsunaminya rata-rata 50-100 kilometer per jam. Di pusat gempa, kecepatan tsunami Aceh secara teoretis dapat dihitung, yaitu antara 400 - 800 kilometer per jam. Daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 meter, meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

4. Kawasan Rawan Banjir/Banjir Bandang

Peristiwa banjir merupakan bencana alam yang juga sering terjadi di wilayah Sumatera Utara yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan

lereng landai atau dataran. Beberapa peristiwa banjir yang terjadi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Peristiwa banjir (dan juga tanah longsor) yang terbesar selama 3 tahun terakhir di Indonesia terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuseur (TNGL) yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
- Di daerah Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada November 2003 terjadi banjir bandang yang berasal dari bagian hulu DAS Bohorok yang menyebabkan 92 orang tewas dan 154 orang hilang.
- Bencana banjir di beberapa wilayah pada Bulan Desember 2012, meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Kepulauan Nias.

Termasuk dalam kawasan ini yaitu Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Silau Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batunanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Manduamas, Barus, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sibolga, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, Batahan; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Besitang, Tanjungpura, Gebang, Secanggih, Hinai, Stabat, Padangtualang, Bahorok.; Kabupaten Labuhan Batu pada Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Pangkatan, Bilah Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kecamatan Kualuh Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Kecamatan Kampung Rakyat dan Kota Pinang; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Tua, Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Biru-biru, Pantai Labu, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam; Kabupaten Serdang Bedagai pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sei Bamban dan Kecamatan Tebing Tinggi.

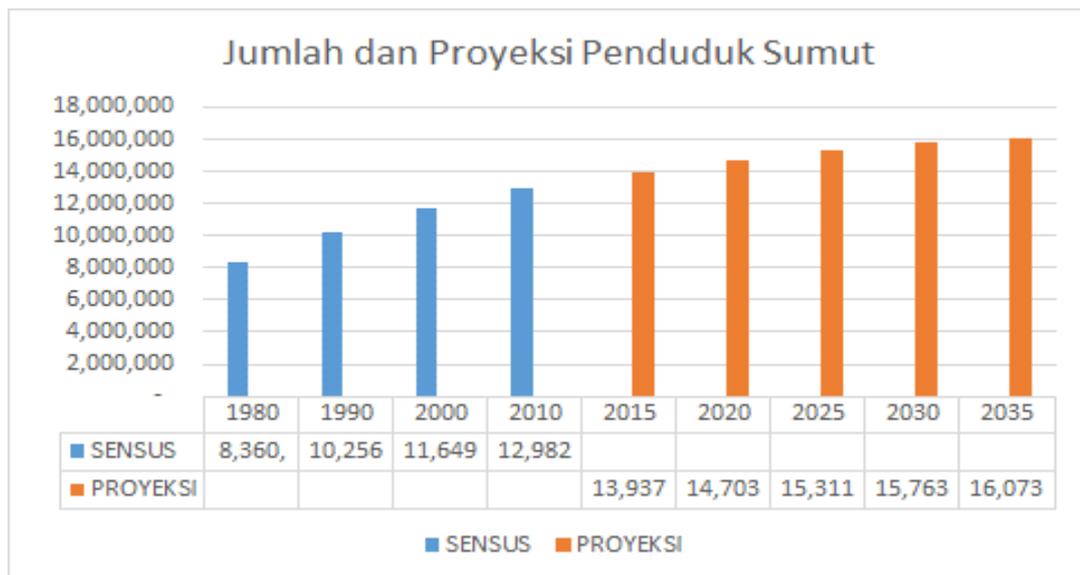
Termasuk juga pada Kabupaten Nias pada Kecamatan Idano Gawo, Gido; Kabupaten Nias Utara pada Kecamatan Tuhemberua, Lahewa, Alasa; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe, Sirombu, Kabupaten Nias Selatan pada Kecamatan Lolowau, Amandraya, Teluk Dalam, Lahusa; Kota GunungSitolli pada Kecamatan Gunungsitolli.

5. *Kawasan Rawan Angin Puting Beliung berada di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal.*
6. *Kawasan Rawan Kebakaran hutan meliputi kawasan sepanjang kawasan Danau Toba.*
7. *Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat pada :*
 - a. **Tipe A**, yaitu Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang pernah tercatat meletus paling tidak sekali sejak tahun 1600 yaitu pada Tahun 2010 sampai 2015 masih aktif mengeluarkan abu vulkanik.
 - b. **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki empat gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Toba Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - c. **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api, yaitu Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.4 Demografi

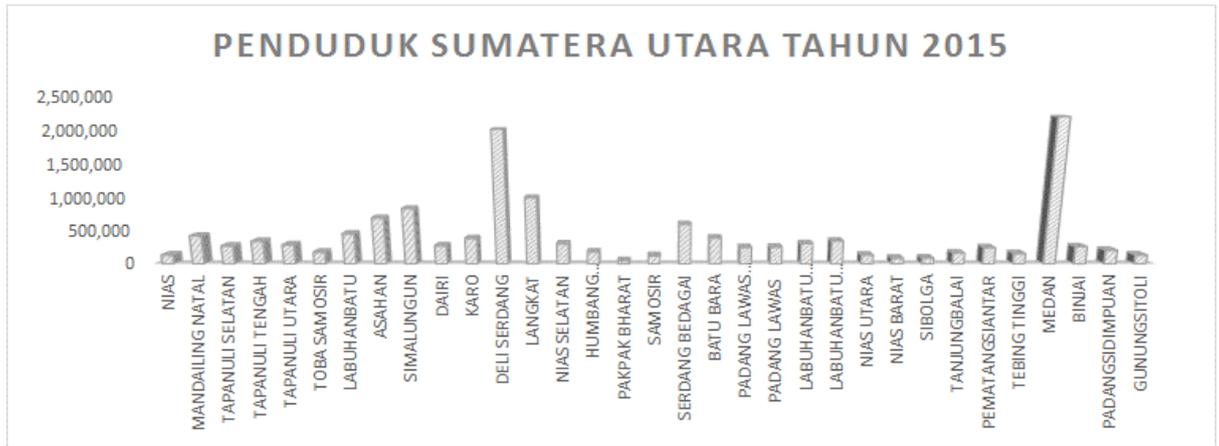
Berdasarkan hasil pendataan Penduduk Tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara mencapai 13.937.797 orang, yang terdiri atas 6.954.552 laki-laki dan 6.983.245 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 186 Jiwa/Km². Sekitar 51,83 % penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 49,17 % bertempat tinggal di daerah perkotaan, angka ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 2014 dimana penduduk yang tinggal di Desa mencapai 50,74% dan di perkotaan sebesar 49,26%, dan diperkirakan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk perkotaan akan sedikit lebih banyak dari pedesaan.

Jumlah penduduk Sumatera Utara merupakan terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah atau terbesar di luar Pulau Jawa. Terdiri dari berbagai suku, yaitu suku asli yang terdiri dari 8 suku yakni Suku Melayu Deli di Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat, Suku Batak Karo berada di Kabupaten Karo, Suku Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Suku Batak Pesisir berada di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Suku Batak Mandailing/Angkola di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, Suku Batak Simalungun umumnya di Kabupaten Simalungun, Suku Batak Pakpak berada di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat dan Suku Nias di Kepulauan Nias. Selain itu terdapat suku pendatang yakni Suku Minangkabau : Kota Medan, Pesisir barat, Suku Aceh umumnya di Kota Medan, Suku Jawa di Pesisir Timur & Barat dan etnis Tionghoa umumnya di wilayah perkotaan pesisir Timur & Barat.



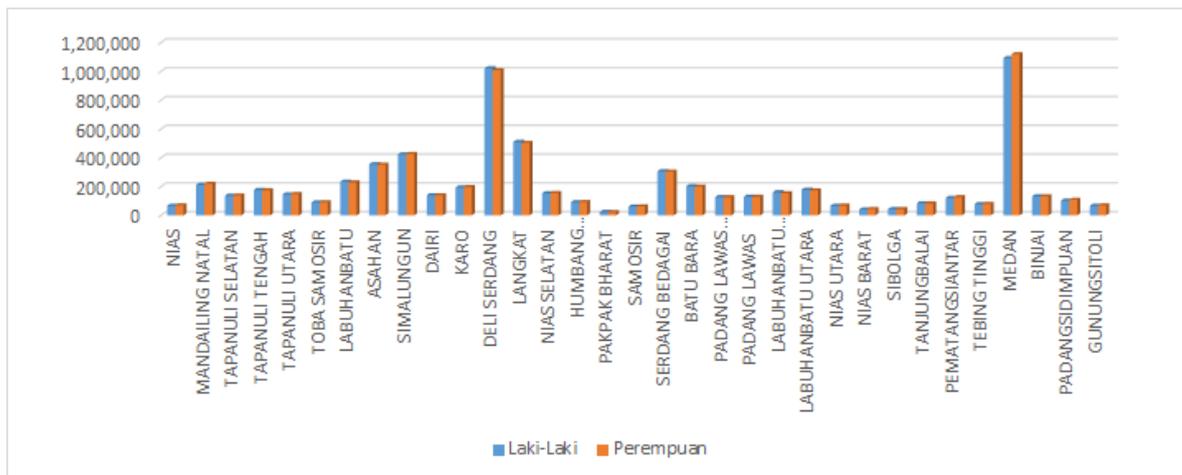
Grafik 2.1
Grafik Kondisi dan Estimasi Jumlah Penduduk Sumatera Utara
Periode Tahun 1980 - 2035

Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Sumatera Utara meningkat 4,6 juta dan diproyeksikan meningkat sebanyak 3,09 juta dalam kurun waktu 25 tahun kedepan. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya.



Sumber : BPS Sumut, 2016

Grafik 2.2.
Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015



Sumber : BPS Sumut, 2016

Grafik 2.3.
Grafik Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,59, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kabupaten Pakpak Barat yakni sebesar 102,16 dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Nias Barat yakni sebesar 91,65.

2.1.4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari data Proyeksi Penduduk Tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara tahun 2015 sebesar 1,20 persen dan pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,22%, merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah di Sumatera, atau posisi ke-5 laju pertumbuhan penduduk terendah secara nasional (dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (0,37%), Jawa Timur (0,76%), Kalimantan Barat (0,91%), dan D.I Jogjakarta (1,02%).

Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Provinsi di Indonesia
2000, 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2025

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.929,3	4.037,9	4.112,2	4.166,3	4.196,5	4.196,3
SUMATERA UTARA	11.642,6	12.452,8	13.217,6	13.923,6	14.549,6	15.059,3
SUMATERA BARAT	4.248,5	4.402,1	4.535,3	4.693,4	4.785,4	4.846,0
RIAU	4.948,0	6.108,4	7.469,4	8.997,7	10.692,8	12.571,3
JAMBI	2.407,2	2.657,3	2.911,7	3.164,8	3.409,0	3.636,8
SUMATERA SELATAN	6.210,8	6.755,9	7.306,3	7.840,1	8.369,6	8.875,8
BENGKULU	1.455,5	1.617,4	1.784,5	1.955,4	2.125,8	2.291,6
LAMPUNG	6.730,8	7.291,3	7.843,0	8.377,4	8.881,0	9.330,0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900,0	971,5	1.044,7	1.116,4	1.183,0	1.240,0
DKI JAKARTA	8.361,0	8.699,6	8.981,2	9.168,5	9.262,6	9.259,9
JAWA BARAT	35.724,0	39.066,7	42.555,3	46.073,8	49.512,1	52.740,8
JAWA TENGAH	31.223,0	31.887,2	32.451,6	32.882,7	33.138,9	33.152,8
DI YOGYAKARTA	3.121,1	3.280,2	3.439,0	3.580,3	3.694,7	3.776,5
JAWA TIMUR	34.766,0	35.550,4	36.269,5	36.840,4	37.183,0	37.194,5
BANTEN	8.098,1	9.309,0	10.661,1	12.140,0	13.717,6	15.343,5
BALI	3.150,0	3.378,5	3.596,7	3.792,6	3.967,7	4.122,1
NUSA TENGGARA BARAT	4.008,6	4.355,5	4.701,1	5.040,8	5.367,7	5.671,6
NUSA TENGGARA TIMUR	3.823,1	4.127,3	4.417,6	4.694,9	4.957,6	5.194,8
KALIMANTAN BARAT	4.016,2	4.394,3	4.771,5	5.142,5	5.493,6	5.809,1
KALIMANTAN TENGAH	1.855,6	2.137,9	2.439,9	2.757,2	3.085,8	3.414,4
KALIMANTAN SELATAN	2.984,0	3.240,1	3.503,3	3.767,8	4.023,9	4.258,0
KALIMANTAN TIMUR	2.451,9	2.810,9	3.191,0	3.587,9	3.995,6	4.400,4
SULAWESI UTARA	2.000,9	2.141,9	2.277,2	2.402,8	2.517,2	2.615,5
SULAWESI TENGAH	2.176,0	2.404,0	2.640,5	2.884,2	3.131,2	3.372,2
SULAWESI SELATAN	8.050,8	8.493,7	8.926,6	9.339,9	9.715,1	10.023,6
SULAWESI TENGGARA	1.820,3	2.065,9	2.363,9	2.653,0	2.949,6	3.246,5
GORONTALO	833,5	872,2	906,9	937,5	962,4	979,4
MALUKU	1.166,3	1.266,2	1.369,4	1.478,3	1.589,7	1.698,8
MALUKU UTARA	815,1	890,2	969,5	1.052,7	1.135,5	1.215,2
PAPUA	2.213,8	2.518,4	2.819,9	3.119,5	3.410,8	3.682,5

Sumber : Data Statistik, BPS

2.1.4.2 Sebaran Penduduk

Secara geografis, penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur, yaitu dimana pada wilayah tersebut terdapat sejumlah kabupaten yang berpenghuni terbesar (di atas 5 % dari seluruh penduduk provinsi) dan berkepadatan tertinggi (di atas 200 jiwa/km²), seperti : Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai. Pada wilayah timur ini juga terdapat sejumlah besar kota besar dengan distribusi dan kepadatan penduduk terbesar yaitu Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat bahwa penyebaran penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten/kota rata-rata dibawah 5 persen, dan hanya lima kabupaten/kota yang persebarannya diatas 5 persen.

Secara umum kepadatan bruto di Provinsi Sumatera Utara masih rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan yang tidak terbangun, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Kecuali pada kota-kota yang ada di Sumatera Utara, kepadatannya relatif sedang sebagai kawasan perkotaan. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2.210.624 orang (15,86%), 2.029.308 orang (14,56%), dan 1.013.385 orang (7,27%). Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 45.516 orang (0,33 persen). Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 72.981,23 kilometer persegi yang didiami oleh 13,937.797,401 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 184 orang per kilo meter persegi.

Menurut hasil pendataan penduduk terakhir tahun 2015, Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak 8.341 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 37,36 orang per kilo meter persegi. Kota kedua dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Tebing Tinggi sebesar 4.445 per kilometer persegi. Dengan kemampuan daya dukung

lahan Kota Tebing Tinggi yang terbatas sementara penduduk terus bertambah, Kota Tebing Tinggi perlu mengendalikan pertumbuhan penduduknya.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk
Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	JUMLAH PENDUDUK		Distribusi Penduduk	
		Jumlah	Kepadatan	Laki-Laki	Perempuan
1	NIAS	136,115	73.87	66,295	69,820
2	MANDAILING NATAL	430,894	70.25	211,506	219,388
3	TAPANULI SELATAN	275,098	45.62	136,683	138,415
4	TAPANULI TENGAH	350,017	159.97	175,690	174,327
5	TAPANULI UTARA	293,399	77.38	145,105	148,294
6	TOBA SAMOSIR	179,704	77.16	89,211	90,493
7	LABUHAN BATU	462,191	214.37	233,485	228,706
8	ASAHAN	706,283	190.77	354,706	351,577
9	SIMALUNGUN	849,405	194.42	423,202	426,203
10	DAIRI	279,090	144.77	139,401	139,689
11	KARO	389,591	183.16	193,397	196,194
12	DELI SERDANG	2,029,308	905.26	1,021,189	1,008,119
13	LANGKAT	1,013,385	161.83	510,288	503,097
14	NIAS SELATAN	308,281	168.90	153,097	155,184
15	HUMBANG HASUNDUTAN	182,991	78.36	90,790	92,201
16	PAKPAK BHARAT	45,516	37.36	23,001	22,515
17	SAMOSIR	123,789	59.83	61,406	62,383
18	SERDANG BEDAGAI	608,691	320.33	305,513	303,178
19	BATUBARA	400,803	434.62	201,697	199,106
20	PADANG LAWAS UTARA	252,589	64.47	126,793	125,796
21	PADANG LAWAS	258,003	66.28	129,289	128,714
22	LABUHAN BATU SELATAN	313,884	87.29	160,080	153,804
23	LABUHAN BATU UTARA	351,097	98.32	177,283	173,814
24	NIAS UTARA	133,897	111.32	66,306	67,591
25	NIAS BARAT	84,917	179.25	40,609	44,308
26	SIBOLGA	86,519	2,094.38	43,394	43,125
27	TANJUNG BALAI	167,012	1,548.85	84,197	82,815
28	PEMATANG SIANTAR	247,411	4,445.04	120,597	126,814
29	TEBING TINGGI	156,815	5,058.55	77,509	79,306
30	MEDAN	2,210,624	8,341.98	1,091,937	1,118,687
31	BINJAI	264,687	4,471.82	132,197	132,490
32	PADANGSIDIMPUAN	209,796	1,829.72	102,184	107,612
33	GUNUNG SITOLI	135,995	484.35	66,515	69,480
	SUMATERA UTARA	13,937,797	190.98	6,954,552	6,983,245

Kedekatan terhadap Kota Medan dan berkedudukan di wilayah timur menjadikan suatu kabupaten memiliki penduduk perkotaan yang semakin besar, seperti kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai berpenduduk perkotaan yang dominan, diikuti Kabupaten Asahan, Batu Bara, Simalungun, Karo dan Langkat. Sebaliknya kabupaten-kabupaten yang jauh dari Medan memiliki penduduk yang sangat didominasi penduduk perdesaan, seperti Kabupaten Nias Selatan, Nias, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, kontribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut:

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir, terlihat semakin mengalami fluktuatif dengan trend penurunan, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai Sumatera Utara terjadi pada tahun 2011 dimana laju pertumbuhannya mencapai 6,66 persen, akan tetapi setelah tahun 2011 terjadi trend penurunan dan puncaknya di tahun

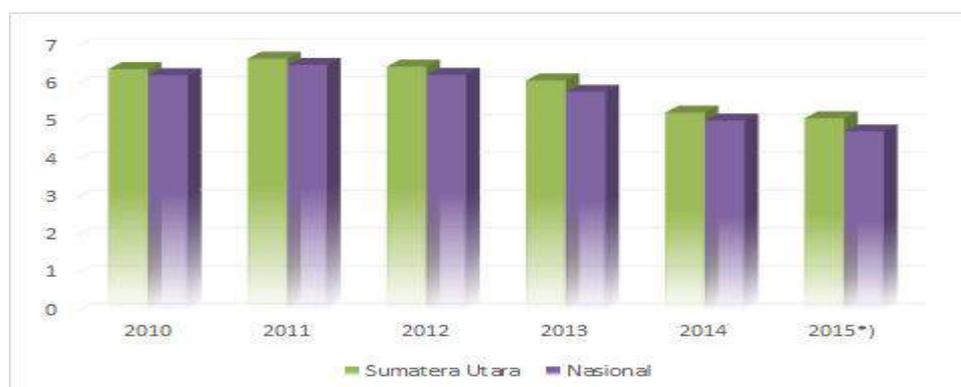
2015 dengan laju pertumbuhan dibawah angka psikologis 6 persen tepatnya di angka 5,10 persen, adapun penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 ini, sebagai dampak pelemahan perekonomian dunia dimana Nasional juga turun dan di bawah capaian Sumatera Utara pada angka 4,79 persen, selain pengaruh global juga sebagai dampak dari berbagai persoalan internal yang masih belum teratasi seperti kondisi infrastruktur baik darat, laut maupun udara dan juga proses perizinan dan ketersediaan ketenagalistrikan dan gas yang menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya minat investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2010-2015

wilayah	Pertumbuhan Ekonomi						rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)	
Sumatera Utara	6.38	6.66	6.45	6.08	5.23	5.1	5.98
Nasional	6.22	6.49	6.23	5.78	5.02	4.79	5.76

*) Kumlatif s/d Triwulan IV 2015

Sumber : BPS (Data Diolah)



Sumber : BPS Sumatera Utara (Data Diolah)

*) Kumulatif sd Trw IV

Grafik. 2.4
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2015 Dibandingkan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, secara rata-rata per lima tahunan juga lebih baik dimana Sumatera Utara dalam kurun waktu enam tahunan rata-rata tumbuh 5,98 persen dan nasional hanya 5,76 persen. Secara umum kondisi enam tahunan Sumatera Utara tahun 2010-2015 Sumatera Utara terjadi penurunan angka pertumbuhan dimana angka psikologis 6 persenan tidak dapat diraih kembali, kondisi ini hamper sama dengan capaian nasional hanya bertengger di angka 5 persenan.

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir berdasarkan ADHK Tahun 2010-2014 dari sisi produksi dengan tahun dasar dan metode perhitungan baru, terlihat kondisi pada **Tabel 2.8** sebagai berikut :

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK 2010
dari Sisi produksi Tahun 2011-2015 (persen)

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.88	5.31	4.71	4.37	5.60
2	B	Pertambangan dan Penggalian	10.72	11.95	26.03	5.33	3.58
3	C	Industri Pengolahan	3.22	5.64	4.84	2.97	5.01
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	13.87	-3.03	-3.88	3.71	2.13
5	E	Pengadaan Air	6.30	5.13	5.68	6.04	4.34
6	F	Konstruksi	8.46	6.67	7.66	6.79	5.56
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.13	7.91	5.57	6.94	4.24
8	H	Transportasi dan Pergudangan	10.24	8.25	7.41	5.71	6.26
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.52	6.75	7.81	6.48	6.18
10	J	Informasi dan Komunikasi	9.96	8.79	7.78	7.23	8.10
11	K	Jasa Keuangan	8.71	10.09	9.99	2.84	7.75
12	L	Real Estate	9.66	6.96	6.94	6.59	6.10
13	M,N	Jasa Perusahaan	10.68	6.04	6.68	6.76	5.01
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.93	2.53	3.34	6.92	7.04
15	P	Jasa Pendidikan	4.79	4.94	8.34	6.37	8.14
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.00	10.58	10.82	7.00	8.85
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	9.00	7.83	7.45	7.04	5.61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			6.66	6.45	6.08	5.23	5.10

*) Triuwlan IV

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumut Tahun 2015 (Triuwlan IV) adalah sebesar 5,10 persen, lebih rendah dari capaian tahun 2014 yang berhasil mencapai 5,23 persen. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan produktifitas gerak ekonomi Provinsi Sumatera Utara, yang dapat berimbas pada penurunan Pendapatan Daerah.

Jika dilihat pada kondisi perekonomian daerah Sumatera Utara tahun 2015 pertumbuhan kategorial tertinggi diperoleh dari lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,85 persen disusul oleh lapangan usaha administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan social wajib sebesar 8,14 persen, adapun pemberi laju pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 2,13 persen disusul oleh Lapangan Usaha Perambangan dan Penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 3,58 persen. Dari kondisi di atas dapat diperoleh gambaran bahwa beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan meningkat akan tetapi terdapat beberapa yang mengalami pertumbuhan sedikit menurun, ada indikasi awal bahwa penurunan ini dapat berimbas dari pasokan energy yang belum optimal terpenuhi di Sumatera Utara seperti pasokan listrik dan gas.

2.2.1.2 Struktur PDRB

Adapun terkait dengan kontribusi sektoral/lapangan usaha PDRB Sumatera Utara akan disajikan dalam bentuk PDRB atas Dasar Harga Berlaku dari periode Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 (triwulan IV) dapat dilihat pada **Tabel 2.9** sebagai berikut :

Tabel 2.9
Struktur PDRB Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.42	24.92	24.54	23.27	22.01
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.07	1.16	1.40	1.32	1.35
3	C	Industri Pengolahan	21.20	20.66	19.86	19.97	20.21
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
5	E	Pengadaan Air	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10
6	F	Konstruksi	11.81	12.33	12.83	13.31	13.61
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.05	17.00	16.68	17.17	17.43
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.40	4.57	4.90	4.97	4.99
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.09	2.18	2.26	2.35	2.41
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.15	2.15	2.04	1.97	1.95
11	K	Jasa Keuangan	2.97	3.23	3.35	3.27	3.35
12	L	Real Estate	4.05	3.92	4.28	4.37	4.50
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.84	0.87	0.90	0.93	0.96
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.45	3.55	3.50	3.61	3.71
15	P	Jasa Pendidikan	1.94	1.90	1.88	1.90	1.87
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.81	0.84	0.86	0.88	0.93
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.47	0.47	0.50	0.52	0.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)
*). Kumulatif sd Trw IV

Dari data **Tabel 2.9** di atas terlihat bahwa peringkat pertama penyumbang PDRB Sumatera Utara adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 22,01 persen (Triwulan IV 2015), dan hal ini jauh menurun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yang menyumbang sebesar 23,18 persen. Demikian pula dengan Industri pengolahan menempati urutan kedua dalam hal kontribusi PDRB Sumatera Utara dimana tahun 2015 pada triwulan IV kembali Industri pengolahan memberikan sumbangan di angka psikologis 20,21 persen, naik bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang hanya memberikan sumbangan sebesar 19,90 persen, peringkat ketiga juga mengalami penambahan angka kontribusi yakni lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi sebesar 17,43 persen, meningkat bila dibandingkan tahun 2014 yang hanya memberikan sumbangan sebesar 17,17 persen.

Sementara lapangan usaha lainnya yang mengalami penurunan sumbangan antara lain di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang turun dari 23,27 persen di tahun 2014 menjadi hanya 22,01 persen di tahun 2015. Demikian pula dengan informasi dan komunikasi dari 1,97 persen di tahun 2014 menjadi hanya 1,95 persen di tahun 2015, dapat dilihat pada **Tabel 2.10** berikut ini:

Tabel 2.10
Struktur PDRB Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.65	25.38	25.05	24.85	24.97
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.05	1.10	1.31	1.31	1.32
3	C	Industri Pengolahan	20.62	20.46	20.23	19.79	19.50
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.16	0.15	0.13	0.13	0.12
5	E	Pengadaan Air	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10
6	F	Konstruksi	11.87	11.90	12.07	12.25	12.30
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.16	17.39	17.31	17.59	17.47
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.40	4.48	4.53	4.55	4.57
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.13	2.14	2.17	2.20	2.24
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.32	2.38	2.41	2.46	2.51
11	K	Jasa Keuangan	2.98	3.08	3.18	3.10	3.17
12	L	Real Estate	3.98	4.00	4.03	4.08	4.11
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.85	0.85	0.85	0.86	0.87
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.46	3.33	3.25	3.30	3.32
15	P	Jasa Pendidikan	1.99	1.96	2.00	2.02	2.02
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.82	0.85	0.89	0.91	0.92
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Sama seperti struktur PDRB ADHB, maka untuk PDRB ADHK hampir sama struktur ADHB, yakni sumbangan terbesar diperoleh dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan sumbangan sebesar 24,97 persen pada tahun 2015, meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebesar 24,85 persen, disusul oleh lapangan usaha industry pengolahan yang mengalami penurunan dari 19,79 persen pada tahun 2014 menjadi 19,50 persen pada tahun 2015.

2.2.1.3 Nilai PDRB

Sebagai Provinsi terbesar di luar pulau Jawa, ditilik dari besaran jumlah penduduk dan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka secara umum besaran PDRB Sumatera Utara belumlah menunjukkan angka yang terbesar di Indonesia, masih merupakan peringkat 7, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Nilai PDRB Provinsi Se-Indonesia Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Berlaku

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)				
	Harga Berlaku				
	2010	2011	2012	2013	2014
ACEH	101,545.24	108,217.63	114,552.08	121,970.99	130,448.24
SUMATERA UTARA	331,085.24	377,037.10	417,120.44	470,221.98	523,771.57
SUMATERA BARAT	105,017.74	118,674.29	131,435.65	146,885.11	167,039.89
RIAU	388,578.23	485,649.34	558,492.72	607,498.59	679,692.18
JAMBI	90,618.41	103,522.91	115,070.40	132,019.49	153,857.14
SUMATERA SELATAN	194,012.97	226,666.93	253,265.12	281,996.53	308,406.84
BENGKULU	28,352.57	32,199.71	36,207.68	40,460.43	45,235.08
LAMPUNG	150,560.84	170,046.79	187,348.82	204,402.79	231,008.43
KEP. BANGKA BELITUNG	35,561.90	40,849.04	45,400.23	50,393.91	56,389.85
KEP. RIAU	111,223.67	126,914.20	144,840.79	163,112.15	182,915.53
DKI JAKARTA	1,075,183.48	1,224,218.48	1,369,432.64	1,547,037.78	1,761,407.06
JAWA BARAT	906,685.76	1,021,628.60	1,128,245.68	1,258,914.48	1,385,959.44
JAWA TENGAH	623,224.62	692,561.63	754,529.44	832,953.58	925,662.69
DI YOGYAKARTA	64,678.97	71,369.96	77,247.86	84,924.66	93,449.86
JAWA TIMUR	990,648.84	1,120,577.16	1,248,767.29	1,382,434.85	1,540,696.53
BANTEN	271,465.28	306,174.29	338,224.93	380,172.81	432,763.96
BALI	93,749.35	104,612.19	117,987.40	134,399.05	156,448.28
NUSA TENGGARA BARAT	70,122.73	68,176.69	69,022.23	73,605.03	82,246.57
NUSA TENGGARA TIMUR	43,846.61	48,815.24	54,893.15	61,325.47	68,602.63
KALIMANTAN BARAT	86,065.85	96,727.13	106,958.80	118,623.26	131,933.45
KALIMANTAN TENGAH	56,531.02	65,871.41	73,425.38	81,905.90	89,871.73
KALIMANTAN SELATAN	85,305.00	98,780.55	106,725.43	115,876.46	131,592.89
KALIMANTAN TIMUR	418,211.58	515,191.48	550,735.76	518,734.86	519,929.94
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	52,574.85	59,080.46
SULAWESI UTARA	51,721.33	57,343.60	63,875.31	71,079.03	80,622.83
SULAWESI TENGAH	51,752.07	60,716.29	69,637.92	79,820.38	90,255.67
SULAWESI SELATAN	171,740.74	198,289.08	228,285.47	258,682.96	300,124.22
SULAWESI TENGGARA	48,401.15	55,758.55	64,693.98	71,041.29	78,620.39
GORONTALO	15,475.74	17,406.53	19,669.72	22,128.08	25,201.10
SULAWESI BARAT	17,183.83	20,189.34	22,626.21	25,249.50	29,391.51
MALUKU	18,428.58	21,367.86	24,661.75	27,834.46	31,733.34
MALUKU UTARA	14,983.91	17,078.14	19,340.46	21,439.62	24,053.50
PAPUA BARAT	41,361.67	44,254.64	47,421.09	53,014.21	58,285.09
PAPUA	110,808.18	108,188.76	112,812.56	119,771.98	123,179.72
INDONESIA	6,864,133.13	7,825,075.53	8,672,954.41	9,612,506.50	10,699,877.63

Sumber : BPS RI

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa kedudukan Provinsi Sumatera Utara dalam konstelasi sumbangan PDB adalah pada peringkat 7, sementara untuk tingkat regional Pulau Sumatera menduduki peringkat dua, sementara untuk Provinsi di luar Pulau Jawa menduduki peringkat ketiga setelah Riau dan Kalimantan Timur.

Adapun untuk kondisi Provinsi Sumatera Utara Nilai Nominal PDRB Sumatera Utara dengan metode perhitungan SNA 2008 dan tahun dasar 2010 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar)

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
			Agregat	Agregat	Agregat	Agregat	Agregat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	95,856.86	103,933.11	115,190.25	121,443.44	125,808.1
2	B	Pertambangan dan Penggalian	4,048.82	4,848.02	6,581.44	6,899.06	7,732.9
3	C	Industri Pengolahan	79,947.92	86,171.93	93,241.47	104,224.00	115,560.0
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	643.05	641.93	597.74	598.06	575.3
5	E	Pengadaan Air	355.93	399.03	441.82	501.06	572.3
6	F	Konstruksi	44,527.25	51,426.26	60,232.62	69,460.77	77,802.0
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	64,308.76	70,891.92	78,324.82	89,597.00	99,646.1
8	H	Transportasi dan Pergudangan	16,580.08	19,056.20	22,990.25	25,923.44	28,501.2
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,874.97	9,100.94	10,598.78	12,283.32	13,761.2
10	J	Informasi dan Komunikasi	8,103.35	8,957.70	9,594.39	10,287.35	11,124.3
11	K	Jasa Keuangan	11,195.20	13,479.43	15,738.02	17,057.99	19,145.0
12	L	Real Estate	15,290.90	16,358.72	20,078.79	22,786.42	25,712.6
13	M,N	Jasa Perusahaan	3,181.13	3,646.33	4,224.04	4,836.42	5,472.3
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	12,990.36	14,786.94	16,427.96	18,832.08	21,234.5
15	P	Jasa Pendidikan	7,318.57	7,938.01	8,848.51	9,930.06	10,713.8
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,044.54	3,519.33	4,020.16	4,604.43	5,328.8
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,769.39	1,964.64	2,332.95	2,690.05	3,031.8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			377,037.08	417,120.44	469,464.01	521,954.95	571,722.01

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa pertumbuhan PDRB ADHB Sumatera Utara dari tahun 2011 ke tahun 2015 meningkat sebesar 51,64 persen, atau secara rata-rata sebesar 10,33 persen/tahun.

Tabel 2.13.
Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. miliar)

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
			Agregat	Agregat	Agregat	Agregat	Agregat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	90,592.55	95,405.42	99,894.57	104,283.11	110,123.24
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3,693.99	4,135.26	5,211.65	5,479.37	5,829.94
3	C	Industri Pengolahan	72,815.22	76,922.41	80,648.62	83,042.09	85,968.40
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	570.71	553.40	531.40	548.43	541.31
5	E	Pengadaan Air	336.49	353.75	373.84	396.43	421.96
6	F	Konstruksi	41,921.90	44,718.29	48,144.38	51,411.36	54,248.91
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	60,589.06	65,384.61	69,025.21	73,817.64	77,037.55
8	H	Transportasi dan Pergudangan	15,545.80	16,827.86	18,075.25	19,107.06	20,155.59
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,527.50	8,035.64	8,663.61	9,225.42	9,866.78
10	J	Informasi dan Komunikasi	8,209.20	8,930.58	9,625.11	10,321.29	11,055.36
11	K	Jasa Keuangan	10,519.43	11,581.05	12,691.89	13,024.10	13,957.95
12	L	Real Estate	14,052.16	15,030.05	16,072.86	17,132.22	18,119.23
13	M,N	Jasa Perusahaan	3,001.22	3,182.59	3,395.10	3,624.70	3,836.94
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	12,213.77	12,522.71	12,940.56	13,836.00	14,642.06
15	P	Jasa Pendidikan	7,011.17	7,357.22	7,970.45	8,478.26	8,904.74
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,900.54	3,207.55	3,554.52	3,803.27	4,066.72
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,646.89	1,775.77	1,908.14	2,042.55	2,179.19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			353,147.60	375,924.16	398,727.16	419,573.30	440,955.9

Dari tabel di atas diperoleh hasil analisa bahwa pertumbuhan PDRB ADHK dengan Tahun Dasar 2010 dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 24,96 atau rata-rata per tahun sebesar 4,97 persen.

2.2.1.4 Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, akan tetapi pada tahun 2015 kondisi inflasi Sumatera Utara lebih baik dari capaian nasional, dimana inflasi di Sumatera Utara mencapai 3,24%.

Secara Makro Rata-Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2011-2015 sebesar 5,82% berada diatas rata-rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 5,65% (nasional lbih baik). Ada pun perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan dalam **Tabel** sebagai berikut :

Tabel 2.14
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Utara

INFLASI	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
INDONESIA	3,79	4,36	8,38	8,36	3,35
SUMATERA UTARA	3,67	3,86	10,18	8,17	3,24

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

2.2.1.5 PDRB per Kapita

Tabel 2.15
PDRB Perkapita Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB (milyar Rp)	377,037.08	417,120.44	469,464.01	521,954.95	571,722.01
Jumlah Penduduk (Jiwa)	13,103,596.00	13,408,202	13,590,250	13,766,851	13,937,797.00
PDRB perkapita (Rp.juta/jiwa)	28.77	31.11	34.54	37.91	41.02
Konversi PDRB/Kapita (US\$)	2,877.00	3,315.00	3,301.00	3,195.00	3,066.00

Sumber : BPS (Data Diolah): Bank Indonesia (Data Diolah)

Kondisi pendapatan per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, hal ini tentunya merupakan pertanda terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dapat dilihat dari tahun 2011 PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.28,77 Juta dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 41,02 Juta. Tetapi jika dikonversikan ke dalam Dollar Amerika mengalami penurunan dari US \$ 3.315 di tahun 2012 menjadi US \$ 3.066 pada tahun 2015. Hal ini terjadi dikarenakan melemahnya harga tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.

2.2.1.6 Disparitas Pendapatan Masyarakat

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

1) *Tipologi Klassen*

Berdasarkan hasil pemetaan Tipologi Klassen yang mengklasifikasikan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita ke dalam 4 kuadran, diketahui bahwa selama periode tahun 2010-2014 pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan adanya perpindahan antar kuadran. Posisi 33 Kabupaten/Kota selama periode tahun 2009-2014 dapat dilihat dalam **Tabel** berikut ini :

Tabel. 2.16
Tipologi Klassen 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sibolga	4	4	4	4	2
2	Tapanuli Tengah	4	4	1	1	4
3	Tapanuli Utara	4	4	4	1	4
4	Toba Samosir	4	4	4	4	4
5	Samosir	4	4	4	1	1
6	Humbang Hasundutan	4	4	4	1	1
7	Nias	1	1	1	1	1
8	Nias Selatan	4	4	4	4	4
9	Gunung Sitoli	1	4	1	1	1
10	Nias Utara	1	1	4	1	1
11	Nias Barat	4	1	4	4	4
12	Padangsidempuan	4	4	1	1	4
13	Mandaling Natal	4	4	1	1	1
14	Tapanuli Selatan	4	4	4	4	4
15	Padang Lawas	4	4	1	1	1
16	Padang Lawas utara	1	1	1	1	1
17	Labuhan Batu	4	4	4	4	3
18	Asahan	4	4	4	4	1
19	Simalungun	4	4	4	4	1
20	Dairi	4	4	4	4	4
21	Karo	4	4	1	4	4
22	Deli Serdang	3	3	3	2	1
23	Langkat	4	4	4	4	4
24	Pakpak Barat	1	4	4	4	1
25	Serdang Bedagai	4	4	4	4	4
26	Batu Bara	3	3	3	3	3
27	Labuhan Batu Utara	3	3	2	2	2
28	Labuhan Batu Selatan	3	3	2	2	2
29	Tanjung Balai	4	4	4	4	1
30	Pematang Siantar	4	4	4	4	2
31	Tebing Tinggi	4	1	1	1	1
32	Medan	2	2	2	3	2
33	Binjai	4	4	1	1	1

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Posisi suatu Kabupaten/Kota dalam Tipologi Klassen ini, selain bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota itu sendiri juga bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota lainnya. Suatu kabupaten/kota bisa saja memiliki pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum tentu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita keseluruhan Kabupaten/Kota di wilayah yang menjadi acuan.

2) Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara berdasarkan Indeks Gini (Gini Ratio) selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel** dibawah ini :

Tabel 2.17
Tabel Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

TAHUN	INDEKS
2010	0,257
2011	0,253
2012	0,315
2013	0,224
2014	0,348

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas diketahui bahwa kesenjangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014 angka Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara 0,348, ini berarti bahwa kesenjangan pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara semakin melebar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

3) Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010-2014 yang dihitung menggunakan Williamson Index menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014, Williamson Index untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,148 dan jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,058. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup meningkat mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

Tabel 2.18
Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014 menurut Indeks Ketimpangan Williamson

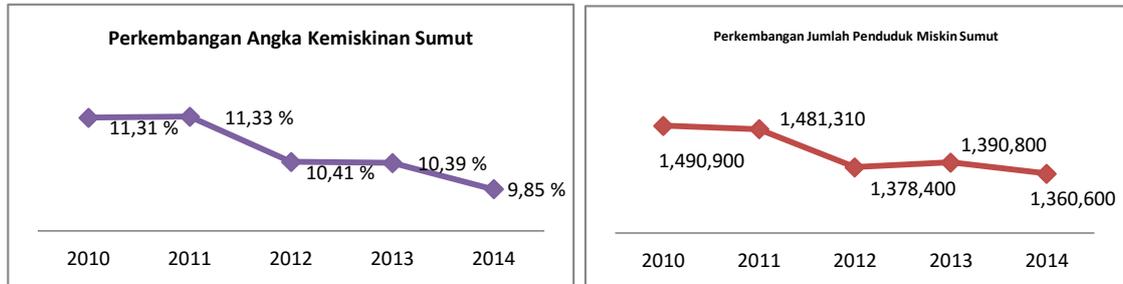
No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Sibolga	0.011	0.014	0.007	0.013	0.098	0.029
2	Tapanuli Tengah	0.101	0.102	0.097	0.104	0.221	0.125
3	Tapanuli Utara	0.052	0.056	0.049	0.059	0.200	0.083
4	Toba Samosir	0.008	0.009	0.006	0.006	0.075	0.021
5	Samosir	0.033	0.035	0.03	0.037	0.104	0.048
6	Humbang Hasundutan	0.037	0.038	0.028	0.037	0.130	0.054
7	Nias	0.059	0.06	0.055	0.059	0.145	0.076
8	Nias Selatan	0.095	0.097	0.093	0.1	0.260	0.129
9	Gunung Sitoli	0.027	0.023	0.018	0.025	0.100	0.039
10	Nias Utara	0.057	0.057	0.053	0.058	0.148	0.075
11	Nias Barat	0.052	0.052	0.05	0.052	0.137	0.069
12	Padangsidempuan	0.059	0.061	0.057	0.065	0.168	0.082
13	Mandaling Natal	0.1	0.102	0.091	0.098	0.225	0.123
14	Tapanuli Selatan	0.062	0.063	0.054	0.063	0.039	0.056
15	Padang Lawas	0.088	0.087	0.084	0.091	0.092	0.088
16	Padang Lawas utara	0.083	0.084	0.08	0.086	0.077	0.082
17	Labuhan Batu	0.024	0.027	0.012	0.032	0.142	0.047
18	Asahan	0.036	0.036	0.012	0.034	0.055	0.035
19	Simalungun	0.101	0.104	0.087	0.103	0.145	0.108
20	Dairi	0.049	0.051	0.04	0.05	0.161	0.070
21	Karo	0.017	0.017	0.002	0.024	0.025	0.017
22	Deli Serdang	0.018	0.015	0.054	0.014	0.086	0.037
23	Langkat	0.044	0.043	0.015	0.041	0.205	0.070
24	Pakpak Barat	0.034	0.035	0.032	0.035	0.088	0.045
25	Serdang Bedagai	0.049	0.052	0.032	0.046	0.117	0.059
26	Batu Bara	0.184	0.185	0.221	0.157	0.265	0.202
27	Labuhan Batu Utara	0.004	0.002	0.02	0.004	0.097	0.025
28	Labuhan Batu Selatan	0.01	0.008	0.025	0.004	0.207	0.051
29	Tanjung Balai	0.004	0.009	0.002	0.018	0.041	0.015
30	Pematang Siantar	0.022	0.027	0.019	0.036	0.011	0.023
31	Tebing Tinggi	0.027	0.027	0.017	0.025	0.099	0.039
32	Medan	0.352	0.339	0.434	0.341	0.846	0.462
33	Binjai	0.007	0.006	0.014	0.004	0.090	0.024
	Sumatera Utara	0.051	0.051	0.066	0.058	0.148	0.075

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Bila dilihat dari disparitas pendapatan dengan metode indeks williamson pada tahun 2014 terlihat bahwa Kota Medan merupakan Kab/kota yang memiliki disparitas pendapatan paling tinggi yakni 0,846 disusul oleh Kabupaten Batu Bara sebesar 0,265. Adapun Kab/Kota yang memiliki disparitas pendapatan rendah yakni Kota Pematang Siantar sebesar 0,011 dan disusul oleh Kabupaten Karo sebesar 0,025.

2.2.1.7 Perkembangan kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mengalami trend positif. Pada tahun 2010 angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mencapai 11,31 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.490.900 jiwa, 10,41 persen pada tahun 2012 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 mencapai 9,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.360.600 jiwa.



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.5
Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara 2010 - 2015

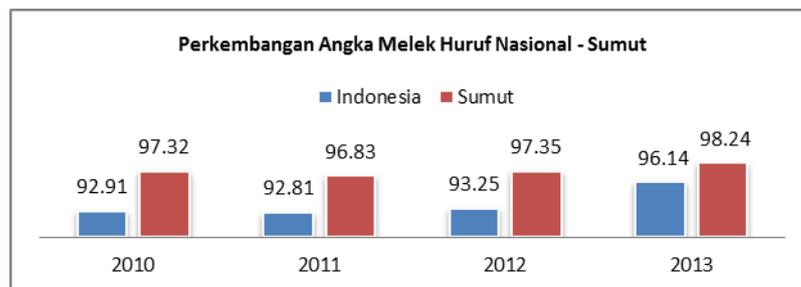
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

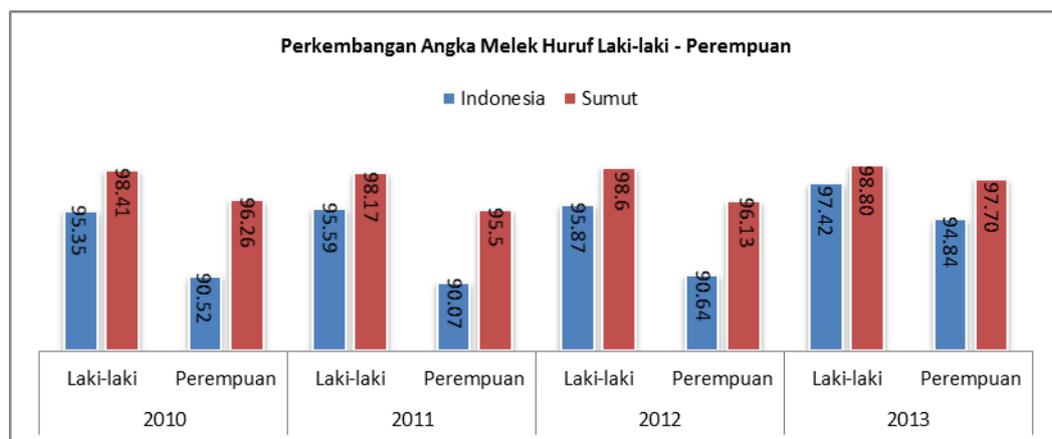
2.2.2.1 Bidang pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Perkembangan antar waktu Angka Melek Huruf (AMH) Sumatera Utara dibandingkan capaian Nasional selama periode 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami tren positif (efektif). Capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 yang mencapai 97,32 persen, berada di atas capaian Nasional pada tahun yang sama mencapai 92,91 persen. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2013, dimana capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara mencapai 98,24 persen tetap berada di atas capaian Nasional yang mencapai 96,14 persen.

Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 - 2013 bila dilihat dari komposisi laki-laki dan perempuan, berada di atas capaian nasional dan didominasi oleh laki-laki dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 98,80 persen sedangkan perempuan mencapai 97,70 persen, sebagaimana **Grafik 2.6** berikut ini :





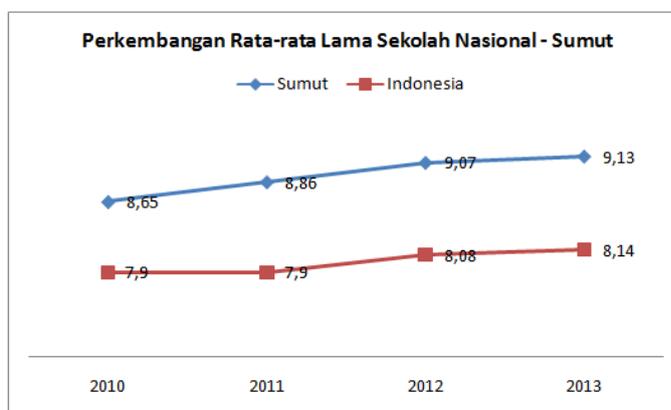
Sumber :

<http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSurvey/Susenas/Pendidikan/AMH/Nasional.aspx>

Grafik 2.6
Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Sumatera Utara

2. Angka rata-rata lama sekolah

Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Provinsi Sumatera Utara, mengalami trend positif dengan peningkatan sejak tahun 2008 (8,5 tahun), 2009 (8,6 tahun), 2010 (8,8 tahun), 2011 (8,8 tahun) hingga tahun 2012 telah mencapai 9,1 tahun.



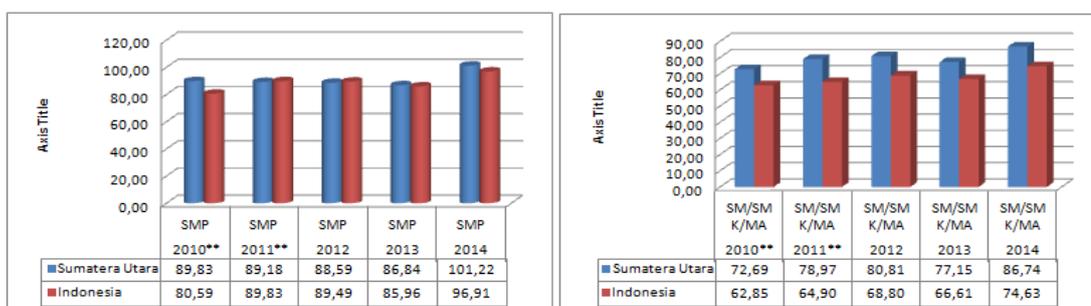
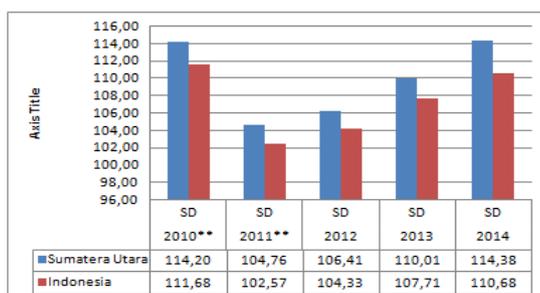
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.7.
Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah

3. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara umum mengalami trend positif hal ini dikarenakan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2010 – 2014 terus berada di atas capaian Nasional.

Pada tahun 2010, capaian APK Sekolah Dasar (SD) Provinsi Sumatera Utara sebesar 114,20 persen, berada di atas capaian Nasional pada tahun yang sama sebesar 111,68 persen. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sumut 89,63 persen sedangkan Nasional 80,59 persen, APK SMA Sumut 72,68 persen sedangkan Nasional 62,85 persen. Trend positif ini terus membaik hingga tahun 2014 APK SD Sumut (114,38 persen), SMP (101,22 persen), SMA (86,74 persen), sedangkan capaian Nasional untuk APK SD (110,68 persen), SMP (96,91 persen) dan SMA (74,63 persen), sebagaimana **Grafik 2.8.** berikut ini :



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

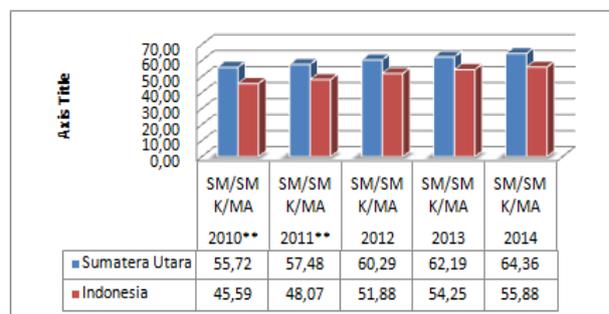
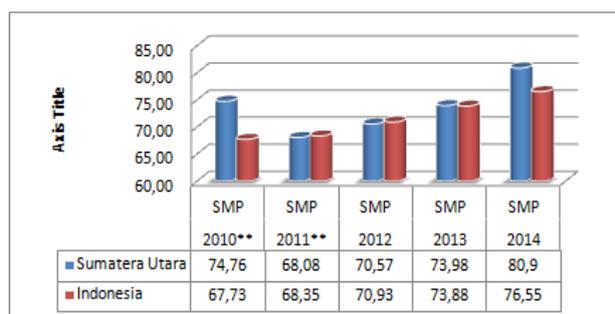
Grafik. 2.8
Grafik Angka Partisipasi Kasar Provinsi Sumatera Utara

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara mengalami trend positif dengan peningkatan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMTA). Pada tahun 2010, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 95,33 persen, SMP (74,76 persen), SMTA (55,72 persen). Pada tahun 2011, APM SD (91,61 persen), SMP (67,05 persen), SMTA (55,34 persen). Hingga pada tahun 2012 APM untuk tingkat SD (93,26 persen), SMP (70,51 persen) dan SMTA (60,02 persen). Secara umum persentase Angka Partisipasi Murni (APM) di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan, namun masih terlihat adanya penurunan APM untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), hal ini menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat Sumatera Utara untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping masih terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka pencapaian sasaran pendidikan di Sumatera Utara yakni Wajib Belajar 12 tahun dan untuk mewujudkan industrialisasi di Provinsi Sumatera Utara

diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian yang memadai atau minimal tamat Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) khususnya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

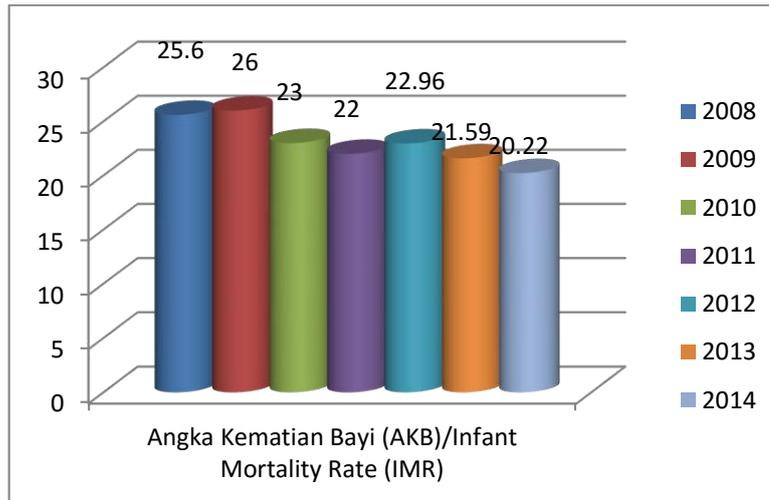
Grafik 2.9
Grafik Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara

2.2.2.2 Bidang Kesehatan

Capain Indikator utama bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara, Indikator Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara per 1.000 kelahiran hidup cenderung mengalami perbaikan dari tahun ketahun. Sejak tahun 2008 dari 25,6 kematian bayi per 1.000 KH telah dapat diturunkan menjadi 20,22 kematian bayi per 1.000 KH, seperti terlihat pada **Grafik 2.10** berikut :



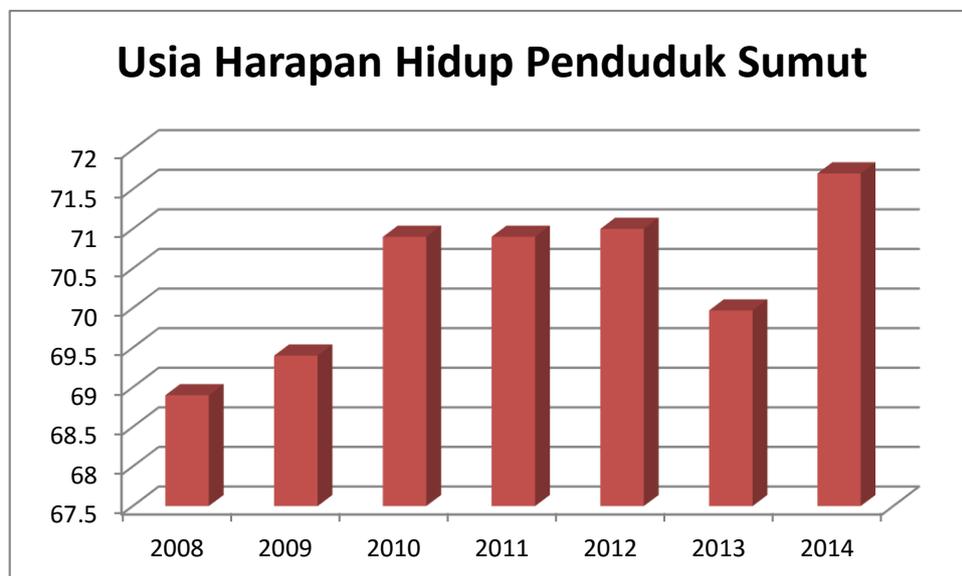
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Grafik 2.10

Grafik Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013
Jumlah Angka Kematian Bayi

2. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 68,9 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,65 tahun pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah mencapai 69,81 tahun dan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 71,7 Tahun sebagaimana tertera pada **Grafik 2.10** berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

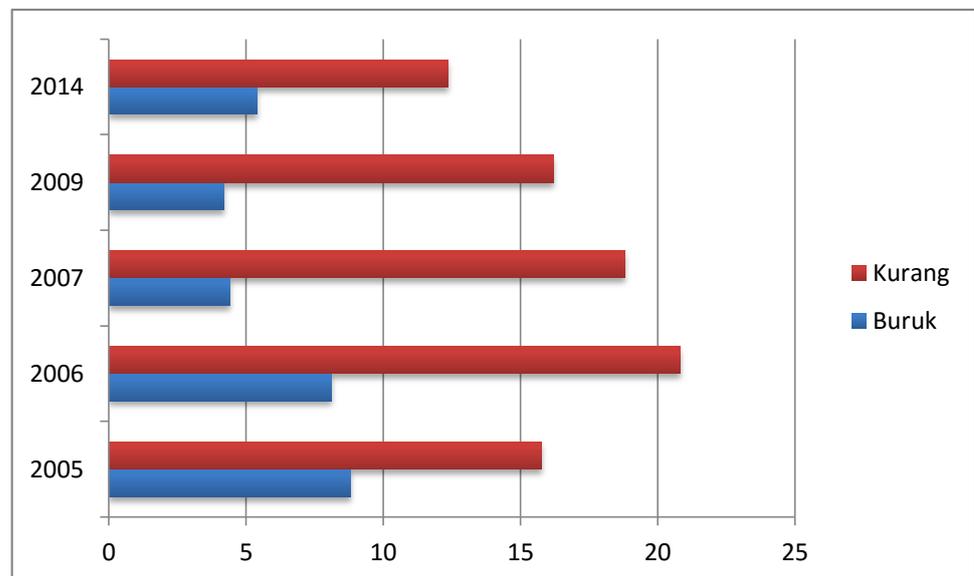
Grafik. 2.11

Grafik Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara 2008-2012

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Status Gizi Balita merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa karena status gizi anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomis.

Data Kementerian Kesehatan RI (Riskesmas, 2010), Provinsi Sumatera Utara masih tergolong provinsi dengan angka kekurangan gizi balitanya diatas angka rata-rata nasional yakni 21,4 sementara angka rata-rata nasional 17,9, meskipun secara umum persentase gizi kurang dan buruk di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan. Meskipun demikian status gizi balita berdasarkan Berat Badan per umur menunjukkan bahwa Prevalensi buruk-kurang (underweight) provinsi Sumatera Utara, jika dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang secara nasional maka pada tahun 2013 angka prevalensi buruk-kurang di provinsi Sumatera Utara (22,4 persen yang terdiri dari 8,3 persen gizi buruk dan 14,1 gizi kurang) lebih tinggi 2,8 persen dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang nasional (19,6 persen) (Riskesmas 2013)



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.12

Grafik Persentase Gizi Kurang dan Buruk Provinsi Sumatera Utara 2007-2013

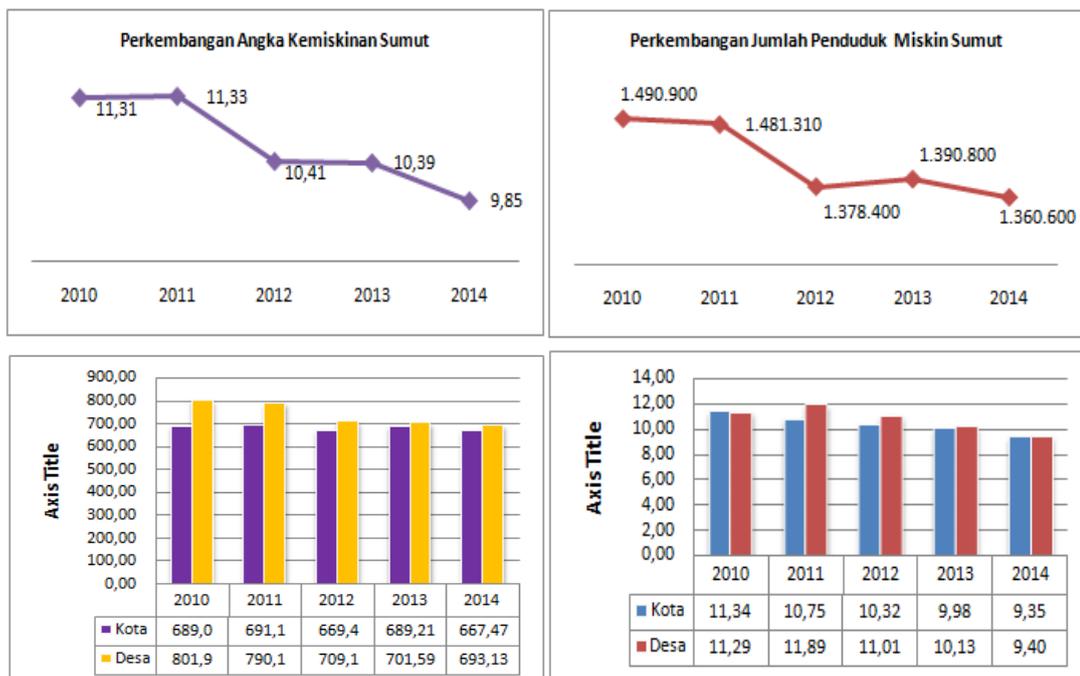
2.2.2.3 Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

1. Persentase Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sejak tahun 2010 - 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Pada tahun 2010, angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai 11,31 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 1.490.900 orang. Kondisi ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014, angka kemiskinan Sumatera Utara telah mencapai 9,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.360.600 orang.

Untuk sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara, cenderung terfokus di

wilayah perkotaan. Pada tahun 2010 sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara wilayah perkotaan mencapai persentase sebesar 11,34 persen lebih rendah dari wilayah perdesaan sebesar 11,29 persen. Kondisi ini terus mengalami penurunan dengan tetap terfokus pada wilayah perkotaan. Namun pada tahun 2014, terjadi perpindahan fokus kemiskinan di Sumatera Utara, dimana wilayah perdesaan menjadi fokus penduduk miskin dengan capaian sebesar 9,40 persen di atas capaian fokus penduduk miskin wilayah perkotaan sebesar 9,35 persen. Hal ini merupakan bagian percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dimulai dari daerah-daerah kantong kemiskinan di desa-desa.



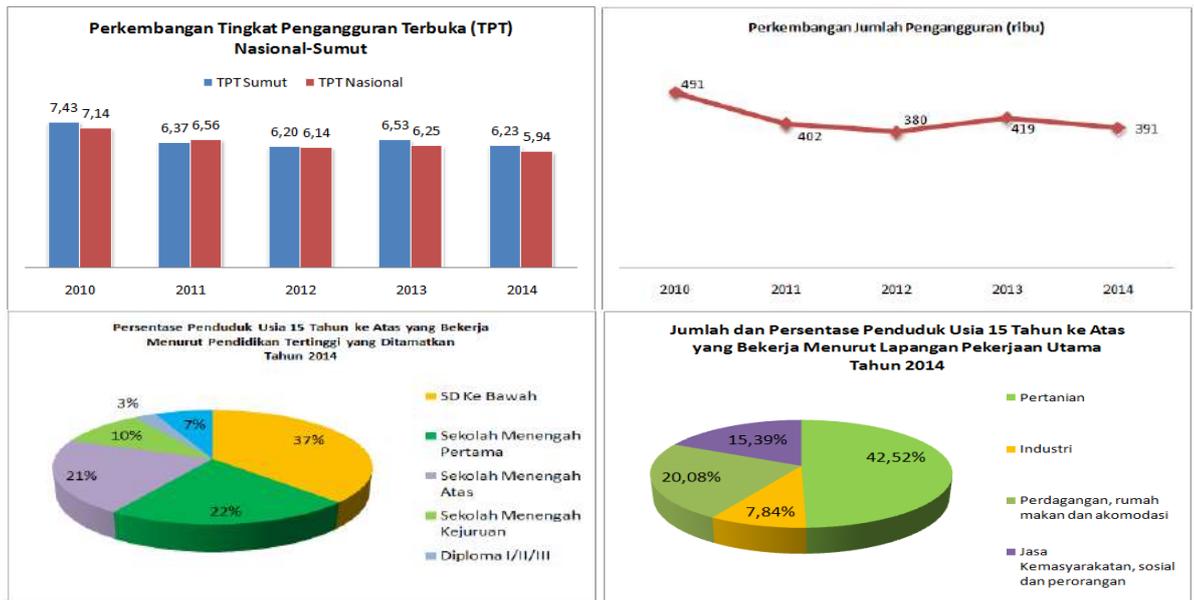
Sumber: Publikasi BPS

Grafik. 2.13
Grafik Perkembangan Angka dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

2. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

sungguh tidak mempunyai pekerjaan) secara umum capaian Sumatera Utara berada di atas Nasional. Sejak tahun 2010 - 2014 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara terus berada di atas capaian Nasional. Hingga tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara telah mencapai 6,23 persen, berada di atas nasional pada tahun yang sama sebesar 5,94 persen dengan jumlah pengangguran mencapai 391 ribu orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2013) yang mencapai 419 pengangguran.

Dominasi pekerjaan bila dilihat dari besaran jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) mencapai 37 persen, Sekolah Menengah Pertama 22 persen, Sekolah Menengah Atas 21 persen, Sekolah Menengah Kejuruan 10 persen dan Perguruan Tinggi 10 persen dengan fokus pekerjaan pada sektor pertanian yang mencapai 42,52 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi (20,08 persen), sektor Jasa 15 persen dan Industri 7 persen.



Sumber: Publikasi BPS

Grafik 2.14
Grafik Perkembangan Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2014

3. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Kondisi keamanan di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari angka kriminalitas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 19
Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Kasus	2012	
	Kejadian	Kejadian
Pembunuhan	152	152
Penganiayaan Berat	3.892	3.892
Penculikan	18	18
Pencurian dengan Kekerasan	1.145	1.145
Pencurian dengan Pemberatan	7.198	7.198
Pencurian Ranmor	7.232	7.232
Pencurian Kawat Telepon	5	5
Pemerksaan	217	217
Pembakaran	142	142
Senpi/Handak	29	29
Pemerasan	619	619
Penyelundupan	15	15
Jumlah	20.659	20.659

Sumber : Polda Sumut, 2014

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian kinerja pada aspek layanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri dari :

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Hasil capaian kinerja layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari :

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah 36 relative besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relative mahal dan dikelola secara mandiri. Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkuat pada peningkatan kualitas.

Persentase Angka Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun 2010 - 2014. Dimana pada tahun 2010 Angka Buta Huruf Sumatera Utara mencapai 2,68 persen, 2011 sebesar 3,17 persen, tahun 2012 mencapai 2,65 persen dan tahun 2013 mencapai 2,19. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan Sumatera Utara dalam mengentaskan buta aksara di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.20
Capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Buta Huruf					
Usia >15 tahun	2,68	3,17	2,65	2,19	-
Usia 15-44 tahun	0,51	1,66	1,11	0,90	-
Usia >45 tahun	7,65	6,85	6,41	5,09	-
Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
Usia <7-12 Tahun)	98,9	98,33	98,59	99,03	-
Usia <13-15 Tahun)	92,26	89,1	90,85	92,11	-
Usia <16-18 Tahun)	66,94	67,54	69,73	71,24	-
Usia <19-24 Tahun)	15,65	16,42	17,36	21,81	-
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
SD/MI/Paket A	114,20	104,56	106,26	110,1	114,38
SMP/Mts/Paket B	89,83	89,02	88,55	86,84	101,22
SMA/SMK/MA/Paket C	72,69	79,69	80,58	77,15	86,74
Angka Partisipasi Murni (APM)					
SD/MI/Paket A	95,33	91,46	93,26	95,64	93,59
SMP/Mts/Paket B	74,76	67,96	70,51	73,98	80,9
SMA/SMK/MA/Paket C	55,72	57,83	60,02	62,19	64,36

Sumber : BPS Indonesia

1. Angka partisipasi sekolah (APS)

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 - 2013 dari jenjang sekolah SD - DIII/S1 secara umum mengalami trend positif. Dimana pada tahun 2010 Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 98,90 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2013 (99,03 persen). APS tingkat SMP pada tahun 2010 (92,26 persen) mengalami penurunan pada tahun 2013 (92,11 persen). APS jenjang SMA pada tahun 2010 (66,94 persen) mengalami kenaikan pada tahun 2013 (71,24 persen) dan APS DIII/S1 pada tahun 2010 (15,65 persen) mengalami kenaikan pada tahun 2013 (21,81 persen). Namun bila melihat partisipasi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga ke Perguruan Tinggi (DIII/S1) masih terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya keinginan masyarakat di Sumatera Utara untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.



Grafik. 2.15

Grafik Persentasi Partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Utara

2. Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan dasar

Tabel 2.21

Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2010-2014

NO	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
A.	Jumlah Gedung Sekolah					
1	SD	8,050	10,292	8,172	9432	9483
2	SMP	1,873	2,230	2,040	2357	2388
3	SMA	861	950	869	868	1002
4	SMK	681	834	678	678	919
B.	Jumlah Ruang Kelas					
1	SD	48.005	68,268	61,255	84481	61200
2	SMP	26.997	17,010	17,807	19202	19495
3	SMA	7.745	9,445	9,188	8325	9426
4	SMK	5.777	6,639	6,467	7223	8085
C.	Ratio Kelas/Sekolah					
1	SD	5.96	6.63	7.49	8.95	6,45
2	SMP	14.40	7.62	8.72	8.15	8,16
3	SMA	8.99	9.94	10.57	9.6	9,4
4	SMK	8.48	7.96	9.53	8.72	8,79

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014 (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah gedung sekolah, ditingkat SMP, SMA dan SMK selama tahun 2010-2014 Pada jenjang sekolah dasar pada tahun 2008 terjadi penggabungan beberapa sekolah dasar karena berkurangnya jumlah murid pada beberapa sekolah.

3. Jumlah Guru dan murid dan Rasio Guru/Murid pada berbagai Jenjang Pendidikan Dasar

Tabel 2.22
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	94.441	102.510	99.927	122.128	112.267
1.2.	Jumlah Murid	1.959.265	1.287.472	1.656.909	1.518.184	1.791.663
1.3.	Rasio	22%	24%	17%	12%	15,96%
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	59.002	45.951	57.563		51.799
2.2.	Jumlah Murid	428.575	569.581	552.761		650.748
2.3.	Rasio	12	12	10		12,56%
3	SMA					
3.1.	Jumlah Guru	18.335	22.610	22.183	17.504	27.034
3.2.	Jumlah Murid	398.100	222.200	272.042	233.916	323.579
3.3.	Rasio	13	12	12	13%	11%
4	SMK					
4.1.	Jumlah Guru	11.726	16.019	18.374	14.178	24.146
4.2.	Jumlah Murid	300.092	220.074	234.983	228.809	267.406
4.3.	Rasio	20	30	13	16	11%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2014

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi perkembangan yang fluktuatif pada Ratio Siswa/Guru. Angka ratio sudah cukup ideal antara 11-22 orang siswa untuk setiap orang guru. Untuk Ratio Guru/Murid pada jenjang SLTP dan SMA cenderung semakin membaik. Hanya pada jenjang SMK yang mengalami penurunan. Diharapkan dengan ratio jumlah guru/murid yang semakin ideal akan lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

4. Rasio Pendidikan

Dilihat dari perbandingan jumlah siswa terhadap sekolah, perbandingan siswa terhadap jumlah kelas, perbandingan siswa terhadap jumlah guru, perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.23
Ratio Jenjang Pendidikan/Rasio Pendidikan
Tahun 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD					
	Siswa / Sekolah	2.15	1.99	202	161	188,93
	Siswa / Kelas	30	32	27	18	29,27
	Siswa / Guru	18	17	17	12	15,96
	Kelas / Sekolah	7.15	6.19	7.49	9	6,45
	Kelas / Guru	0.61	0.53	0.61	0.69	0,54
	Guru / Sekolah	12	12	12	13	11,84
2	SMP					
	Siswa / Sekolah	3.09	2.48	279	235	272,5
	Siswa / Kelas	36	29	32	29	33,38
	Siswa / Guru	15	13	12	10	12,56
	Kelas / Sekolah	8.59	8.66	8.72	8.15	8,16
	Kelas / Guru	0.41	0.44	0.39	0.33	0,37
	Guru / Sekolah	21	19	22	24	21,69
3	SMA					
	Siswa / Sekolah	0.43	3.08	313	269	322,93
	Siswa / Kelas	35	34	30	35	34,32
	Siswa / Guru	12	11	12	13	11,97
	Kelas / Sekolah	9.69	9.12	10.57	1	9,40
	Kelas / Guru	0.34	0.33	0.41	0.38	0,34
	Guru / Sekolah	28	27	26	20	26,98
4	SMK					
	Siswa / Sekolah	0.57	3.41	346	276	290,97
	Siswa / Kelas	39	35	36	28	33,07
	Siswa / Guru	12	13	13	16	11
	Kelas / Sekolah	9.18	9.78	9.53	9.6	8,79
	Kelas / Guru	0.3	0.37	0.35	0.5	0,33
	Guru / Sekolah	30	26	27	17	26,27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

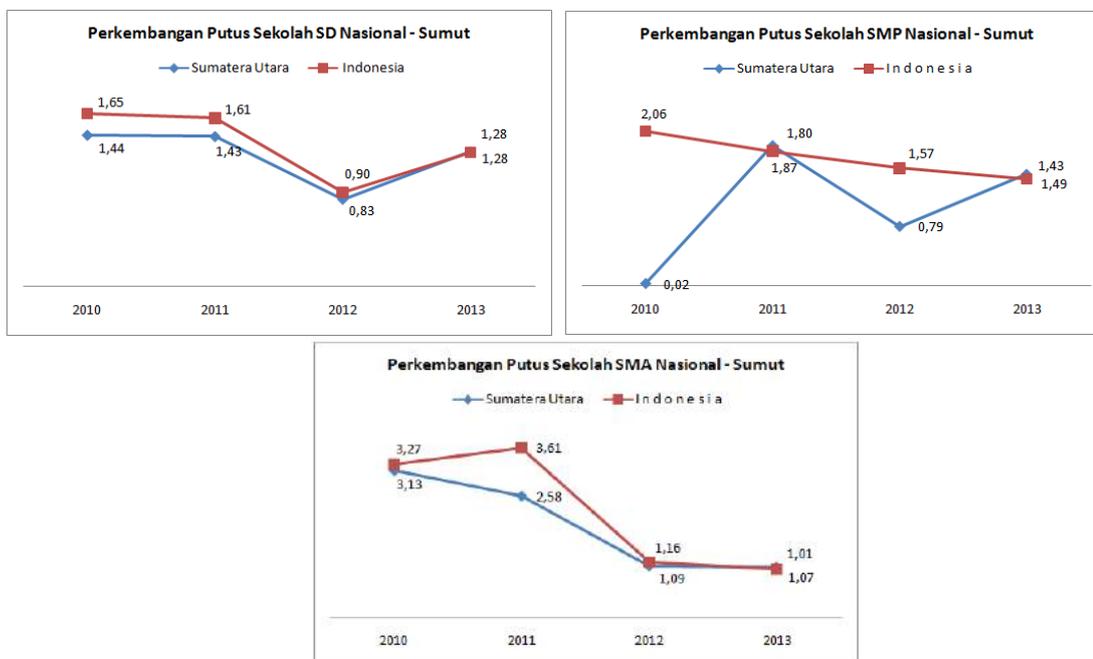
Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru sudah cukup ideal antara 11-20 orang siswa untuk setiap orang guru, namun belum terjadi pemerataan pada semua Kabupaten/Kota. Dengan tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara.

5. Fasilitas pendidikan

Dari data jumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2011, tercatat jumlah ruang kelas dalam kondisi baik berjumlah 54.986 buah (63.50%), kondisi rusak ringan berjumlah 16.484 (19.04%) dan kondisi rusak berat berjumlah 15.121 (17.46%). Hal ini menuntut adanya penanganan segera agar target indikator pendidikan dapat tercapai.

6. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara masih memperlihatkan trend negatif, karena capaian Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 – 2013 terus berada di atas capaian Nasional, sebagaimana **Grafik 2.16** berikut ini:



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Grafik 2.16
Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2010-2013

7. Angka Kelulusan

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	SD	205.289	506.881	237.821	286.681
2	SMP	171.304	172.973	148.873	282.212
3	SMA	91.717	98.199	75.413	117.254
4	SMK	60.513	57.987	40.172	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah kelulusan siswa pada berbagai tingkatan, selama tahun 2010-2014, hal ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi peserta didik dalam menjalani pendidikannya disekolah. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.

Tabel 2.25
Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi

No	Jenjang Pendidikan Guru Sekolah	Tahun									
		2010		2011		2012		2013		2014	
		S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
1	SD	204.06	65	22.446	71	40.605	192	55.764	447	71.369	703
2	SMP	21.825	148	24.007	162	36.170	358	34.141	912	32.824	1.001
3	SMA	15.290	364	16.819	400	22.183	736	17.881	1.396		
4	SMK	10.013	90	11.014	99	15.531	739	11.063	399		
	Jumlah	251.134	667	74.286	732	114.489	2.025	118.849	3.154		

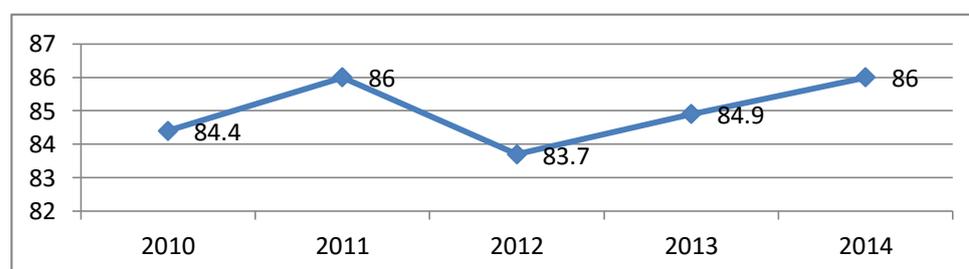
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Pemerintah provinsi Sumatera Utara secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari S0 ke S1 dan dari S1 ke jenjang S2. Dari data diatas terlihat peningkatan jumlah yang cukup signifikan sehingga dalam lima tahun terakhir (2009-2013) terjadi peningkatan kualifikasi guru berpendidikan S2.

2.3.1.2 Kesehatan

Pencapaian kinerja Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2014 dapat digambarkan dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 sebagai berikut:

1. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan



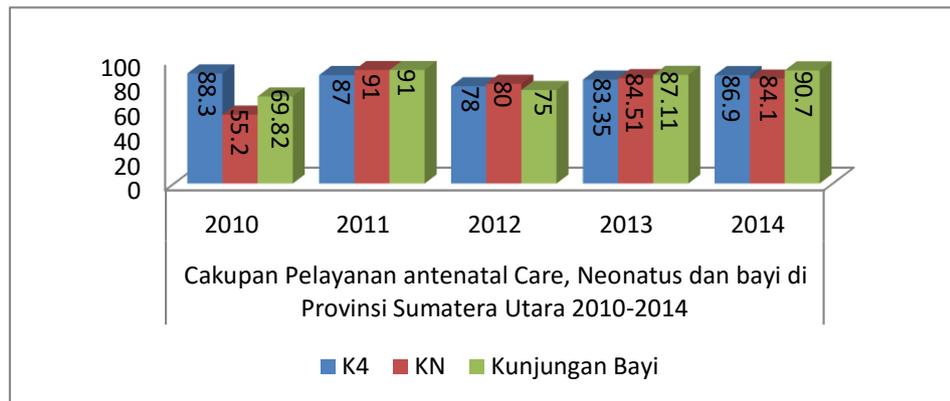
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2010-2014

Grafik 2.17
Grafik Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan Tahun 2010-2014

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2010, cakupan indikator ini mencapai 84,4 persen dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 84.9% pada tahun 2013 menjadi 86% pada tahun 2014. Diharapkan pada Tahun 2015 dapat dicapai menjadi 87%.

2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi

Kunjungan antenatal care (K4) di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 78% pada tahun 2012 menjadi 84.10% pada tahun 2014, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan (90%). Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) dan kunjungan bayi masing-masing sebesar 86.90% dan 90%, mencapai target yang telah ditetapkan.



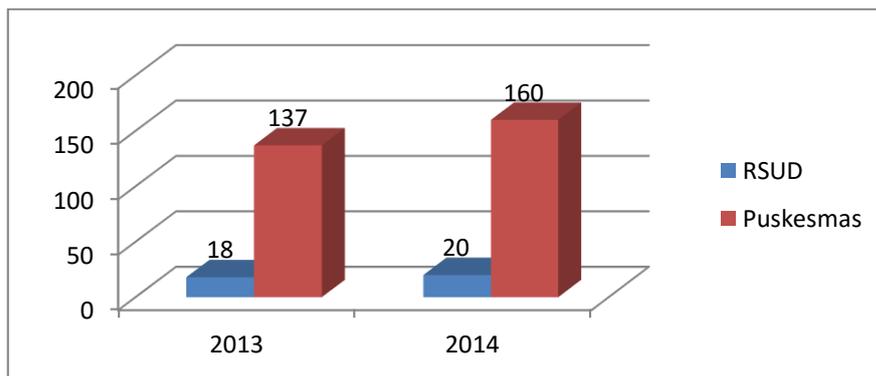
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2010-2014

Grafik. 2.18
Grafik Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus(KN Lengkap)
Dan Kunjungan Bayi Tahun 2010 - 2014

3. Sumber daya kesehatan pada Pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan didukung dengan ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014, terdapat 211 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 35 RS pemerintah, 3 RS Khusus Pemerintah, 10 RS TNI/Polri, 13 RS BUMN, 30 RS Khusus swasta dan 120 RS swasta, serta tersedia 570 unit Puskesmas dan 1.992 unit Puskesmas Pembantu.

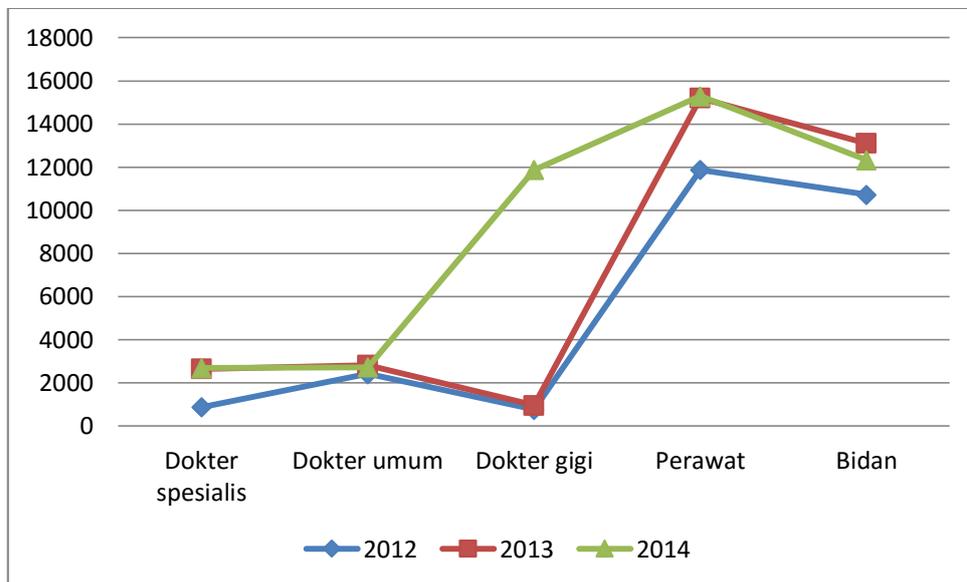
Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONEB berjumlah 160 Puskesmas, meningkat dibandingkan dengan jumlah tahun 2013 (140 Puskesmas). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS sebanyak 20 RS, dan terdapat 9 RSUD yang telah menjadi PPK-Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2014 (data diolah)

Grafik 2.19
Grafik Jumlah RSUD mampu PONEK dan Puskesmas mampu PONED
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2014

Tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut : tenaga dokter spesialis meningkat dari 855 orang menjadi 2.672 orang; dokter umum meningkat dari 2.405 orang menjadi 2.705 orang; dokter gigi meningkat dari 746 orang menjadi 964 orang; perawat meningkat dari 11.876 orang menjadi 15.292 orang; dan bidan meningkat dari 10.723 orang menjadi 12.326 orang.

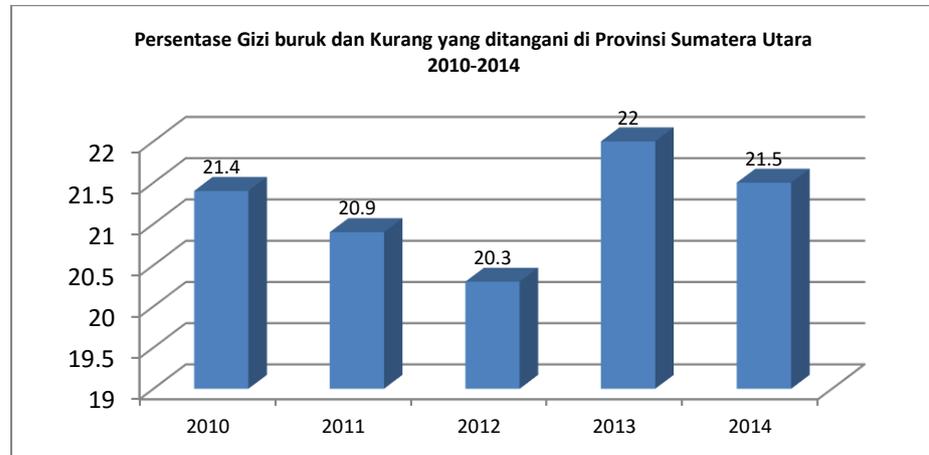


Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2014

Grafik 2.20
Grafik Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014

4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Pada tahun 2014, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 21,5 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 (22 kasus).

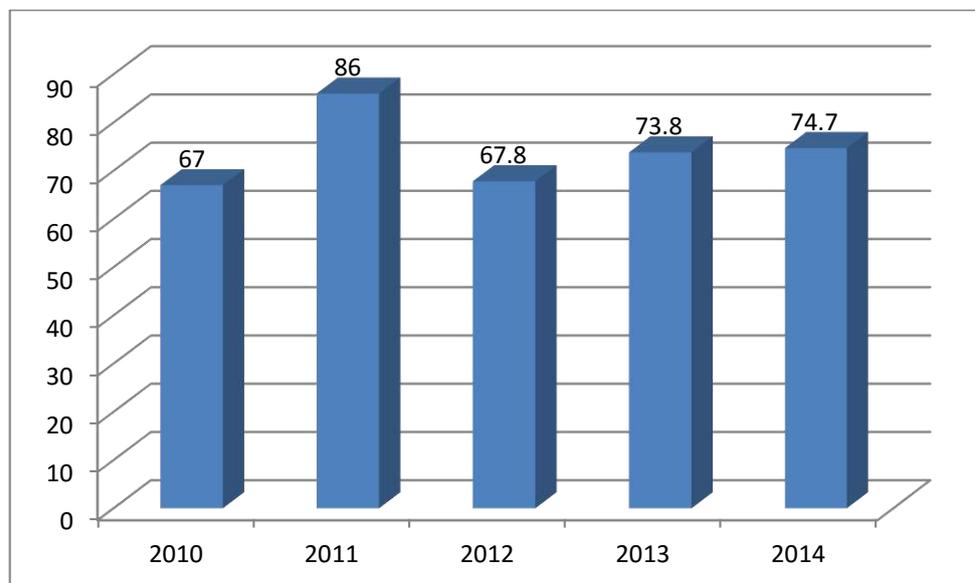


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Grafik 2.21
Persentase Gizi Buruk dan Kurang yang ditangani di Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

5. Desa/kelurahan *Universal Child Immunization*

Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Pada tahun 2010 persentase Desa UCI mencapai 67 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun pada Tahun 2014 naik menjadi 74,7 persen namun masih dibawah target Provinsi tahun 2014 (80%)



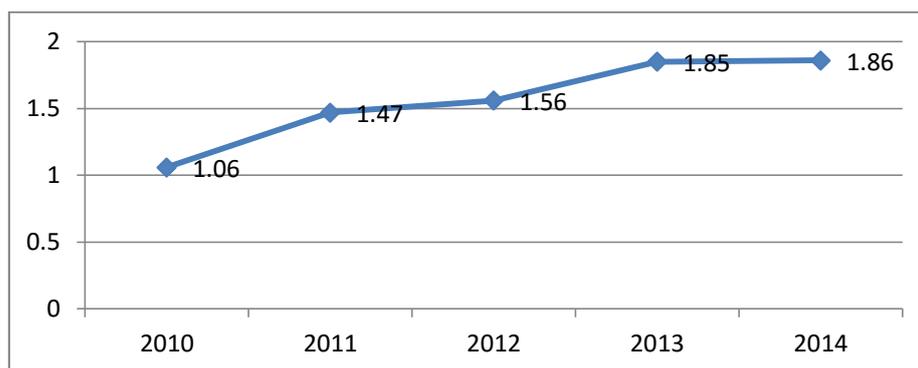
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

Grafik 2.22
Grafik Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

Persentase pencapaian desa UCI di Provinsi Sumatera Utara yang masih dibawah rata-rata nasional disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor supply side immunisasi, belum maksimalnya peran tenaga kesehatan yang bekerja di desa, revutalisasi posyandu yang belum maksimal.

6. Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa)

Pada tahun 2014 telah terjadi KLB diare di 5 Kab/Kota, yaitu di Kabupaten Padang Lawas 2 kali, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Mandailing Natal. Angka CFR Diare cenderung meningkat, dan masih diatas target nasional Tahun 2014 (kurang dari 1,2%).



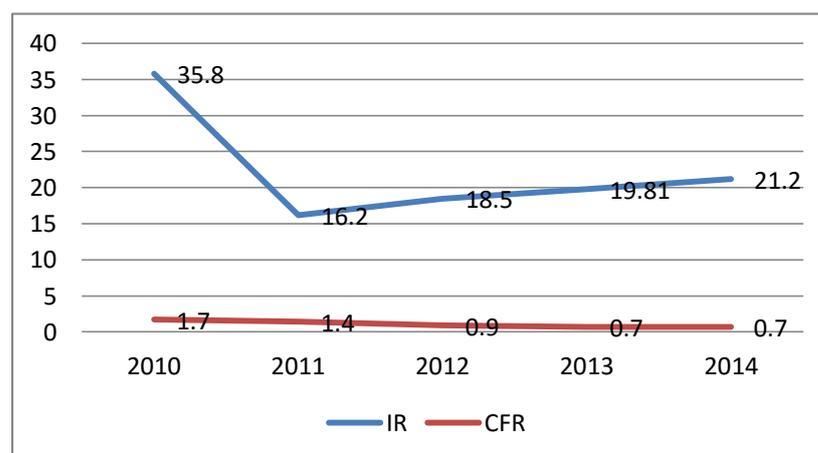
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

Grafik 2.23

Grafik Persentase Angka Kematian (CFR) akibat Diare pada KLB Tahun 2010-2014

7. Angka Kesakitan dan Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk

Program Pemberantasan DBD di Sumatera Utara terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu angka kesakitan (Incidence Rate/IR) dan angka kematian (Case Fatality Rate/CFR). Target Angka kesakitan (Insiden rate) Tahun 2014 DBD <50 per 100.000 penduduk, sedangkan CFR <1%.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2010-2014

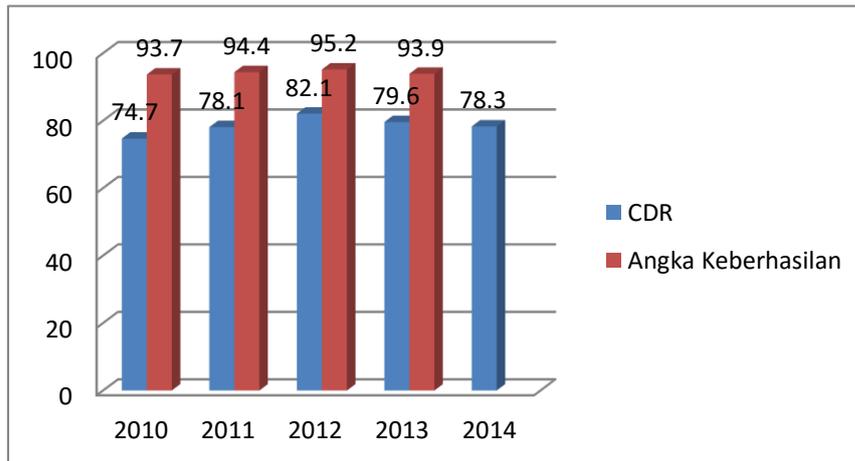
Grafik 2.24

Grafik Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2014

Angka kesakitan (IR) dan kematian (CFR) DBD per 100.000 penduduk kurun waktu 2010-2014 cenderung berada dibawah target Provinsi Sumatera Utara, meskipun dalam tiga tahun terakhir IR cenderung menurun namun CFR cenderung meningkat.

8. Angka *Case Detection Rate (CDR)* dan Keberhasilan Pengobatan TB

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2010-2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2010-2014

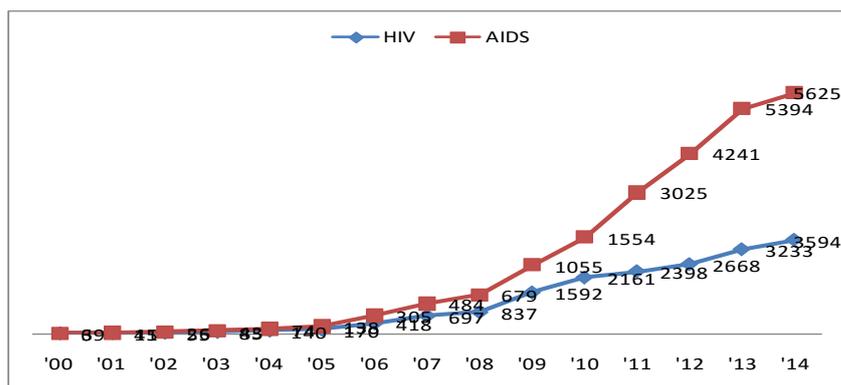
Grafik 2.25

Grafik Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010–2014

Pada tahun 2014, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 16.659 kasus atau 78,3% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.277 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 75% lebih rendah dari tahun 2013 (76,6%). Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2012, namun tahun 2013 dan 2014 CDR cenderung menurun ini terjadi karena terdapat Kab/Kota tidak mengirimkan laporan.

9. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara sejak tahun 1992 kasus tersebut ditemukan dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

Grafik 2.26

Grafik Jumlah Kumulatif Kasus HIV/AIDS DI Sumut Tahun 2000 – 2014

Prevalensi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapatkan pengobatan Anti-Retrovital Therapy (ART) meningkat dari 75% pada tahun 2013 menjadi 76% pada tahun 2014.

9. Persentase Ibu Hamil Positif yang mendapat ARV

Program Pencegahan penularan Penyakit HIV/AIDS dari ibu ke anak telah dibentuk 2 unit pelayanan PPIA dimana pada Tahun 2014 dari 130 orang ibu hamil HIV (+) yang masuk kelayanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) sebanyak 93 orang mendapatkan obat ARV (72%).

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Beberapa capaian indikator bidang pekerjaan umum sampai dengan tahun 2014, antara lain proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik, Persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio rumah layak huni, persentase rumah tangga pengguna air bersih, persentase rumah tangga pengguna listrik.

- Persentase rumah tinggal bersanitasi : 59,12 %
- Rasio rumah layak huni : 82,98 %
- persentase rumah tangga pengguna air bersih : 89,98 %
- Persentase rumah tangga pengguna listrik : 88,36 %
- Bina Marga
- Sumber Daya Air

Tabel 2.26
Proporsi Jalan Nasional Dalam Kondisi Mantap
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

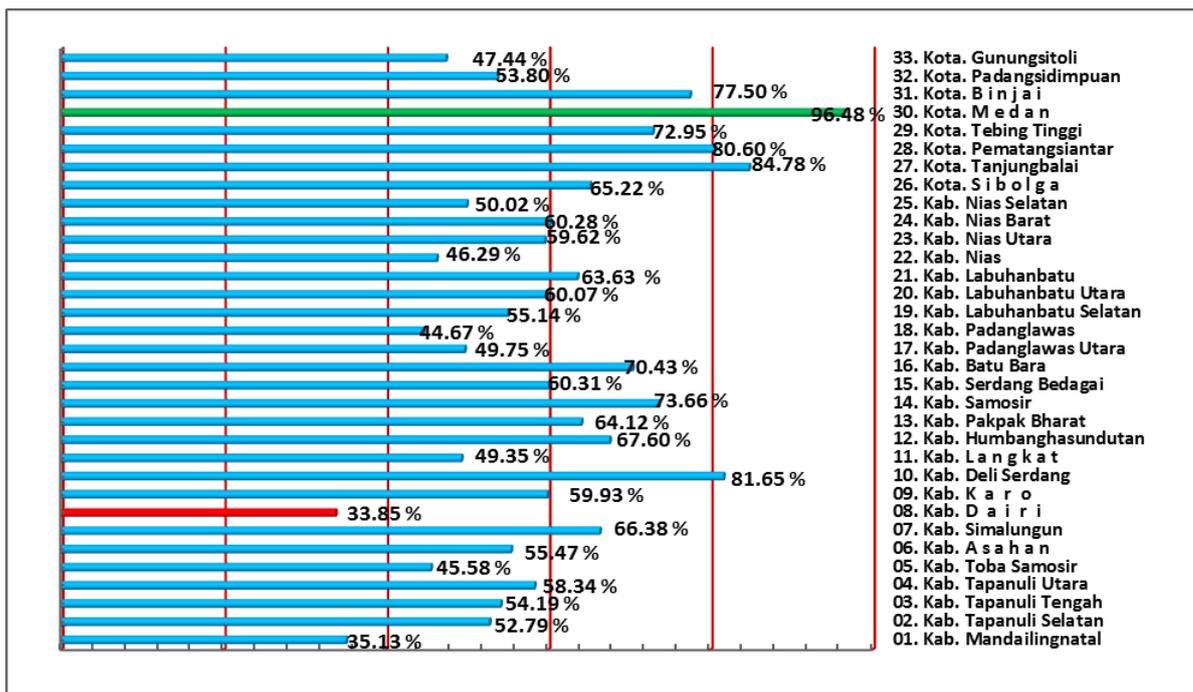
	2010	2011	2012 (Akhir Tahun 2012)	2013 (Semester III Tahun 2013)	2014 (Semester II Tahun 2014)
Panjang Jalan (Km)	2.249,64	2.249,64	2.249,64	2.249,64	2.249,64
Kondisi Mantap (%)	77,69	81,59	87,30	81,51	80,30

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan

Tabel 2.27
Proporsi Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

	2010	2011	2012 (Awal Tahun 2012)	2013 (akhir Tahun 2013)	2014 (Akhir Tahun 2014)
Panjang Jalan (Km)	2.752,41	2.754,41	3.048,50	3.048,50	3.048,50
Kondisi Mantap (%)	73,71	75,52	66,59	69,60	74,42

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu



Sumber : Dinas Bina Marga Provsu

Grafik 2.27
Grafik Diagram Kondisi Jalan Mantap di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014
(Status Jalan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota)

Tabel 2.28
Luas Irigasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

	2011	2012	2013	2014
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi layanan optimal	52.200	53.069	52.200	53.330
Luas Total	86.999	86.999	86.999	86.999
(%) layanan optimal	60	61	60	61,3

Sumber : Dinas PSDA Provsu

2.3.1.4 Penataan Ruang

Provinsi Sumatera Utara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang RTRW Provsu Tahun 2003 - 2018. Saat ini Perda dimaksud sedang direvisi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta untuk

mengakomodir perkembangan terkini. Proses penyusunan dan pembahasan revisi RTRW Provsu tersebut telah dimulai pada tahun 2008 dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pada Juli 2010 Gubernur telah menyampaikan Raperda RTRW Provsu ke DPRD Provsu. Kemudian DPRD Provsu membentuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) dan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Setelah melalui Balegda, selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Utara membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dimana saat ini Raperda RTRW Provsu dimaksud sedang dibahas oleh Pansus Tata Ruang.

Kegiatan Pembahasan dengan Pansus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 dilakukan dengan mengadakan pertemuan/konsultasi publik ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara guna membahas hal-hal untuk dijadikan masukan maupun muatan terhadap substansi dari materi draft Raperda RTRW Provsu. Kabupaten/kota yang berjumlah 33 tersebut kemudian dibagi ke dalam 6 (enam) zona dan masukan-masukan yang didapatkan telah didokumentasikan untuk dibahas bersama Pansus RTRW DPRD Provinsi Sumatera Utara, tenaga ahli dan BKPRD Provinsi Sumatera Utara untuk dimuat di draft Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2013 bersama Panitia Khusus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dan menghasilkan Persetujuan Bersama antara Gubernur dengan DPRD Nomor 07/K/2013 dan 188.44/669/KPTS/2013 Tanggal 9 September 2013 tentang persetujuan bersama terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2033, Raperda tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Raperda Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Mempedomani amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, khususnya pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Rancangan Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034, yang telah mendapat kesepakatan Bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, tanggal 6 November 2013 kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Selanjutnya disampaikan bahwa menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, oleh Ditjen. Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 16 November 2013 di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah diterbitkan hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 650-1650 Tahun 2014.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, sebagai rangkaian proses revisi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka telah dilakukan proses integrasi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ke dalam Rencana Pola Ruang Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 serta ke dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pusat data geospasial di Provinsi Sumatera Utara, sejak Tahun 2012 telah dimulai pembangunan Jaringan Pusat Data dan Informasi

Geospatial di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Terkait status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota, 16 (enam belas) Kabupaten/Kota telah memperdakan RTRW nya. Status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut ini :

Tabel 2.29
Status Legalisasi Peaturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	STATUS
1	Kota Medan	PERDA NO. 13 TAHUN 2011
2	Kota Binjai	PERDA NO. 12 TAHUN 2011
3	Kota Gunung Sitoli	PERDA NO. 12 TAHUN 2012
4	Kabupaten Simalungun	PERDA NO. 10 TAHUN 2012
5	Kota Pematangsiantar	PERDA NO. 1 TAHUN 2013
6	Kota Tebing Tinggi	PERDA NO. 4 TAHUN 2012
7	Kota Tanjung Balai	PERDA NO. 2 TAHUN 2013
8	Kabupaten Serdang Bedagai	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
9	Kabupaten Batubara	PERDA NO. 10 TAHUN 2013
10	Kabupaten Tapanuli Tengah	PERDA NO. 8 TAHUN 2013
11	Kabupaten Langkat	PERDA NO. 9 TAHUN 2013
12	Kabupaten Asahan	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
13	Kabupaten Nias	PERDA NO. 1 TAHUN 2014
14	Kabupaten Dairi	PERDA NO. 7 TAHUN 2014
15	Kota Padangsidimpuan	PERDA No. 4 TAHUN 2014
16	Kabupaten Nias Utara	PERDA No. 1 TAHUN 2015
17	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
19	Kabupaten Nias Barat	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
20	Kabupaten Nias Selatan	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
21	Kota Sibolga	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
22	Kabupaten Labuhan Batu	Di Biro Hukum
23	Kabupaten Pakpak Bharat	Evaluasi Teknis
24	Kabupaten Mandailing Natal	Evaluasi Teknis
25	Kabupaten Humbang Hasundutan	Evaluasi Teknis
26	Kabupaten Tapanuli Utara	Evaluasi Teknis
27	Kabupaten Toba Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
28	Kabupaten Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
29	Kabupaten Padang Lawas	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
30	Kabupeten Labuhan Batu Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
32	Kabupaten Karo	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
33	Kabupaten Deliserdang	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara

2.3.1.5 Perencanaan Pembangunan

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, adalah sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 – 2015.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2020.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengendalian Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2020.

2.3.1.6 Perhubungan

Capaian Indikator bidang perhubungan antara lain adalah :

- Jumlah Pelabuhan Laut : **35 Pelabuhan**
- Bandar Udara : **8 Bandara**
- Terminal Bis : **40 buah**
- Angkutan darat : **3.927 unit (AKDP : 2.833 ; AKAP : 1.094)**

2.3.1.7 Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari status mutu air dan kasus pencemaran air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, dan penegakan hukum lingkungan :

A. Status Mutu Air

Jumlah alokasi pelayanan status mutu air sungai dan danau di reseptor yang sensitif ditargetkan pada 6 lokasi, dan terealisasi 6 lokasi, dengan capaian kinerja 100%.

1) Sungai Deli

Status mutu air sungai deli di 7.sampling adalah status mutu air di 5 titik (Sibayakindo, Jemabatan Simalingkar B, Jembatan Jalan Ir. Juanda, Pertemuan antara Sungai Deli dan Sungai Babura, dan Jembatan Pulau Brayen) tergolong tercemar ringan. Status mutu air di 2 titik (PT. Unibis dan Jembatan Medan Labuhan) tergolong tercemar sedang.

- 2) Sungai Belawan
Status mutu air di 7 titik sampling (Jembatan Tuntungan, Pertemuan Sei Belawan-Sei Kriyo, PDAM Tirtanadi Medan, PT. Everbright, Pabrik gula Sei Semayang, PT. Rubber Hock Lie, Tirtanadi Hamparan Perak) pada sungai Belawan tergolong tercemar ringan.
- 3) Sungai Asahan
Status mutu air Sungai Asahan di 6 titik sampling adalah status mutu air di 2 titik (Jembatan jalan Balige pasar Porsea, Jembatan Desa Meranti Pintu Pohan) tercemar ringan. Status mutu air di 2 titik (Titi Gantung-Deang-deang, Jembatan downstream PKS Pulau Raja) tergolong tercemar sedang. Status mutu air di 2 titik (Jembatan Kuning P. Simardan, Jembatan Tabayong, Desa Patembo) tergolong tercemar berat.
- 4) Sungai Wampu
Status mutu air di 6 titik sampling (jembatan desa sogong, jembatan sei bahorok, jembatan desa tanjung lenggang, penyeberangan getek jumari desa perhiasan, jembatan jalan umar baki binjai, jembatan desa stabat) pada sungai wampu tergolong tercemar sedang.
- 5) Sungai Percut
Status mutu air sungai percut di 6 titik sampling adalah status mutu air di 2 titik (jembatan bukum desa cinta rakyat dan jembatan desa sari laba jahe) tergolong tercemar ringan. Status mutu air di 3 titik (jembatan desa aji baho batumbak, jembatan medan amplas dan jembatan desa bandar setia) tergolong tercemar sedang. Status mutu air di 1 titik (jembatan desa tembung) tergolong tercemar berat.
- 6) Sungai Batahan
Status mutu air di 6 titik sampling (jembatan gantung desa batu, jembatan bitungan bejangkar baru/aerapa, jembatan bitungan bejangkar kampung, jembatan rambin tran-1, jembatan gantung simpang gordes, lubuk pusing) tergolong tercemar berat.

B. Cakupan pelayanan Kasus-kasus lingkungan hidup
Target 100% capaian kinerja 59,38%

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima instansi Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun sebanyak 32 kasus sedangkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti hanya 19 kasus. Capaian kinerja yang rendah disebabkan karena beberapa hal antara lain masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dalam melakukan tindaklanjut pengaduan kasus pencemaran dan atau kasus perusakan lingkungan sehingga beberapa kasus di Kabupaten/Kota tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu disebabkan karena kurangnya personil untuk menindaklanjuti kasus-kasus serta waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses penanganan kasus-kasus lingkungan.

C. Cakupan terhadap Pelayanan AMDAL

Target 100%, capaian kinerja 100%.

Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 8 perusahaan dan dokumen yang sudah selesai/dalam proses dibahas oleh Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara Tahun 2014 sebanyak 8 dokumen.

D. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Telah dilakukan Analisa AMDAL, khususnya pada perusahaan besar di Sumatera Utara, sebanyak 19 dokumen dalam bentuk KA-ANDAL dan ANDAL/RKL-RPL, UKL-UPL dan DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPPL (Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

E. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan telah dilakukan melalui penanganan pengaduan masalah lingkungan, sebanyak 26(dua puluh enam) kasus pengaduan. 7 (tujuh) pengaduan terkait masalah pencemaran lingkungan telah diproses dengan melakukan verifikasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagai salah satu capaian indikator pemberdayaan perempuan memperlihatkan trend positif. Dimana pada tahun 2011 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 67,39 persen dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 2 persen sehingga pada tahun tersebut IPG Sumatera Utara telah mencapai 69,82 persen.

Capaian IPG Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar 69,82 persen ini tidak terlepas dari capaian beberapa indikator lain seperti keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun yang sama sebesar 17 persen, perempuan sebagai tenaga kerja profesional sebesar 51,62 persen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebesar 35,64 persen.

Peningkatan peran serta perempuan pada bidang ketenaga kerjaan juga menunjukkan trend positif. Pada tahun 2013, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 56,10 persen mengalami peningkatan sebesar 3,5 persen, dimana pada tahun 2012 persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Sumut hanya mencapai 60,85 persen.

Namun, peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai sektor, tidak diikuti oleh upaya perlindungan terhadap perempuan, sehingga pada tahun 2013 telah ditemukan 20 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), angka ini mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya (2012) yang hanya mencapai 17 kasus kekerasan. Sehingga hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan.

2.3.1.9 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator terkait dengan keluarga berencana dilihat dari rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan penurunan dari 2,42 tahun 2007 menjadi 1,92 pada tahun 2008, namun pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 2,1 dan 2,07 pada tahun 2010. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan tekanan kepada pertumbuhan penduduk Sumatera Utara.

Disamping itu terjadi peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, di tahun 2011 terapat 1.059.065 dari 3.138.657 kepala keluarga dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 1.087.362 dari 3.253.024 kepala keluarga di Sumatera Utara.

2.3.1.10 Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota, yang menampung anak-anak terlantar, gelandangan, cacat fisik, pengemis dan lanjut usia.

- PMKS yg memperoleh bantuan sosial

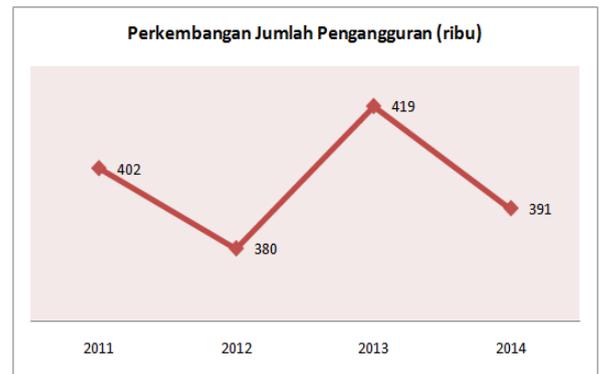
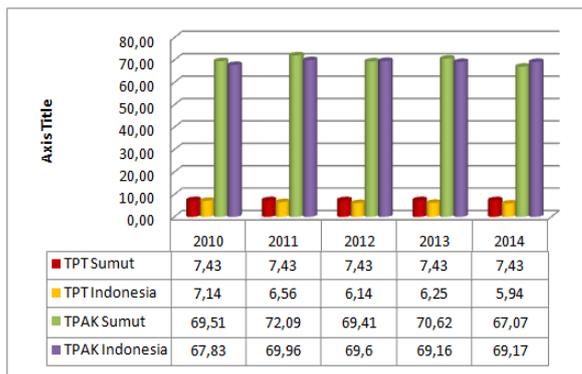
Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara terdiri dari beberapa jenis, sebagaimana terlihat pada **tabel** dibawah ini :

Tabel 2.30
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

No	Jenis PMKS
1	Anak Balita Terlantar
2	Anak terlantar
3	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4	Anak jalanan
5	Anak dengan kedisabilitas
6	Wanita rawan sosial ekonomi
7	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
8	Lanjut Usia
9	Penyandang Disabilitas
10	Tuna susila
11	Pengemis
12	Gelandangan
13	Keluarga bermasalah sosial psikologis
14	Pemulung
15	Kelompok Minoritas
16	Bekas Narapidana
17	HIV/AIDS
18	Korban Narkotika
19	Traficking
20	Komunitas Adat Terpencil (KAT)
21	Korban Tindak Kekerasan
22	Pekerja Migran Bermasalah Sosial
23	Korban Bencana Alam
24	Korban Bencana Sosial
25	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
26	Fakir Miskin

2.3.1.11 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2014 yang mncapai 67,07 persen, sebesar 7,43 persen adalah pengangguran terbuka. Kondisi capaian ini berada di bawah capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 6,25 persen, Sehingga hal ini juga menggambarkan bertambahnya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Dimana pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sebesar 419.202 jiwa mengalami peningkatan menjadi 391.202 jiwa pada tahun 2014, sebagaimana grafik berikut :



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2014

Grafik 2.28
Grafik Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2010-2014

2.3.1.12 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Koperasi di Sumatera Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.31
Perkembangan Koperasi Tahun 2014 – 2015

No	Uraian	Keadaan		
		2014	Oktober 2015	% (+/-)
1	Jumlah Koperasi	12.273	11.755	- 4,22
	Aktif (Unit)	7.480	6.825	- 8,75
	Tidak Aktif (Unit)	4.793	4.930	2,85
2	Anggota (Orang)	2.133.927	1.818.568	- 14,77
3	RAT (Unit)	4.305	227	- 94,72
4	Manajer (Orang)	1.596	146	- 90,85
5	Karyawan (Orang)	12.096	6.559	- 45,77
6	Modal Sendiri (Rp. 000)	3.058.101.432	21.230.966.062	594,25
7	Modal Luar (Rp. 000)	1.520.777.633	1.191.175.509	- 21,67
8	Volume Usaha (Rp. 000)	5.048.516.265	4.934.083.624	- 2,26
9	SHU (Rp. 000)	500.512.930	593.676.669	18,61

Keragaan Koperasi Tahun 2015 mengalami perubahan signifikan di beberapa indikator. Hal ini disebabkan karena pendataan selama ini dilakukan tidak memakai aplikasi yang online, sehingga tidak terbaharui secara berkelanjutan. Mulai Tahun 2015 Database Koperasi Se - Sumatera Utara mempergunakan Aplikasi Online Data System (ODS), sebagai program yang diterapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam mendata koperasi di seluruh Indonesia dengan Online.

Dengan mempergunakan aplikasi Online Data System ada beberapa kelebihan yang diperoleh, yaitu :

1. Dapat dilihat data individu koperasi secara riil dan terkini
2. Tidak terjadi tumpang tindih data koperasi

3. Dapat menampilkan laporan dengan berbagai kebutuhan (bentuk koperasi, jenis koperasi, sektor usaha koperasi, kelompok koperasi, wilayah koperasi, dll)
4. Dapat menampilkan profil koperasi (kepengurusan, Kelembagaan dan indikator usaha)
5. Data koperasi dapat diakses melalui website Kementerian Koperasi dan UKM RI (www.depkop.go.id)

Jumlah koperasi tahun 2015 yang kelihatan menurun bukan berarti kinerja Dinas Koperasi dan UKM menurun akan tetapi itu adalah upaya yang dilakukan dengan membubarkan koperasi yang tidak aktif dan memacu koperasi aktif agar lebih berkualitas. Makin merebaknya jenis koperasi yang kurang jelas peruntukannya, memaksa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penertiban dengan pengecekan, pemberian nomor Induk Keanggotaan serta kode respon cepat.

Mulai 2015, Koperasi yang tidak mempunyai sertifikat Nomor Induk Koperasi dan Quick Response (QR) Code akan dibubarkan pemerintah secara massal. Keputusan ini mengacu pada surat dari Kementerian Koperasi dan UKM yang akan memberikan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan QR Code kepada koperasi yang betul-betul aktif dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sementara koperasi yang aktif tapi tidak melaksanakan RAT akan diberi sertifikat NIK saja. Keputusan ini bertujuan untuk menyaring model koperasi yang sehat dan menertibkan daftar keanggotaan koperasi di setiap kota dan kabupaten. Manfaat Sertifikat NIK dan QR code diantaranya, koperasi mendapatkan rekomendasi penuh dari program-program pemerintah. Disamping itu jika ingin mengajukan hutang ke bank, otomatis langsung disetujui.

Sedangkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32
Jumlah UMKM Tahun 2014 - 2015

Sektor	Jumlah (unit)		
	2014	2015	% (+-)
Jumlah UMKM	2.855.399	2.855.549	0,00525

Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak sektor UMKM alat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Perkembangan jumlah UMKM di Sumatera Utara cukup baik, hal ini dapat memberikan kontribusi yang cukup baik baik penumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

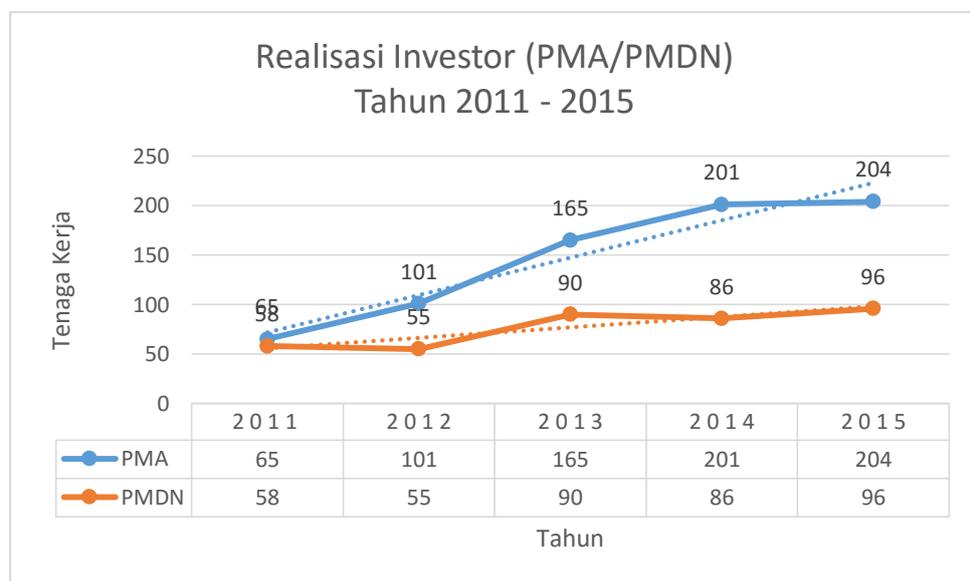
2.3.1.13 Penanaman Modal Daerah

- a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Secara keseluruhan pada tahun 2015 Provinsi Sumatera Utara mempunyai 300 investor baik dari local maupun investor asing, dan diketahui bahwa dari tahun 2011 - 2015 jumlah investor terus mengalami peningkatan, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada **Tabel** berikut ini :

Tabel 2.33
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 – 2015
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	Jumlah Investor	58	65	123
2012	Jumlah Investor	55	101	156
2013	Jumlah Investor	90	165	255
2014	Jumlah Investor	86	201	287
2015	Jumlah Investor	96	204	300

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



Grafik 2.29

Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 – 2015 Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel dan grafik diatas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN mengalami peningkatan yang signifikan dari 58 jumlah proyek ditahun 2011 menjadi 96 proyek ditahun 2015. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami kenaikan dari semula 65 proyek pada tahun 2011 menjadi 204 jumlah proyek yang terealisasi di Sumatera Utara tahun 2015.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.34** berikut:

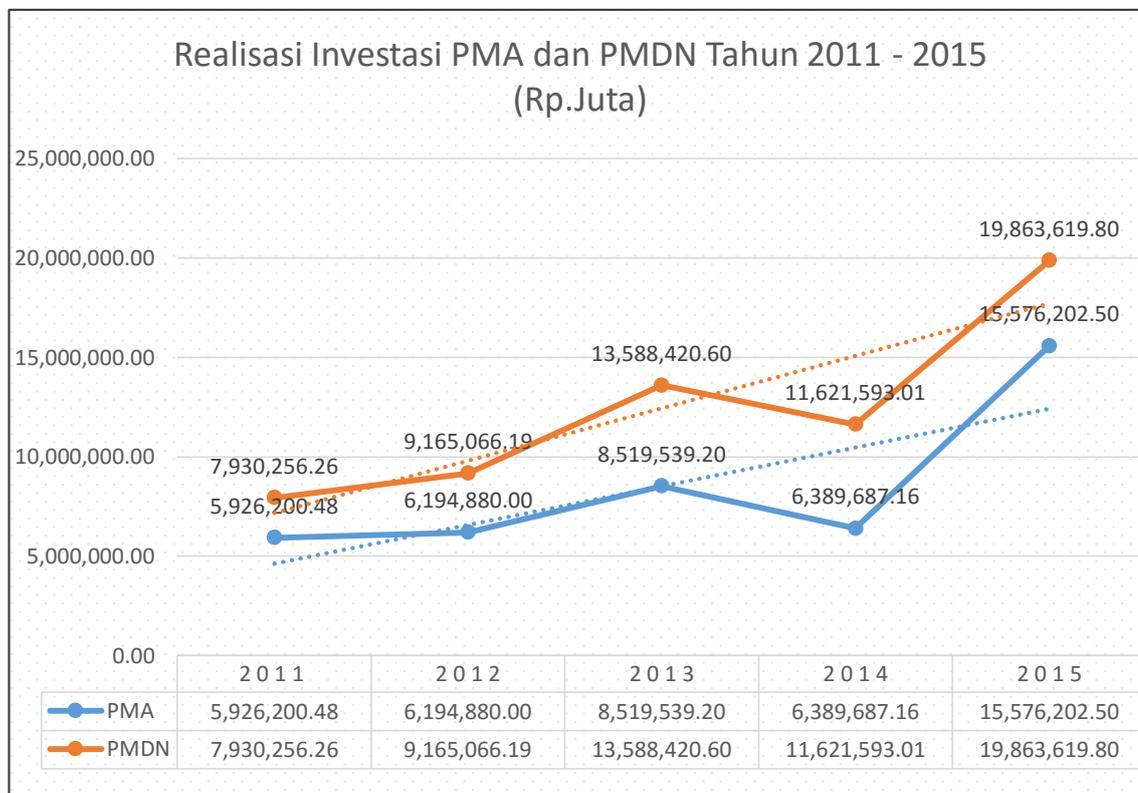
Tabel 2.34
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 – 2015

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US \$.000)*
2011	58	2.004.055,78	65	658.466,72
2012	55	2.970.186,19	101	645.300,00
2013	90	5.068.881,40	165	887.452,00
2014	86	5.231.905,85	201	550.835,10
2015	96	4.287.417,30	204	1.246.096,20

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu.

- US \$ 1 = Rp. 9.000.- (2011)
- US \$ 1 = Rp. 9.600.- (2012)
- US \$ 1 = Rp. 9.600.- (2013)
- US \$ 1 = Rp. 10.500.- (2014)
- US \$ 1 = Rp. 12.500.- (2015)

Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir ini baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai investasi dari Penanaman Modal Asing. Tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik investasi asing maupun investasi dalam negeri.



Grafik 2.30
Grafik Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 – 2015
Provinsi Sumatera Utara (Juta Rp.)

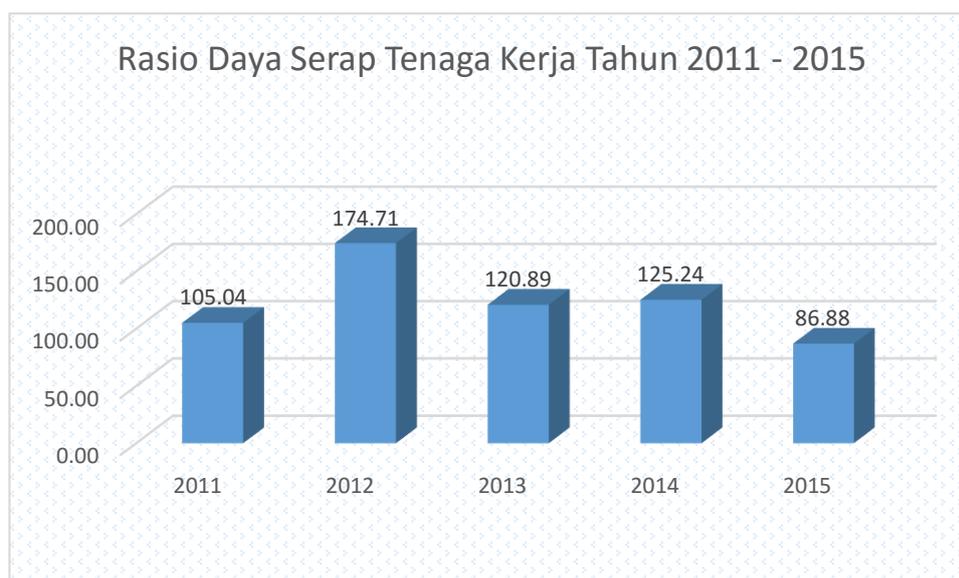
c. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 2.35
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN)
Tahun 2011 - 2015 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	12,920	27,255	30,826	26,667	26,063
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	123	156	255	287	300
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	105.04	174.71	120.89	125.24	86.88

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



Grafik 2.31
Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA/PMDN selama 2011-2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2014. Jika dilihat dari peningkatan nilai realisasi investasi yang meningkat lebih dari 100%, dapat disimpulkan bahwa nilai investasi tersebut bukan hanya berasal dari investor baru tetapi merupakan investor yang melakukan penambahan nilai investasi, sehingga tidak melakukan penambahan tenaga kerja, selain itu dikarenakan semakin tingginya teknologi di Sumatera Utara sehingga tidak memerlukan banyak tenaga kerja hanya menggunakan mesin.

2.3.1.14 Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik. hal ini dapat dilihat dari suku/etnis yang tinggal di Sumatera Utara. Ada 8 (delapan) suku/etnis asli di Sumatera Utara, yaitu : Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Mandailing, Batak Phakpak Dairi, Simalungun, Batak Angkola dan Nias. Selain itu terdapat juga beberapa suku/etnis pendatang antara lain adalah suku Jawa, Minangkabau, Cina dan Aceh. Untuk melestarikan keragaman budaya serta menjaga kerukunan antar suku/etnis, diselenggarakan berbagai macam festival seni budaya, antara lain yaitu :

- Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang dilaksanakan rutin 1 tahun sekali.
- Pesta Danau Toba. Diselenggarakan setahun sekali..
- Festival Mejuah-juah . Diselenggarakan setahun sekali.
- SUMUT Gempar. Diselenggarakan rutin setahun sekali dan telah memperoleh rekor MURI.
- Pameran Warisan Budaya Islam.
- Festival Budaya Melayu.
- Pawai Budaya Hut RI.

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya.

Sarana dan Prasarana adalah salah satu hal penting dalam pengembangan maupun pelestarian seni dan budaya. Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa gedung (sarana) untuk penyelenggaraan kegiatan Seni dan Budaya, yaitu : Tapian Daya PRSU sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera, Museum Taman Budaya dan Museum Negeri Sumatera Utara. Jumlah Kunjungan ke Museum Negeri Sumatera Utara pada tahun 2015 mencapai 90.270 orang. Jumlah ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu sebesar 166.389 orang. Dibawah ini disajikan jumlah kunjungan ke Museum Negeri Sumatera Utara,



Grafik 2.32

Grafik Jumlah Pengunjung Museum Negeri Sumatera Utara Tahun 2011-2015

c. Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Selain memiliki kawasan wisata alam yg memukau. Sumatera Utara juga memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Benda. Situs budaya yang perlu dilestarikan antara lain yaitu :

- Candi Portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Candi Bahal di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Istana Maimun di Kota Medan.
- Masjid Raya Medan.
- Budaya Loncat batu di Kabupaten Nias.
- Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.3.1.15 Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, didefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan regulasi terkait dengan Ketahanan Pangan, yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 14 Seri G).
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 25 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan.
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015
- d. One day no Rice

Dalam Ketahanan pangan dikenal 3 aspek pokok yaitu :

1. Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,
2. Aspek Distribusi dan Akses Pangan, serta
3. Aspek Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan energi rata-rata penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 3.868 k.kal/kap/hari pada tahun 2013 menjadi 3.887 k.kal/kap/hari pada tahun 2014, akan tetapi pada tahun 2015 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 menjadi 3.876 kkal/kap/hari, akan tetapi masih

lebih tinggi dari tahun 2013. Tetapi angka ketersediaan protein terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 - 2015 dari 76.18 gr/kap/hari pada tahun 2013 meningkat menjadi 76.96 gr/kap/hari pada tahun 2014 dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 76,98 gr/kap/hari.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber karbohidrat masyarakat Sumatera Utara tidak lagi beras melainkan bersumber dari jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Sumatera Utara juga mengalami surplus beras sebesar 482.133 ton. dimana konsumsi beras penduduk Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 1.740.545 ton sedangkan ketersediaan berasnya mencapai 2.194.959 ton. Jika diasumsikan konsumsi beras penduduk Sumatera Utara sebesar 142.735 ton/bulan. maka ketersediaan cadangan pangan Sumatera Utara aman untuk 3 bulan kedepan.

Untuk Pola Pangan Harapan (PPH) Sumatera Utara meningkat dari 83.6 pada tahun 2013 menjadi 85.0 pada tahun 2014 (meningkat sebesar 1.67%). Sedangkan tingkat konsumsi beras masyarakat Sumatera Utara menurun dari 130.61 kg/kap/tahun pada tahun 2013 menjadi 128.53 kg/kap/tahun pada tahun 2014 (menurun 1.60%) dan berada dibawah 128.65 kg/kap/tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah untuk melakukan penurunan konsumsi beras sebesar 1.5% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya gerakan manggadong dan one day no rice di Sumatera Utara.

Tabel 2.36
Aspek Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

No.	URAIAN	Target 2015	Realisasi 2015	Pencapaian Target (%)
I.	KETERSEDIAAN PANGAN			
1.	Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63gr per hari	Karbohidrat : 3.876 kkal. Protein : 76.98 gram	Karbohidrat : 3.876 kkal. Protein : 76.98 gram	Karbohidrat: 100% Protein : 100%
2.	Ketersediaan Cadangan Pangan	146 Ton	150 Ton	102,74
3.	Kelembagaan Pangan	29 Lumbung	49 Lumbung	168.97
4.	Kelompok Lumbung Pangan	94 Gapoktan	91 Gapoktan	96.81
II.	DISTRIBUSI AKSES PANGAN			
1.	Sistem Distribusi Harga	100 %	100 %	100
2.	Akses Pangan Masyarakat	81 Kelompok	7 Kelompok	8,64
III.	PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN			
1.	Penurunan Konsumsi Beras 1.5% dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Konsumsi Beras 126.72 kg/kap/tahun ; PPH 85.0	Konsumsi Beras 126.32 kg/kap/tahun ; PPH 85.2	Konsumsi Beras : 99,68 % PPH : 100.23%
2.	Konsumsi pangan untuk memenuhi	Energi 2.100 kkal, Protein	Energi 1.997 kkal,	Energi : 95,09 %,

	kebutuhan energi minimal 2.200 kkal dan protein 57 gr	62,8 gr/kap/hari	Protein 59,3 gr/kap/hari	Protein : 94,42%
3.	Penanganan Keamanan Pangan Segar	75 %	100%	133,33
4	Sertifikasi Buah dan Sayuran Segar kelompok produsen di kab/kota	15 kelompok	7 kelompok	46,67
IV.	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
1.	Berkurangnya Penduduk Miskin dan Rawan Pangan	Penduduk Miskin 9.61 %.	Penduduk Miskin berkurang 10,53%	109,57
2.	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	75 desa	77 desa	102,67
V.	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI KETAHANAN PANGAN			
1.	Efektivitas Koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	65%	65%	100
2.	Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan provinsi dan kab/kota	5 kali	8 kali	160

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu 2015 (data diolah)

2. Kondisi Rawan Pangan

Kemiskinan berhubungan sangat erat dengan kerawanan pangan dalam dua dimensi yaitu dari (1) kedalamannya, dibedakan dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (2) jangka waktu/periode kejadian, dengan kategori kronis untuk jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.000 kkal. Jika konsumsi perkapita kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; sekitar 70 hingga 90 persen dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90 persen dari AKG termasuk dalam kategori tahan pangan.

2.3.1.16 Perpustakaan dan Kearsipan

a. Jumlah perpustakaan

Berikut ini adalah Perpustakaan yang telah dibina Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37
Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara
Jumlah Perpustakaan yang telah dibina (Mendapat Bantuan)

No	Jenis Perpustakaan	Data BPS 2008-2010	2010	2011	2012	2013	Total
1	Kabupaten/Kota	-	33	33	33	33	-
2	Kecamatan	-	30	10	-	50	-
3	Desa/Kelurahan	177	192	100	132	1321	177
4	PAUD/TK	-	-	10	-	10	-
5	SD	-	-	20	B	20	-
6	SMP	-	20	14	B	34	-
7	SMU	-	20	14	B	34	-
8	SMK	-	-	20	B	20	-
9	Pondok Pesantren	-	10	10	-	30	-
10	Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta)	6	6	6	-	24	6
11	Masjid	-	10	10	-	30	-
12	Gereja	-	10	10	-	30	-
13	Masyarakat/TBM	20	35	8	-	92	20
14	RSUD	-	10	-	-	20	-
15	Puskesmas	-	-	10	-	20	-
16	Khusus/Instansi	-	30	8	B	48	-
17	Lembaga Pemasyarakatan	1	5	10	-	17	1
18	Panti Sosial	-	12	-	-	12	-

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2014

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Berikut ini adalah grafik tingkat kunjungan Pemustaka tiap tahunnya ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.38
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Tahun	Jumlah
2010	589.553
2011	593.834
2012	594.443
2013	100.000



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.33

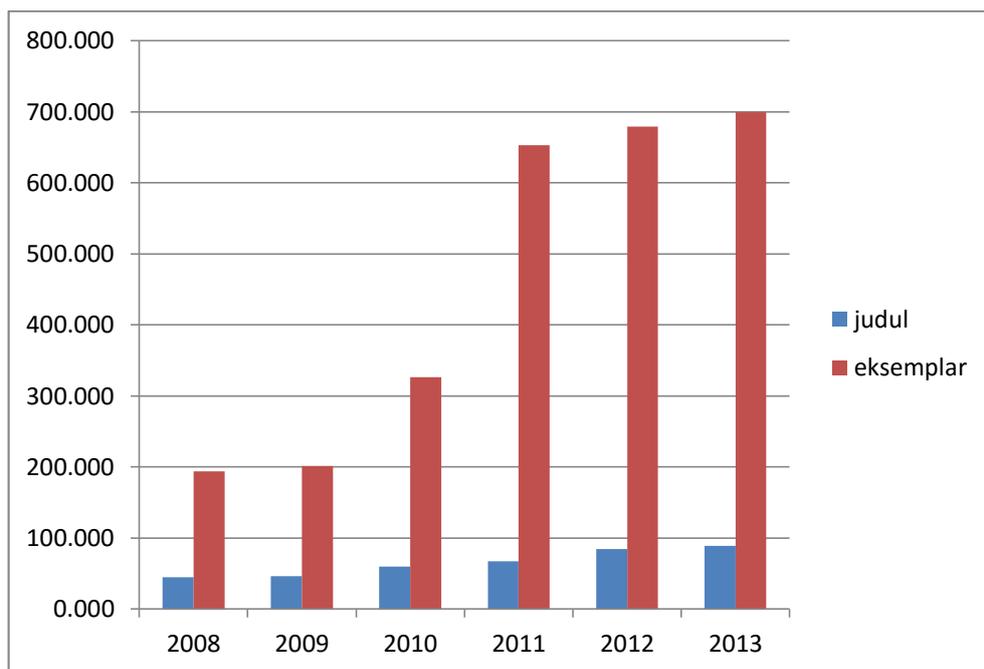
Grafik Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun (dalam ribuan) 2010-2014

- e. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Berikut ini adalah grafik koleksi buku yang ada di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

Tabel. 2.39
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan
Provinsi Sumatera Utara

TAHUN	JUDUL	EKSEMPLAR
2009	46.433	201.067
2010	59.855	326.170
2011	67.084	652.780
2012	84.419	679.289
2013	88.694	699.204

Grafik perkembangan jumlah dan Judul Buku dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Grafik 2.33
Grafik perkembangan jumlah dan judul buku 2009-2013

d. Kearsipan

Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis. Pengelolaan Arsip yang telah dilaksanakan di Bidang Arsip Daerah pada tahun 2010 dan 2011 adalah pengelolaan arsip dinamis aktif dan statis.

Proses/ sistem pengelolaan arsip secara baku di Bidang Arsip Daerah :

1. Mengumpulkan/ menerima arsip in aktif dan statis dari SKPD dilingkungan Pemprov.
2. Melakukan pemilahan arsip.
3. Melakukan pencatatan atau pendeskripsian arsip.
4. Melakukan manuver kartu deskripsi dan fisik arsip.
5. Melakukan penomoran arsip.
6. Membungkus arsip.
7. Membuat DPAS.
8. Menyimpan arsip ke dalam boks.
9. Memberikan nomor boks arsip.
10. Menyimpan boks arsip ke dalam Roll O'Pack.
11. Memasukkan data arsip statis ke dalam jaringan.

Tabel 2.40
Jumlah Arsip Statis yang dikelola Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara

Arsip Statis

No.	Masalah	Tahun							
		2010		2011		2012		2013	
		Arsip	Boks		Boks	Arsip	Boks	Arsip	Boks
1.	Umum	473	45		22	23	2	70	7
2.	Keuangan	693	135		91	42	8	870	145
3.	Kepegawaian	150	16		8	9	1	-	-

4.	Organisasi dan Hukum	309	19		11	2174	616	-	-
5.	Bina Program	247	29		15	19	4	-	-
6.	Jaringan Jalan Nasional dan Propinsi	575	159		114	175	43	-	-
7.	Laporan	606	85		99	-	-	12	2
8.	Hukum Teknis dan Hubungan Partisipasi	-	-		-	-	-	2798	248
9.	Program	-	-		1	-	-	12	2
10.	Pengawasan	119	14		5	-	-	-	-
11.	Pengawasan Pemanfaatan Jalan	-	-		-	-	-	-	-
12.	Pemerintahan	-	-		-	-	-	-	-
13.	Politik	-	-		-	-	-	-	-
14.	Keamanan dan Ketertiban	-	-		-	-	-	-	-
15.	Kesra	-	-		-	-	-	-	-
16.	Perekonomian	-	-		-	-	-	-	-
17.	Pembinaan	-	-		-	-	-	-	-
18.	Pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Usaha Tani	-	-		-	-	-	-	-
20.	Perlindungan Tanaman	-	-		-	-	-	-	-
21.	Penelitian dan Laporan	-	-		-	-	-	-	-
22.	Kesiagaan	-	-		-	-	-	-	-
23.	Produk-Produk Hukum	-	-		-	-	-	-	-
24.	Pengendalian dan Pembinaan	-	-		-	-	-	-	-
25.	Umum dan Perlengkapan	-	-		-	-	-	-	-
26.	Pajak	-	-		-	-	-	-	-
27.	Retribusi dan Pendapatan	-	-		-	-	-	-	-
28.	Pengendalian dan Pengembangan	-	-		-	-	-	-	-
29.	Pengujian	-	-		-	-	-	-	-
Jumlah		3172	502	2793	366	2442	674	3762	404

2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, disebutkan bahwa ada 6 (enam) indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika, yaitu : (1) Jumlah jaringan

komunikasi; (2) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk; (3) Jumlah surat kabar nasional/ lokal; (4) Jumlah penyiaran radio/TV lokal; (5) Website milik pemerintah daerah; (6) Pameran /expo.

Berdasarkan keenam indikator tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah jaringan komunikasi yang tertuang dalam RPJMD Provsu ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 4 jaringan., yaitu Local Area Network, Fiber Optik, Wireless dan Internet Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2014 target tersebut telah terpenuhi, yakni 4 jaringan. Artinya capaian kinerjanya sebesar 100 %. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan, dimana pada tahun sebelumnya jaringan komunikasi yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5 jenis (Local Area Network, Fiber Optik, Radio Link, Wireless dan VPN-IP/intranet. Hal ini disebabkan jaringan VPN-IP/Intranet tidak difungsikan lagi untuk menginput atau mengakses data/informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SPIKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, pada tahun 2014 telah terbangun DRC (Data Recovery Center) di Kantor Gubernur Lt. 6. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah jaringan komunikasi yang ada sebanyak 4 jenis.
2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk yang tertuang dalam RPJMD Provsu ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 64,64 %. Dalam realisasinya, pada tahun 2014 target tersebut telah dapat terpenuhi sebesar 64,64 %. Artinya capaian kinerjanya sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, capaian kinerja pada indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 8,43 %. Adapun yang menjadi faktor pendorong peningkatan pada indikator ini adalah tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan informasi dan banyaknya pelaku bisnis yang menekuni bidang pengelolaan wartel/warnet di Sumatera Utara.
3. Jumlah Surat kabar nasional pada tahun 2014 yang terpantau dan tercatat sama dengan tahun sebelumnya (2013), yaitu 8 surat kabar. Kondisi ini, juga sama dengan jumlah Surat kabar lokal yang ada, yakni sebanyak 33 Surat kabar. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah Surat kabar nasional / lokal pada tahun 2014 sebesar 100 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah Surat kabar nasional sebanyak 8 Surat kabar dan 33 Surat kabar lokal.
4. Jumlah penyiaran radio pada tahun 2014 sebanyak 200 radio dan televisi lokal di Sumatera Utara sebanyak 12 televisi. Jumlah tersebut relevan dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Provsu, yakni sebesar 200 radio dan 12 televisi lokal. Dengan demikian, maka capaian kinerja untuk indikator jumlah penyiaran radio / televisi lokal sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka kondisinya sama. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah penyiaran radio dan televisi sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 200 radio dan 12 televisi.
5. Website milik pemerintah daerah pada tahun 2014 sebanyak 15 website, terdiri dari 1 website milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 14 website SKPD di lingkungan Pemprovsu. Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Provsu, yaitu sebanyak 30 website. Dengan demikian, maka capaian kinerjanya sebesar 50 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan website milik pemerintah daerah sebanyak 35 website.
6. Jumlah pameran yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu pada tahun 2014 sebanyak 1 kali dalam setahun, yakni Pekan Raya Sumatera Utara. Jumlah ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD

Provsu sebanyak 4 kali. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebanyak 25 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah pameran yang dilaksanakan sebanyak 1 kali.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pertanian

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Pemerintah telah menetapkan komoditi tanaman pangan utama yang harus mencapai swasembada adalah Komoditi Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai). Untuk mengetahui produksi dan produktivitas komoditi utama tersebut di Sumatera Utara dapat dilihat pada **Tabel** di bawah ini :

Tabel 2.41
Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung dan Kedele
Provinsi Sumatera Utara

No.	URAIAN	Tahun						Pencapaian Target (%) Tahun 2015
		Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015*	
1	Produksi Padi (ton)	3.549.371	3.727.250	3.771.545	3.631.039	3.794.985	3.866.492	96,22
2	Luas Panen Padi (ha)	-	742.968	-	717.318	-	753.996	-
3	Produktifitas Padi (kw/ha)	47,70	50,17	49,90	50,62	50,38	51,28	101,48
4	Produksi Jagung (ton pipilan kering)	1.335.970	1.183.012	1.529.636	1.159.795	1.672.076	1.478.584	75,81
5	Luas Panen Jagung (ha)	-	211.750	-	200.603	-	242.208	-
6	Produktifitas Jagung (kw/ha)	55,40	55,87	56,50	57,82	57,30	61,05	102,33
7	Produksi Kedele (ton)	3.645	3.229	14.131	5.705	15.051	6.583	40,37
8	Luas Panen Kedele (ha)	-	3.126	-	5.024	-	5.481	-
9	Produktifitas Kedele (kw/ha)	10,10	10,33	10,50	11,36	10,70	12,01	108,19

Sumber :

* : Angka Ramalan II Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk ketiga komoditi pada tahun 2015 dari sisi produksi tidak mencapai target yang diharapkan, sedangkan untuk produktivitas telah mencapai target yang diharapkan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka pada tahun 2015 mengalami peningkatan untuk produksi, luas panen dan

produktivitas. Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan maka perlu usaha yang lebih intensif seperti pengadaan bibit unggul, penggunaan teknologi tepat guna dan peningkatan sumber daya manusia di sektor pertanian.

b. Tanaman Perkebunan

Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat ini adalah karet, kelapa sawit, kopi dan coklat. Luas areal tanaman perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2015 berdasarkan pengesahaan (Perkebunan Rakyat, PTPN, PBSN dan PBSA) dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel 2.42
Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut
jenis komoditi dan pengusahaan Tahun 2011-2015

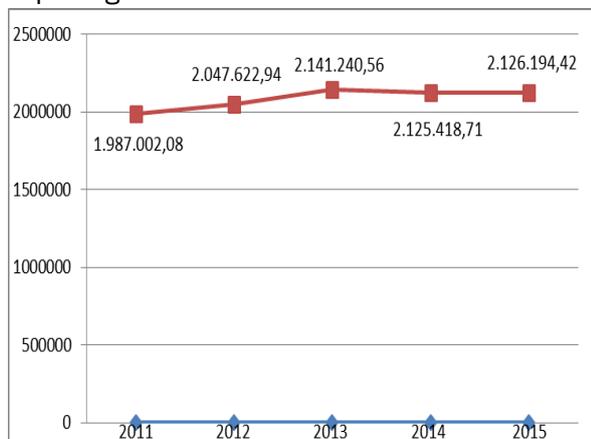
No	Jenis Komoditas	Luas Areal (Ha)				Total Luas (Ha)
		PR	PTPN	PBSN	PBSA	
1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2011						
1	Karet	374,234.85	85,632.19	64,053.48	39,824.80	563,745.32
2	Kelapa Sawit	406,999.57	305,435.75	251,489.64	112,323.11	1,076,248.07
3	Kopi Arabika	57,475.49	-	-	-	57,475.49
	Kopi Robusta	20,403.37	-	720.65	-	21,124.02
4	Kelapa	109,052.11	-	1,525.00	1,744.16	112,321.27
5	Kakao	56,913.19	19,503.97	4,005.03	2,303.73	82,725.92
6	Komoditi Perkebunan Lainnya	59,473.25	13,527.07	361.67	-	73,361.99
Jumlah :		1,084,551.83	424,098.98	322,155.47	156,195.80	1,987,002.08
Tahun 2012						
1	Karet	390,951.68	42,403.05	97,897.03	50,425.35	581,677.11
2	Kelapa Sawit	411,843.76	255,764.34	309,955.39	141,169.77	1,118,733.26
3	Kopi Arabika	60,652.60	-	-	-	60,652.60
	Kopi Robusta	20,758.95	-	773.47	-	21,532.42
4	Kelapa	110,114.31	-	1,716.14	1,121.97	112,952.42
5	Kakao	66,220.18	7,759.80	3,062.09	2,686.46	79,728.54
6	Komoditi Perkebunan Lainnya	59,957.94	12,209.39	179.27	-	72,346.59
Jumlah :		1,120,499.42	318,136.58	413,583.39	195,403.55	2,047,622.94
Tahun 2013						
1	Karet	394,113.57	42,317.35	102,132.00	52,700.00	591,262.92
2	Kelapa Sawit	414,915.84	313,070.66	327,581.00	145,885.00	1,201,452.50
3	Kopi Arabika	61,063.35	-	-	-	61,063.35
	Kopi Robusta	20,643.00	-	796.70	-	21,439.70
4	Kelapa	110,457.93	-	1,735.00	1,122.60	113,315.53
5	Kakao	66,623.88	6,782.06	3,096.20	2,696.00	79,198.14
6	Komoditi Perkebunan	60,096.42	13,234.00	178.00	-	73,508.42

No	Jenis Komoditas	Luas Areal (Ha)				Total Luas (Ha)
		PR	P T P N	P B S N	P B S A	
1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2011						
	Lainnya					
Jumlah :		1,127,913.99	375,404.07	435,518.90	202,403.60	2,141,240.56
Tahun 2014						
1	Karet	395,017.00	38,501.15	102,238.00	53,299.00	589,055.15
2	Kelapa Sawit	416,475.11	286,627.87	346,009.00	154,187.00	1,203,298.98
3	Kopi Arabika	61,231.44	-			61,231.44
	Kopi Robusta	20,853.81	-	810.00	-	21,663.81
4	Kelapa	110,122.13	-	1,851.00	1,140.00	113,113.13
5	Kakao	64,934.36	-	441.00	-	65,375.36
6	Komoditi Perkebunan Lainnya	60,224.86	11,455.98	-	-	71,680.84
Jumlah :		1,128,858.71	336,585.00	451,349.00	208,626.00	2,125,418.71
Tahun 2015*						
1	Karet	395,124.00	38,529.85	102,238.00	53,299.00	589,190.85
2	Kelapa Sawit	416,552.00	286,529.39	346,009.00	154,187.00	1,203,277.39
3	Kopi Arabika	61,285.00	-	-	-	61,285.00
	Kopi Robusta	20,895.00	-	810.00	-	21,705.00
4	Kelapa	110,130.00	-	1,851.00	1,140.00	113,121.00
5	Kakao	64,965.00	-	441.00	-	65,406.00
6	Komoditi Perkebunan Lainnya	60,753.00	11,456.18	-	-	75,209.18
Jumlah :		1,129,704.00	336,515.42	451,349.00	208,626.00	2,129,129.42

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2016

*) angka sementara

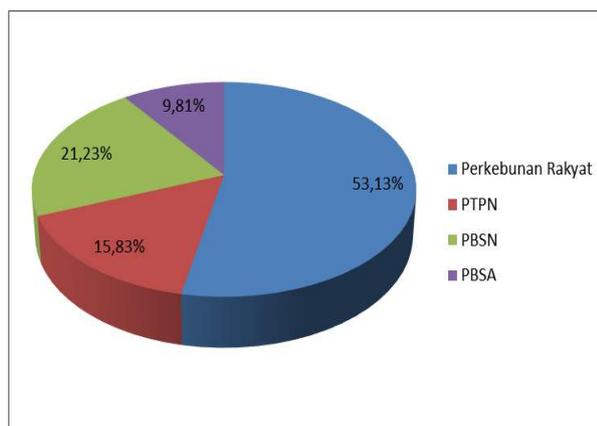
Dari tabel di atas dapat diketahui selama periode 2011-2015 luas areal perkebunan di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1.73 persen per tahun. Untuk tahun 2015 sendiri mengalami peningkatan sebesar 0.04 persen dibanding tahun 2014. Pertumbuhan luas areal perkebunan di Sumatera Utara dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.34

Grafik Pertumbuhan Luas Areal Perkebunan di Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Untuk tahun 2015 luas areal perkebunan masih didominasi oleh perkebunan rakyat (PR) seluas 1,129,704.00 hektar atau 53.13 persen dari total luas areal perkebunan di Sumatera Utara seluas 2,126,194.42 hektar.



Grafik 2.35
Grafik Komposisi Luas Areal Perkebunan di Sumatera Utara
Tahun 2015 berdasarkan Pengusahaan.

Sementara itu untuk data produksi komoditi perkebunan di Sumatera Utara tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.43
Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

No	Jenis Komoditas		Produksi (Ton)				Total Produksi (ton)
			PR	PTPN	PBSN	PBSA	
1	2		3	4	5	6	7
Tahun 2011							
1	Karet		314,307.12	61,019.47	75,530.10	46,455.33	497,312.02
2	Kelapa Sawit	TBS	5,594,006.50	4,823,524.93	3,107,385.21	1,545,758.03	15,070,674.67
		MS	1,230,681.43	1,061,175.48	683,624.75	340,066.77	3,315,548.43
		IS	167,820.20	192,941.00	124,295.41	61,830.32	546,886.92
3	Kopi Arabika		46,028.03	-	-	-	46,028.03
	Kopi Robusta		8,019.14	-	640.40	-	8,659.54
4	Kelapa		96,044.29	-	1,515.33	1,234.01	98,793.63
5	Kakao		33,792.92	20,357.90	3,984.14	2,543.02	60,677.98
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		49,482.81	52,980.02	539.02	-	103,001.85
Jumlah :			6,141,680.81	4,957,882.32	3,189,594.20	1,595,990.39	15,885,147.72
Tahun 2012							
1	Karet		310,266.17	26,843.35	125,866.00	57,877.00	520,852.52
2	Kelapa	TBS	5,511,644.	2,531,276.	4,911,914.	2,483,784.	15,438,619.

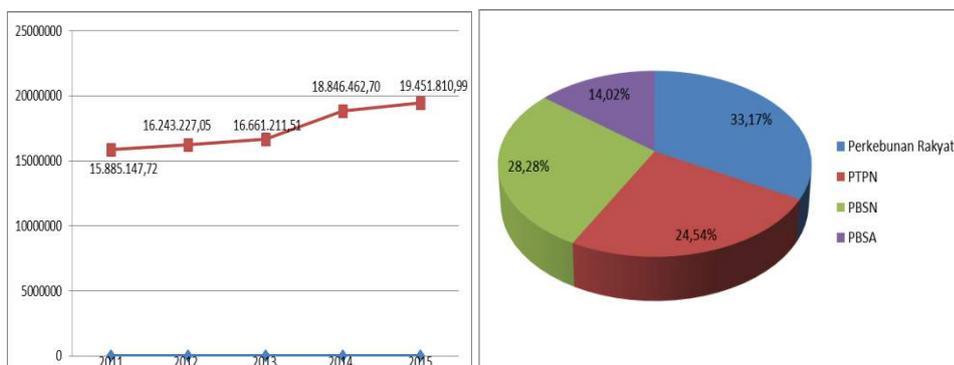
	a		29	00	42	76	47
	Sawit	MS	1,212,561.74	556,880.72	1,080,621.17	546,432.65	3,396,496.28
		IS	165,349.33	101,251.04	196,476.58	99,351.39	562,428.34
3	Kopi Arabika		48,063.49	-	-	-	48,063.49
	Kopi Robusta		8,430.03	-	662.98	-	9,093.01
4	Kelapa		90,359.79	-	1,933.02	1,201.12	93,493.93
5	Kakao		39,800.47	8,810.70	4,198.97	2,872.29	55,682.43
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		36,720.27	40,530.85	171.08	-	77,422.20
Jumlah :			6,045,284.51	2,607,460.90	5,044,746.47	2,545,735.17	16,243,227.05
Tahun 2013							
1	Karet		321,099.05	27,240.40	121,469.00	71,428.00	541,236.45
2	Kelapa Sawit	TBS	5,612,066.73	2,540,676.00	5,140,109.83	2,540,070.00	15,832,922.56
		MS	1,234,654.68	558,948.72	1,130,824.16	558,815.40	3,483,242.96
		IS	168,362.00	101,627.04	205,604.39	101,602.80	577,196.23
3	Kopi Arabika		48,646.44	-	-	-	48,646.44
	Kopi Robusta		8,562.54	-	750.00	-	9,312.54
4	Kelapa		91,621.57	-	2,038.00	1,235.00	94,894.57
5	Kakao		41,101.64	8,034.00	4,478.20	2,937.00	56,550.84
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		36,649.11	40,811.00	188.00	-	77,648.11
Jumlah :			6,159,747.08	2,616,761.40	5,269,033.03	2,615,670.00	16,661,211.51
Tahun 2014							
1	Karet		332,673.82	36,169.84	119,864.00	71,556.00	560,263.66
2	Kelapa Sawit	TBS	5,745,235.23	4,340,754.16	5,376,885.83	2,654,857.00	18,117,732.22
		MS	1,263,951.75	998,897.54	1,182,914.88	584,068.54	4,029,832.71
		IS	172,357.06	192,556.15	215,075.43	106,194.28	686,182.92
3	Kopi Arabika		49,176.51	-	-	-	49,176.51
	Kopi Robusta		8,887.52	-	776.00	-	9,663.52
4	Kelapa		91,662.47	-	2,146.00	1,349.00	95,157.47
5	Kakao		41,265.77	-	353.00	-	41,618.77
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		35,843.39	37,007.16	-	-	72,850.55
Jumlah :			6,304,744.71	4,413,931.16	5,500,024.83	2,727,762.00	18,846,462.70
Tahun 2015*							
1	Karet		334,154.0	34,107.84	119,864.0	71,556.00	560,681.84

			0		0		
2	Kelapa Sawit	TBS	5,875,321.00	4,699,427.16	5,376,885.83	2,654,857.00	18,606,490.99
		MS	1,282,025.00	1,092,587.54	1,182,914.88	584,068.54	4,141,595.96
		IS	183,124.00	188,301.15	215,075.43	106,194.28	692,694.86
3	Kopi Arabika		52,124.00	-	-	-	52,124.00
	Kopi Robusta		11,127.00	-	776.00	-	11,903.00
4	Kelapa		94,856.00	-	2,146.00	1,349.00	98,351.00
5	Kakao		44,315.00	-	353.00	-	44,688.00
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		39,337.00	38,255.16	-	-	77,592.16
Jumlah :			6,451,234.00	4,772,790.16	5,500,024.83	2,727,762.00	19,451,810.99

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2016

*) angka sementara

Produksi komoditi perkebunan di Sumatera Utara selama periode 2011-2015 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,29 persen per tahun. Sedangkan untuk tahun 2015 sendiri mengalami peningkatan sebesar 3.21 persen dibanding tahun 2014. Penyumbang produksi terbesar berasal dari komoditi kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS).



Grafik 2.36

Produksi Tahun 2011-2015 dan Persentase Produksi Komoditi Perkebunan di Sumatera Utara Tahun 2015 berdasarkan Pengusahaan

Berikut ini beberapa komoditi utama perkebunan Sumatera Utara :

1. Kelapa Sawit

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau dalam hal perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar luas lahan tersebut merupakan perkebunan rakyat diikuti dengan Perkebunan Besar Swasta Nasional, perkebunan PTPN dan Perkebunan Besar Swasta Asing. Begitu juga jika ditinjau dari produksi, maka produksi terbesar berasal dari perkebunan rakyat diikuti oleh Perkebunan Besar Swasta Nasional, PTPN dan Perkebunan Besar Swasta Asing. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44

Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2011-2015*

No	Tahun		Perkebunan Rakyat		PTPN		PBSN		PBSA		Total Luas (Ha)	Total Produksi (ton)
			Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2011	TBS	406,999.57	5,594,006.50	305,435.75	4,823,524.93	251,489.64	3,107,385.21	112,323.11	1,545,758.03	1,076,248.07	15,070,674.67
		MS		1,230,681.43		1,061,175.48		683,624.75		340,066.77	-	3,315,548.43
		IS		167,820.20		192,941.00		124,295.41		61,830.32	-	546,886.92
2	2012	TBS	411,843.76	5,511,644.29	255,764.34	2,531,276.00	309,955.39	4,911,914.42	141,169.77	2,483,784.76	1,118,733.26	15,438,619.47
		MS		1,212,561.74		556,880.72		1,080,621.17		546,432.65	-	3,396,496.28
		IS		165,349.33		101,251.04		196,476.58		99,351.39	-	562,428.34
3	2013	TBS	414,915.84	5,612,066.73	313,070.66	2,540,676.00	327,581.00	5,140,109.83	145,885.00	2,540,070.00	1,201,452.50	15,832,922.56
		MS		1,234,654.68		558,948.72		1,130,824.16		558,815.40	-	3,483,242.96
		IS		168,362.00		101,627.04		205,604.39		101,602.80	-	577,196.23
4	2014	TBS	416,475.11	5,745,235.23	286,627.87	4,340,754.16	346,009.00	5,376,885.83	154,187.00	2,654,857.00	1,203,298.98	18,117,732.22
		MS		1,263,951.75		998,897.54		1,182,914.88		584,068.54	-	4,029,832.71
		IS		172,357.06		192,556.15		215,075.43		106,194.28	-	686,182.92
5	2015	TBS	416,552.00	5,875,321.00	286,529.39	4,699,427.16	346,009.00	5,376,885.83	154,187.00	2,654,857.00	1,203,777.39	18,606,490.99
		MS		1,282,025.00		1,092,587.54		1,182,914.88		584,068.54	-	4,141,595.96
		IS		183,124.00		188,301.15		215,075.43		106,194.28	-	692,694.86

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2016

*) angka sementara

Dari data tabel di atas diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dari tahun 2011-2015. Dibanding tahun 2011, pada tahun 2015 luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan seluas 127,529.32 hektar atau rata-rata 31,882.3 hektar per tahun (2,87 % per tahun).

Sedangkan untuk produksi terus terjadi peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dengan rata-rata peningkatan sebesar 883,954.08 ton TBS per tahun atau 5.53 % per tahun.

2. Karet

Secara umum kondisi perkebunan karet di Provinsi Sumatera Utara cukup relatif berkembang dengan baik. Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi komoditi karet dari tahun 2011-2015 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.45
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2011-2015

No	Tahun	Perkebunan Rakyat		PTPN		PBSN		PBSA		Total Luas (Ha)	Total Produksi (ton)
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2011	374,234.85	314,307.12	85,632.19	61,019.47	64,053.48	75,530.10	39,824.80	46,455.33	563,745.32	497,312.02
2	2012	390,951.68	310,266.17	42,403.05	26,843.35	97,897.03	125,866.00	50,425.35	57,877.00	581,677.11	520,852.52
3	2013	394,113.57	321,099.05	42,317.35	27,240.40	102,132.00	121,469.00	52,700.00	71,428.00	591,262.92	541,236.45
4	2014	395,017.00	332,673.82	38,501.15	36,169.84	102,238.00	119,864.00	53,299.00	71,556.00	589,055.15	560,263.66
5	2015 *	395,124.00	334,154.00	38,529.85	35,107.84	102,238.00	119,864.00	53,299.00	71,556.00	589,190.85	560,681.84

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2016

*) angka sementara

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan luas areal komoditi karet dari tahun 2011-2015 sebesar 25,445.53 hektar atau rata-rata 6,361.38 hektar per tahun (5,07%/tahun). Sedangkan jika ditinjau dari pengelolaan maka peningkatan luas tanam tersebut didominasi dari perkebunan rakyat, PBSN dan PBSA.

Jika dilihat dari sisi produksi, terjadi peningkatan produksi dari tahun 2011-2015 sebesar 63,369.46 ton atau rata-rata pertahun sebesar 15,842.46 ton (3.06 %/tahun)

3. Kakao

Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu daerah penghasil kakao yang terbesar di Indonesia selain dari komoditi kelapa sawit, karet, kelapa serta kopi. Untuk mengetahui perkembangan luas areal dan produksi komoditi kakao di Provinsi Sumatera Utara. maka berikut ini akan disajikan data dari tahun 2011-2015 seperti tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2011-2015

No	Tahun	Perkebunan Rakyat		PTPN		PBSN		PBSA		Total Luas (Ha)	Total Produksi (ton)
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2011	56,913.19	33,792.92	19,503.97	20,357.90	4,005.03	3,984.14	2,303.73	2,543.02	82,725.92	60,677.98
2	2012	66,220.18	39,800.47	7,759.80	8,810.70	3,062.09	4,198.97	2,686.46	2,872.29	79,728.54	55,682.43
3	2013	66,623.88	41,101.64	6,782.06	8,034.00	3,096.20	4,478.20	2,696.00	2,937.00	79,198.14	56,550.84
4	2014	64,934.36	41,265.77	-	-	441.00	353.00	-	-	65,375.36	41,618.77
5	2015	64,965.00	44,315.00	-	-	441.00	353.00	-	-	65,406.00	44,688.00

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

*) angka sementara

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan luas areal tanaman dari tahun 2011 sampai 2015, tetapi mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Terjadi penurunan seluas 17.319,92 Ha atau rata-rata pertahun seluas 4,329.98 hektar (-5.42%/tahun).

Jika dilihat dari sisi produksi, terjadi penurunan produksi kakao dari tahun 2011-2015 sebesar 15.989,98 ton atau rata-rata pertahun 3,997.50 ton (-6.43%/tahun).

Penurunan luas dan produksi komoditas kakao dikarenakan PTPN dan PBSA pada tahun 2014 dan 2015 tidak lagi menanam kakao di lahannya, sedangkan PBSN menurunkan areal pertanamannya.

Sementara itu dari data pertanaman rakyat ternyata masih terdapat areal yang tidak produktif (Tanaman Tidak Menghasilkan) yang membutuhkan peremajaan seluas 71.689,84 Ha. sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.47
Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2013-2014

No	Komoditas	Luas Tahun 2013			Luas Tahun 2014		
		TBM	TM	TTM	TBM	TM	TTM
1	Karet	56,305.70	297,533.22	40,274.65	57,784.52	297,737.88	39,494.60
2	Kelapa Sawit	62,271.72	348,646.12	3,998.00	58,096.03	354,932.90	3,446.18
3	Kopi Arabika	13,976.37	42,865.63	4,221.35	14,098.26	43,247.48	3,885.70
4	Robusta	1,332.53	12,736.20	6,574.27	1,576.05	12,819.58	6,458.18
5	Kelapa	9,079.15	91,667.84	9,710.94	8,685.60	92,133.89	9,302.64
6	Kakao	16,432.81	46,678.29	3,512.78	16,332.72	45,220.85	3,380.79
7	Cengkeh	564.21	1,839.75	706.03	616.75	1,905.75	645.75
8	Kemenyan	1,141.90	19,378.05	2,354.35	1,205.50	19,410.30	2,282.00
9	Kulit Manis	1,012.63	3,843.77	816.47	1,066.00	3,879.20	767.00
10	Nilam	815.93	439.47	-	832.00	485.00	-
11	Kemiri	917.78	9,215.48	780.59	981.85	9,287.55	698.60
12	Tembakau	1,795.50	1,597.50	-	1,691.00	1,447.00	-
13	Tebu	1,195.00	1,156.00	-	900.00	897.90	-
14	Pala	8.50	92.80	31.00	11.50	102.50	26.70
15	Lada	11.69	110.55	28.39	21.00	119.30	22.40
16	Kapuk	62.55	312.60	80.80	67.55	331.80	72.30
17	Gambir	361.00	1,409.60	217.20	372.00	1,426.60	204.80
18	The	-	-	-	-	-	-
19	Aren	1,171.49	3,250.37	756.72	1,252.66	3,317.50	718.75
20	Pinang	1,107.71	4,124.90	327.18	1,174.90	4,284.80	259.45
21	Vanili	31.00	137.45	28.28	35.60	152.00	20.00
22	Jarak	-	14.50	3.40	1.00	15.00	3.00
23	Kapulaga	6.00	15.70	0.70	8.00	17.50	-
24	Jambu Mete	10.00	5.50	1.40	10.00	6.00	1.00
25	Sereh Wangi	-	-	-	-	-	-
	Total	169,611.17	887,071.29	74,424.50	166,820.49	893,178.28	71,689.84

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2016

c. Peternakan

1. Ternak Besar

Populasi ternak besar di Sumatera Utara yang meliputi ternak kuda, sapi, kerbau dan sapi perah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dalam **Tabel** di bawah ini :

Tabel 2.48
Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara
dari Tahun 2011-2015

Jenis Ternak Besar	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Kuda	3.175	3.069	2.133	2.153	2.056
Sapi	456.752	609.951	523.277	654.185	666.496
Kerbau	128.540	131.483	93.966	127.487	117.200
Sapi Perah	932	1.057	1.901	1.184	1.147
Total	589.399	745.560	621.277	785.009	786.899

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2016

Jika dilihat secara total dari tahun 2011-2015 jumlah populasi ternak besar sangat fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak besar dari tahun 2011 hingga 2015 sebesar 9 % per tahun. Pada tahun 2015 populasi ternak besar mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 1.890 ekor. Peningkatan populasi ini terutama terjadi pada ternak Sapi diikuti oleh ternak Kerbau dan Kuda. Sedangkan pada ternak sapi perah mengalami penurunan populasi pada tahun 2015 dibanding tahun 2014 sebesar 37 ekor.

2. Ternak kecil

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan kecil di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel** di bawah ini :

Tabel 2.49
Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015

Jenis Ternak Kecil	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Kambing	763.147	781.774	849.487	894.235	883.862
Domba	325.722	374.286	595.517	625.297	620.919
Babi	761.235	866.207	978.717	989.120	1.159.027
Total	1.850.104	2.022.267	2.423.721	2.508.652	2.663.808

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2016

Populasi ternak kecil pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 155.156 ekor dibanding tahun 2014. Peningkatan populasi terjadi pada ternak Babi dan Domba sedangkan pada ternak Babi mengalami penurunan populasi pada tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan total populasi ternak kecil dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 10 % per tahun.

3. Ternak Unggas

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan unggas di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal ini dapat kita lihat dalam **Tabel** di bawah ini :

Tabel 2.50
Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2011-2015

Jenis Ternak Unggas	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Ayam Ras Petelur	9.060.742	12.055.592	15.704.311	16.383.627	14.962.637
Ayam Ras Pedaging	40.360.663	42.813.178	46.064.412	47.528.611	47.659.709
Ayam Buras	11.963.681	12.073.428	15.545.153	16.475.729	14.190.165
Itik	2.633.909	2.790.326	2.411.989	2.526.035	2.446.864
Total	64.018.995	69.732.524	79.725.865	82.914.002	79.259.375

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2015

Populasi ternak unggas pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3.654.627 ekor dibanding tahun 2014. Peningkatan populasi terbesar pada Ayam Ras Pedaging sebesar 131.098 ekor. Sedangkan rata-rata pertumbuhan populasi ternak unggas dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 6 % per tahun.

Produksi daging/susu/telur di Sumatera Utara Tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Produksi Daging, Telur dan Susu
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2011-2015

Jenis Ternak	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Daging (ton)					
Kuda	101,45	100,02	56,79	53,77	54,03
Sapi	18.299,35	24.546,61	18.436,60	22.656,29	23.268,01
Kerbau	4.942,37	7.307,89	3.395,12	4.170,20	4.183,55
Kambing	3.268,71	3.352,55	3.469,81	3.538,23	3.692,50
Domba	1.588,62	1.706,98	1.852,71	1.886,78	1.991,31
Babi	35.787,11	38.221,38	39.211,68	40.907,11	41.377,54
Ayam Ras Petelur	5.231,85	8.501,33	11.074,32	10.463,48	10.551,31

Ayam Ras Pedaging	47.049,23	35.168,26	37.835,60	38.751,75	39.145,92
Ayam Buras	13.430,43	14.314,07	18.435,18	16.647,62	16.828,29
Itik	1.344,18	2.409,35	2.082,10	2.038,90	2.112,21
Itik Manila	0	209,61	269,20	444,65	454,92
Puyuh	0	58,28	72,09	63,79	64,16
Merpati	0	5,03	9,71	10,00	10,14
Kelinci	0	9,65	6,76	7,40	7,91
Jumlah	131.043,30	135,911,00	136.207,69	141.639,97	143.741,80
Telur (ton)					
Ayam Buras	9.776,72	9.866,41	12.703,50	11.471,71	11.596,20
Ayam Ras Petelur	80.590,23	108.018,10	140.710,63	132.949,22	134.065,23
Itik	13.941,70	13.376,82	11.563,08	11.323,16	11.730,27
Puyuh	0	459,37	568,19	502,77	505,72
Itik Manila	0	1.743,56	2.239,27	3.698,64	3.784,12
Jumlah	104.308,65	133.464,26	167.784,66	159.945,50	161.681,54
Susu (ton)	684,48	761,04	1.368,72	783,36	825,84

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu, 2016

Dari data di atas menunjukkan bahwa Produksi Daging pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2.101,83 ton dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi daging lebih didominasi produksi daging Sapi dan diikuti oleh produksi daging Babi, Ayam Ras Pedaging, dan Ayam Buras. Sedangkan untuk ternak Kuda, Kerbau, kambing, Domba, itik, Itik Manila, Puyuh, Merpati, dan Kelinci setiap tahunnya mengalami naik turun (tidak stabil). Disamping itu juga, produksi telur di dominasi oleh produksi telur Itik dimana produksi telur Itik mengalami peningkatan terbesar dibandingkan ternak Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Puyuh, dan Itik Manila. Dimana pada tahun 2015 produksi telur itik mengalami peningkatan sebesar 407.11 dibandingkan tahun 2014. Produksi telur Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Puyuh dan Itik Manila setiap tahunnya mengalami kondisi naik turun. Sedangkan untuk produksi susu pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 42,48 ton atau 5,42 % dibandingkan pada tahun 2014.

d. Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (ADHK 2010)

Dari data diatas dapat disimpulkan tentang produktifitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Utara berdasarkan harga konstan. sebagai berikut :

Tabel 2.52
Produktivitas Bahan Pangan Utama. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Produktivitas Bahan Pangan (Kw/Ha)					
	- Padi (GKG)	47.62	48.56	50.17	50.62	51,28
	- Jagung	50.71	55.41	55.87	57.82	61,05
	- Kedele	10.01	9.90	10.33	11.36	12,01
2.	Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK 2010)	5,88	5,3	4,71	4,37	5,60
3.	Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB 2010)	25,42	24,9	24,5	23,27	22,01

Sumber : - BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)
 - Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

2.3.2.2 Kehutanan

a. Luas Kawasan Hutan

Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel 2.53
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2006- 2015 (Ha)

Tahun	Fungsi Hutan			
	Produksi	Lindung	Hutan Konsevasi	Hutan Produksi Dikonversi
2006*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2007*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2008*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2009*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2010*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2011*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2012*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2013*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2014**)	1.346.221.88	1.206.881.32	427.007.49	75.684.33
2015	1.346.221.88	1.206.881.32	427.007.49	75.684.33

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

*) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

***) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas menunjukkan adanya perubahan luas kawasan hutan pada fungsi hutan yang berbeda sebagai akibat diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

(menggantikan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 47/P/Hum/2011 pada tanggal 23 Desember 2013). Total luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah 3.055.795.02 hektar atau 42.90% dari luas total wilayah (yang sebelumnya seluas 3.742.120 hektar). Terdiri dari Hutan Konservasi seluas 427.007.49 hektar; Hutan Lindung seluas 1.206.881.32 hektar; Hutan Produksi Terbatas seluas 641.769.79 hektar; Hutan Produksi Tetap seluas 704.452.09 hektar dan Luas Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 75.684.33 hektar. Hasil hutan baik merupakan hasil utama maupun hasil ikutan dari tahun 20011-2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.54
Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi
Tahun 2011-2015

Jenis Produksi		Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
A. Hasil Utama							
1.	Log Rimba	M ³	367.638.30	621.543.83	106.228.77	290.360.00	87.788,610
2.	Log Pinus	M ³	78.586.89	93.665.92	3.405.48	149.907.27	138.791,990
3.	Kayu Gergajian	M ³	233.781.35	464.866.105	360.066.032	451.953.94	167.680,771
4.	Kayu Lapis	M ³	60.427.34	45.417.480	31.467.219	104.704.67	25.185,191
5.	PULP	M ³	185.403.99	178.676.080	182.436.560	139.618.05	128.509,320
6.	Block Board	M ³	-	-	-	8.884.54	150,000
7.	Moulding	M ³	70.047.54	-	52.447.433	-	37.974,183
B. Hasil Ikutan							
1.	Rotan	Ton	65.70	45.00	-	-	
		Batang	-	7.654.00	-	500	
2.	Arang	Ton	-	-	-	-	
3.	Getah Tusam	Ton	518.79	56.27	-	798.52	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Batang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata produksi hasil utama kehutanan yaitu Log Rimba, Log Pinus, Kayu Gergajian, Kayu Lapis, PULP dan Block Board mengalami penurunan. Begitu juga dengan hasil ikutannya pada tahun 2015 tidak ada produksi.

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Lahan kritis adalah bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya dukung bagi pertumbuhan tanaman hutan. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya. sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air. pengendali erosi. siklus hara. pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisinya vegetasinya. kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai : sangat kritis. kritis. agak kritis. potensial kritis dan kondisi normal (tidak kritis).

Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2015 adalah 6.620.036.86 hektar. dengan tingkat kekritisan lahan sebagai berikut:

- Tidak Kritis : 1.549.264.76 hektar
- Potensial Kritis : 1.749.347.63 hektar

- Agak Kritis : 1.520.973.87 hektar
- Kritis : 1.460.817.50 hektar
- Sangat Kritis : 339.633.10 hektar

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa lahan dengan kategori potensial kritis memiliki persentase luas terbesar yakni 27% dari total luas lahan kritis atau seluas 1.749.347.63 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa lahan di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kritis yang besar. Sedangkan untuk kategori lahan sangat kritis memiliki persentase 5% atau seluas 339.633.10 hektar. Untuk kategori ini memerlukan penanganan rehabilitasi lahan yang sangat prioritas.

c. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan adalah usaha yang dilakukan baik fisik maupun vegetative guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya. akibat mengalami kerusakan dari beberapa macam gangguan. Rehabilitasi lahan adalah upaya memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah.

Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2015 adalah 7.216,69 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 6.883,07 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 333,62 hektar. Kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan reboisasi adalah seluas 6.883,07 hektar yang terdiri dari : Rehabilitasi Hutan Lahan pada Provinsi/Kabupaten/Kota seluas 22,95 hektar, Penanaman HTI seluas 6.817,40 hektar dan Penanaman Swadaya oleh Kelompok Tani binaan Dinas Kehutanan.

Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan penghijauan adalah seluas 333,62 hektar yang terdiri dari : Penanaman oleh Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon oleh Organisasi Wanita (SIKIB, PKK, DWP, APPB, DP, KOWANI dan BHAYANGKARA) seluas 0,81 hektar, Penghijauan lingkungan seluas 303,11 hektar, Pengadaan bibit simbolis seluas 7,20 hektar dan pengadaan bibit MPTs seluas 22,50 hektar serta pembuatan 2 Unit Pintu Paluh.

d. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Konstan selama tahun 2010 - 2012 terjadi penurunan kontribusi, walaupun nilai rupiahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap intensitas pengusaha hutan, tanpa melupakan aspek pelestariannya.

Tabel 2.55
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Tahun 2010- 2014 Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Kontribusi ADHB		Kontribusi ADHK	
	(Miliar Rp.)	%	(Miliar Rp.)	%
2010	2.736	0,99	1.442	1,21
2011	2.987	0,95	1.451	1,15
2012	3.196	0,91	1.504	1,12
2013	NA	NA	NA	NA
2014	NA	NA	NA	NA
2015	NA	NA	NA	NA

Sumber : Statistic Indonesia , PDRB Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

2.3.2.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Energi Listrik

Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, batubara, air dan panas bumi.

Tabel 2.56
Unit Pembangkit di Subsistem Sumatera Utara Tahun 2015

No	Pembangkit	Energi Primer	DMN (MW)
1	PLTU Belawan	Minyak	157
2	PLTGU Belawan	Gas	637
3	PLTG Lot 3 Belawan	Minyak	90
4	PLTMG Sewa PJB Belawan	Gas	10
5	PLTD Sewa Belawan MFO	Minyak	120
6	PLTG Glugur	Minyak	26
7	PLTG Paya Pasir	Minyak	34
8	PLTD Titi Kuning	Minyak	16
9	PLTD Sewa	Minyak	308
10	PLTU Pangkalan Susu	Batubara	400
11	PLTMH Total	Air	32
12	PLTA Sipansihaporas	Air	50
13	PLTA Renun	Air	80
14	PLTU Labuhan Angin	Batubara	120.00
15	PLTA Asahan I (IPP)	Air	180.00
16	PLTP Sibayak	Panas Bumi	10.00
17	Excess Power	Minyak	62.00
18	INALUM	Air	90.00
	TOTAL		2422

(Sumber : UPB PT. PLN Sumatera Utara)

Tabel 2.57
Pembangkit Terpasang di Subsistem SUMBAGUT Tahun 2015

No	Lokasi Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)				
		Energi Fosil		Energi Terbarukan		
		Diesel	Batubara	Air	Panas Bumi	Biomassa
Sektor Belawan						
1	PLTU, PLTGU, PLTD sewa	1284				
Sektor Medan						
2	Glugur	36				
3	Paya Pasir	119				
4	Titi Kuning	25				
5	PLTD Sewa	335				
Sektor Pandan						
6	Sipansihaporas			50		
7	Renun			80		
8	PLTMH tersebar			5		
Sektor Labuhan Angin						
9	Labuhan Angin #1, #2		230			
Sektor Pangkalan Susu						
10	Pangkalan Susu #1, #2		440			
Independent Power Producer (IPP)						
11	Asahan I (#1, #2)			180		
12	PLTM Parlilitan			7,5		
13	PLTM Silau			7,5		
14	PLTM Huta Raja			5		
15	PLTM Karai			8,3		
16	Sibayak #1				10	
17	PLTU Growth Sumatera					11
18	PLTU Growth Asia					20
19	PLTU Rambutan					2
Jumlah		1799	670	343,3	10	33
		2469		386,3		
Total		2855,3				

Sumber : UPB PT. PLN Sumatera Utara

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Utara yang memasok daya ke sistem SUMBAGUT adalah sebesar 2.855.3 MW. Selain menggunakan bahan bakar terbarukan berupa diesel dan batubara. beberapa pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga air. panas bumi dan biomassa. Kapasitas pembangkit berbasis energi fosil dan energi terbarukan masing-masing 2469 MW dan 386.3 MW. Komposisi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yaitu sebesar 13.5 % dari total kapasitas terpasang di Provinsi Sumatera Utara.

Selain Pembangkit Listrik Terpasang yang Memasok Energi Listrik ke Sistem Sumbagut, sumber daya listrik terpasang lain di Sumatera Utara yang dikelola oleh PLN Wilayah Sumut sebesar 7.500 KW yang berasal dari pembangkit listrik PLTM dan 132.000 KW yang berasal dari PLTA. tersebar di 8 lokasi. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

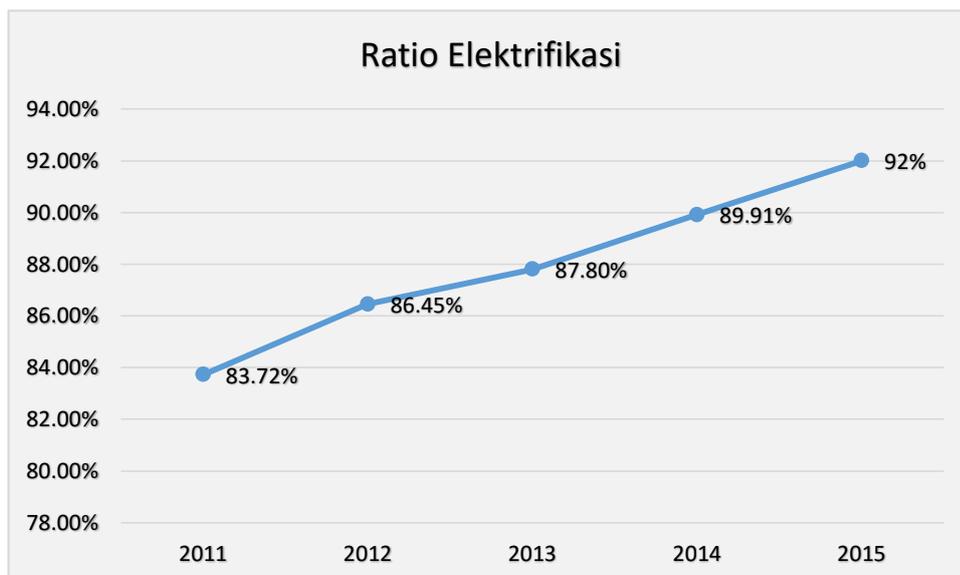
Tabel 2.58
Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air
Yang dikelola PLN PerseroWilayah SumutStatus Tahun 2015

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / DUSUN	KLASIFIKASI PEMBANGKIT	DAYA TERPASANG (KW)
1.	Simalungun	Tanah Jawa	Tonduhan	PLTM	2 x 200 = 400
2.	Pakpak Bharat	- Kerajaan	Kombih I	PLTM	2 x 750 = 1500
		sda	Kombih II	PLTM	2 x 750 = 1500
3.	Madina	Penyabungan	Batang Gadis	PLTM	2 x 450 = 900
4.	Humbahas	- Dolok Sanggul	Silang	PLTM	1 x 750 = 750
		- Dolok Sanggul	Sibundong	PLTM	1 x 750 = 750
5.	Tap. Utara	- Adian Koting	Raisan I	PLTM	1 x 750 = 750
		sda	Raisan II	PLTM	1 x 750 = 750
6.	Samosir	Pangururan	Boho	PLTM	1 x 200 = 200
7.	Dairi	Sumbul	Silalahi II	PLTA Renun	2 x 41.000 = 82.000
8.	Tap. Tengah	Sibolga	Sibuluan II	PLTA Sipansihaporas	1 x 50.000 = 50.000
			TOTAL	PLTM = 9 PLTA = 2	7.500 132.000

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

Penyediaan energi listrik di sisi pembangkit sangat terbantu oleh kebijakan PT. PLN (Persero) melakukan sewa pembangkit diesel (455 MW) yang tersebar di sektor Medan dan Belawan. Pada tahun 2015, daya mampu pasok pembangkit listrik cenderung membaik yaitu sebesar 1850 MW. Kondisi ini dikarenakan semakin stabilnya PLTU Pangkalan Susu (440 MW) dan PLTU Nagan Raya Aceh (220 MW).

Beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara pada tahun 2014 dan 2015 sudah mencapai masing-masing 1750 MW dan 1800 MW. Pada tahun 2014, kondisi ini tidak dibarengi dengan daya mampu pasok yang hanya sekitar 1500 MW, sehingga terjadi defisit listrik sekitar 250 MW. Pada tahun 2015, daya mampu pasok sudah mencapai 1850 MW sehingga sistem mempunyai cadangan sekitar 50 MW. Kondisi kelistrikan Sumatera Bagian Utara masih jauh dari kondisi ideal yaitu seharusnya memiliki cadangan listrik ideal 30 % dari beban puncak. Apabila beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara sekitar 1800 MW maka seharusnya cadangan daya listrik sudah mencapai sekitar 540 MW.



Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

Grafik 2.38
Grafik Kondisi Ratio Elektrifikasi Tahun 2011 - 2015

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa ratio elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup baik dari target tahun 2015 sebesar 91,08% tetapi dapat terealisasi sebesar 92%. Ratio elektrifikasi ini dihitung bukan hanya dari pembangkit listrik yang bersumber dari PT. PLN tetapi juga bersumber dari pembangkit yang dibangun oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Daya Mineral

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014 (year on year) meningkat sebesar 5,10 persen. Namun Pertumbuhan tersebut hanya 6.40% disumbang dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Tabel 2.59
Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Tahun 2011-2015 (y o y)

Tahun	Laju Pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	10.72	6.66
2012	11.9	6.45
2013	26	6.08
2014	5.33	5.23
2015	6.40	5.10

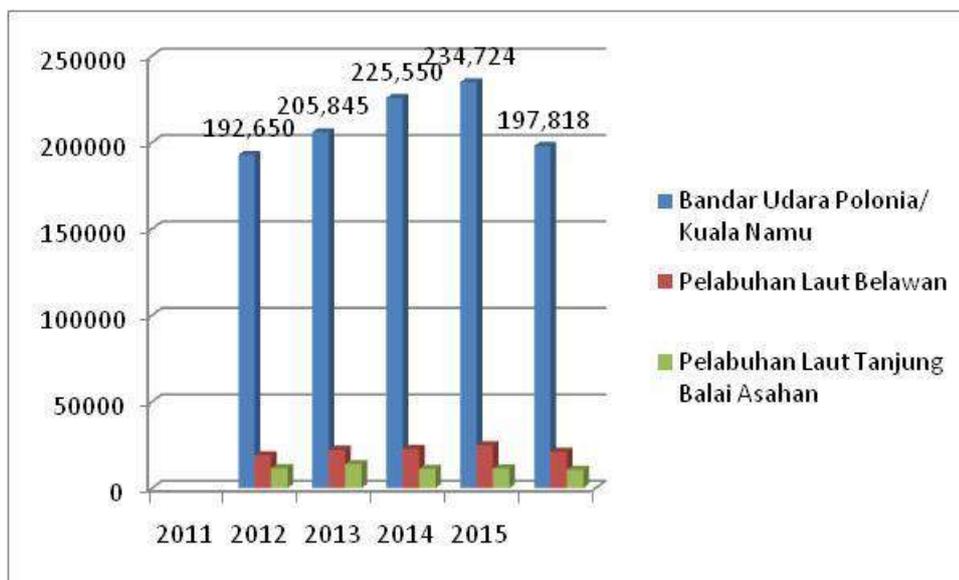
2.3.2.4 Pariwisata

Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPRNAS) Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan pariwisatanya. Salah satunya adalah Kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Salah satu faktor pendukung yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata adalah aksesibilitas menuju ke daerah wisata yang dirasa masih sangat kurang. Selain itu dukungan masyarakat pariwisata di Sumatera sangat diperlukan untuk peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Berikut ditampilkan jumlah kunjungan wisman ke Sumatera Utara dalam jangka waktu 5 tahun terakhir,

Tabel 2.60
Wisatawan Mancanegara yang datang Ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk (tahun 2011-2015)

Tahun	Bandar Udara Polonia/ Kuala Namu	Pelabuhan Laut Belawan	Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan	Jumlah Total
2011	192,650	18,975	11,501	223,126
2012	205,845	22,132	13,856	241,833
2013	225,550	22,631	11,118	259,299
2014	234,724	24,769	11,344	270,837
2015	197,818	20,916	10,554	229,288

Sumber : BPS Prov.Sumatera Utara



Grafik 2.39
Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara (tahun 2011-2015)

Secara kumulatif, selama Januari-November 2015 jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Utara mencapai 205.193 kunjungan, yang berarti menurun 13,72 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2014. Persentase penurunan tertinggi terjadi di pintu masuk Pelabuhan Laut Belawan yaitu sebesar 14,42 persen, melalui pintu masuk Bandar Udara Kuala Namu Internasional turun 14,06 persen, dan melalui pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan turun sebesar 4,74 persen.

Tabel 2.61
Jumlah Hotel Menurut Kelas di Sumatera Utara dari Tahun 2011 – 2015

No.	Kelas	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Melati	712	712	693	717	N/A
2	Bintang 1	24	24	23	20	N/A
3	Bintang 2	20	23	26	31	N/A
4	Bintang 3	14	18	25	32	N/A
5	Bintang 4	12	11	16	16	N/A
6	Bintang 5	6	7	6	7	N/A
Jumlah		788	795	789	823	N/A

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada November 2015, TPK tertinggi terjadi pada hotel bintang 5 yaitu mencapai 60,75 persen, sedangkan TPK hotel terendah terjadi pada hotel bintang 1 yang hanya mencapai 39,88 persen. Jika dibandingkan TPK bulan Oktober 2015 kenaikan terbesar terjadi pada hotel bintang 2 yaitu sebesar 8,70 poin dan hotel bintang 3 naik 4,05 poin. Sedangkan untuk hotel bintang 5 turun sebesar 7,49 poin, hotel bintang 4 turun 2,19 poin dan hotel bintang 1 mengalami penurunan sebesar 1,54 poin.

Rata-rata lama menginap tamu asing bulan November 2015 yang mencapai 1,63 hari, mengalami penurunan 0,32 poin dari rata-rata lama menginap tamu asing bulan November 2014 yang mencapai 1,9 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin atau naik dari 1,56 hari pada bulan November 2014 naik menjadi 1,62 hari pada bulan November 2015. Secara gabungan, rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia pada bulan November 2015 yang mencapai 1,62 hari, mengalami penurunan sekitar 0,01 poin jika dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia periode yang sama tahun sebelumnya

Tabel 2.62
Rata-rata Lama Inap Tamu Hotel
(tahun 2011-2015)

Tahun	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	Rata-rata Bintang
2011	1.54	1.37	1.86	2.08	1.62	1.69
2012	1.38	1.35	1.47	1.92	1.62	1.55
2013	1.57	1.34	1.39	1.94	1.7	1.59
2014	1.2	1.37	1.8	1.79	1.69	1.57
2015 *)	1.3	1.69	1.62	1.85	1.45	1.58

2.3.2.5 Kelautan dan Perikanan

a. Perikanan tangkap

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan produksi perikanan tangkap untuk dapat dikonsumsi di dalam negeri serta di ekspor ke luar negeri. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011-2015.

Tabel 2.63
Kondisi Produksi Perikanan Tangkap
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2011-2015

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penangkapan di Laut	379.770	391.352	508.360,6	515.325,00	485.165,20
Penangkapan di Perairan Umum	28.979	32.892	46.950,4	50.471,27	112.561,70
JUMLAH	408.748	424.244	555.311	565.796,27	597.337,90

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu, 2016. (Data diolah)

Dari tabel di atas diketahui produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 meningkat sebesar 5,57 % dibanding produksi perikanan pada tahun 2014. Dengan rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar 10,54 %.

b. Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seperti tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.64
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2011-2015

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Perikanan Budidaya	126.386,40	143.447	193.750	204.744,20	198.737,1

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,93 % dibanding produksi tahun 2014. Sedangkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar 12,83 %.

Sementara itu menurut data volume dan nilai ekspor serta konsumsi ikan/kapita penduduk Sumatera Utara juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.65
Produksi Ekspor, Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2011-2015

TAHUN	EKSPOR		KONSUMSI IKAN/KAPITA (KG)
	Volume (ton)	Nilai (US \$)	
2011	51.508.65	213.663.776.33	34.66
2012	52.719.29	225.434.288.08	31.92
2013	56.185.92	250.900.694.10	38.95
2014	57.314.05	299.591.121.35	40.10
2015	56.013.02	250.805.264,17	41.30

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu, 2015. (Data diolah)

Volume ekspor perikanan pada tahun 2015 menurun sebesar 1.301,03 ton atau 2,27 % dibanding tahun 2014. Begitu juga untuk konsumsi ikan/kapita tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 1.20 kg/kapita atau meningkat sebesar 2.99 %. Naiknya konsumsi ikan/kapita pada masyarakat menjadi indikator kenaikan gizi masyarakat terutama untuk sumber protein.

Tabel 2.66
Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Ekspor Ikan (ton / thn)	Produksi ikan (ton / thn)
2011	51.505.65	535.134.60
2012	52.719.29	567.691.10
2013	56.185.92	758.972.69
2014	57.314.05	773.228.8
2015	56.013.02	796.075,0

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu, 2015. (Data diolah)

2.3.2.6. Perdagangan

- a. Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB

Kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB adalah perbandingan antara nilai kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap jumlah PDRB dalam bentuk persentase. Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB pada tahun tertentu. Tabel berikut menjelaskan kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB untuk tahun 2011-2015 di Propinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.67
Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap ADHK 2010 dan ADHB Tahun 2011 s/d 2015
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	PDRB (ADHK 2010)	ADHK 2010		PDRB (ADHB)	ADHB	
		(JutaRp.)	%		(JutaRp.)	%
2011	353,147.59	60,589.05	17.16	377,037.08	64,308.77	17.1
2012	375,924.40	65,384.60	17.39	417,120.44	70,891.92	17.0
2013	398,727.14	69,025.20	17.31	469,464.02	78,324.82	16.7
2014	419,573.31	73,817.64	17.59	521,954.96	89,597.00	17.2
2015*	440,955.85	77,037.55	17.47	571,722.01	99,646.14	17.4

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah Nilai Ekspor suatu daerah selama satu tahun dikurangi dengan jumlah Nilai Impor selama satu tahun. Untuk menggambarkan nilai ekspor bersih perdagangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.68
Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2011-2015
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	EKSPOR		IMPOR		Neraca (000 US\$)
	BeratBersih	Nilai FOB	BeratBersih	Nilai CIF	
	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	
2011	8.161.003	11.883.268	6.718.063	4.953.462	6.929.806
2012	8.695.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185
2013	9.275.859	9.597.907	6.922.414	5.108.737	4.489.170
2014	9.087.526	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598
2015	9.008.220	7.752.786	6.854.082	3.988.411	3.764.377

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2.3.2.7. Perindustrian

Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dari tahun 2011-2015 sangat fluktuatif, bahkan cenderung mengalami penurunan di dua tahun terakhir. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan hanya mencapai 3.52 persen, meningkat dibanding tahun 2014 yang hanya 2,97 persen.

Tabel 2.69
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB
Provinsi Sumatera Utara 2011-2015

Tahun	Kontribusi						Laju Pertumbuhan ADHK
	ADHK 2010			ADHB			
	PDRB (ADHK 2010)	Sektor Industri Pengolahan (Rp. Milyar)	%	PDRB	Sektor Industri Pengolahan (Rp. Milyar)	%	
2011	353,147.59	72,815.22	20.62	377,037.08	79,947.92	21.2	3.22
2012	375,924.40	76,922.41	20.46	417,120.44	86,171.93	20.7	5.6
2013	398,727.14	80,648.61	20.23	469,464.02	93,241.47	19.8	4.84
2014	419,573.31	83,042.09	19.79	521,954.96	104,224.00	19.97	2.97
2015	440,955.85	85,968.40	19.49	571,722.01	30,066.92	20.21	3.52

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat capaian indikator kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia :

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per-kapita. Nilai tukar petani dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Perbulan selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.70
Angka Konsumsi RT perkapita/bulan Tahun 2009 – 2013

NO	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Total Pengeluaran RT	432.389	499.694	564.565	599.060	656.133
	a. Pangan	236.917	267.180	316.343	344.467	363.363
	b. Non Pangan	195.472	232.514	248.222	254.593	292.770
2	Jumlah RT	3.027.500	3.037.716	3.083.199	3.131.600	3.168.566
3	Rasio (Pengeluaran RT/ Jumlah RT)	14,28	16,44	18,31	19,13	20,71

Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah)

b. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengidentifikasi kesejahteraan petani.

Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan kondisi Nilai tukar Petani Sumatera Utara tahun 2011-2015 :

Tabel 2.71
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	138.20	141.49	147.08	112,71	122,73
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	133.64	139.12	147.83	112,62	121,98
3.	NTP	103,42	101,71	99,49	100,08	100,62

Keterangan : *Desember 2015

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 5 (lima) tahun terakhir atau selama periode 2011-2015 NTP Sumatera Utara tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan pada angka 99-103. Nilai Tukar Petani pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0.44. dan jika dibandingkan dengan kondisi November 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 1,09 dari 99,54. Kenaikan Nilai Tukar Petani pada Desember 2015 disebabkan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.72
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	232.51 4	248.22 2	254.59 3	292.77 0	300.33 5
2.	Total Pengeluaran RT	499.69 4	564.56 5	599.06 0	656.13 3	699.26 7
3.	Rasio	46.53	43.97	42.50	44,62	42,95

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Data diolah)

2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian Indikator Iklim Berinvestasi dilihat dari lama pengurusan ijin dan kondisi keamanan daerah (angka kriminalitas dan aksi demonstrasi) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Lama Proses Perijinan

Dalam hal proses perizinan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan Peraturan Gubernur no. 55 Tahun 2010. tentang pedoman. tata cara permohonan dan jenis perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.

Dalam pergub tersebut telah diatur tentang penerbitan perizinan dan non perizinan lama proses nya 10 hari. terkecuali perizinan yang terkait dengan penataan ruang. lingkungan hidup. keamanan. keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan perundang-undangan.

b. Angka kriminalitas

Tabel 2.73
Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

No	Jenis Kriminal	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kasus Narkoba	2.802	2.718	2.728	2.432	2.713
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	105	130	129	133	118
3	Jumlah Kasus Perkosaan	214	207	113	124	305
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	6.210	6.836	6.971	6.898	7.445
5	Jumlah Kasus Pencurian	9.040	10.355	11.639	10.783	10.797
6	Jumlah Kasus Penipuan	1.707	2.317	2.808	2.316	1.877
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	22	13	31	17	12
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	35.336	41.806	47.156	43.234	43.652
9	Jumlah Penduduk	13.201.715	13.339.353	13.103.596	13.215.401	13.326.307
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0.26%	0.31%	0.35%	0.32%	0.33%

Sumber : SUDA 2014

c. Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.74
Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara, 2009 – 2012

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Bidang Politik	243	193	84	64
2	Ekonomi	82	47	55	211
3	Sosial Budaya	66	279	70	309
4	Kasus Pemogokan Kerja	82	72	60	47
5	Jumlah Unjuk Rasa	473	591	269	631

Sumber : POLDA SUMUT, 2013

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada tren peningkatan gangguan keamanan dari tahun 2009 – 2013 dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi dan gangguan kenyamanan berupa aksi demonstrasi yang berakibat negatif terhadap ini daerah ini.

Hal ini perlu diantisipasi dan dukungan dari semua pihak, baik aparat keamanan, maupun masyarakat untuk menjaga agar kondisi keamanan tetap kondusif, sehingga menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio ketergantungan usia tidak produktif, yang menunjukkan semakin baiknya struktur angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel ini memperlihatkan data rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.75
Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan
Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	4.139.648	3.461.930	4.344.275	4.381.084	4.311.313
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	517.226	568.777	509.599	513.793	514.899
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	4.656.874	4.030.707	4.853.874	4.894.877	
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	6.076121	6.379.748	6.105.409	5.950.598	8.500.095
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,76	0,63	0,79	0,82	

Sumber : BPS, 2013

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel rangkuman berikut ini :

Tabel 2.76
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Sumatera Utara

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	PDRB ADHB (Rp. Trilyun)	377,04	417,12	469,46	521,95	571,72	554,03	
1.2.	PDRB ADHK (Rp. Trilyun)	353,15	375,93	398,78	419,57	440,95	171,11	
1.3.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,66	6,45	6,08	5,23	5,90	6,48	
1.4.	Laju inflasi provinsi (%)	3,67	3,86	10,18	8,17	3,24	4,25	
1.5.	PDRB per kapita ADHB (Rp.Juta/Jiwa)	30,31	31,11	34,54	23,99	26,40	40,96	
1.6.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,42	101,71	99,49	100,08	100,62	102,99	<
1.7.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,051	0,049	0,045				
1.8.	Persentase penduduk miskin (%)	10,83	10,41	10,39	9,85	10,79	9,31	>
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf (%)	97,32%	97,46%	97,65	97,51	-		-
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,85	8,91	-		-		-
1.3.	Angka partisipasi kasar							-
1.3.1.	PAUD (%)	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.3.2.	SD/MI (%)	114,20	104,56	104,56	106,26	-		-
1.3.3.	SMP/MTs (%)	89,83	89,02	89,02	88,55	-		-
1.3.4.	SMA/SMK/MA (%)	72,69	79,69	79,69	80,58	-		-
1.4.	Angka Partisipasi Murni							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	95,33	91,46	91,46	93,26	-		-
1.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	74,76	67,96	67,96	70,51	-		-
1.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	55,72	57,83	57,83	60,02	-		-
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi, dilihat dari Angka Kematian Bayi /1000 kelahiran hidup	23,0	23,0	23	22	-		=
2.2.	Angka Kematian Ibu dilihat dari Kematian Ibu Melahirkan/100.000 kelahiran hidup	268,0	250,0	250	285	-		>
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,8	72,0	-	69,65	-		>
2.4.	Persentase balita gizi buruk (%)	21,4	20,0	-	22,50	-		=
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	91,99	93,63	93,80	93,40	-		>
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.2.	Pendidikan dasar							
1.2.1	APK SD + MI + Paket A	114,20	104,56	104,56	106,26	-		=
1.2.2	APM SD + MI	95,33	91,46	91,46	93,26	-		=
1.2.3	APK SMP + MTs + Paket B	89,83	89,02	89,02	88,55	-		=
1.2.4	APM SMP + MTs	74,76	67,96	67,96	70,51	-		=
1.2.5	APK SMA + MA + Paket C	72,69	79,69	79,69	80,58	-		=
1.2.6	APM SMA	55,72	57,83	57,83	60,02	-		=
1.2.1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97,32	97,46	-	97,51	-		>
1.2.2	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,85	8,91	-		-		=
1.3.	Fasilitas Pendidikan:					-		
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Unit)				-	-		-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (Unit)				-	-		-
1.4.	Angka Putus Sekolah				-	-		-
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	1.03	0.93		-	-		-
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	4.60	4.14		--	-		--
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ /MA (%)	6.21	5.59		-	-		-
1.5.4	Angka Putus Sekolah (APS) SMK (%)	2.15	1.94			-		
1.5.	AngkaKelulusan:				-	-		-
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	205.289	506.881	278,219	286,681	-		-
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	171.304	172.973	242,182	282,212	-		-
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	76.115	73.393	120,090	117,254	-		-
1.6.4	Angka Kelulusan (AL) SMK	251.134	74.286	93,900	116,884	-		-
1.6.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 (orang)	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.6.6	S2 (orang)	667	732		-	-		
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka Kematian Bayi /1000 KLH	23.0	22,0	222	22	-		>
2.2.	Angka Kematian Ibu/100.000/KLH	305	295	285	275	-		<
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,6	70,4	71,2	71,30	-		<
2.4.	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang	21,80	21,20	20,6	20	-		>
2.5.	Rasio posyandu per satuan balita	1:55,71	1:24.68 1		-	-		
2.6.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:25.33 2	1:24.68 1		-	-		-
2.7.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:69.91 8	1:67.61 6		-	-		-
2.8.	Rasio dokter per satuan penduduk	1:14.67	1:17,64		-	-		-
2.9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:25,61	1:29,69		-	-		-
2.10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%.		-	-		-
2.11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	64,20%	86,73%		-	-		-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
2.12.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	NA	65,78%		-	-		-
2.13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%		-	-		-
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%	100%		-	-		-
2.15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		-	-		-
2.16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%		-	-		-
2.17.	Cakupan kunjungan bayi	69,82%	76,82%		-	-		-
2.18.	Cakupan puskesmas	1:25.33 2	1:24.68 1		-	-		-
2.19.	Cakupan pembantu puskesmas	1:6.918	1:7.137		-	-		-
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	40,86	44,11	41,74	43,47	39,04		
3.2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang (%)	37,99	31,32	24,85	26,13	35,38		
3.3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan (%)	9,53	13,42	17,00	13,52	8,50		
3.4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat (%)	11,64	11,15	16,41	16,88	17,08		
3.5.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	40,86	44,11	41,74	43,47	39,04		
3.6.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1: 381	1: 381		-			
3.7.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	2.752,0 4	2.752,0 4	3048,50	3048,50	-		
3.8.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km)	32.115, 92	33.078, 18	33.078,1 8	33.383, 66	-		
3.9.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	29,08	38,70	38,25	36,88			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
3.10.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	39.149	52.199	53.069	52.199	53.330	62.639	<
4.	Perencanaan Pembangunan							
4.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Dokumen)	-	-	-	-	-		=
4.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	-	-	-	-		=
4.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1	-	-	-	-		=
4.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	1	1	-	-	-		=
5.	Lingkungan Hidup							
5.1.	Persentase Penduduk berakses airminum (%)	85	-	-	-	-		
5.2.	Penegakan hukum lingkungan (kasus)	-	-	-	-	-		
6.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-				
6.1.	Rasio KDRT (kasus)	18	17	17	20	-		
6.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57%	57%	60,85 %	56,10 %	-		
7.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
7.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,07	3.8	3.8	3.0	-		
7.2.	Jumlah Akseptor KB	405,961	406.638	424.583	2.210.958	-		
7.3.	Cakupan peserta KB aktif	1.429.414	1.367.255	1.463.520	1.423.051	-		
7.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	1.048.191	1.059.065	198.538	1.111.883	-		
8.	Sosial							
8.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (UPT Layanan Sosial)	19	19	19	19	-		
8.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (jenis)	23	23	26	26	-		
8.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (program)	6	6	6	6	-		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
9.	Ketenagakerjaan							
9.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	77,10	72,09	69,41		-	
9.2.	Pencari kerja yang ditempatkan (org)	52.974			-	
9.3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,43	6,37	6,20	6,00	-		<
10.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
10.1.	Persentase koperasi aktif (%)	58,57	58,60	59,8	56,8	-	
10.2.	Jumlah UKM non BPR (Unit)
10.3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	95	95				
10.4.	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	2.151.729				
11.	Penanaman Modal							
11.1.	Penanaman Modal							
11.2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	127	123	156	255	221	126	>
11.3.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	7.930.256,26	9.165.066,19	13.588.420,60	11.621.593,01	19.863.619,80	12.000.000,00	>
11.4.	Daya serap tenaga kerja (%)	105,04	174,71	120,89	125,24	86,88	113	<
12.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta) (%)	3.008.907,99 61,14%	1.234.809,93 15,57%	4.423.354,41 48,26%	(1.966.827,59) -14,47%	8.242.026,79 70,92%	45%	>
12.1.	Ketahanan Pangan							
12.2.	Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	-	1	-				
12.2.	Ketersediaan pangan utama							
12.2.	Padi (ton) GKG	3.607.403	3.715.514	3.727.250	3.631.039	3.866.492	3.935.668	<
12.2.	Jagung (ton)	1.294.645	1.347.124	1.183.012	1.159.795	1.478.584	1.697.315	<
12.2.	Kedele (ton)	11.426	5.419	3.229	5.705	6.583	15.578	<
13.	Daging Sapi (ton)	131.043,30	135.911,00	136.207,69	141.639,97	143.741,80	153.239,65	<
23.1.	Statistik							
	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	>
14.	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Ada	Ada	Ada				
15.	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	4	4	4	5	2	2	=
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5/20	5/34	5/34	8/33	8/33	8/33	=
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6/2	15/2	15/2	200/12	200/12	200/12	=
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	23	15	15	15	15	35	<
25.6.	Pameran/expo	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	4	<
16.	Perpustakaan							
26.1.	Jumlah perpustakaan	31 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota			
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	589.553	593.834	594.443	99.771			
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	326,170	652.780	679.289	699.204			
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas Padi (kw/ha)	47,62	48,56	50,17	50,64	51,28	50,5	>
1.2.	Produktivitas Jagung (kw/ha)	50,71	55,41	55,87	57,82	61,05	58,2	>
1.3.	Produktivitas Kedele (kw/ha)	10,01	9,90	10,33	11,36	12,01	10,9	>
1.4.	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) ADHB 2010	25,42	24,9	24,5	23,27	22,01		
1.5.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	-	-	-	-			
1.6.	Kontribusi sektor perkebunan PDRB	-	-	-	-			
1.7.	Kontribusi sektor peternakan	-	-	-	-			
1.8.	Kontribusi sektor perikanan	2,58	2,53	2,50	-	-		
1.9.	Kontribusi sektor kehutanan	1,21	1,15	1,12	-	-		
2.	Kehutanan							
2.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,21	1,15	1,12	-	-		
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1.	Kontribusi Kategori pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB ADHB	1,07	1,2	1,4	1,33	1,31	1,36	<
4.	Pariwisata							
4.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
5.	Kelautan dan Perikanan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
5.2.	Produksi perikanan	535.134,60	567.691,00	758.965,69	770.540,47	796.075,00		
5.3.	Konsumsi ikan	34,66	31,92	38,95	40,10	41,30		
6.	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHB	17,1	17,0	16,7	17,1	17,20	20,12	<
6.2.	Volume Ekspor (Juta ton)	8,16	8,69	9,275	9,09	9,01		
6.3.	Nilai Ekspor (Milyar US\$)	11,88	10,39	9,597	9,36	7,75		
6.4.	Volume Impor (Juta ton)	6,71	6,81	6,92	7,39	6,85		
6.5.	Nilai Impor (Milyar US\$)	4,95	5,16	5,10	5,05	3,99		
6.6.	Nilai Bersih Perdagangan (Milyar US\$)	6,92	5,29	4,48	4,31	3,76		
7.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHK 2010)	21,2	20,7	19,8	19,9	20,61	22,76	<
ASPEK DAYA SAING DAERAH		ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	499.694	564.565	599.060	656.131			
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp.)	232.514	248.222	254.593	292.770			
1.3.	Produktivitas total daerah							
2.	Pertanian							
2.1.	Nilai tukar petani	103,42	101,71	99,49	100,08	100,62	102,99	
Fokus Iklim Berinvestasi		Fokus Iklim Berinvestasi						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas yang tertangani				-	-		
1.2.	Jumlah demo	6.285		-	-		
1.3.	Lama proses perijinan	581	269	631	-	-		
1.4.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha			-	-		
1.5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa				-	-		
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3				-	-		
1.2.	Rasio ketergantungan	0,63	0,79	0,82	-	-		

2.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah

Secara umum gambaran hasil Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah secara umum dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel 2.77
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2014	2015		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB (Harga Berlaku)	Triliun Rp	523,77	571,72	47,95	648,78	739,38
2	PDRB (Harga Konstan)	Triliun Rp	419,65	440,96	21,31	465,85	492,64
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu	%	11,18	9,53	-1,65	13,48	13,96
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun Dasar 2010	%	5,23	5,10	-0,13	5,65	5,75
5	Tingkat Inflasi	%	8,17	3,24	-4,93	4 ± 1	4 ± 1
6	Struktur PDRB						

	Pendekatan Produksi Atau Lapangan Usaha :						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	23.27	22.01	-1.262	21.35	20.79
	Pertambangan dan Pengecilan	%	1.32	1.35	0.031	1.46	1.57
	Industri Pengolahan	%	19.97	20.21	0.245	20.17	20.28
	Pengadaan Listrik, Gas	%	0.11	0.10	-0.014	0.09	0.08
	Pengadaan Air	%	0.10	0.10	0.004	0.10	0.10
	Konstruksi	%	13.31	13.61	0.301	14.09	14.53
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	17.17	17.43	0.263	17.20	16.65
	Transportasi dan Pergudangan	%	4.97	4.99	0.019	5.15	5.39
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	2.35	2.41	0.054	2.46	2.45
	Informasi dan Komunikasi	%	1.97	1.95	-0.025	1.80	1.74
	Jasa Keuangan	%	3.27	3.35	0.081	3.43	3.52
	Real Estate	%	4.37	4.50	0.132	4.61	4.72
	Jasa Perusahaan		0.93	0.96	0.031	0.99	1.03
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	3.61	3.71	0.106	3.73	3.76
	Jasa Pendidikan	%	1.90	1.87	-0.029	1.85	1.83
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0.88	0.93	0.050	0.98	1.04
	Jasa lainnya	%	0.52	0.53	0.015	0.54	0.54
7	Produktivitas Sektoral yang merupakan Rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap Sektor terhadap jumlah Tenaga Kerja di sektor yang bersangkutan						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta			-	-	-
	Pertambangan dan Pengecilan	Juta					
	Industri Pengolahan	Juta					
	Pengadaan Listrik, Gas	Juta					
	Pengadaan Air	Juta					
	Konstruksi	Juta					
	Perdagangan Besar dan	Juta					

	Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor						
	Transportasi dan Pergudangan	Juta					
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta			-	-	-
	Informasi dan Komunikasi	Juta			-	-	-
	Jasa Keuangan	Juta					
	Real Estate	Juta					
	Jasa Perusahaan	Juta			-	-	-
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Juta			-	-	-
	Jasa Pendidikan	Juta			-	-	-
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta			-	-	-
	Jasa lainnya	Juta			-	-	-
					-	-	-
8	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)		1,65		-	-	-
9	Jumlah Penduduk Miskin	Juta Jiwa			-	-	-
10	Tingkat Pengangguran	%	6,08		-	-	-
11	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	- Pendapatan Perkapita	Rp Juta	29,59		-	-	-
	- Kemampuan Investasi	Rp Triliun	87,11		-	-	-
	- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)		0,354		-	-	-
	- Besaran IPM (indeks Pembangunan Manusia)	-	75,57		-	-	-
12	Berbagai Macam Besaran Rasio dan Perbandingan-perbandingan				-	-	-
	- Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,12		-	-	-
	- Biaya Pendidikan, Kesehatan, Penelitian dan sebagainya terhadap PDRB	%	0,15		-	-	-
	- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	1,81		-	-	-

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun 2014-2015.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun lalu (2014 - 2015), didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 yang merupakan penjabaran tahun ke-tiga dari masa bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun 2017. Selain itu untuk mereview RPJMD dan RKPD, dengan memperhatikan dokumen RKPD tahun 2015. Perkembangan capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2014-2015) adalah sebagai berikut :

2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2015

Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu : PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi.

Tabel 2.78
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014
Provinsi Sumatera Utara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
I. Wajib																	
1.	Pendidikan	1.1 Indeks Pendidikan			60												
		1. APK PAUD			112,59											55,67	
		2. APK SD + MI + Paket A	111,4	112,59	92,66		111,4					100				108,11	<
		3. APM SD + MI	92,66	92,66	105,01		92,66					100				96,40	>
		4. APK SMP + MTs + Paket B	101,19	105,01	97,52		101,19					100				96,35	<
		5. APM SMP + MTs	93,29	97,52	89,99		93,29					100				85,90	<
		6. APK SMA + MA + SMK	82,46	89,99	74,57		82,46					100				92,28	<
		7. APM SMA	68,5	74,57	1,54		68,5					100				80	<
		8. Buta Aksara	1,79	1,67	10,07		1,54					86,03				99,77	>
		9. Rata - Rata Lama Sekolah (tahun)	9,66	10,07			9,66					100				12	<
2.	Kesehatan	2.1 Indeks			22												

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		Kesehatan															
		1. Angka Kematian Bayi (/1000 KLH)	24	23	275		22,0					91,7				19	>
		2. Angka Kematian Ibu (AKI) (100.000 KLH)	295	285	72		250,0					118,0				235	<
		3. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	70,4	71,2	20		72,00					98,9				72	=
		4. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang (%)	21,20	20,6			20,9					101,4				20	>
3	Pekerjaan Umum																
	a. Sumber Daya Air	3.1															
		Irigasi (Ha)															
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	80.659	88.725	73.326	72.934	73.326	73.318	80.000	73.318	75.201	90,94	82,64	98,04	103.10	90	<
		2. Perbaikan/ Peningkatan	7.480	8.228	9.051	21.712	6.040	5.599	9.051	10.225	12.062	80,75	68,05	100	55.56	61.86	<
		3.2															
		Rawa (Ha)															
		1. Pemeliharaan	67.905	74.696	82.166	55.832	61.732	55.232	80.413	55.232	52.832	67,9	74,69	82,16	103.	74,91	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		(rutin tiap tahun)													10		
		2. Perbaikan/Peningkatan	4.620	5.590	5.590	41.046	2.604	1.135	5.560	5.560	7.000	56,36	22,33	100	55,56	59,30	<
		3,3 Sungai (m)															
		1. Perkuatan tebing	11.550	12.705	13.976	4.426	12.261	5.814	11.976	4.060	3.090	106,15	45,76	85,68	69,81	41,60	<
		2. Normalisasi/pelurusan	10.495	11.495	12.645	19.469	16.345	42.070	10.000	15.000	36.300	156,41	36,59	79,87	186,45	332,70	>
		3. Pembangunan / Perbaikan tanggul	16.775	18.453	20.298	19.469	17.615	14.430	20.296	14.800	36.300	115,5	78,20	100	186,45	71,09	<
		3,4 Penyediaan Air Baku/Embung (unit)	4	4	4	20	9	7	4	7	1	225,0	175	100	5	175	>
	b. . Bina Marga	4.1 Kondisi Jalan dan Jembatan Bertambah Baik, Pelayanan Lalu lintas menjadi Lebih Baik (km)															
		1. Pembangunan Jalan (Km)	121,00	133,10	146,41	241,54	320,70	208,93	100,55	147,30	203,37	172,67	75,54	100,47	84,20	63,41	>
		2. Penggantian Jembatan (m)	374,00	411,40	452,54	402,74	475,90	599,10	379,00	308,00	612,70	160,19	91,46	68,06	152,13	128,75	>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		4.2 Berkurangnya Jalan - jalan berlobang	37,90	41,68	45,85	45,00	54,00	7,45	16,80	15,70	20,70	19,70	40,31	34,24	46,00	38,33	<
		1. Pemeliharaan Berkala Jalan (Km)	2.552	2.807,20	3.082,92	3.017,47	3.005,00	2.280,93	2.203,41	2.856,33	2.145,70	89,40	78,49	92,65	71,11	71,40	<
		2. Pemeliharaan Rutin Jalan (Km)	15.015	16.516,50	18.168,15	9.054,28	7.988,04	10.101,93	10.237,16	9.433,10	9.504,28	67,30	61,98	51,92	100,00	113,35	<
		3. Pemeliharaan Rutin Jembatan (m)	121,00	133,10	146,41	241,54	320,70	208,93	100,55	147,30	203,37	172,67	75,54	100,47	84,20	63,41	>
	c. Perhubungan	5.1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan															
		1. Tersedianya alat keselamatan pelayaran (buah)	-	-	1.680	1.350	500	-	1.472	-	-	-	-	-	-	-	<
		5.2 Meningkatkan Keselamatan															
		1. Tersedianya Rambu Lalu Lintas (buah)	350	500	1.670	1.000	800	190	216	375	1.100	54,29	43,20	22,46	110,00	137,50	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		2. Tersedianya Delineator (buah)	1.000	1.900	2.075	4.000	800	545	700	490	3.000	54,45	36,84	23,61	23,33	375,00	<
		3. Tersedianya Guardrail (buah)	1.500	1.000	4.275	4.000	800	745	-	1.550	1.800	49,67	-	56,88	45,00	225,00	<
		4. Tersedianya APILL/ Warning Light (lokasi)	3	5	13	4	5	-	2	1	3	-	40,00	7,69	75,00	60,00	<
		5. Tersedianya Paku Jalan (buah)	-	-	2.085	4.000	96.375	-	1.080	1.005	-	-	-	48,20	-	-	<
		6. Tersedianya Marka Jalan (m)	1.500	2.000	9.487	335.000	915.563	2.080	1.247	1.990	124.500	138,80	62,35	20,98	37,16	13,60	<
		7. Tersedianya LPJU (buah)	-	-	-	45	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	<
		8. Tersedianya Cermin Tikungan (buah)	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
		9. Tersedianya Rambu Perairan (buah)	50	100	100	50	200	-	-	-	20	-	-	-	40,00	10,00	<
		10. Tersedianya	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16= (12/7)	17= (12/8)	18
		ZOSS (lokasi)															
	d. Energi Listrik	4.1 Rasio Elektifikasi Desa	-		90		80,85	83,63						90,26	90,26		
		4.1 Rasio elektrifikasi rumah tangga	-		80		78,00	86,45						89,91	89,91		
I.	Pilihan																
1.	Pertanian	1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya															
		a. Padi															
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/Tahun (Kg)	132,79	132,12	131,46	-	-	134,00	132,60	130,61	-	100,91	97,22	99,35	-	-	-
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.782,837	1.795,953	1.808,895	-	-	1.755,881,86	1.752,362	1.740,549	-	98,49	97,57	96,22	-	-	-
		3. Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi (Ton)	2.111,039	2.159,846	2.209,782	-	-	2.042,665,05	2.158,612	2.338,4762	-	96,76	99,94	105,82	-	-	-
		4. Surplus/Penyakit	328,20	363,89	400,88	-	-		406,25	597,92	-	87,38	111,6	149,1	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		ngga per Tahun (Ton) (4-3)	2	3	7			286.78 3,00	0	7			4	5			
		5. Produksi GKG	3.727.4 13	3.813.5 91	3.901.7 61	3.771.5 45	4.087.42 0	3.607.0 36,00	3.715.5 13	3.727.2 49	3.626.9 68	96,77	97,43	95,53	96,1 7	88,73	<
		6. Luas Panen (Ha)	841.98 0	854.60 9	867.42 8	-	-	757.42 8,00	765.09 9	742.96 8	-	89,96	97,43	85,65	-	-	-
		7. Produktivitas (Kw/Ha)	44,27	44,62	44,98	49,9	51,3	47,62	48,56	50,17	50,64	106,4 8	89,53	111,5 3	101, 48	98,71	<
		8. Luas Tanam (Ha)	859.16 3	872.05 0	885.13 1	-	-	757.42 8,00	769.17 4	739.04 0	-	88,16	88,21	83,49	-	-	-
		b. Jagung															
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61.492	61.615	61,739	-	-		61.615	60.820			100,0 0	98,51	-	-	-
		2. Kebutuhan (Konsumsi + Industri) per Tahun (Ton)	825.60 9	837,53 4	849.50 4	-	-		873.50 3	904.23 6**	-		104,2 9	106,4 4	-	-	-
		3. Surplus/Penyanga ngga per Tahun (Ton)	194.54 0	217,52 9	241.66 9	-	-		473.62 1	278.77 5	-		217,7 3	108,4 1	-	-	-
		4. Produksi Jagung (Ton)	1.020.1 49	1,055,0 63	1.091.1 73	1.529.6 36	1.831.82 0	1.294.6 45	1.347.1 24	1.183.0 11	1.159.6 98	126,9 1	127,6 8	73,38	75,8 1	63,31	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		5. Luas Panen (Ha)	274.632	281,498	288.536	-	-	255.291	243.098	211.750	-	92,96	86,36	147,72	-	-	-
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	37,15	37,48	37,82	56,5	59,9	50,71	55,41	55,87	57,82	136,50	147,84	74,15	102,33	96,53	<
		7. Luas Tanam (Ha)	280.237	287,243	294.424	-	-	262.079	253.234	218.319	-	93,52	88,16	108,41	-	-	-
		c. Kedele															
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4,447	4,452	4,456	-	-		4,452	4,830				108,39	-	-	-
		2. Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	59.710	60,512	61.316	-	-		4.730	64.532				105,25	-	-	-
		3. Impor/Surplus per Tahun (Ton *)	(19,379)	(14,374)	(9.366)	-	-		689	(61.313)				654,63	-	-	-
		4. Produksi Kedele (Ton)	40.337	46,138	51.950	14.131	16.687	11.426	5.419	3.229	5.705	28,33	11,75	6,22	40,37	34,19	<
		5. Luas Panen (Ha)	34.300	39,200	44.100	-	-	11.413	5.475	3.126	-	33,27	13,97	7,09	-	-	-
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	11,76	11,77	11,78	10,5	11,3	10,01	9,90	10,33	11,36	85,12	84,11	87,69	108,19	100,53	>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		7. Luas Tanam (Ha)	35.000	40,000	45.000	-	-	14.915	5.450	4.175	-	42,61	13,63	9,28	-	-	-
		1.2 Produksi tanaman perkebunan (ton) *)															
		1. Perkebunan Rakyat	5.621.653,58	5.766.437,79	5.914.635,24	6.405.697,46	7.090.026,31	5.851.971	6.088.712,25	6.372.946,65	6.456.154,54	104,09	105,59	107,75	100,79	91,06	<
		2. PTPN	5.006.924,07	5.135.602,02	5.267.586,99	-	-	5.372.409	5.222.013,90	2.369.684,25	-	107,30	101,68	44,99	-	-	-
		3. PBSN	4.150.919,94	4.257.598,59	4.367.018,87	-	-	3.484.123	3.259.386,82	5.800.592,56	-	83,94	76,55	132,83	-	-	-
		4. PBSA	1.686.821,24	1.730.172,55	1.774.637,99	-	-	1.838.419	1.688.057,64	2.618.354,65	-	108,99	97,57	147,54	-	-	-
		Jumlah	16.466.618,84	16.889.810,94	17.323.879,09	-	-	16.546.923	16.258.170,61	17.161.578,11	-	100,49	96,26	99,06	-	-	-
		1.3 Produksi perikanan															
		1. Produksi		545.72		623.46	760.485,	535.13	567.69	749.06	770.54	98,06	104,0	128,8	123,	101,32	>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belumlah tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		Perikanan (ton)	545.720,36	0,36	581.192,19	5,3	09	4,4	1	1	0,47		3	8	59		
		2. Ekspor hasil perikanan (ton)	64.151,19	70.566,31	77.622,94	55.929,9	67.983,18	51.508,65	52.719,29	56.185,92	57.314,05	80,29	74,71	72,38	102,47	84,31	<
		3. Konsumsi ikan (kg/Kapita/tahun)	32,61	34,73	36,98	38,1	46,33	34,66	31,92	38,95	40,10	106,29	91,91	105,33	105,25	86,55	<
		1.4 Produktivitas peternakan															
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/Tahun (Kg)	0,99	1,04	1,10	-	-	-	1,86	2,41	-		178,85	219,09	-	-	-
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	13.262	14,172	15.142	-	-	-	24.580,65	32.116,4	-		173,45	212,10	-	-	-
		3. Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	13.838	15,174	16.640	-	-	16.066	24.546,61	32.170,78	-	116,10	161,77	193,33	-	-	-
		4. Jumlah Pemotongan Sapi (Ekor)	74.373	81,558	89.434	-	-	86.347	131.880	172.842	-	116,10	161,70	204,44	-	-	-
		5. Produktivitas (Kg/Ekor)	186	186	186	-	-	186	186,13	186,13	-	100,03	100,07	100,07	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		6. Pemotongan Sapi Lokal (Ekor)	68.896	77,451	86.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Populasi (Ekor)	491.038	521,975	554.859	-	-	480.941	611.008	626.892	-	97,94	117,06	112,98	-	-	-
		1. NTP Peternak	-	-	-	107,32	109,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Daging (Ton)	-	-	-	141.687,22	164.792,09	-	-	-	145.449,71	-	-	-	102,66	88,26	<
		3. Telur (Ton)	-	-	-	139.363,38	162.959,87	-	-	-	159.945,50	-	-	-	114,77	98,15	<
		4. Susu (Ton)	-	-	-	835,17	1.131,67	-	-	-	783,36	-	-	-	93,80	69,22	<
2.	Koperasi dan UMKM																
		1. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10 - 15% per tahun (KUKM)	1.100	1.000	800		800	875				86,36					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10% per tahun (Orang)	55.000	50.000	50.000		50.000	45.000				103,64					
		3. Meningkatnya daya saing dan nilai ekspor produk koperasi dan pertumbuhan nilai tambahnya (KUKM)	30	30	30		30	28				100,00					
		4. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (Koperasi)	1.200	1.200	1.100		1.100	1.000				91,67					
		5. Pemberdayaa	250.00	250.00	250.00		250.000					88,00					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		n usaha Mikro dan Menengah (UMKM)	0	0	0			240,000									
		6. Terbinanya Koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan (KUKM)	10	10	10		10	10				120,000					
		7. Terbinanya Koperasi pada Desa TP. PKK Provinsi (Koperasi)	5	5				5				120,000					
		8. Peningkatan peran gender dalam Pengembangan KUKM (Orang)	200	200	200		200	190				110,000					
		9. Pembentukan Koperasi Primer (Unit)	200	200	200		200	185				90,000					
		10. Terbinanya UMKM dalam	300	300	300		300	287				90,000					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		Sentra (UMKM)															

2.2.2 Review Capaian Kinerja terhadap RPJMD

Review capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2014, target yang ingin dicapai pada tahun 2015 dan proyeksi untuk tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.79
Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa							
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk					Keberadaan rumah ibadah yang tidak merata di daerah	Kemudahan syarat pendirian rumah ibadah
2.	Pelayanan publik yang baik melalui Good Governance dan Clean Government					Masih adanya persepsi lambannya pelayanan aparat pemerintah dan kurangnya daya saing daerah	Penguatan Lembaga perijinan terpadu
		Terbangunnya sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Office	-	-	-	Masih adanya isu KKN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah	Pembentukan LPSE diseluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung pemberlakuan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
		-	-	-	-	Masih tingginya inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perda tentang sistem perencanaan dan penganggaran secara terpadu - Pembangunan sistem yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran
							Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak lapar
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	- Padi (Kw/Ha)	50,17	50,64			Luas tanam belum tercapai	Pencetakan sawah baru
						Produktifitas masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target produksi	Penanaman bibit unggul adaptif
						Irigasi belum optimal	Pembangunan dan perbaikan Irigasi
	- Jagung (Kw/Ha)	55,87	57,82	-	-	Konsumsi masih rendah	Diversifikasi pangan non beras dengan meningkatkan konsumsi jagung
						Luas tanam belum	Tumpang sari dengan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						tercapai	kedele dan lahan kebun TBM
	- Kedele (Kw/Ha)	10,33	11,36	-	-	Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan jagung
						Produktifitas masih rendah	Penanaman bibit unggul dan teknologi pertanian
						Bibit unggul masih terbatas	Revitalisasi BBI untuk pengadaan benih
	- Daging (ton)	186,13 (Daging Sapi)	145.449.709 (Total Produksi Daging)	-	-	Ketergantungan impor masih tinggi	Pengadaan bibit ternak sapi untuk menambah populasi
						Populasi masih kurang	Pembangunan Cluster industri pengolahan ternak
						Pengembangan ternak masih terbatas	Integrasi ternak dengan kebun dan hutan (agroforestry)
2.	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) ADHK 2010	26,05	24,85	-	-	Anomali iklim makro	Manajemen sistem usaha tani dan maksimalisasi peran BMG
							Komitmen Mewujudkan Rakyat Tidak Bodoh
1.	APK PAUD (%)	NA	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Utara pada tahun 2010	Pembinaan terhadap Lembaga PAUD di Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						53,50 persen masih dibawah rata-rata APK PAUD Indonesia yang sebesar 53,70	
2.	APK SD + MI	112,59	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Utara sebesar 94,24 masih dibawah rata-rata APK Nasional yang sebesar 95,23	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
3.	APM SD + MI	92,66	-	-	-		
4.	APK SMP + MTs	105,01	-	-	-	APK SMP/MTs Nasional = 98,11% Hal ini berarti bahwa APK SMP/MTs Sumut lebih tinggi daripada APK SMP/MTs secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
5.	APM SMP + MTs	97,52	-	-	-		
6.	APK SMA + MA + SMK (%)	89,99	-	-	-	APK SMA/MA/SMK Nasional = 69,6%, yang berarti APK SMA/MA/SMK Sumut lebih tinggi daripada APK SMA/MA/SMK secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan revitalisasi SMK
7.	APM SMA	74,57	-	-	-		
8.	APK Perguruan Tinggi	NA	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 18,19 persen masih dibawah rata-rata APK Perguruan Tinggi (PT) Nasional sebesar 18,36	Pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D-I dan D-III

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
9.	Angka Melek Huruf (%)	98,46	-	-	-	Masih terdapat buta aksara usia produktif diatas 15 tahun	Pembelajaran di luar ruang kelas dan peningkatan kesempatan belajar
10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,07	-	-	-	Target Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah tercapai tetapi perlu ditingkatkan untuk Wajib Pendidikan Dasar 12 Tahun	Perluasan kesempatan belajar formal melalui kemudahan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan
							Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak Sakit
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (Angka Kematian Bayi)	22	-	-	-	Target sudah tercapai namun AKB masih cukup tinggi di beberapa Kabupaten	Meningkatkan kesehatan ibu pra kehamilan
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	265	-	-	-	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada yang AKI tinggi	Meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan
3.	Usia harapan hidup	72,0	-	-	-	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada disparitas	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada kabupaten yang belum memenuhi target
4.	Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	20	-	-	-	Target rata-rata sudah tercapai namun masih ada beberapa Kabupaten yang prevalensi balita gizi buruk Sangat Tinggi (diatas 30%)	Peningkatan kesehatan bagi ibu pra kehamilan dan selama masa pertumbuhan balita

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
6.	Rasio posyandu per satuan balita	-	-	-	-	Keberadaan Posyandu sudah kurang berperan aktif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Revitalisasi posyandu melalui rehabilitasi posyandu dan pemberian insentif bagi tenaga pelayanan kesehatan
7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	-	-	-	-	Kurangnya fungsi pelayanan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	Revitalisasi Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-	-	-	-	Keterbatasan daya tampung pasien di Rumah Sakit	Pemberian kemudahan bagi pihak swasta dalam mendirikan Rumah Sakit dan pemberian stimulan bantuan melalui Hibah dan Bansos
9.	Rasio dokter per satuan penduduk	-	-	-	-	Kurang meratanya keberadaan tenaga pelayanan kesehatan di daerah disebabkan ketertarikan melayani di daerah perkotaan	Pemberian insentif dan beasiswa bagi tenaga pelayanan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal.
10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	-	-	-	-		
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	-	-	-	-	Kurangnya kompetensi SDM Bidan	Pembinaan bidan melalui seminar, workshop, lokakarya dan pelatihan keterampilan
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	-	-	-	-		
13.	Cakupan Desa/kelurahan	-	-	-	-	Masih terdapatnya kondisi	Pemberian imunisasi,

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
	<i>Universal Child Immunization (UCI)</i>						
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	-	100%	-	-	balita gizi kurang dan gizi buruk serta pemberian imunisasi yang tidak lengkap	makanan pengganti ASI dan makanan tambahan secara gratis bagi balita melalui Puskesmas, Pustu, Pusling dan Posyandu
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	100%	-	-	Masyarakat kurang memahami gejala penyakit yang diderita dengan cepat sehingga penanganan selalu terlambat	Sosialisasi gejala penyakit penderita TBC BTA dan BDB dan tindak lanjut penanganan dengan pengobatan dasar
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	-	100%	-	-		
17.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	100%	-	-	Masyarakat miskin yang menerima pelayanan kesehatan rujukan belum tertangani seluruhnya melalui Jamkesmas	Pengalokasian dana Jamkesda bagi masyarakat miskin di luar peserta Jamkesmas, Askes, Asabri dan Jamsostek
18.	Cakupan kunjungan bayi	-	95%	-	-	Kunjungan rutin bayi melakukan imunisasi masih kurang	Pemberian imunisasi dasar secara gratis melalui pelayanan Posyandu dan Puskesmas
19.	Cakupan puskesmas	-	1 : 23.000	-	-	Menurunnya fungsi Pelayanan Dasar Puskesmas, Pembantu Puskesmas	Revitalisasi Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
20.	Cakupan pembantu puskesmas	-	1 : 6.700	-	-		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)		70,64	-	-	Rendahnya kemampuan SDM angkatan kerja sehingga kurang memenuhi permintaan kesempatan kerja	Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai pelaksanaan berbagai pelatihan kerja dan pemagangan serta menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan
2.	Pencari kerja yang ditempatkan			-	-	Penempatan angkatan kerja masih belum memenuhi permintaan kesempatan kerja	Pelatihan dan pemagangan para pencari kerja oleh perusahaan pencari pekerja
3.	Persentase koperasi aktif (%)	56,8		-	-	Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit berbunga murah seperti dengan pendirian Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
4.	Usaha Mikro dan Kecil						
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	378	120		123	Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah	Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
							jalan dan energi
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Juta)	13.588.420,60	10.000.000	11.000.000		Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
7.	Daya serap tenaga kerja (%)	126,18	108	110		Masih rendahnya serapan tenaga kerja	Menyelaraskan kurikulum pelatihan dan pemagangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja
8.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4.424.974,41	35 %	40%		Proses perizinan yang masih birokratif, serta status lokasi usaha yang masih belum pasti (sengketa lahan)	Harus terdapat SOP untuk pengurusan izin investasi dan biaya yang jelas untuk pengurusan izin investasi serta ada payung hukum tentang ruang (RTRW Provsu) harus egera selesai diperdakan
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	99.49	100.08	-	-	NTP sudah memenuhi target, namun masih ada disparitas ntar kabupaten	Perlu peningkatan SDM petani dengan penyuluhan pertanian dan bantuan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
							permodalan
10	Angka Kemiskinan	10,30	10,2	-	-	Perlu kerja keras untuk menanggulangi Angka Kemiskinan sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7,5%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha
11	Angka Pengangguran	6,5	6,0	-	-	Masih perlu upaya serius untuk mengatasi Angka Pengangguran Terbuka sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi dan peluang usaha produktif
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	76,35	-	-	Target IPM tahun 2009 sudah tercapai, namun disparitas antar Kabupaten masih sangat jauh	Perlu peningkatan pada aspek terkait kesehatan (angka harapan hidup) pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan ekonomi (pengeluaran riil/ perkapita)
							Pengembangan Infrastruktur Wilayah
1.	Tingkat Kemantapan Jalan(%)	68,22	74,42	84,44	89,08	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi topografi yang sangat bervariasi dimana daerah dataran rendah rawan bencana banjir, sedangkan di daerah pegunungan rawan longsor. Di kawasan pegunungan 	Peningkatan alokasi anggaran APBD dan APBN Peningkatan SDM dan Kelembagaan Regulasi pembatasan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>dan hutan lindung lebar standar 7 m tidak terpenuhi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. • Pendanaan yang terbatas. • Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. • Peralatan kerja yang tidak memadai. • SDM yang terbatas. • Masih terdapat ± 400 Km kondisi jalan permukaan tanah. 	berat kendaraan Peningkatan Peralatan
2.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	36,88	39,45	48,50	60,00	Kemampuan keuangan yang terbatas sehingga kapasitas jalan dan geometri jalan tidak sesuai dengan standar teknis minimal	Peningkatan bantuan APN untuk penanganan jalan di Kab/Kota
3.	Jaringan irigasi						
	Pemeliharaan Rutin	80.000 Ha	88,773 Ha	86,999 Ha	72.934	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kondisi irigasi teknis dan semi teknis akibat kerusakan alat ukur dan bangunan irigasi. 2. Kondisi jaringan irigasi secara keseluruhan 	Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>masih banyak yang belum dilengkapi bangunan-bangunan irigasi yang berfungsi sebagai pengatur pembagian air, pengendali kelebihan air dan pengamanan terhadap kerusakan.</p> <p>3. Daerah irigasi di dataran tinggi yang jaringan irigasinya terletak pada lereng-lereng perbukitan rentan terhadap longsor.</p> <p>4. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa.</p> <p>5. Penurunan fungsi jaringan irigasi dan belum lengkapnya dan/telah rusaknya bangunan pengatur sehingga pengalokasian air tidak optimal menaikkan intensitas tanam, saat ini intensitas tanam 115 %.</p> <p>6. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah</p>	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>Irigasi menjadi non pertanian.</p> <p>7. Sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah untuk kebutuhan infrastruktur SDA.</p> <p>8. Kelembagaan/org asnisasi pemakai air irigasi yang masih lemah dan belum berkembang untuk menunjang sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>9. Masih lemahnya pemahaman tentang berbagai kebijakan dan regulasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.</p> <p>10. Belum terlaksananya pengelolaan aset irigasi dengan baik yang sangat penting untuk Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)</p> <p>11. Belum aktifnya Komisi Irigasi Provinsi</p>	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						Sumatera Utara serta belum terbentuknya Komisi Irigasi kabupaten pada sebagian besar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara	
	Perbaikan/Peningkatan	10.225 m	12.062 m	21.711 m	21.712 m		
	Jaringan Rawa						
	Pemeliharaan Rutin	80.413 Ha	55.232 Ha	55.232 Ha	55.832 Ha	1. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Rawa. 2. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Rawa menjadi non pertanian setelah dibangun jaringan pengairan 3. Tidak adanya lembaga masyarakat Pengelolaan Jaringan Rawa	Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/normalisasi/rehabilitasi jaringan Rawa
	Perbaikan/Peningkatan	5.590 m	7000 m	4857 m	4856 m		
	Penanganan Tebing Sungai /Pantai	4.060 m	4.090 m	4.426 m	4.428 m	Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Sungai.	Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai
	Normalisasi /Pelurusan Sungai	15.000 m	36.300 m	19.469 m	19.469 m		
	Perbaikan dan pembangunan tanggul banjir	14.800 m	36.300 m	19.469 m	19.469 m		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
	Penyediaan Air baku/Embung	4	30	40	10	Terbatasnya dan penyediaan air baku	Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan terjadinya krisis air
5.	Rasio elektrifikasi desa	90.25 %	90.26 %	90.42 %	90.60 %	Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi belum mampu terlayani Potensi energi di Sumut yang belum sepenuhnya dieksploitasi	Pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hydro dan PLTS (energi terbarukan)
6.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	88.52 %	89.91 %	88.65 %	88.79 %		
7.	Cakupan pelayanan air minum (%)						
8.	Status Mutu Sumber Air Minum	Layak Minum	Layak Minum				

2.2.3. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.80
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJMN*)	RKPD Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan;	Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara	Revitalisasi UPT dan BBI untuk meningkatkan ketersediaan benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan perikanan dan Gema Pangan
2.	Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut;	Pengelolaan terpadu perikanan darat dan perikanan laut	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung (kapal, pelabuhan perikanan dan pasar lelang)
3.	Pengembangan industri unggulan;	- Pengembangan industri hilir CPO di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei - Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung berbasis aluminium	
4.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra industri migas dan lumbung energi nasional;	Pembangunan PLTA Asahan III, dan PLTA Asahan IV	Pembangunan PLTP Sarulla Pengembangan Bio Mass
5.	Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya;	Pengembangan tujuan wisata Danau Toba, dan Kepulauan Nias,	Pengembangan wisata MICE di Kota Medan Pengembangan Geo Park di Danau Toba

6.	Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi;	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan Jaringan Listrik Desa - Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp - 100 Wp di Desa Terpencil - Pembangunan PLTS terpusat 15 KW - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) - Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya - Pemasangan Sambungan Listrik Baru Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu 	
7.	Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Toll se-Sumatera • Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api se-Sumatera • Interkoneksi listrik se-Sumatera • Global hub Kuala Tanjung • Bandara Kuala Namu sebagai hub penerbangan nasional/internasional 	
8.	Pengembangan Sumatera sebagai <i>pool</i> angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN;	Pemberdayaan BLK Dukungan terhadap penciptaan 1 juta pengusaha pemula (12.000)	
9.	Peningkatan program penanggulangan kemiskinan;	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni • Beasiswa siswa miskin • Jamkesda • Bantuan Sosial 	
10.	Reformasi birokrasi dan tata kelola;	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-Government melalui system e-Planning, e-Budgeting, e-Office, e-Procurement dan e-Performance • Pencapaian WTP pada Laporan Keuangan Provinsi 	
11.	Pengembangan kawasan perbatasan	Pengembangan daerah terdepan, terluar,	

	sebagai beranda depan wilayah nasional	perbatasan (pulau Berhala)	
12.	Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.	Pengembangan Taman Nasional Gn. Leuser dan TN Batang Gadis Penataan kawasan industri berbasis lingkungan	
13.	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera. diarahkan untuk : - Mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; - Menjaga kelestarian pengembangan ekosistem Kawasan Danau Toba	- Pengembangan PKN Kawasan Mebidang-ro - Pembentukan kelembagaan Mebidang-ro - Pengembangan Kerjasama Pembangunan di KSN Mebidangro - Pengembangan KSN Danau Toba berbasis lingkungan	
	- Mendukung pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet	• Pengembangan Cluster Industri CPO • Pengembangan Kawasan Peternakan • Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) • Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian	
14.	Penanggulangan Pasca Bencana Kepulauan Nias	Pengembangan <i>Regional Management</i> dan kerjasama sektor produksi unggulan di Kepulauan Nias	
15		- Pengembangan <i>Regional Management Lake Toba</i> di kawasan Danau Toba - Pengembangan infrastruktur wilayah permukiman di daerah-daerah tertinggal. seperti Pakpak Bharat. Tapanuli Tengah.	

		Nias. Nias Selatan. Nias Barat. dan Nias Utara	
--	--	--	--

Keterangan :

*) Kebijakan Nasional terhadap Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam RPJMN-2010-2014

2.2.4. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD tahun 2014. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rangkuman hasil inventarisasi terhadap pokok-pokok pikiran/hasil reses DPRD tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran yang tidak terpisahkan.

2.3. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.81
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf	>	1. Realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana, sistem) yang menjabarkan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih terbatas. 3. Kapasitas lembaga pendidikan kejuruan/pelatihan keterampilan yang relatif rendah	1. Penguatan dan pengawasan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi dan berbasis lokal 2. Penerapan pendidikan berbasis karakter bagi pendidik dan peserta didik 3. Keberadaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai serta terjangkau sesuai kebutuhan di tiap jenjang pendidikan 4. Alokasi dana pendidikan yang terus meningkat untuk membiayai program dan kegiatan prioritas bidang pendidikan
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	>		
1.3.	Pendidikan dasar 9 tahun	>		
1.4.	Angka partisipasi sekolah	>		
1.5.	Angka partisipasi kasar	>		
1.6.	Angka partisipasi murni	>		
1.7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	=		
1.8.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	=		
1.9.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	>		
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	<		
1.11.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	<		
1.12.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.13.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<		
1.14.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<		
1.15.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<		
1.16.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<		
1.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<		
1.18.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<		
1.19.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.20.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<		
1.21.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<		
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	>	<p>1. Derajat Kesehatan masih rendah yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Bayi, Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dan Angka Kematian Ibu melahirkan.</p> <p>2. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di seluruh bidang pelayanan</p> <p>2. Universal coverage pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesda dan Jampersal</p> <p>3. Kesejahteraan tenaga pelayan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan terluar</p>
2.2.	Angka usia harapan hidup	<		
2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	>		
2.4.	Persentase balita gizi buruk	<		
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	<	1. Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan,	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan alokasi anggaran - Peningkatan SDM dan kelembagaan - Peningkatan peralatan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. saluran irigasi/rawa, jaringan pengairan lainnya, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai	- Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi
			3. Ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru	- Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa
			4. Pemantapan dan efektifitas jalan raya (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota).	- Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai
3.2.	Rasio jaringan irigasi	<		- Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan terjadinya krisis air
3.3.	jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum			
3.4.	persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	<		
3.5.	Panjang jalan dilalui Roda 4	<	5. Realisasi pembangunan jalan lingkaran luar (<i>Outer Ring Road</i>) Danau Toba.	
3.6.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	<		
3.7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	<	6. Realisasi pembangunan jalan Tanjung Morawa-Saribudolok-Tongging (Rawasaring).	
3.8.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	<	7. Realisasi pembangunan kawasan Mebidang-Ro	
4.	Perumahan/Permukiman			
4.1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Perencanaan Pembangunan			
5.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	=		
5.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	=		
5.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	=		
5.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perhubungan			
6.1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	<	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status Pelabuhan Laut Pengumpulan Regional belum sepenuhnya diserahkan oleh Kemenhub (Kepmenhub No.KM.313/2013) 2. Kelengkapan dokumen pendukung (Kepmenhun No.1 /2006) 3. Pengembangan Terminal Angkutan Jalan yang belum sesuai dengan arahan RTRW (batal dilaksanakan) 4. Pembangunan fasilitas terminal VIP Bandara Kualanamu 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pemerintah Pusat - Kelengkapan dokumen perencanaan (FS/DED) oleh Pemda - Keseuaian usulan pembangunan dengan Dokumen RTRW - Pembebasan lahan
7.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak			
7.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	< 5,44	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya peran aktif perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta 2. Menimnya Perlindungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjalanya fungsi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di lembaga pemerintahan
7.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	< 17 %		
7.3.	Rasio KDRT	< 20		
7.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,10 %	hak perempuan dan anak di seluruh sektor	dan swasta 2. Kerjasama yang terintegrasi aparat penegak hukum dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak
7.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	= 356		
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		1. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa terkendali 2. Minimnya minat pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta aktif KB	1. Slogan “Dua Anak Lebih Baik” menjadi keinginan setiap pasangan rumah tangga 2. Dasar pemahaman yang kuat akan pentingnya ber-KB
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	= 3,0		
12.2.	Rasio akseptor KB	= 51,7 %		
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	= 64,36 %		
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	= 34,14 %		
13	Sosial		1. Keberadaan prasarana dan sarana panti pemerintah dan swasta yang memprihatinkan 2. Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang minim	1. Rehabilitasi rutin dan berkala panti pemerintah dan swasta 2. Penyandang masalah kesejahteraan sosial memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	= 20		
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan social	= 26		
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	= 26		
14	Ketenagakerjaan			
14.1.	Rasio penduduk yang bekerja	=	1. Rendahnya serapan	1. Berjalannya fungsi BLK
14.2.	rasio ketergantungan	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.3.	Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)	<	angkatan kerja	dalam menghasilkan tenaga kerja siap pakai berkualitas
14.4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	>	2. Rendahnya kualitas tenaga kerja	2. Kerjasama yang sinergi dan terintegrasi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Lembaga Penyedia Tenaga Kerja
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.1.	Persentase koperasi aktif	<	Produktifitas koperasi yang masih rendah	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	<	serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit berbunga murah seperti dengan pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
15.3.	Jumlah BPR/LKM	<		
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	<		
16	Penanaman Modal			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	- Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah	- Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	>		
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	<		
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		- Promosi	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	- Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
16.6.	Angka kriminalitas			
16.7.	Jumlah demo	<		
16.8.	Lama proses perijinan	<		
16.9.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	<		
17.	Kebudayaan			
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<	Pagelaran/pertunjukan seni budaya masih terbatas	Fasilitas pendukung gedung pertunjukan belum memadai
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	<		
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<		
18.	Kepemudaan dan Olahraga			
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	<	1. Minimnya Data dan informasi organisasi pemuda dan olahraga 2. Minimnya prestasi	1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi dan keberadaan
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	<		
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	<		
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	<		
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.6.	Lapangan olahraga	<	olahraga disebabkan prasarana dan sarana olahraga yang tidak mendukung	organisasi pemuda dan olahraga serta prasarana dan sarana olahraga 2. Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai guna memacu prestasi olahraga
19	Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	<	1. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	<		
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	<	2. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	<		
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	<		
20.4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	<		
22	Ketahanan Pangan			
22.1.	Regulasi ketahanan pangan	=	1. Masih berlanjutnya alih fungsi lahan sawah	1. Optimalisasi pemanfaatan irigasi yang ada serta perbaikan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>2. Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</p> <p>3. Terbatasnya penyediaan air bagi budidaya beberapa komoditas pangan pokok dan strategis</p> <p>4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat</p> <p>5. Terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan dan meningkatnya suku bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang berdampak kepada terbatasnya penerapan teknologi</p>	<p>dan pembangunan jaringan irigasi baru dan penghentian alih fungsi lahan melalui penetapan aturan-aturan yang dilandasi hukum</p> <p>2. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan agar potensi lahan yang ada dapat dipertahankan terutama di wilayah usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan menerapkan teknologi konservasi dan rehabilitasi</p> <p>3. Peningkatan dan penanganan teknologi pasca panen untuk memperoleh efisiensi dan kualitas produksi pertanian</p> <p>4. Penyediaan sarana produksi dan permodalan</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. Belum optimalnya penannnganan panen dan pasca panen yang berpotensi mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup besar	secara tepat sehingga bermanfaat untuk petani bagi meningkatkan produktivitas hasil
			7. Cukup tingginya jumlah penduduk miskin yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya keterampilan, akses permodalan dan lapangan kerja	5. Penguatan kelembagaan dan system penyuluhan bagi para petani sehingga terjadi penerapan paket teknologi untuk meningkatkan produktivitas hasil 6. Mengurangi rasio ketergantungan terhadap impor dan pemasukan bahan pangan dari provinsi lain guna kebutuhan masyarakat 7. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat yang menghadapi masalah pangan
22.1.	Ketersediaan pangan utama	=		
24	Statistik			
24.1.	Buku "Provinsi Dalam Angka"	=		
24.2.	Buku "PDRB kabupaten"	<		
25	Kearsipan			
25.1.	Pengelolaan arsip secara baku	=	1. Minimnya keberadaan arsip daerah	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	=	2. Minimnya kemampuan SDM arsiparis	pentingnya arsip daerah 2. Tata kelola arsip yang tertib dan teratur
26	Komunikasi dan Informatika		1. Prasarana dan sarana media informasi baik cetak maupun elektronik belum menjangkau seluruh lokasi di daerah	1. Informasi tersampaikan ke seluruh daerah melalui media cetak dan media elektronik
26.1.	Jumlah jaringan komunikasi	=		
26.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	=		
26.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	=		
26.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	=		
26.5.	Web site milik pemerintah daerah	=		
26.6.	Pameran/expo	=		
27.	Perpustakaan		1. Jumlah perpustakaan dan koleksi buku yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai dengan kerjasama TP PKK melalui desa binaan
27.1.	Jumlah perpustakaan	<		
27.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	<		
27.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<		
B.	URUSAN PILIHAN			
1.	Pertanian			
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		1. Peningkatan produktivitas tidak dibarengi dengan peningkatan luas panen (untuk padi dan kedele) 2. Terjadinya	1. Revitalisasi pertanian mendukung peningkatan produksi dalam menjaga stabilitas pangan dan mensukseskan swasembada
	1.1.1. Padi (Ton)	>		
	1.1.2. Jagung (Ton)	>		
	1.1.3. Kedele (Ton)	<		
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	>		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	>	konversi lahan pertanian produktif 3. Anomali iklim yang mempengaruhi pola tanam 4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat	pangan 2. Peningkatan mekanisasi pertanian 3. Pengadaan bibit/benih unggul 4. Peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan jalan produksi, irigasi)
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	>		
1.5.	Nilai tukar petani	>		
2.	Kehutanan			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan			
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	<		
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	<	Penerapan prinsip eco environmental telah menjadi rujukan untuk perijinan tambang	Pembuatan Perda Larangan bagi para PETI untuk beroperasi serta adanya zonasi bagi operasional Legal yang diperbolehkan dan dimasukkan dalam RTRWP/RTRWK
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	<		
4.	Pariwisata			
4.1.	Kunjungan wisata	<	1. Infrastruktur	Pembangunan/per

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	>	belum memadai menuju destinasi 2. Destinasi wisata masih monoton	baikan jalan menuju objek wisata ditingkatkan
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1.	Produksi perikanan (ton)	<	1. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum	1. Pengembangan produksi perikanan budidaya untuk
5.2.	Konsumsi ikan/kapita/thn	<		
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Tidak ada data		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Tidak ada data	<p>sepenuhnya dikelola secara efisien dengan penerapan teknologi maju dengan budaya bisnis.</p> <p>2. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum merata di seluruh Sumatera Utara, khususnya perikanan tangkap.</p> <p>3. Terjadinya cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>4. Terjadinya pencemaran perairan umum dan perairan pantai akibat limbah industri dan rumah tangga.</p> <p>5. dukungan prasarana terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan dibandingkan dengan potensi perikanan yang tersedia</p> <p>6. Jumlah induk unggul untuk kegiatan pembenihan</p>	<p>konsumsi dalam negeri dan ekspor di kawasan budidaya air tawar,air payau/tambak dan air laut</p> <p>2. Pengadaan kapal dan alat penangkap ikan</p> <p>3. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana budidaya melalui pengadaan calon induk unggul dan pengadaan mesin pellet</p> <p>4. Identifikasi potensi dan pemetaan pulau di Sumatera Utara</p> <p>5. Pengembangan kluster industri pengolahan hasil perikanan</p>
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017				II-160

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Perdagangan			
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	>		
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	>		
7.	Perindustrian			
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	<	1. Krisis energi listrik yang menghambat produksi industri rumah tangga 2. Bahan baku masih diimpor dari luar	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dibidang energi listrik
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	<		
7.3.	Pertumbuhan Industri.	<		

BAB - III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi daerah

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Misi ini dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah beserta potensi pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi subjek dan asset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.

Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut membutuhkan arah dan kebijakan ekonomi daerah yang tepat, selanjutnya upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian Provinsi Sumatera Utara terkini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian Tahun 2017

Sebelum membahas tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017, tentunya perkembangan ekonomi global beserta estimasinya harus diketahui terlebih dahulu disamping yang tak kalah pentingnya adalah perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Diawali dengan pembahasan tentang proyeksi ekonomi dunia, dimana menurut World Economic Outlook yang direlease pada tanggal 19 Januari 2016 dengan tema release **“Permintaan Lemah dan Prospek Yang semakin Menurun”** menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 diperkirakan berkisar di angka 3,1 persen, di 2016 diproyeksi sebesar 3,4 persen dan pada tahun 2017 sebesar 3,6 persen.

Di Negara ekonomi maju, secara perlahan perbaikan ekonomi akan diharapkan berlanjut secara bertahap menuju ke arah yang diharapkan. Kelambanan dan ketidakseimbangan ekonomi Tiongkok telah menyebabkan jatuhnya harga komoditas, disamping beberapa ketegangan di beberapa Negara seperti Turki dan Rusia akan menyebabkan penghambat pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2016 dan 2017, tetapi optimistis perbaikan ekonomi akan terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dibawah bayang-bayang perlambatan ekonomi Tiongkok.

Tahun 2015, perekonomian global masih berada dalam posisi lemah, baik di Negara berkembang maupun Negara industri baru. Terdapat 3 kunci transisi yang dapat mempengaruhi perekonomian global yakni :

1. Masih terjadinya perlambatan dan ketidakseimbangan ekonomi Tiongkok dimana terjadi pergeseran struktur ekonomi dari Investasi dan Industri ke konsumsi dan jasa-jasa
2. Harga komoditas dan harga energi yang turun

3. Pengetatan kebijakan moneter yang diambil oleh Amerika Serikat

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dikembangkan oleh perdagangan di luar negeri, akan tetapi jauh dari harapan malah terjadi penurunan perdagangan ekspor dan impor di Tiongkok yang mencerminkan semakin melemahnya investasi *Foreign Direct Investment* (FDI) dan aktifitas industry pengolahan, dan menjadikan Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah dimana pada tahun 2014 tumbuh sebesar 7,3 persen dan di tahun 2015 sebesar 6,9 persen.

Perkembangan ekonomi Tiongkok akan menentukan pada gerak langkah ekonomi Negara-negara lain, karena telah menyebabkan beberapa harga komoditas dan harga energy menjadi semakin rendah. Aktifitas industry pengolahan dan perdagangan komoditi tetap rendah di seluruh dunia, tidak hanya di Tiongkok saja tetapi berimbas pada Negara-Negara Berkembang dan Negara Industri baru.

Harga minyak dunia secara pasar telah turun sejak September 2015, yang disebabkan salah estimasi dari OPEC yang meningkatkan produksi minyak dunia untuk meningkatkan konsumsi minyak, akan tetapi diperkirakan harga minyak dunia akan tetap rendah dalam kurun waktu dua tahun kedepan sampai dengan tahun 2017.

Pada tahun 2016 perekonomian Global akan tumbuh sebesar 3,4 persen dan akan tumbuh sebesar 3,6 persen di tahun 2017, yang secara rinci disajikan per regional sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprediksi akan melambat di kisaran 6,3 persen di tahun 2016 dan 6 persen di tahun 2017, secara umum direfleksikan dengan pelemahan pertumbuhan investasi dan ketidakseimbangan perekonomian. India dan beberapa Negara industry baru di Asia secara umum diprediksi akan tetap tumbuh meningkat, meskipun beberapa Negara akan terimbas dari pelemahan ekonomi Tiongkok dan pelemahan industry dunia.
2. Agregat PDRB Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia diprediksi akan membaik di tahun 2016, walaupun lebih rendah dari tahun 2015, pertumbuhan yang positif di kebanyakan Negara-negara ini akan berlanjut walaupun resesi ekonomi terjadi di Brasil.
3. Pertumbuhan yang lebih tinggi akan terjadi di Negara-Negara Timur Tengah, walaupun beberapa kasus geo politik dengan tensi tinggi, akan tetapi tidak begitu mempengaruhi perbaikan pertumbuhan ekonomi
4. Negara-Negara Eropa diproyeksikan akan berlanjut tumbuh, meskipun agak sedikit turun bila dibandingkan dengan tahun 2015. Rusia akan menghadapi perlambatan GDP sebab penurunan harga minyak dan adanya sanksi ekonomi, dan diprediksi masih dalam kondisi resesi di tahun 2016. Beberapa Negara persemakmuran akan menghadapi resesi juga terimbas dari resesi ekonomi Rusia dan tensi politik yang memanas, diprediksi akan bergerak moderat di 2016 dan sedikit lebih cepat di tahun 2017
5. Kebanyakan Negara di Sub Sahara Afrika , akan mengalami pertumbuhan yang lebih membaik, akan tetapi tetap terimbas dari penurunan harga komoditas dunia.

Secara grafik akan disajikan secara lengkap tentang Estimasi Perekonomian Global sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Periode 2016-2017

Region/Country	Projection	
	2016	2017
World Output	3,4	3,6
Advanced Economies	2,1	2,1
United State	2,6	2,6
Euro Area	1,7	1,7
Germany	1,7	1,7
France	1,3	1,5
Italy	1,3	1,2
Spain	2,7	2,3
Japan	1,0	0,3
United Kingdom	2,2	2,2
Canada	1,7	2,1
Other Advanced Economies 3/	2,4	2,8
Emerging Market and Developing	4,3	4,7
Commonwealth Of Independent States	0,0	1,7
Russia	-1,0	1,0
Excluding Russia	2,3	3,2
Emerging and Developing Asia	6,3	6,2
China	6,3	6,0
India5/	7,5	7,5
ASEAN-5 6/	4,8	5,1
Emerging and Developing Europe	3,1	3,4
Latin America and the Caribbean	-0,3	1,6
Brazil	-3,5	0,0
Mexico	2,6	2,9
Middle East, North Africa, Afghanistan, and pakistan	3,6	3,6
Saudi Arabia	1,2	1,9
Sub-Saharan Africa	4,0	4,7
Nigeria	4,1	4,2
South Africa	0,7	1,8

Tahun 2017 yang akan dilalui diestimasikan menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia. Berbagai isu domestik dan internasional akan terus menghantui kinerja perekonomian Indonesia ke depan.

Kabar baiknya adalah, tekanan inflasi sudah mulai melunak sebagai konsekuensi dari turunnya tren harga-harga komoditas di pasar internasional. Perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-tanda pulih memberikan imbas yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat serta menyebabkan tren depresiasi rupiah yang cukup persisten.

Sementara itu secara internal, belum tuntasnya infrastruktur pendukung produksi juga turut menyumbang melambatnya kinerja ekspor yang pada gilirannya turut memberikan tekanan yang berlebihan pada Rupiah. Untuk tahapan awal Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka menengah untuk periode 2017-2019 bisa mencapai kisaran 6,0-6,5 persen. "Peningkatan pertumbuhan ini karena paket kebijakan ekonomi pemerintah yang akan semakin terasa dampaknya, terdapat Beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat

Diakhirinya pengetatan dollar Amerika Serikat akan memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate. Penurunan dari BI rate tersebut tentunya akan menjadi stimulus dalam melakukan ekspansi bisnis kedepan. Hal ini tentunya akan semakin memberikan geliat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2017.

2. Melambatnya Ekonomi Mitra dagang Utama

Stagnasi yang melanda di negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi perlambatan tersebut. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, apalagi pada saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya menjalin kerjasama dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. Perlambatan ekonomi di Tiongkok berdampak pada sektor riilnya sehingga membawa dampak terhadap turunnya harga komoditas di pasar internasional

Sepanjang tahun 2016, perekonomian Cina akan mengalami perlambatan yang cukup persisten yang dipicu oleh adanya kondisi *rapid aging society*. Data sepanjang tahun 2015 telah menjustifikasi terjadinya perlambatan tersebut. Bahkan IMF terus melakukan koreksi atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok sepanjang tahun 2015 dimana Tiongkok hanya tumbuh sebesar 6.7 persen saja. Di tahun 2015, perlambatan tersebut tampak semakin nyata dan persisten. Mengingat Tiongkok merupakan partner dagang terbesar untuk Indonesia (lebih dari 20 persen dari total ekspor Indonesia), maka perlambatan dari ekonomi Tiongkok juga memberikan pengaruh terhadap perlambatan ekonomi di Indonesia, khususnya terkait dengan ekspor komoditas tertentu dan juga migas khususnya gas cair.

Hal ini tentunya Patut menjadi catatan bahwa faktor-faktor utama yang dewasa ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat rentan akan shock. Meskipun mengalami melambat, akan tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Tiongkok dan Singapura yang cenderung stagnan dan mengalami penurunan pertumbuhan, perekonomian Indonesia sebenarnya masih menunjukkan kinerja menuju ke arah yang semakin baik.

Ekspansi fiskal melalui pengeluaran pemerintah diharapkan semakin meningkat pada periode selanjutnya sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus positif untuk menggerakkan perekonomian.

Adapun terhadap nilai inflasi sepanjang tahun 2016 akan mencapai 4.0 ± 1 persen, lebih tinggi dari inflasi sepanjang tahun 2015 yang telah mencapai 3,35 persen. Rendahnya inflasi sepanjang tahun 2015 merupakan sumbangan dari melemahnya permintaandomestik sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa akan ada tren peningkatan permintaan domestik sepanjang tahun 2016 dan 2017 yang akan datang.

Khusus untuk nilai tukar Rupiah secara umum pada tahun 2016 nanti rupiah akan mengalami depresiasi sebesar 7.2 persen secara year on year. Dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia maka akan semakin rentan terhadap gejala eksternal khususnya dalam pergerakan nilai tukar. Tekanan terhadap Rupiah juga merupakan imbas dari sikap investor yang mulai berjaga-jaga untuk mengantisipasi rencana kenaikan suku bunga the Fed.

Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

perekonomian Nasional, maka terdapat beberapa hal yang akan diproyeksikan semakin membaik baik dari aspek laju pertumbuhan PDRB, stabilitas angka inflasi, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan juga penurunan angka persentase kemiskinan.

Ad.1. Perkembangan PDRB

Pertama sekali akan dapat dilihat mengenai kondisi perkembangan PDRB Sumatera Utara, dimana Perekonomian Sumatera Utara tahun 2015 tumbuh sebesar 5,10 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa keuangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,17 persen, diikuti oleh informasi dan komunikasi sebesar 7,11 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,95 persen. Adapun secara lengkap disajikan pada table di bawah ini :

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2010 Tahun 2015 (Persen)

	Lapangan Usaha	Triw III- 2015	Triw IV- 2015	Triw IV- 2015	Laju rtumbuhan 2015	Sumber Pertumbuha n 2015
		terhadap Triw II- 2015	terhadap Triw III- 2015	terhadap Triw IV- 2014		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,15	(0,80)	6,98	5,60	1,39
B	Pertambangan dan Penggalian	0,55	2,11	3,81	6,40	0,08
C	Industri Pengolahan	4,06	(0,49)	5,52	3,52	0,70
D	Pengadaan Listrik, dan Gas	6,50	9,89	4,54	(1,30)	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	(1,27)	0,39	3,40	6,44	0,01
F	Konstruksi	3,22	0,80	2,01	5,52	0,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,18	(0,32)	3,27	4,36	0,77
H	Transportasi dan Pergudangan	2,48	0,42	5,70	5,49	0,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	0,28	0,85	5,66	6,95	0,15

J	Informasi dan Komunikasi	2,14	0,07	7,43	7,11	0,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,50	3,49	11,14	7,17	0,22
L	Real Estate	1,91	1,86	6,34	5,76	0,24
M,N	Jasa Perusahaan	2,80	1,44	4,49	5,86	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,27	1,33	4,67	5,83	0,19
P	Jasa Pendidikan	8,50	(0,11)	9,79	5,03	0,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	1,51	4,71	6,93	0,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,24	2,38	8,06	6,69	0,03
	PDRB	3,22	0,09	5,32	5,10	5,10

Sementara jika dilihat dari struktur PDRB menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (22,01 persen); industri pengolahan (20,21 persen); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,43 persen), dengan secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Struktur PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2015 (Persen)

No	Kategori	Uraian	2015*
			Total
(1)	(2)	(3)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.01
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.35
3	C	Industri Pengolahan	20.21
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.10
5	E	Pengadaan Air	0.10
6	F	Konstruksi	13.61
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.43
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.99
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.41
10	J	Informasi dan Komunikasi	1.95
11	K	Jasa Keuangan	3.35
12	L	Real Estate	4.50
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.96
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.71
15	P	Jasa Pendidikan	1.87
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.93
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.0

Sementara dari aspek pengeluaran pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,10 persen terjadi pada beberapa komponen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 4,70 persen, diikuti oleh PMTB sebesar 3,96 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,45 persen, dengan sajian lengkap sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Penggunaan
Tahun Dasar 2010 Tahun 2015 (Persen)

Komponen	Terhadap Triw II- 2015	terhadap Triw III- 2015	terhadap Triw IV- 2014	Pertumbuh	Pertumbuh
				n 2015	an 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,25	0,72	4,48	4,70	2,42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,97	1,91	5,29	-0,41	0,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,76	15,98	1,39	2,45	0,18
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,20	1,14	4,55	3,96	1,17
Perubahan Inventori	-62,03	75,73	72,78	22,50	0,52

Ekspor Barang dan Jasa	5,76	2,10	2,36	-1,56	-0,71
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-0,36	10,99	1,41	-4,07	-1,53
PDRB	3,22	0,09	5,32	5,10	5,10

Selanjutnya jika dilihat dari sisi pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terlihat dari sisi nominal Rupiah terjadi peningkatan, akan tetapi jika dikonversi ke nilai tukar Dollar Amerika Serikat, maka terlihat trend penurunan nilai PDRB/Kapita dari tahun 2013 US\$ 3.301,49 menurun menjadi US\$ 3.194,64 dan menurun kembali menjadi hanya sebesar US\$ 3.066,41 atau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan nilai konversi sebesar 7,11 persen dimana secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5.
PDRB per Kapita Sumatera Utara Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai PDRB (Milyar Rp)	469 464,02	521 954,95	571 722,01
Penduduk Proyeksi (jiwa)	13 590 250	13 766 851	13 937 797
Kurs USD	10 463,20	11 867,96	13 377,04
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku			
Nilai (Juta Rp)	34,54	37,91	41,02
Nilai (US\$)	3 301,49	3 194,64	3 066,41

Ad.2. Perkembangan Inflasi

Inflasi Sumatera Utara tahun 2015 dapat dikendalikan pada level yang rendah dan berada pada kisaran sasaran inflasi $4\pm 1\%$. Keberhasilan tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam mengelola harga komoditas strategis (administered prices) khususnya harga BBM. Pasokan bahan pangan juga dapat dijaga dengan baik. Ditengah gejolak yang sempat muncul, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara melakukan berbagai program jangka pendek dan menengah untuk mengelola pasokan barang dan jasa. Komitmen tersebut berhasil menjaga tingkat inflasi volatile foods berada dibawah historisnya serta terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat. Sementara permintaan yang diindikasikan meningkat menyebabkan kenaikan inflasi inti. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Sumatera Utara tercatat sebesar 3,24%, jauh lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 8,17%.

Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada penghujung 2015 menurun jauh dibanding tahun sebelumnya. Inflasi 2015 adalah sebesar 3,24%, jauh lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 8,17%. Angka tersebut juga sedikit dibawah angka nasional yang mencapai 3,35% (yoy). Penurunan inflasi tahunan (yoy) Sumatera Utara mulai terlihat sejak triwulan II 2015. Secara triwulanan, inflasi tercatat menurun dari 7,82% pada triwulan II, 6,62% pada triwulan III, menjadi 3,24% di akhir tahun. Penurunan inflasi pada akhir tahun 2015 terjadi di semua kota penghitungan IHK di Sumatera Utara.

Berbagai komoditas yang muncul sepanjang tahun 2015 sebagai inflatoir maupun deflatoir karena berbagai kondisi diantaranya siklus pasokan yang tergantung masa tanam/panen komoditas dan faktor cuaca, serta kebijakan penetapan harga BBM dan listrik oleh pemerintah. Di sisi permintaan, faktor musiman terkait perayaan hari besar dan tahun ajaran baru mendorong kenaikan harga barang tertentu. Selain itu, berbagai langkah non-konvensional untuk mengurangi pasokan seperti pengafkiran bibit ayam serta faktor eksternal terkait nilai tukar juga mempengaruhi naik/turunnya harga barang dan jasa di sepanjang tahun 2015. Adapun komoditas tersebut adalah :

Tabel 3.6.
Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Sepanjang Tahun 2015 di Sumatera Utara

Rank	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
		(%, qtq)		(%, qtq)
1	Beras	0,46	Bensin	-0,79
2	Rokok Kretek Filter	0,29	Cabai Merah	-0,46
3	Kontrak Rumah	0,25	Angkutan Dalam Kota	-0,26
4	Angkutan Udara	0,23	Tongkol/Ambu-ambu	-0,04
5	Bawang Merah	0,20	Kangkung	-0,04
6	Bahan Bakar RT	0,17	Minyak Goreng	-0,03
7	Sekolah Dasar	0,16	Cabe Hijau	-0,03
8	Tarif Listrik	0,13	Cabai Rawit	-0,03
9	Daging Ayam Ras	0,12	Angkutan Antar Kota	-0,02
10	Rokok Kretek	0,12	Sabun Detergen Bubuk	-0,01

Sumber: BPS, diolah

Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya realisasi inflasi 2015 dibanding 2014 adalah kebijakan penetapan harga BBM oleh pemerintah serta semakin

tingginya komitmen TPID Sumut untuk menjaga pasokan pangan melalui berbagai program jangka pendek dan menengah. Ekspektasi inflasi masyarakat menjadi lebih terjaga dengan stabilnya inflasi administered prices dan volatile foods tersebut

Ad.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Agustus 2015 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja dan jumlah pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2015 mencapai 6,39 juta orang atau bertambah sekitar 119 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2014, yaitu sebesar 6,27 juta orang. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 mencapai 5,96 juta orang atau bertambah sekitar 81 ribu orang dibanding Agustus 2014, yaitu sebesar 5,88 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan dari 391 ribu pada Agustus 2014 menjadi 429 ribu pada Agustus 2015 atau bertambah sebanyak tiga puluh delapan ribu orang.

Keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Agustus 2015 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja dan jumlah pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2015 mencapai 6,39 juta orang atau bertambah sekitar 119 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2014, yaitu sebesar 6,27 juta orang. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 mencapai 5,96 juta orang atau bertambah sekitar 81 ribu orang dibanding Agustus 2014, yaitu sebesar 5,88 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan dari 391 ribu pada Agustus 2014 menjadi 429 ribu pada Agustus 2015 atau bertambah sebanyak tiga puluh delapan ribu orang.

Tabel 3.7.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Kegiatan Utama Tahun 2014 dan 2015

	Kegiatan Utama	Satuan	Agustus 2014 ^{*)}	Agustus 2015 ^{*)}	Selisih
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angkatan Kerja	Ribuan Orang	6 272	6 391	119
	- Bekerja	Ribuan Orang	5 881	5 962	81
	- Pengangguran terbuka	Ribuan Orang	391	429	38
2	Bukan Angkatan Kerja	Ribuan Orang	3 079	3 108	29
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,07	67,28	0,21
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,23	6,71	0,48
5	Pekerja Tidak Penuh				
	- Setengah Menganggur	Ribuan Orang	487	604	117
	- Paruh Waktu	Ribuan Orang	1 371	1 370	-1

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2014, dan Agustus 2015

Keterangan : *) Menggunakan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035

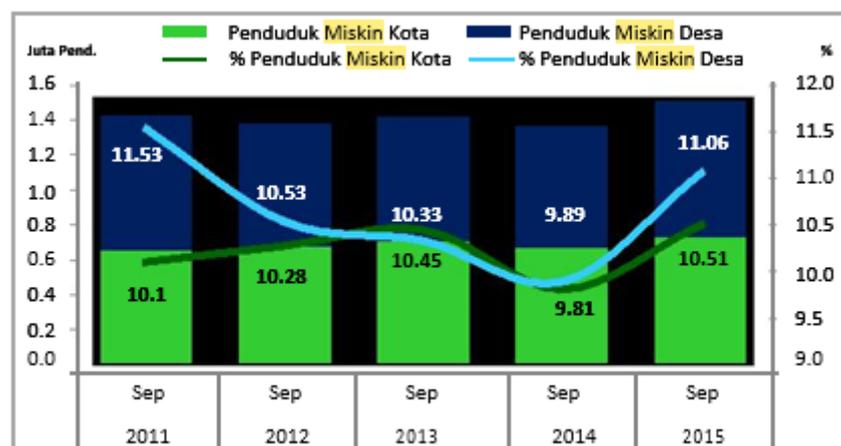
Ad.4. Persentase Penduduk Miskin

Seiring dengan kondisi nasional, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,5 juta jiwa atau 10,8% dari total penduduk. Jumlah ini meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 1,4 juta jiwa atau 9,9% dari total penduduk.

Dalam waktu 6 bulan, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami peningkatan 44.000 jiwa penduduk miskin. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi terkait menurunnya tingkat pendapatan meski daya beli relatif terjaga.

Secara spasial, Sumut masuk ke dalam 5 besar provinsi dengan penambahan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia, bersama dengan Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Secara nasional, Sumatera Utara masih menduduki peringkat 17 nasional berdasarkan urutan jumlah persentase penduduk miskin terbesar. Tingkat kemiskinan yang semakin melebar ini tidak lepas dari karakteristik Sumatera Utara yang memang sangat menggantungkan aktivitas ekonominya pada perkebunan. Tahun 2015 memang memberikan pukulan yang cukup berat akibat perkembangan harga dan permintaan yang kurang mengembirakan.

Selama periode September 2014 s.d. September 2015, persentase kemiskinan meningkat tajam di pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan di Sumatera Utara bertambah 87.280 orang menjadi 11,06% dari total penduduk desa. Sementara itu, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 60.290 orang menjadi 10,51% dari total penduduk kota (Grafik 5.8). Secara historis, persentase penduduk miskin di desa memang selalu lebih tinggi dibandingkan di kota. Meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir, namun tingkat kemiskinan di desa kembali meningkat signifikan pada September 2015, sebagaimana digambarkan pada grafik sebagai berikut :



Sumber: BPS

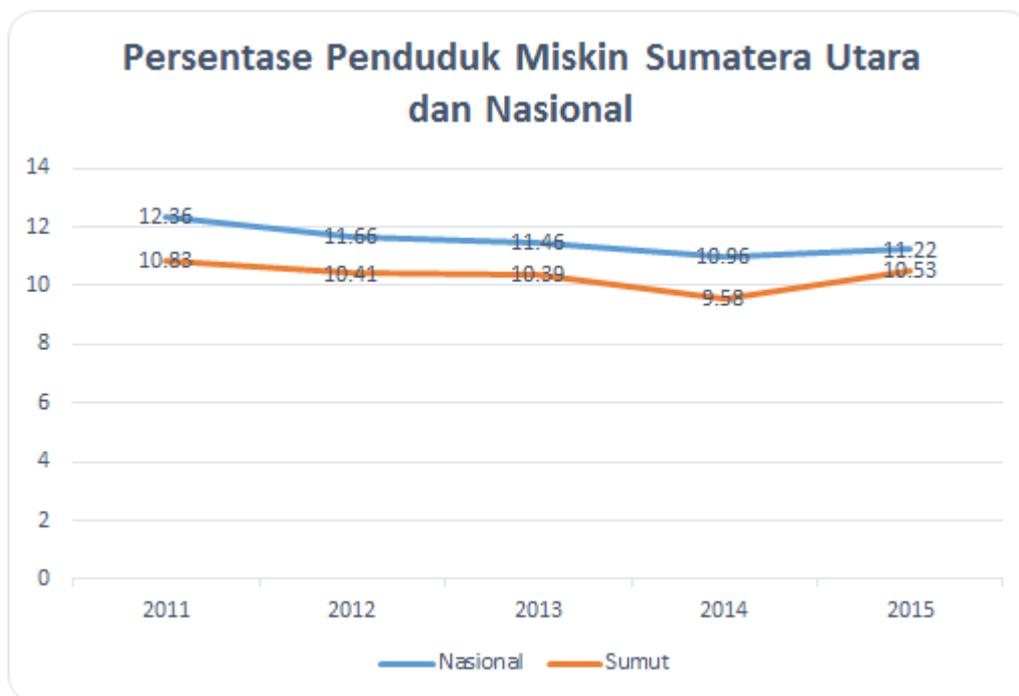
Grafik 3.1

Grafik Indeks Kedalaman & Keparahan Kemiskinan di Sumatera Utara

Meningkatnya kemiskinan di pedesaan diduga karena daya beli masyarakat desa yang masih terbatas. Hal tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani yang masih berada di bawah 10020, jauh lebih rendah bila dibandingkan tahun 2014. Hal ini

terjadi baik untuk tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura. Hal tersebut terutama dipengaruhi normalisasi harga komoditas yang berjalan lambat.

Adapun jika dibandingkan dengan Nasional, maka capaian pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara terlihat lebih baik, hal ini terjadi sejak tahun 2011 dimana disparitas persentase penduduk miskin antara Sumatera Utara dan Nasional sebesar 1,53 persen, akan tetapi disparitas ini semakin kecil bahkan di tahun 2015 hanya sebesar 0,69 persen, tentunya ini menjadi salah satu perhatian khusus, sebab terdapat beberapa Provinsi di Indonesia yang secara lebih cepat mengurangi persentase penduduk miskinnya di banding upaya Provinsi Sumatera Utara. Adapun secara rinci disajikan pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2
Grafik Perbandingan Capaian Persentase Penduduk Miskin Antara Nasional dengan Provinsi Sumatera Utara

Setelah mengetahui kondisi terkini tentang perkembangan makro ekonomi utama yang disajikan di atas, berikut akan disajikan proyeksi dari masing-masing kondisi yang diharapkan pada tahun 2017.

Ad 1. Agregat, Kontribusi dan Laju PDRB

Setelah memperhatikan kondisi perekonomian Global, Nasional dan juga Sumatera Utara terkini dan proyeksi yang disusun oleh beberapa analis seperti dari IMF, Bank Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal serta mempertimbangkan asumsi-asumsi, variabel pendukung dan parameter acuan, diperoleh hasil estimasi untuk besaran PDRB Sumatera Utara pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Besaran Agregat PDRB Sumatera Utara Tahun 2016 dan 2017 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)

No	Kategori	Uraian	2016		2017	
			ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138,489.50	114,748.42	153,695.65	119,969.47
2	B	Pertambangan dan Penggalian	9,453.49	6,161.66	11,604.16	6,524.59
3	C	Industri Pengolahan	130,871.72	88,762.37	149,913.56	92,303.99
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	585.66	557.82	596.67	580.41
5	E	Pengadaan Air	641.90	452.38	720.02	489.52
6	F	Konstruksi	91,432.86	58,290.45	107,451.90	62,050.19
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	111,613.64	82,699.81	123,121.01	88,860.95
8	H	Transportasi dan Pergudangan	33,417.67	21,790.21	39,850.57	23,339.49
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,982.27	10,532.79	18,082.34	11,349.08
10	J	Informasi dan Komunikasi	11,682.69	12,183.01	12,853.29	13,401.31
11	K	Jasa Keuangan	22,256.00	14,318.07	26,028.40	14,687.47
12	L	Real Estate	29,898.59	19,432.87	34,915.57	20,938.92
13	M,N	Jasa Perusahaan	6,432.72	4,153.49	7,587.40	4,508.61
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24,175.52	15,557.19	27,765.59	16,342.83
15	P	Jasa Pendidikan	11,989.85	9,532.52	13,537.74	10,204.57
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,386.52	4,353.42	7,667.02	4,621.16
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	3,472.87	2,328.46	3,988.59	2,471.67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			648,783.49	465,854.95	739,379.48	492,644.22

Dari tabel di atas berdasarkan data baseline tahun 2015, maka besaran PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 648,78 triliun, dan akan diproyeksikan menjadi Rp. 739,38 triliun. Demikian pula dengan Agregat PDRB ADHK dengan Tahun dasar 2010 akan semakin meningkat dari Tahun 2016 yang diestimasikan akan berada di angka Rp. 465,85 triliun meningkat menjadi Rp. 492,64 triliun.

Selanjutnya jika dilihat dari kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB, terlihat bahwa pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi akan sedikit lebih baik dari tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,10 persen, maka optimism di tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 akan mencapai 5,65 persen dan di tahun 2017 diestimasikan berada di kisaran 5,75 persen. Demikian pula terkait dengan postur PDRB Sumatera Utara tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disusul oleh Industri Pengolahan dan diurutan ketiga Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Adapun secara rinci disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3.9
Laju Pertumbuhan Serta Kontribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 dan 2017
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)

No	Kategori	Uraian	2016		2017	
			Laju	Kontribusi	Laju	Kontribusi
(1)	(2)	(3)				
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.20	21.35	4.55	20.79
2	B	Pertambangan dan Penggalian	5.69	1.46	5.89	1.57
3	C	Industri Pengolahan	3.25	20.2	3.99	20.3
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	3.05	0.1	4.05	0.1
5	E	Pengadaan Air	7.21	0.1	8.21	0.1
6	F	Konstruksi	7.45	14.1	6.45	14.5
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.35	17.2	7.45	16.7
8	H	Transportasi dan Pergudangan	8.11	5.2	7.11	5.4
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.75	2.5	7.75	2.4
10	J	Informasi dan Komunikasi	10.20	1.8	10.00	1.7
11	K	Jasa Keuangan	2.58	3.4	2.58	3.5
12	L	Real Estate	7.25	4.6	7.75	4.7
13	M,N	Jasa Perusahaan	8.25	1.0	8.55	1.0
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.25	3.7	5.05	3.8
15	P	Jasa Pendidikan	7.05	1.8	7.05	1.8
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.05	1.0	6.15	1.0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	6.85	0.5	6.15	0.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			5.65	100.0	5.75	100.0

Sementara jika melihat dari sisi penggunaan, maka besaran PDRB Sumatera Utara disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.10
Besaran Agregat PDRB Sumatera Utara
Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan 2017
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)

Komponen Pengeluaran	2016		2017	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	340,741.09	238,238.22	397,342.53	246,174.32
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,190.27	5,357.33	6,580.48	5,714.67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	50,280.72	34,286.92	65,435.08	38,771.10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	207,286.33	140,222.34	231,056.09	151,980.74
5. Perubahan Inventori	15,765.44	4,658.55	6,654.42	4,926.44
6. Ekspor Luar Negeri	234,210.84	205,442.03	240,076.52	216,763.46
7. Impor Luar Negeri	204,691.19	162,350.45	207,765.63	171,686.51
PDRB	648,783.49	465,854.95	739,379.48	492,644.22

Dari table di atas diperoleh hasil bahwa diestimasikan pada tahun 2016 Besaran PDRB Sumut menurut Penggunaan akan didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, disusul kedua oleh Ekspor Luar Negeri. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dan struktur PDRB menurut pengeluaran, akan disajikan pula dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.11

Laju dan Kontribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan 2017

Komponen Pengeluaran	2016		2017	
	Laju	Kontribusi	Laju	Kontribusi
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.46	52.52	3.33	53.74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	18.65	0.80	6.67	0.89
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.42	7.75	13.08	8.85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.65	31.95	8.39	31.25
5. Perubahan Inventori	(61.04)	2.43	5.75	0.90
6. Ekspor Luar Negeri	8.38	36.10	5.51	32.47
7. Impor Luar Negeri	7.45	31.55	5.75	28.10
PDRB	5.65	100.00	5.75	100.00

Pada tahun 2016 dengan asumsi estimasi berdasarkan data baseline tahun 2015, maka laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara akan mencapai 5,65%, lebih baik dari realisasi capaian tahun 2015 yang mencapai 5,10 persen, dan pada tahun 2017 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari tahun 2016, maka laju pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,75 persen dengan laju pertumbuhan tertinggi akan diduduki oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 13,08 persen, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,39 persen, adapun laju pertumbuhan terkecil akan di tempati oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hanya diestimasi tumbuh sebesar 3,33 persen.

Dari sisi distribusi PDRB menurut aspek pengeluaran, maka pengeluaran konsumsi Rumah tangga pada tahun 2017 akan tetap menempati urutan terbesar terhadap sumbangan PDRB yakni 53,74 persen, disusul oleh ekspor luar negeri sebesar 32,47 persen. Adapun kontribusi terkecil akan diberikan oleh perubahan inventori yakni sebesar 0,90 persen.

Ad 2. Besaran Inflasi

Pada tahun 2016 dan juga tahun 2017 Seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, daya beli masyarakat yang membaik diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan akan barang dan jasa. Sementara itu, pasokan barang khususnya bahan pangan diperkirakan masih memadai. Tekanan inflasi dari penyesuaian harga komoditas yang diatur Pemerintah juga relatif terkendali. Dengan kondisi tersebut, inflasi pada triwulan tahun 2016 dan tahun 2017 diperkirakan berada dalam kisaran 4,0 ±1%.

Rendahnya harga minyak mentah di pasar global meningkatkan keyakinan akan kembali tercapainya inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan. Produksi minyak yang terus digenjot meski pasokan sudah cukup melimpah menyebabkan resiko kenaikan harga yang relative minim. Koordinasi pengendalian inflasi antara bank Indonesia dengan Pemerintah melalui forum TPI/TPID yang telah berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan diperkirakan akan dapat menjaga stabilisasi angka inflasi di Provinsi Sumatera Utara.

Terdapat Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi terkendali, diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi TPID dalam mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan yang bergejolak.

2. Melanjutkan program peningkatan produksi pangan maupun diversifikasi konsumsi masyarakat melalui komunikasi yang lebih intensif
3. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kemudahan perizinan, pengadaan lahan maupun penguatan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini juga penting untuk meningkatkan perdagangan antar wilayah.
4. Mendukung peningkatan kapabilitas UMKM yang bergerak dalam industri pangan untuk meredam fluktuasi harga akibat panen.
5. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai program sertifikasi lahan pertanian dan skema pembiayaan petani untuk meningkatkan akses pembiayaan.

Ad. 3. Besaran Angkatan Kerja/Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015, serta estimasi akan semakin membaiknya ekonomi di Tahun 2016 dan 2017, maka pada tahun 2017 akan terjadi pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka walaupun tidak begitu besar, secara holistic disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Kondisi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera
Tahun 2013 sd 2015 serta
Proyeksi Tahun 2016 dan Tahun 2017

TAHUN	INDIKATOR					
	LPE (%)	JUMLAH ORG BEKERJA (org)	L. KERJA BARU (org)	TPT	ANGKATAN KERJA	%tpt
2013	6.01	6,359,661	215,061	399,876	6,759,537	5.92
2014	5.23	5,881,000	(478,661)	391,000	6,272,000	6.23
2015	5.10	5,962,000	81,000	429,000	6,391,000	6.71
2016	5.65	6,157,554	195,554	421,981	6,579,535	6.41
2017	5.75	6,350,285	192,731	391,106	6,741,391	5.80

Dari table di atas diproyeksikan bahwa pada tahun 2016 angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara akan berjumlah 6.579.535 orang dengan rincian jumlah orang bekerja sebanyak 6.157.554 orang dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,41 persen atau sebanyak 421.981 orang. Adapun untuk tahun rencana 2017 di proyeksikan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara akan berjumlah 6.741.391 orang dengan rincian jumlah orang yang bekerja sebesar 6.350.285 orang serta Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,80 persen atau sebanyak 391.106 orang.

Ad 4. Besaran Angka Persentase Penduduk Miskin

Proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk Sumatera Utara untuk tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin terhadap penduduk Sumatera Utara diproyeksikan sebesar 10,05 persen dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 9,55 persen (kembali ke single digit) seperti capaian pada tahun 2014 sebesar 9,58 persen.

Dalam kurun 2 tahun kedepan diharapkan persentase penduduk miskin akan kembali mengalami trend penurunan, sebagai dampak beberapa pembangunan strategis di Sumatera Utara yang akan menciptakan lapangan kerja, dan

peningkatan pertumbuhan ekonomi serta terjaganya nilai inflasi, sementara di pertanian diharapkan angka Nilai Tukar Petani akan berada di atas 100.

Secara umum disajikan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 3.13
Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk Sumatera Utara Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun \ Indikator	2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Kemiskinan (%)	10.05	10.45	9.55	10.00

Sumber : Hasil Analisis MAkro Ekonomi Sumatera Utara, Bappeda 2016

3.1.2 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tantangan dan prospek perekonomian Sumatera Utara, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Sumatera Utara sendiri.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2016-2017 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diprediksikan masih dalam kondisi yang cukup stabil cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015, meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2017

No.	URAIAN	TARGET	TARGET
		TAHUN 2016	TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)		
	a. Range	5,40 - 5,75	5,50 - 5,80
	b. Moderat	5,65	5,75
2	EKONOMI SUMUT (2010=100)		
	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB - Milyar	648.783,49	739.379,48
	b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK- Milyar	465.854,95	492.644,22
3	PER KAPITA (juta rupiah/tahun)	45,99	51,78
4.	Inflasi	4 + <u>1</u>	4 + <u>1</u>
5.	Persentase Penduduk Miskin	10,05	9,55
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,41	5,80

Untuk tahun 2016 dan 2017 berdasarkan PDRB lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama akan didukung oleh sektor industri pengolahan, Sektor Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sementara dari sisi investasi, prospek investasi juga akan cerah, hal ini didorong oleh berbagai faktor antara lain stabilitas makroekonomi yang diperkirakan tetap akan terjaga serta potensi pasar di Indonesia begitu pula dengan Sumatera Utara karena besarnya jumlah populasi dibanding daerah Provinsi lainnya di luar pulau Jawa, sementara hal yang menggembirakan adalah akan beroperasinya secara resmi beberapa pembangkit listrik skala besar di Sumatera Utara seperti PLTU Pangkalan Susu II dan beberapa beskala mini dan mikro selain itu juga akan dielesaikan perluasan Bandara Sibisa dan Silangit, disamping juga bahwa pada tahun 2017 di Sumatera Utara akan dibangun beberapa Proyek berskala nasional seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional MEBIDANG; Pembangunan Bendungan Lausimeme; Pembangunan Semelter di Kuala Tanjung dan Percepatan Infrastruktur Transportasi, listrik dan air bersih untuk KSPN Danau Toba.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

2. **Disiplin Anggaran**, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang disajikan sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2017

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

1). Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan PAD pada RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017 diproyeksikan akan mengalami peningkatan dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2017 diproyeksikan akan sedikit lebih baik dari capaian tahun 2015 yang berada di angka 5,10 persen dan unuk tahun 2016 diestimasikan akan tumbuh sebesar 5,65 persen, sementara untuk tahun 2017 diestimasikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen. Dengan asumsi tersebut maka Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2017 akan diestimasikan tumbuh sebesar 5,62 persen dibandingkan dengan tahun 2016 Rp. 4.919.272.204.432,- atau meningkat sebesar Rp. 276.565.652.890,-, bila dibandingkan dengan Agregat PDRB Sumut Tahun 2017, maka PAD Sumatera Utara adalah 0,67%.

- b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 3 tahun terakhir (Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14 persen tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 85,35%; hal ini berdampak pada estimasi komponen PAD seperti Pajak Daerah yang tahun 2017 diproyeksikan pada Rp. 4.445.566.154.906,- atau meningkat sebesar 6,64 persen dari Tahun 2016. Demikian pula dengan Retribusi daerah yang merupakan pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari pos-pos pendapatan pada berbagai SKPD hanya diprediksi meningkat moderat sebesar 2 persen menjadi Rp. 32.603.900.823,-, khusus untuk pos pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan juga akan mengalami peningkatan moderat sebesar 3,00 persen menjadi Rp. 269.462.082.649,- dan pos pendapatan asli daerah yang terakhir yakni dari lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan mengalami peningkatan moderat sama dengan ketiga pos PAD lainnya yakni sebesar 2,00 persen menjadi Rp. 171.640.066.054-
- c. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun Anggaran 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru, serta adanya operasi penertiban terhadap pelanggaran pembayaran pajak .

2). Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sebesar 15,60 persen dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kewenangan dalam pengelolaan SMA dan SMK menjadi urusan Provinsi, yang berimplikasi bahwa gaji beserta tunjangan Guru SMA/SMK beserta pemeliharaan Gedung Sekolah dan Administrasi lainnya ditanggung APBD Provinsi;
- b. Peningkatan DAU dari APBD TA. 2015 ke APBD 2016 mengalami peningkatan sebesar 40,84 persen, sehingga diperkirakan secara moderat bahwa pada tahun 2017 akan terjadi peningkatan DAU sebesar 20,70 persen;
- c. Peningkatan DAK akan meningkat secara trend sejak tahun 2016 terjadi peningkatan DAK sebesar 75,46 persen dari tahun 2015, secara nominal dari Rp. 86.812.510.000,- menjadi Rp. 152.322.490.000,-, sementara untuk tahun 2017 diestimasikan masih akan tetap naik walaupun tidak sebesar Tahun 2016, di angka Rp. 158.415.389.600 atau naik 4,00 persen.

3). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diproyeksikan naik rata-rata sebesar 4,09%.
- b. Berkurangnya pos dana annual fee mulai tahun 2014 dari sumbangan PT. Inalum yang sejak tahun 2014 telah resmi menjadi BUMN, sehingga MOA yang mengatur tentang annual fee secara otomatis akan tidak berlaku lagi.

- c. Kemungkinan masih tetap adanya dana insentif daerah (DID) sebagai award atas pengelolaan keuangan daerah beserta perbaikan makro ekonomi dan social masih tetap menjadi harapan tetap dialokasikan oleh Pusat masih sebesar Rp. 39.666.323.000,-
- d. Dana BOS tetap menjadi salah satu alokasi terbesar di APBD Sumatera Utara, dan untuk Tahun 2017 diestimasikan akan meningkat sebesar 5 persen atau menjadi Rp. 3.142.666.800.000,-
- e. Terapat dua pos baru yang akan tetap menjadi harapan bagi penerimaan pendapatan daerah yakni dari Akreditasi Rumah sakit dan dari dana peningkatan pengelolaan koperasi dan UKM, akan tetapi di tahun 2017 diestimasikan besaran alokasi yang diperoleh akan tetap sama yakni RP. 444.296.000,- untuk akreditasi rumah sakit dan Rp. 3.500.000.000,- untuk pos dana peningkatan pengelolaan Koperasi dan UKM.

Adapun untuk secara garis besarnya berikut disampaikan realisasi dan perkiraan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 yang akan datang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15
Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 s.d tahun 2018

Kod Rek	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2014	Realisasi APBD Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.1	Pendapatan asli daerah	4,405,211,552,054	-	4,630,468,147,628	4,919,272,204,432	5,195,837,857,322
1.1.1	Pajak daerah	4,055,217,776,906		4,168,615,291,940	4,445,566,154,906	4,713,231,677,520
1.1.2	Retribusi daerah	76,984,011,321		31,964,608,650	32,603,900,823	34,234,095,864
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	156,160,197,054		261,613,672,473	269,462,082,649	272,156,703,475
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	116,849,566,772		168,274,574,565	171,640,066,054	176,215,380,463
1.2	Dana perimbangan	1,812,638,981,079	-	2,272,745,764,900	2,627,213,559,088	2,752,660,355,207
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	403,778,317,079		515,917,601,900	532,159,822,177	556,022,239,239
1.2.2	Dana alokasi umum	1,349,132,276,000		1,604,505,673,000	1,936,638,347,311	2,033,470,264,680
1.2.3	Dana alokasi khusus	59,728,388,000		152,322,490,000	158,415,389,600	163,167,851,288
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1,560,378,934,211	-	3,070,774,859,639	3,196,419,879,000	3,228,264,706,720
1.3.1	Dana Otonomi Khusus				-	-
1.3.2	Dana Penyesuaian	1,508,790,304,934		3,036,626,619,000	3,186,277,419,000	3,217,817,972,920
1.3.3	Hibah	30,087,355,809		34,148,240,639	10,142,460,000	10,446,733,800
1.3.4	Dana darurat					-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)				-	-
1.3.6	lainnya	21,501,273,468			-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	7,778,229,467,344	-	9,973,988,772,167	10,742,905,642,520	11,176,762,919,249

Ketahanan fiskal Daerah akan terus ditingkatkan. Perkiraan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2017 termasuk Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 10.742.905.642.520,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.

4.919.272.204.432,-. Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.627.213.559.088,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.3.196.419.879.000,-.

Secara lebih rinci pada tahun 2017 estimasi penerimaan sektor Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 4.919.272.204.432,- meningkat sebesar 6,24 persen dibandingkan dengan tahun 2016; Dana Perimbangan diperkirakan akan meningkat signifikan pada tahun 2017 menjadi Rp. 2.627.213.559.088,- atau naik sebesar 15,60 persen dibandingkan dengan tahun 2016, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan meningkat sebesar 4,09%% menjadi Rp. 3.196.419.879.000,- penerimaan ini belum termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015.

Dari komponen penerimaan PAD diharapkan di tahun 2017 adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, antara lain dari obyek pungutan pajak daerah sebesar Rp. 276.950.862.966,- atau menjadi Rp. 4.445.566.154.906,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 639.292.173 menjadi Rp. 32.603.900.823,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 7.848.410.174 menjadi Rp. 269.462.082.649,- sedangkan penerimaan lainnya dari Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya diharapkan akan terjadi peningkatan sebesar 2,00 persen dari Rp. 168.274.574.565 pada tahun 2016 menjadi Rp. 171.640.066.054 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 3.365.491.489.

Selain itu, penerimaan Dana Perimbangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 yakni sebesar 15,60 persen atau bertambah sebesar Rp. 354.467.794.188. Peningkatan ini akan berasal dari komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang akan meningkat sebesar 3,15 persen, selain itu Dana Alokasi Umum juga akan mengalami kenaikan yang signifikan dari sejak tahun 2015, dimana tahun 2016 saja Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi DAU sebesar 1.605.505.673.000,- meningkat sangat besar dari tahun 2015 yang hanya dialokasikan sebesar 1.139.261.371.000,- atau meningkat sebesar 40,84 persen, untuk tahun 2017 memang diestimasikan akan mengalami kenaikan kembali sebesar 20,70 persen, sehingga DAU pada tahun 2017 diestimasikan akan mencapai Rp. 1.936.638.347.311,-, hal ini berkaitan dengan bertambahnya jumlah alokasi belanja pegawai sebab Guru SMA/SMK yang selama ini menjadi kewenangan Pemkab/Pemko sejak tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga akan diestimasikan meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp. 158.415.389.600,- atau meningkat sebesar 4,00 persen

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2017, Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1). Belanja Pegawai

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2017 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji

pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. Terlebih lagi pada tahun 2017 yang akan datang kewenangan pengelolaan dan penganggaran Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

- b. biaya pemungutan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan yang besarnya 3% dari target penerimaan pajak daerah; Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional mempedomani ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2017 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional.
 - d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - e. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 2). Belanja Hibah
- Belanja Hibah; pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti BPS, KODAM, POLDA, KPUD dan Bawaslu), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dalam pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Anggaran setelah tahun anggaran berakhir; selanjutnya bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

3). Belanja Bantuan sosial

Bantuan Sosial; dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala

tertentu, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4). Belanja Bagi hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2017, sedangkan pelampauan target TA. 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam APBD Perubahan TA. 2017, pada tahun 2017 juga akan dibayarkan hutang bagi hasil Kab/Kota yang masih tertunda.

5). Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan partai politik

Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan untuk :

- a. Infrastruktur;
- b. Revitalisasi pasar tradisional;
- c. Sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Prasarana dan sarana kesehatan;
- e. Pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong kemiskinan;
- f. Sarana dan Prasarana Pertanian;

6). Belanja Tidak Terduga

Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017; sedangkan penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak

terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Sementara untuk kebijakan Belanja Langsung pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 memperhatikan hal-hal khusus, dimana Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2017 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
- 2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;
- 4) Capaian target *Visi dan Misi RPJMD Provsu Tahun 2013-2018*;
- 5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
- 6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-daerah.
- 7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Langsung antara lain meliputi :

1. Penganggaran belanja langsung untuk setiap kegiatan, terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
2. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
3. Belanja Pegawai; penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan; sedangkan penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.
4. Belanja Barang dan Jasa; penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa; Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-

rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi; Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Belanja Modal; dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2017. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan yang untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 meliputi urusan sebagai berikut:

Urusan Wajib

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Penataan ruang;
- 5) Perencanaan pembangunan;
- 6). Perhubungan;
- 7). Lingkungan Hidup;
- 8). Sosial
- 9). Tenaga Kerja
10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 11). Penanaman modal;
- 10) Kebudayaan;
- 10) Pemuda dan Olahraga;
- 11) Keselamatan Bangsa dan Politik dalam negeri;
- 12) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 13) Ketahanan Pangan;
- 14) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 15). Komunikasi dan Informatika:
- 16). Perpustakaan

Urusan Pilihan

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 4) Kelautan dan Perikanan;
- 5). Industri

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014 s.d tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2014	Realisasi APBD Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	1,008,161,978,816		1,371,733,360,063	2,067,992,096,370	2,152,819,740,569
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	1,611,718,256,710		3,022,816,000,000	3,172,666,800,000	3,204,093,468,000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1,065,000,000		-	5,000,000,000	6,000,000,000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	1,692,809,638,822		2,478,630,055,595	2,741,501,959,163	2,300,000,000,000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1,053,174,611,548		178,809,909,657	200,000,000,000	300,000,000,000
2.1.8	Belanja tidak terduga	4,482,346,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,371,411,831,896	-	7,059,489,325,315	8,194,660,855,533	7,970,413,208,569
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	144,540,208,585		175,532,063,500	184,308,666,675	193,524,100,008
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1,146,647,301,401		1,472,525,876,503	1,549,097,222,081	1,580,079,166,522
2.2.3	Belanja modal	1,145,972,228,647		1,243,297,180,210	1,339,838,898,231	1,632,746,444,150
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2,437,159,738,633	-	2,891,355,120,213	3,073,244,786,987	3,406,349,710,680
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	7,808,571,570,529	-	9,950,844,445,528	11,267,905,642,520	11,376,762,919,249

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran Pembiayaan dibedakan atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Komponen Penerimaan Pembiayaan terdiri dari atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman daerah.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan komponen Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- c. Pembayaran pokok utang; dan
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah penganggaran belanja yang melebihi pendapatan. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada paragraf III tentang Pembiayaan khususnya pasal 300 sampai dengan pasal 305.

Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
- d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. pinjaman Daerah; dan
- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2017 diperkirakan penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2016, yang diperkirakan akan berjumlah lebih kurang Rp.525.000.000.000,-

Penggunaan dari pembiayaan antara lain diprioritaskan untuk menutup defisit anggaran sementara untuk penyertaan modal diperhitungkan tidak ada penyertaan modal, selama perda belum ditetapkan.

Adapun secara rinci kondisi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 s.d tahun 2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun	Realisasi APBD Tahun	Tahun Berjalan	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
		2014	2015	2016	-6	-7
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	45,225,748,118		1,123,954,000	525,000,000,000	200,000,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45,225,748,118	-	1,123,954,000	525,000,000,000	200,000,000,000
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	24,268,280,639	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	24,268,280,639	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	45,225,748,118	-	(23,144,326,639)	525,000,000,000	200,000,000,000

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. SASARAN POKOK ARAH KEBIJAKAN RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara, dan mempertimbangkan keberagaman budaya yang hidup dalam masyarakat, isu-isu strategis baik dalam konteks Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dengan merujuk kepada :

- a. Permendagri 54/2010 pada Bab-X, tentang penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD dan daerah otonom baru, dimana pada Pasal 287 Ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi, dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional, dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Pasal 5 ayat 3 UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tersebut maka Prioritas dan Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini disusun berlandaskan kepada :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, dengan mempedomani Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJPD Tahap IV (2013-2018)
- b. RPJM Nasional 2015-2019, dengan mempedomani Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJMN di Tahun 2017.
- c. Sinkronisasi dengan RKP Tahun 2017, dengan mencermati Isu Strategis, Prioritas , Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017.

Adapun tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 ialah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur, dengan sasaran ditujukan kepada :

- (1) Meningkatkan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya yang membawa masyarakat Sumatera Utara semakin sejahtera,
- (2) Terwujudnya Sumut yang demokratis berlandaskan hukum
- (3) Terwujudnya rasa aman dan damai serta terlindunginya semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat
- (4) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- (5) Terwujudnya Sumut yang asri dan lestari
- (6) Terwujudnya masyarakat Sumut yang bermoral, beretika, beriman dan berbudaya

Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat
- 2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya

- 3) Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum
- 4) Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- 5) Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
- 6) Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D Tahap ke-4 ditujukan kepada ***Memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah, Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka meningkatkan Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing.***

Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan tumbuhnya demokratisme masyarakat yang ditandai dari semakin mantapnya pertumbuhan nilai-nilai demokrasi ditengah-tengah masyarakat serta tumbuhnya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai produk dari RPJP-D ke-1, 2 dan RPJP-D ke-3, maka Sumatera Utara akan sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumberdaya alam menjadi daya saing kompetitif berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Untuk itu, pemantapan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor-sektor melalui peningkatan keterpaduan sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tertier) yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan akan menciptakan daya saing yang tangguh bagi Sumatera Utara. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal (tersedia sepanjang hari) dan efisien (tarif yang realistik) baik untuk kebutuhan industri /sektor bisnis maupun rumah tangga, tersedia pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin pemenuhannya melalui pembangunan tahap keempat ini.

Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam pemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan telah tumbuh dengan baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah perlu memotivasi dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap informasi.

Selain itu dalam penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016, juga dengan melihat dan mencermati :

- a. RTRW Provsu 2013-2032 dan revisinya
- b. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang didalamnya memuat Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- d. Hasil evaluasi pembangunan tahun 2014-2015, dan tahun berjalan 2016, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2017 yang merupakan tahun keempat dari RPJMD 2013-2018, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017 mengacu kepada Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara

Tahap-IV Tahun 2013-2018, yakni “Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada daya saing daerah yang dilandaskan kepada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi”

4.2. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017

5 prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) *Business Not As Usual*

Pelaksanaan dan pendanaan pembangunan serta implementasi pembangunan tidak hanya bertumpu pada satu pihak saja tetapi melibatkan seluruh komponen masyarakat dan bekerja dengan tidak pantang menyerah, dengan mempergunakan seluruh daya dan upaya untuk mensukseskan pembangunan Sumatera Utara terlebih lagi bahwa pada tahun 2017 merupakan tahun keempat dari Implementasi dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan tahun dimulainya pencalonan pimpinan daerah dalam hal ini akan dilaksanakan Penjaringan calon Gubernur Sumatera Utara untuk periode 2018-2023.

2) Memiliki Daya Saing

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diarahkan kepada peningkatan daya saing pada semua aspek pembangunan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, perdagangan dan industri, keuangan dan investasi dan sebagainya, yang kesemuanya diarahkan kepada tercapainya sasaran utama yakni penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Efisien dan Efektif

Pembangunan yang dilaksanakan dengan secara efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal, dan efektif yakni kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Mengingat keterbatasan dalam pendanaan pembangunan, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

4) Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat / daerah, BUMN / BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan No. 81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima.

Pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan (yang dalam hal ini adalah masyarakat secara luas). Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kualitas pelayanan meliputi (1) Kecepatan dan ketepatan waktu (2) Kesederhanaan dalam proses, (3) Kepastian dalam aspek regulasi/hukum, (4) Fasilitas pelayanan (5) Ketulusan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- 5) Partisipasi Stakeholder Pembangunan (*Academic, Business, Community and Government / ABCG,*)

Pembangunan merupakan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, pelaku bisnis maupun masyarakat secara luas, yang bersama membangun sinergitas untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kemakmuran masyarakat.

4.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dapat dicermati beberapa hal penting sebagai berikut :

- a. RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional, memuat (1) Prioritas pembangunan nasional, (2) Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta (3) program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Selanjutnya dengan memperhatikan arahan Presiden Jokowi terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang disampaikan pada saat Sidang Kabinet tanggal 10 Pebruari 2016 yang lalu, terdapat beberapa direktif yang disampaikan Presiden antara lain :

- 1). Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan
- 2). Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 3). Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi ***money follow program prioritas***. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (**tusi**) harus dibiayai secara merata
- 4). Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat
- 5). Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya, jadi tidak selama ini hanya berbentuk koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan koordinasi serta lainnya.

Selain hal tersebut, dalam RKP Tahun 2017 juga telah ditetapkan pendekatan pembangunan, yakni :

- 1) **Holistik- Tematik**: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
- 2) **Integratif**: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menghentikan konversi lahan

produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

- 3) **Spasial**: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Terdapat beberapa penekanan dalam dimensi-dimensi prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RKP Tahun 2017, yakni :

- 1) **Pengurangan kesenjangan** secara tegas diamanatkan di dalam Nawacita ke tiga dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan serta pulau-pulau terluar
- 2) **Pembangunan infrastruktur** untuk mendukung konektivitas antar wilayah menjadi prioritas sehingga dapat menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan
- 3) Penekanan **pembangunan Politik, Hukum serta Pertahanan dan Keamanan** dalam RKP 2017 ditujukan untuk memenuhi secara bertahap *Minimum Essential Forces* dengan peran industri pertahanan dalam negeri yang makin meningkat. Selain itu juga diarahkan untuk memantapkan penegakan hukum, reformasi birokrasi serta konsolidasi demokrasi.

- b. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2017 adalah :

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa Visi dan Misi Pembangunan Nasional adalah :

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Adapun misi yang diembang adalah :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terdiri dari 9 (sembilan) disusun sebagai penjabaran dari Nawa Cita, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun untuk rencana tahunan Pemerintah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk Tahun 2017, yang menjadi tema pembangunan nasional adalah :

“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH”

dengan strategi utama untuk keberhasilan pembangunan adalah :

- 1). Pembangunan bersifat holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi yang terkait (Dimensi pembangunan manusia; dimensi pembangunan sector unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan
 - 2). Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (*entitled society*).
 - 3). Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar
 - 4). Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem.
 - 5). Pembangunan harus mendorong tumbuhkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan.
- c. Sasaran Utama pembangunan Nasional secara holistik Tahun 2017:
- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang semula dalam RPJMN Tahun 2015-2019 diasumsikan akan tercapai sebesar 7,1 persen, direvisi menjadi sebesar 5,5-5,9 persen sebagai dampak capaian pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir yang tidak mencapai target..
 - 2) Penurunan angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semula dalam RPJMN Tahun 2015-2019 ditargetkan akan dapat menjadi di kisaran 5,0-5,3 persen direvisi menjadi lebih realistis di angka 5,3-5,6 persen
 - 3) Penurunan persentase penduduk miskin yang semula dalam RPJMN Tahun 2015-2019 berada di angka 8,5-9,5 persen, direvisi menjadi di kisaran 9,5 -10,5 persen.
 - 4) Gini Rasio diestimasikan akan dapat mencapai 0,38
 - 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru akan diproyeksikan tercapai di angka 75,7
- d. Tema pembangunan regional (Sumatera) dan target pembangunan nasional untuk Provinsi Sumatera Utara

Adapun tema pembangunan wilayah untuk Pulau Sumatera Tahun 2017 adalah :

- 1). Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam rangka perdagangan internasional.

- 2). Lumbung energy nasional, termasuk pengembangan energy terbarukan biomassa
- 3). Pengembangan hilirisasi komoditas batubara
- 4). Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit dan kaolin.
- 5). Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industry perikanan, pariwisata bahari, industry perkebunan dan industry pertambangan.

Sementara target-target yang diharapkan dapat tercapai oleh Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung sasaran pembangunan makro ekonomi dan social RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Laju Pertumbuhan ekonomi diharapkan ada tahun 2017 Sumatera Utara dapat mencapai 7,2 persen
- 2) Persentase penduduk miskin diharapkan pada tahun 2017 dapat menjadi sekitar 8,1 persen.
- 3) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 dapat berada di angka 5,6 persen.

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015, serta perumusan permasalahan dan tantangan tahun 2017, yang telah disajikan pada Bab-II, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

4.3.1. Isu Strategis Global

Berbagai Isu Global yang berhubungan dan mempengaruhi kondisi regional, nasional maupun lokal (Provinsi Sumatera Utara) berkaitan dengan ekonomi dan sosial antara lain adalah :

a. Perekonomian :

- 1) Krisis yang berkepanjangan dan lambannya proses pemulihan ekonomi negara maju telah menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kebijakan akomodatif oleh otoritas negara maju sebagai respon ekonomi yang melambat dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan krisis dan hanya memberi sentimen positif jangka pendek. Oleh karena itu, imbas nyata kebijakan akomodatif baru dirasakan di pasar keuangan, sementara indikator makro seperti angka pengangguran, investasi, konsumsi, dan sentimen bisnis masih dalam kecenderungan melemah.
- 2) Adanya sistem perdagangan bebas dunia dengan kebijakan nol tariff, sementara daya saing produk pertanian lokal umumnya masih rendah, sehingga pasar saat ini kebanjiran barang impor produk luar yang lebih murah dengan kualitas lebih baik.
- 3) Adanya kenaikan permintaan dunia akan produk berkualitas yang dihasilkan dari pertanian ramah lingkungan (pertanian organik) dan sistem pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) dan adanya kecenderungan pertumbuhan ekonomi kedepan lebih mengedankan pertumbuhan yang selaras dengan lingkungan (ekonomi hijau).
- 4) Terjadinya perubahan iklim dunia (*Climate Change*) akibat pemanasan global mempengaruhi pola tanam yang dapat mengancam ketahanan pangan khususnya di sejumlah daerah yang masih dalam kategori rawan pangan.

- 5) Adanya konflik kepentingan komoditi pertanian sebagai bahan pangan dan juga sebagai sumber energi pengganti bahan baku fosil (energi alternatif), mengancam ketersediaan pangan dunia
- 6) Terbentuknya ASEAN *Economic Community* (AEC) dengan pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) di tahun 2016 akan menghadapkan kita pada situasi di mana lalu lintas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil akan menjadi jauh lebih bebas. Ini akan menjadi ancaman jika Sumatera Utara tidak siap menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena kesamaan komoditi ekspor yang dipasarkan. Tidak ada pilihan bagi kita selain meningkatkan daya saing setinggi mungkin dan daya saing perekonomian kita akan lebih ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Sosial :

- 1) Tujuan Pembangunan Millenium (*The Millenium Development Goals*) yang dimulai dari tahun 1990 dengan target tahun 2015, belum semuanya dapat dicapai, terutama di bidang kesehatan yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), masih cukup tingginya prevalensi balita kekurangan gizi dan prevalensi balita bertubuh pendek.
- 2) Saat ini kita hidup satu kampung global (*global village*) dimana lalu lintas orang, barang, uang dan penyakit tidak tersekat-sekat lagi, sehingga dibutuhkan kerjasama antar Negara dalam menangani penyakit pandemic yang menyebar keseluruh dunia seperti penyakit flu burung, flu babi, mad cow serta HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan zat aditif berbahaya.
- 3) Pertumbuhan penduduk dunia dan adanya peperangan menjadi pemicu kelaparan dan pemiskinan di sejumlah negara yang belum berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan. Bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin ini dan menjamin ketersediaan makanan untuk semua.
- 4) Perkembangan politik regional seperti yang terjadi di Myanmar, Korea Utara akan memicu instabilitas di kawasan ini akan berakibat langsung bagi pembangunan Indonesia (imigrasi).
- 5) Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, isu terorisme turut mempengaruhi Indonesia. Perlu dilakukan langkah-langkah global dan regional untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkan perang terhadap terorisme tersebut.
- 6) Masih tingginya jumlah penduduk miskin di berbagai belahan dunia mengindikasikan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di berbagai negara tersebut masih kurang, kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa modal sosial memberi andil yang cukup besar bagi keberhasilan pembangunan.

4.3.2. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai berkelanjutan dari RPJMD-4

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh

menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan;

- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- Wilayah pinggiran;
- Luar Jawa;
- Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
 - a. Kepastian dan penegakan hukum;
 - b. Keamanan dan ketertiban;
 - c. Politik dan demokrasi; dan
 - d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.
4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

4.3.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu strategis Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Isu Strategis Provinsi

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
Prioritas 1 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kehidupan beragama dan harmonisasi antar umat beragama 2. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah, serta layanan publik yang prima 3. Peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat 4. Peningkatan iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum 5. Peningkatan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN 6. Peningkatan persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum 7. Perwujudan iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah 8. Peningkatan partisipasi dunia usaha, BUMN, BUMD dan perbankan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 9. Pemantapan pelaksanaan otonomi dan kerjasama daerah 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan 11. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan 12. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	13. Peningkatan seni budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
Prioritas 2 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum maksimal 2. Jumlah anak tidak bersekolah masih relatif banyak dan belum terdata dengan baik dan akurat di Kabupaten dan Kota 3. Masih terjadi kesenjangan akses pendidikan menurut kategori perkotaan & pedesaan; serta mampu dan tidak mampu secara ekonomis. 4. Angka kesenjangan cenderung naik di tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi 5. Penduduk \geq 15 tahun yang buta aksara masih relatif banyak dan belum terdata dengan baik dan akurat di Kabupaten dan Kota 6. Peringkat mutu pendidikan Sumatera Utara secara Nasional masih relatif rendah terkait dengan tingkat relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan 7. Pengendalian dan koordinasi antar pemerintah (Provinsi dan Kabupaten & Kota) yang belum berjalan optimal karena kurang ditunjang oleh data dan sinkronisasi kegiatan (sistem informasi manajemen) yang terbangun dengan baik 8. Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesehatan ibu, bayi dan balita ; 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian, penyakit menular, tidak menular dan penyehatan lingkungan; 4. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; 5. Pemenuhan, pengembangan sistem Jamkesmas; 6. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan; 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 9. Tingginya angka BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu perbandingan antara kapasitas rawat inap dengan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Daerah Sumatera Utara yang masih di atas 100% (104%) 10. Tingginya Angka LOS (Length Of Stay) atau lamanya masa rawatan rata-rata perpasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Daerah Sumatera Utara. 11. Kurangnya Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia), terutama dokter spesialis jiwa, perawat khusus jiwa, dan tenaga ahli di beberapa bidang tertentu dan sarana/prasarana rumah sakit jiwa

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
<p>Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi serta peningkatan kesejahteraan 2. Optimalisasi infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan), perhubungan, sumber daya air, energi dan fasilitas lainnya khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit dijangkau 3. Peningkatan struktur jalan menuju kawasan strategis nasional dan jalan strategis provinsi disetiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 4. Pembangunan dan peningkatan struktur jalan lingkarpulau Nias 5. Pembangunan dan peningkatan struktur jalan mendukung kawasan agropolitan dan mebidangro 6. Peningkatan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar 7. Pengembangan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan 8. Peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah 9. Pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat kegiatan lokal yang terkoneksi dalam sistem wilayah 10. Peningkatan koordinasi dan pembinaan penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota 11. Peningkatan kapasitas mitigasi bencana 12. Pengendalian kualitas lingkungan 13. Pengembangan kota baru 14. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau 15. Peningkatan kualitas hunian masyarakat 16. Penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok msyarakat secara tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya; 17. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi/rawa serta produktivitas air irigasi/rawa; 18. Pengurangan alih fungsi lahan pertanian beririgasi harus lebih mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi dan menyediakan lahan beririgasi produktif; 19. Peningkatan kapasitas aliran sungai, berfungsinya bangunan prasarana pengendali banjir dan penataan pemanfaatan sempadan. 20. Perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil dan terluar serta perlindungan daerah Danau Toba dari abrasi air Danau Toba. 21. Optimalisasi fungsi layanan irigasi dan rawa 22. Pengendalian daya rusak air/pengednalian banjir dan pengamanan pantai

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	23. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif (PPSIP) 24. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air 25. Perencanaan koordinasi dan pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu 26. Peningkatan konservasi Sumber Daya Air melalui pengelolaan DAS secara terpadu
Prioritas 5 : Peningkatan produksi, produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1. Penguatan ketahanan pangan (food security) dan penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi untuk terwujudnya swasembada pangan (kedele, daging dan ikan) dan swasembada berkelanjutan (beras, jagung) 2. Diversifikasi pangan untuk penguatan Pola Pangan Harapan (PPH) 3. Peningkatan infrastruktur Pertanian meliputi irigasi, jalan usahatani dan jalan produksi 4. Peremajaan Tanaman Tidak Menghasilkan di Perkebunan 5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan 6. Peningkatan kelembagaan petani dan nelayan 7. Peningkatan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan 8. Penyediaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan 9. Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan 10. Pengendalian inflasi komoditi pertanian 11. Pengendalian dan pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan 12. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan perhutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Prioritas 6 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas daerah	1. Peningkatan kemampuan IPTEK dalam rangka mendukung percepatan, perluasan dan daya saing ekonomi daerah 2. Pengembangan riset dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Unggulan Daerah 3. Pengembangan riset dan penerapan teknologi untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis 4. Penciptaan inovasi dan kreativitas daerah
Prioritas 7 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	1. Peningkatan jumlah dan peran serta koperasi terhadap perekonomian daerah 2. Peningkatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi nonformal

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan daya saing serta produktifitas koperasi dan industri kecil menengah 4. Peningkatan investasi (PMA dan PMDN) 5. Peningkatan sumber-sumber PAD 6. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata serta kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
Prioritas 8 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin	<ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi rumah produktifitas daerah 2. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif berbasis keluarga 3. Peningkatan produktivitas usaha mikro 4. Pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal dan daerah perbatasan 5. Mendorong penciptaan wirausahawan pemula (job creation) 6. Perluasan kesempatan kerja
Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kebijakan nasional di provinsi dan mendorong pelaksanaannya di kabupaten/kota antara lain : MP3KI, MP3EI, RAD MDGs, RAD-PG, RAD - PK dan RAD - GRK 2. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 3. Mendorong percepatan pembangunan KSN dan Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera Utara 4. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan

4.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Sumatera Utara dapat dikemukakan sebagai berikut :

4.4.1. Urusan Wajib

Tabel 4.2. Identifikasi Permasalahan

Bidang/Urusan	Permasalahan
1.1.1.1. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta masih relatif rendah, dari jumlah kurang lebih 194.405 guru di Provinsi Sumatera Utara, lebih dari 50% belum memiliki kualifikasi sarjana (S1). 2) Kemampuan teknis Guru yang ada di daerah pedesaan umumnya masih relatif rendah, baik dalam penguasaan bahan ajar hingga penguasaan metode pembelajaran. 3) Penyebaran guru-guru sesuai

Bidang/Urusan	Permasalahan
	<p>bidang/kompetensinya belum merata di Kabupaten dan Kota. Umumnya guru-guru yang berkompentensi masih terkonsentrasi di Kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten/Kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran secara online (e-Education), antara lain belum tersedianya akses internet dan ketersediaan web site masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota 5) Alokasi anggaran masih minim dan belum memenuhi amanah Undang-undang sebesar 20% APBN & APBD untuk kegiatan pembangunan pendidikan pada masing-masing dinas pendidikan Kabupaen/Kota 6) Kebutuhan akan kompetensi sekolah kejuruan (SMK dan Politeknik)
1.1.1.2. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih terbatasnya SDM kesehatan 2) Belum memadainya dana APBD untuk kesehatan (baru 2-4 %). 3) Pembangunan fisik yang diutamakan sehingga alokasi untuk pembangunan non fisik terabaikan (seperti diklat) 4) Masih ditemukan alokasi peralatan medis tidak sesuai dengan kebutuhan. 5) Masih ada kabupaten/Kota yang belum mempunyai SPM yang baku. 6) RSUD baru sebahagian yang terakreditasi, puskesmas juga masih terbatas jumlahnya yang telah mendapat ISO 7) Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 8) Dukungan Kabupaten/kota yang terbatas untuk mencapai sasaran Universal Coverage
1.1.1.3. Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbatasnya pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi, perhubungan, pengairan dan fasilitas lainnya 2) Kelas jalan yang dibangun sudah tidak mampu menahan beban muatan yang melebihi kapasitas sehingga rentan terhadap kerusakan 3) Kondisi sebagian besar jalan-jalan diwilayah Sumatera Utara baik yang berstatus nasional, provinsi maupun kabupaten berada dalam keadaan kurang baik khususnya di Pantai Barat 4) Kondisi geografis yang sulit di Kawasan Pantai Barat menimbulkan biaya yang lebih mahal dalam proses pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
1.1.1.4. Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya regulasi daerah tentang RTRW Provinsi dan sebagian RTRW Kabupaten/Kota yang

Bidang/Urusan	Permasalahan
	<p>mengacu pada kebijakan penataan ruang (UU No. 26 Tahun 2007) sehingga menjadi kendala dalam percepatan dan investasi pembangunan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Belum tersedianya secara lengkap regulasi tata ruang daerah hingga tingkat operasionalisasi tata ruang melalui ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang kabupaten/kota 3) Belum memadainya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan 4) Belum selesainya upaya penetapan alokasi luasan kawasan hutan sebagai kawasan budidaya maupun kawasan lindung serta penataan batas kawasan hutan 5) Belum tuntasnya permasalahan penetapan tata batas wilayah administratif antara provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi berbatasan (Aceh, Riau, dan Sumatera Barat) serta antar kabupaten/kota 6) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana yang berpotensi terjadi akibat berkurangnya daya dukung alam dan perubahan iklim
1.1.1.5. Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya konsistensi dan komitmen kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi dalam pelaksanaannya (perencanaan dan penganggaran) 2) Masih kurangnya SDM perencana dengan spesifikasi keahlian dari berbagai bidang dan aspek pembangunan 3) Sinkronisasi berbagai kebijakan nasional pada rencana pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
1.1.1.6. Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keterbatasan sarana dan prasana perhubungan khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit untuk dijangkau
1.1.1.7. Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan 2) Meningkatnya kecenderungan kerusakan mangrove, terumbu karang dan pencemaran perairan laut 3) Meningkatnya kecenderungan kerusakan lingkungan hutan TNGL dan wilayah sekitar DAS 4) Meningkatnya kecenderungan pencemaran dan kerusakan lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan 5) Meningkatnya kecenderungan pencemaran udara dan limbah B3 6) Meningkatnya kecenderungan pencemaran dan kerusakan ekosistem Danau Toba 7) Belum optimalnya pengendalian dan penurunan emisi gas rumah kaca

Bidang/Urusan	Permasalahan
1.1.1.8. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Banyaknya masyarakat penyandang masalah sosial 2) Jumlah PMKS yang dapat menerima pelayanan sosial relatif sangat kecil
1.1.1.9. Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi SDM tenaga kerja masih terbatas dan kurang memiliki daya saing 2) Jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar kerja jauh lebih tinggi dari lapangan pekerjaan yang ada
1.1.1.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi dan UMKM terutama prosedur dan biaya perizinan usaha yang masih dirasakan cukup memberatkan disebabkan belum optimalnya pelayanan satu pintu dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 2) Masih lemahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya terutama potensi sumber daya lokal yang tersedia serta permodalan disebabkan Koperasi dan UMKM belum memiliki jaminan (bankable). 3) Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki Koperasi dan UMKM sangat terbatas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran dan sarana yang dimiliki Koperasi dan UMKM disamping komitmen stakeholders belum optimal. 4) Rendahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, yang disebabkan kemampuan dan kualitas manajemen Koperasi dan UMKM relatif rendah. 5) Inventarisasi Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara optimal sehingga data yang akurat terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM sulit diperoleh
1.1.1.11. Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan. Begitu juga dengan ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalian sumber energi baru terutama energi listrik dan gas. 2) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Daerah yang bermasalah serta tidak kondusif bagi pengembangan iklim investasi bahkan cenderung dapat menghambat investasi. 3) Rendahnya daya tarik investasi terutama berkaitan dengan birokrasi, pungutan liar, korupsi, efisiensi, dan good governance.
1.1.1.12. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan hukum dalam aspek budaya (kultur hukum) masyarakat agar mendukung pembangunan daerah di Sumatera Utara. 2) Belum dijadikannya budaya (etnis) menjadi modal

Bidang/Urusan	Permasalahan
	dalam pembangunan daerah
1.1.1.13. Pemuda dan Olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha dengan adanya perubahan paradigma pemuda dari politic category ke social category 2) Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan dikalangan pemuda 3) Semakin maraknya peredaran NAPZA, trafficking anak dan perempuan, pornografi dan pornoaksi, meningkatnya penyakit menular seksual HIV/AIDS dan destruktif yang dapat mengakibatkan lost generation 4) Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 5) Belum berkembangnya klub-klub olahraga di kabupaten/kota 6) Minimnya perhatian dan partisipasi pengusaha, BUMN dan BUMD terhadap pembangunan pemuda dan olahraga 7) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga (belum berimbang) dibanding jumlah penduduk
1.1.1.14. Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman tentang etika dan analisa politik sehingga tercipta situasi kehidupan yang kondusif di Sumut 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum legislatif dan presiden 3. Diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pemahaman Penanganan Pembangunan Sumut
1.1.1.15. Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diperlukan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang kebencanaan di Sumut 2) Tersedianya peta rawan bencana tingkat Kab/Kota 3) Tersedianya logistik dan prasarana logistik penanggulangan bencana
1.1.1.16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan kualitas sumber daya manusia sebagai penyelenggara pelayanan publik maupun tingkat intelektualitas masyarakat sebagai penikmat pelayanan. 2) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih lemah, banyak terjadi praktek pungli, tidak ada kepastian, dan prosedur berbelit-belit. Dampaknya pada bidang usaha ekonomi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat investasi, memperlambat arus barang ekspor-impor, kesan bagi masyarakat kurang memuaskan dan citranya buruk. 3) Fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan

Bidang/Urusan	Permasalahan
	<p>dalam melakukan pelayanan publik.</p> <p>5) Prinsip-prinsip good governance belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.</p> <p>6) Tersendatnya realisasi otonomi yang diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2014, disebabkan oleh kemampuan profesional dan etos kerja aparatur di daerah</p> <p>7) Prinsip-prinsip good governance belum berjalan sebagaimana yang diharapkan</p>
1.1.1.17. Sekretariat Daerah	1) Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
1.1.1.18. Sekretariat DPRD	1) Optimalisasi kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah
1.1.1.19. Litbang	<p>1) Belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi/lembaga Litbang lainnya di Sumatera Utara</p> <p>2) Belum adanya payung hukum seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>3) Proses pengambilan kebijakan dalam program Pembangunan Daerah masih belum merupakan hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh BPP Provsu, hal ini berkaitan dengan kualitas hasil penelitian yang belum dapat memenuhi kebutuhan Pemprovsu</p> <p>4) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas daerah</p> <p>5) Masih belum optimalnya fungsi Badan Riset Daerah</p>
1.1.1.20. Inspektorat Daerah	1) Belum optimalnya fungsi inspektorat dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan
1.1.1.21. Kantor Perwakilan Jakarta	<p>1) Terbatasnya pengembangan kapasitas ruang penginapan</p> <p>2) Belum optimalnya kapasitas sdm dan sarana prasarana dalam mendukung kinerja layanan publik</p>
1.1.1.22. Pendidikan dan Pelatihan	<p>1) Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan latihan</p> <p>2) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar dan widyaiswara</p>
1.1.1.23. Kepegawaian Daerah	1) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih lemah, banyak terjadi praktek pungli, tidak ada kepastian, dan prosedur berbelit-belit. Dampaknya

Bidang/Urusan	Permasalahan
	<p>pada bidang usaha ekonomi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat investasi, memperlambat arus barang ekspor-impor, kesan bagi masyarakat kurang memuaskan dan citranya buruk.</p> <p>2) Kualitas produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna jasa</p>
1.1.1.24. Sekretariat KORPRI	1) Peningkatan peran dan fungsi sekretariat Korpri dalam pembinaan anggota
1.1.1.25. Ketahanan Pangan	<p>1) Belum tercapainya swasembada untuk semua komoditi , khususnya kacang kedele, daging sapi</p> <p>2) Masih rawannya ketahanan pangan</p> <p>3) Belum meratanya distribusi pangan</p> <p>4) Belum menurunnya konsumsi beras</p>
1.1.1.26. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	<p>1) Kapasitas SDM penyuluh perlu ditingkatkan</p> <p>2) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga penyuluh di Provinsi dan Kabupaten/kota</p> <p>3) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh di lapangan</p> <p>4) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluhpenyuluh</p>
1.1.1.27. Pemberdayaan Masyarakat & Desa	<p>1) Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, sejak beberapa tahun terakhir tetapi jumlahnya masih cukup tinggi.</p> <p>2) Beberapa daerah mempunyai perentase penduduk miskin yang sangat besar seperti Gunung Sitoli sebesar 33,7%.</p> <p>3) Kemiskinan yang terjadi umumnya kemiskinan struktural yang berapa di daerah kumuh, desa terpencil, dan nelayan.</p> <p>4) Lambatnya pembangunan daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi</p>
1.1.1.28. Komunikasi dan Informatika	<p>1) Perlunya dilakukan sosialisasi komunikasi dan diseminasi Informasi Pra Pemilu Legislatif dan Presiden di Kabupaten/Kota</p> <p>2) Perlunya dilakukan Pertemuan Komunikasi dan Informasi antara Muspida Plus se-Sumatera Utara dalam Rangka Pra Pemilu Legislatif dan Presiden</p> <p>3) Implementasi pelaksanaan E- Government dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara</p>
1.1.1.29. Perpustakaan dan Arsip	<p>1) Belum semua Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007</p> <p>2) Rendahnya minat baca masyarakat karena belum tertanamnya budaya gemar membaca</p> <p>3) Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan dan</p>

Bidang/Urusan	Permasalahan
	<p>kearsipan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Minimnya SDM Pustakawan dan Arsiparis 5) Belum adanya peraturan tentang wajib baca dan wajib simpan arsip 6) Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah 7) Belum terpenuhinya permintaan komponen masyarakat mendirikan perpustakaan 8) Rendahnya keinginan untuk menulis buku terutama muatan lokal 9) Sulitnya menemukan arsip-arsip tempo dulu dan naskah kuno /manuskrip

4.4.2. Urusan Pilihan

Bidang/Urusan	Permasalahan
1.1.1.30. Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Status kepemilikan dan luas lahan petani sangat minim yang mengakibatkan pendapatan tidak mencukupi kebutuhan untuk hidup sejahtera (nilai tukar petani masih rendah) 2) Petani umumnya berpendidikan rendah (setingkat SD/sederajat), sehingga mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan penerapan teknologi. 3) Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian (irigasi, Jalan Usaha Tani, pusat pemasaran produk pertanian) mengakibatkan banyaknya terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan menjadi lahan perkebunan atau untuk peruntukan lainnya 4) Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global 5) Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan 6) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani 7) Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal 8) Masih luasnya Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) di perkebunan 9) Mutu hasil produk perkebunan masih rendah, kurang didukung oleh Unit Pengolahan yang efisien dan terbatas pada produk primer, sehingga peluang untuk memperoleh nilai tambah belum maksimal 10) Masih besarnya sumbangan sektor pertanian dalam memacu inflasi 11) Ancaman kerusakan Sumber Daya Alam akibat pengelolaan yang tidak tepat 12) Jaminan harga produk pertanian di tingkat petani

1.1.1.31. Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelestarian dan pengendalian hutan 2) Masih terjadinya perambahan hutan dan illegal logging 3) Terjadinya kebakaran hutan
1.1.1.32. Energi dan Sumberdaya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bauran energi (energy mix) belum optimal. 2) Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), terutama listrik dan gas. 3) Teknologi dan pendanaan didominasi asing. 4) Regulasi masih perlu disempurnakan diikuti dengan konsistensi kebijakan. 5) Kebijakan harga (pricing policy) masih belum tepat. 6) Efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik. 7) Parsitipasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi kurang. 8) Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan; 9) Perlunya regulasi baru tentang pengelolaan tambang batuan non logam; 10) Rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tambang 11) Data dan informasi tentang potensi sumberdaya mineral belum rinci dan kualitas cadangan . 12) Belum terjaminnya kepastian hukum berusaha di bidang pertambangan dan penggalian. 13) Tumpang tindih lokasi prospek pertambangan dan penggalian dengan kawasan hutan lindung. 14) Padat modal dan resiko tinggi berusaha di bidang pertambangan dan penggalian. 15) Persepsi sebagian masyarakat bahwa kegiatan pertambangan/penggalian merusak lingkungan. 16) Kurang intensifnya promosi di bidang pertambangan
1.1.1.33. Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komitmen dari berbagai pihak terkait dengan pariwisata belum seluruhnya terlaksana. 2) Pengelolaan pariwisata yang ada di kabupaten / Kota belum dilaksanakan secara optimal. 3) Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata. 4) Aksesibilitas menuju beberapa daerah objek tujuan wisata masih kurang mendukung. 5) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten / Kota masih relatif rendah. 6) Apresiasi masyarakat terhadap pariwisata masih rendah. 7) Peran serta dari masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata masih rendah. 8) Keterbatasan dana pengembangan pariwisata di Kabupaten / Kota. 9) Aspek-aspek dalam pengembangan pariwisata belum memiliki kepastian hukum yang kuat. 10) Minat investor pada sektor pariwisata di Provinsi

	<p>Sumatera Utara masih rendah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11) Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terfokus pada pangsa pasar tertentu. 12) Masyarakat di DTW belum memiliki perilaku sadar wisata 13) Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap objek-objek wisata dan budaya yang berada didalam kawasan strategis provinsi 14) Belum optimalnya sektor pariwisata sebagai pendorong ekonomi wilayah
1.1.1.34. Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pencurian ikan (illegal fishing) masih menjadi kendala program pembangunan perikanan disebabkan lemahnya pengawasan serta pengendalian terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. 2) Terjadinya praktik-praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak bertanggung jawab, serta melanggar peraturan sehingga terjadi kehilangan sumber daya yang cukup besar setiap tahunnya. 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat terlarang seperti bom, racun, trawl (Kepres No. 39 Tahun 1980). 4) Masih terbatasnya ketersediaan bibit/benih unggul pada perikanan budidaya 5) Belum optimalnya peran UPT dalam menghasilkan bibit unggul untuk memenuhi kebutuhan bibit 6) Masih rendahnya kualitas SDM Nelayan dan Pembudidaya 7) Keterbatasan akses nelayan terhadap permodalan
1.1.1.35. Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya pengawasan barang yang beredar dalam rangka pengamanan dan perlindungan konsumen 2) Informasi tentang produk-produk dalam negeri belum optimal, hal ini menjadi penyebab barang produksi dalam negeri belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. 3) Masih banyak alat-alat UTTP yang belum standar di Kabupaten/Kota, disebabkan masih minimnya pengawasan dalam hal ini karena kekurangan tenaga pemeriksa 4) Daya saing hasil produksi IKM Masih Lemah karena penggunaan teknologi masih relative sedikit 5) Rendahnya kualitas barang-barang produk IKM dan kurangnya pemanfaatan teknologi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk IKM 6) Masih rendahnya kemampuan SDM di bidang teknologi maupun manajemen, sehingga produktifitas masih rendah. 7) Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9 (sembilan) bahan pokok serta barang beredar

	8) Masih banyak produk-produk komoditi unggulan Sumatera Utara yang belum dikenal di Indonesia 9) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan penguasaan teknologi masih rendah dan terbatas 10) Masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Instansi serumpun) dalam merencanakan kegiatan. 11) Belum Optimalnya data industri dan perdagangan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan masa yang akan datang 12) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri 13) Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal komoditi andalan Sumatera Utara. 14) Adanya barang-barang impor ilegal 15) Masih rendahnya skill dan pengetahuan SDM UKM di bidang Ekspor-Impor
--	---

4.5. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2015 serta perkiraan pada tahun 2016 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

a. Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Menilik kepada Visi Pembangunan Jangka Panjang Tahap IV Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yakni : “Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada daya saing daerah yang dilandaskan kepada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi”, dan Tema RKP Tahun 2017, maka ditentukan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah :

“ SINERGITAS PEMBANGUNAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN”.

Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, yakni :

1. Sinergisitas Pembangunan

- Peningkatan Koordinasi antar SKPD Pemprov
- Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi antara Dokumen Perencanaan Nasional dengan Provinsi Sumatera Utara
- Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan antar Kab/Kota dengan Provinsi
- Mendorong keterpaduan pembangunan yang berujung pada sasaran pembangunan yang tercapai

2. Meningkatkan daya saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

- Peningkatan Kualitas SDM
- Optimalisasi Pemanfaatan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung dan pelestarian lingkungan

- Peningkatan Kualitas dan kuantitas pertumbuhan ekonomi
- Menekan angka inflasi
- Peningkatan komoditas dan nilai Ekspor
- Peningkatan penggunaan teknologi di segala bidang untuk peningkatan produktifitas
- Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani
- Pengurangan Resiko Bencana
- Penurunan Kemiskinan dan pengangguran
- Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

b. Sasaran Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Dengan mendasarkan kepada sasaran utama pembangunan nasional, maka sasaran utama pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen
- b. Penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 5,80 persen
- c. Penurunan persentase angka kemiskinan menjadi 9,55-10 persen
- d. Laju inflasi $4,0 \pm 1$ persen

Berdasarkan analisis capaian indikator makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 dan target tahun 2016-2017, maka diproyeksikan sasaran makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2014-2015 dan Estimasi Tahun 2016-2017

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI EKONOMI TAHUN 2014 - 2015 ¹⁾		PRAKIRAAN TARGET ²⁾	
			2014	2015 ^{*)}	2016	2017
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Triliun Rp	521,95	571,72	648,78	739,38
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Triliun Rp	419,57	440,96	465,85	492,64
3	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	37,91	41,02	45,99	51,78
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga kontans 2010	Juta Rp	30,48	31,64	33,02	34,50
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,23	5,10	5,65	5,75
6	Nilai Tukar Petani (NTP)		100,08	98,63	100,23	100,56
7	Struktur Perekonomian					
-	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	23,27	22,01	21,35	20,79
-	Pertambangan dan Penggalian	Persen	1,32	1,35	1,46	1,57
-	Industri Pengolahan	Persen	19,97	20,21	20,17	20,28
-	Pengadaan Listrik dan Gas	Persen	0,11	0,10	0,09	0,08

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI EKONOMI TAHUN 2014 – 2015 ¹⁾		PRAKIRAAN TARGET ²⁾	
			2014	2015*)	2016	2017
-	Pengadaan Air	Persen	0,10	0,10	0,10	0,10
-	Konstruksi	Persen	13,31	13,61	14,09	14,53
-	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan S. Motor	Persen	17,17	17,43	17,20	16,65
-	Transportasi dan Pergudangan	Persen	4,97	4,99	5,15	5,39
-	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	2,35	2,41	2,46	2,45
-	Informasi dan Komunikasi	Persen	1,97	1,95	1,80	1,74
-	Jasa Keuangan	Persen	3,27	3,35	3,43	3,52
-	Real Estate	Persen	4,37	4,50	4,61	4,72
-	Jasa Perusahaan	Persen	0,93	0,96	0,99	1,03
-	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sos Wajib	Persen	3,61	3,71	3,73	3,76
-	Jasa Pendidikan	Persen	1,90	1,87	1,85	1,83
-	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Persen	0,88	0,93	0,98	1,04
-	Jasa Lainnya	Persen	0,52	0,53	0,54	0,54
7	Volume Ekspor	Juta Ton	9,09	9,00	9,07	9,09
8	Nilai Ekspor	Milyar US\$	9,36	7,75	8,61	9,05
9	Volume Impor	Juta ton	7,39	6,85	6,97	6,99
10	Nilai Impor	Milyar US\$	5,05	3,99	4,88	5,44
11	Tingkat Inflasi	Persen	8,17	3,24	4 ± 1	4 ± 1

Sumber : 1) BPS Provinsi Sumatera Utara

2) Bappeda Provinsi Sumatera Utara

*) Triwulan III

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diarahkan kepada :

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;
6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah.

Sektor-sektor prioritas ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing-masing Kabupaten/Kota, melalui berbagai kerjasama pendanaan untuk berbagai kegiatan menurut sektor-sektor pembangunan yang berpedoman kepada fokus pembangunan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu tetap diupayakan penggalian dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Sumatera Utara, seperti melalui kerjasama Pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*), sektor dana Corporate Social Responsibility (CSR), Program Komitmen Bina Lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara/ Daerah serta dana Pinjaman Luar Negeri (LOAN)

4.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri tentang tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diterbitkan setiap tahunnya, bahwa RKPD tahun 2017 harus disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang menjadi landasan penyusunan berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sampai dengan tahun 2014, pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan. Kelima belas bidang SPM tersebut wajib diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan 9 (sembilan) diantaranya wajib diterapkan oleh provinsi dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dalam hal ini Bappeda berfungsi dalam mengkoordinasikan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD). Sedangkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM dikoordinasikan oleh Biro Otonomi dan Kerjasama Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditembuskan ke Bappeda sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Kesembilan SPM bidang urusan pemerintahan provinsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pendidikan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemetaan sekolah terkait lokasi, kondisi ruang kelas, dan persebaran penduduk;
- 2) Pemetaan kondisi dan pemenuhan kebutuhan ruangan, laboratorium, alat peraga dan berbagai fasilitas sekolah lainnya;
- 3) Pemetaan jumlah dan kompetensi guru dan kepala sekolah serta identifikasi berbagai aktifitas yang mendukung pembinaan, pelatihan dan sertifikasi;
- 4) Pendataan dan penyediaan kebutuhan buku bagi peserta didik dan guru;
- 5) Pemantapan kurikulum 2013 melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi; dan
- 6) Penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui pemetaan kemampuan satuan pendidikan, diklat peningkatan kompetensi dan penjaminan mutu substansi MBS.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan adalah :

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), diantaranya BOP PAUD, satu desa satu PAUD, dan bantuan rintisan lembaga PAUD baru;
- 2) Dukungan pelaksanaan program pendidikan dasar, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SD, SMP, BOS SD dan SMP, pembangunan unit sekolah baru SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sedang SMP, pembangunan SD-SMP satu atap, insentif guru bantu;
- 3) Dukungan pelaksanaan program pendidikan menengah, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SMA dan SMK, BOS SMA dan SMK, RKB SMA dan SMK, USB SMA dan SMK, serta peralatan laboratorium;
- 4) Peningkatan kompetensi bahasa dan apresiasi sastra guru dan siswa; dan
- 5) Dukungan kepada Pendidikan menengah Universal (PMU) melalui penyediaan fasilitas dalam menghadapi hambatan dari segi kultur, ekonomi, geografi, seleksi, informasi, dan keterbatasan waktu bagi warga negara yang akan mengikuti pendidikan menengah.

2. Bidang Kesehatan

Peningkatan akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang kesehatan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peran posyandu dalam melakukan *screening* untuk meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak keluarga miskin usia 6-24 bulan;
- 2) Peran posyandu dalam melakukan *screening* gizi keluarga miskin untuk meningkatkan cakupan perawatan atas balita gizi buruk;
- 3) Kunjungan Puskesmas ke SD dan setingkat untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan siswa;
- 4) Ppromosi keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) mandiri untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif;
- 5) Penemuan kasus penyakit secara aktif pada masyarakat untuk meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;
- 6) Pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin;
- 7) Pelayanan kesehatan rujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
- 8) Peninjauan pada instalasi gawat darurat untuk meningkatkan cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di Kabupaten/Kota;
- 9) Pembinaan terhadap puskesmas dalam penanganan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk meningkatkan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam; dan
- 10) Pembinaan desa siaga aktif untuk meningkatkan cakupan desa siaga aktif.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diselaraskan adalah;

- 1) Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat, antara lain :
 - a) Akses masyarakat terhadap jamban sehat.
 - b) Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
- 2) Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya kesehatan; dan
- 3) Meningkatkan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Bidang Sumber Daya Air yaitu tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
 - b) Bidang Bina Marga
 - (1) Tersedianya jalan yang menjamin aksesibilitas, konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, dan keselamatan pengguna;
 - (2) Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan
 - (3) Pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan “baik” dan “sedang” berdasarkan nilai Internasional Roughness Index (IRI).
 - c) Bidang Badan Pembinaan Konstruksi
 - (1) Tersedianya data-data terkait 3 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait;
 - (2) Tersedianya SDM yang dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI.
 - d) Penataan Ruang yaitu ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) dan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a) Bidang Sumber Daya Air
 - (1) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok mineral sehari-hari.
 - (2) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
 - b) Bidang Bina Marga
 - (1) Adanya pembangunan/penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi;
 - (2) Percepatan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi;
 - (3) Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan
 - (4) Pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan “baik” dan “sedang” berdasarkan nilai Internasional Roughness Index (IRI).
 - c) Bidang Cipta Karya

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

Selain itu, beberapa kegiatan prioritas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu diselenggarakan adalah :

- 1) Mendukung ketahanan pangan nasional, melalui Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- 2) Mendukung ketahanan air melalui kegiatan pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya dan penyedia dan pengelolaan air baku; dan
- 3) Mengendalikan daya rusak air dalam rangka mengurangi kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, serta abrasi pantai, melalui pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), telah ditetapkan **Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang perumahan rakyat, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi:
 - a) Sosialisasi dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau;
 - b) Pemutakhiran data secara berkala dari Kabupaten/Kota terkait bangunan rumah, harga rumah, penghasilan rumah tangga dan kondisi PSU lingkungan perumahan; dan
 - c) Pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri, untuk substansi ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU;
 - b) Melakukan pemutakhiran data secara berkala, terkait bangunan rumah layak huni, harga rumah, penghasilan rumah tangga, kondisi prasarana, sarana utilitas lingkungan perumahan;
 - c) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;

- d) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan;
- e) Melakukan pelatihan kepada para staf dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat;
- f) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah);
- g) Memberikan fasilitas rumah layak huni dan terjangkau kepada MBR untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan, berupa penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni, pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni, pembiayaan pembangunan rumah layak huni dan pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni;
- h) Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitas kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
- i) Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
- j) Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 (dua) kali laporan dalam satu tahun anggaran;
- k) Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan tentang ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan MBR menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU.

5. Bidang Perhubungan

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, telah ditetapkan **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang transportasi, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi).
 - b) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - c) Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 Gross Tonnage (GT) dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

- d) Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelalaian kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota
- a) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
 - b) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang perhubungan yang perlu diselenggarakan adalah;

- 1) Membangun konektivitas nasional dengan cara:
 - a) Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/prasarana transportasi;
 - b) Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia transportasi;
 - c) Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; dan
 - d) Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN.
- 2) Membangun industri jasa transportasi nasional dengan cara:
 - a) Mendorong peran pemerintah provinsi Kabupaten/Kota, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
 - b) Meningkatkan kepastian hukum; dan
 - c) Melanjutkan reformasi regulasi/deregulasi.

6. Bidang Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup, yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota** dan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota** dan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup berupa:
 - a) Pelayanan informasi status mutu air;
 - b) Pelayanan informasi status mutu udara ambien;
 - c) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- d) Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan) di provinsi;
 - e) Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup;
 - f) Terlatihnya sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup;
 - g) Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; dan
 - h) Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup berupa:
- a) Pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
 - c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
 - d) Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang lingkungan hidup yang perlu diselenggarakan adalah;

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah;
- 2) Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber domestik dan usaha skala kecil;
- 3) Pengelolaan kualitas lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau dalam rangka penurunan laju kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- 4) Inventarisasi dan pemetaan lokasi area terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (prioritas area industri kecil dan menengah contoh: *recycle battery/aki*, kerajinan emas tembaga dan perak);
- 5) Pengelolaan kualitas lingkungan pantai, kawasan karst, dan perlindungan mata air di hulu sungai; dan
- 6) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan di daerah melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH), Produk Rekayasa Genetik (PRG), dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, telah ditetapkan **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota**, dan **Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Penyediaan cakupan bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%;
 - b) Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kab/Kota;
 - c) Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di Provinsi;
 - d) Pembinaan penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan daerah kab/kota diwilayahnya;
 - e) Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM;
 - f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - g) Pembangunan sistem data SPM di daerah;
 - h) Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi;
 - i) Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - j) Monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten/kota.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Penyediaan cakupan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%;
 - b) Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi;
 - c) Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di kabupaten/kota;
 - d) Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM;
 - e) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - f) Penyusunan data dan informasi untuk mendukung penerapan SPM;
 - g) Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan dan anak di daerah;
 - h) Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - i) Membangun kerjasama antar daerah dan *stakeholder* dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan

- j) Membangun kerjasama antar daerah dan *stakeholder* dalam penerapan dan pencapaian SPM.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang harus diselaraskan adalah;

- 1) Penggunaan parameter kesetaraan gender dalam penyusunan dan perancangan kebijakan;
- 2) Pemberian akte kelahiran gratis;
- 3) Patisipasi anak yang merujuk pada konvensi hak anak dan peraturan peraturan perundangan yang terkait dengan tumbuh kembang anak;
- 4) Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang politik, kesehatan dan lingkungan hidup;
- 5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- 6) Perlindungan hak perempuan, terutama perempuan korban kekerasan dan *trafficking*;
- 7) Peningkatan kualitas hidup anak terutama dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 8) Pengembangan data gender dan anak; dan
- 9) Pengembangan kabupaten/kota layak anak.

8. Bidang Keluarga Berencana

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera meliputi jenis pelayanan dasar yang mencakup pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi data mikro, telah ditetapkan **Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang keluarga berencana, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui perencanaan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan, kependudukan dan analisa dampak kependudukan;
- 2) pengembangan peta Pasangan Usia Subur (PUS) dan pendataan keluarga di desa;
- 3) penyediaan dukungan operasional lini lapangan bagi Kelompok kegiatan (POKTAN), Petugas Pembantu Lapangan Keluarga Berencana (PPLB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) minimal 12 kali dalam setahun;
- 4) Rapat koordinasi program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat desa dan kecamatan; dan
- 5) Penyediaan dukungan operasional dan sumber daya manusia untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ditingkat kecamatan.

9. Bidang Sosial

Dalam rangka menjamin akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah, telah ditetapkan **Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/ 2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang sosial, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial, pusat rehabilitasi, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial;
- 3) Kesejahteraan sosial bagi korban bencana melalui pelayanan sosial dasar yang meliputi pendidikan masyarakat di daerah bencana dengan taruna siaga bencana, penyiapan kampung siaga bencana, dan alokasi bantuan sosial bagi korban bencana; dan
- 4) Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat, mental, lanjut usia terlantar, fakir miskin, keluarga miskin rumah tangga sangat miskin yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang responsif gender.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang sosial yang perlu diselaraskan adalah;

- 1) Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- 2) Program keluarga harapan;
- 3) Asistensi Sosial Dengan Kecacatan Berat (ASODKB);
- 4) Asistensi sosial lanjut usia terlantar; dan
- 5) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial yang terdiri dari gelandangan dan pengemis, wanita tuna sosial, eks napi, kelompok minoritas (waria, gay, lesbian, orang dengan HIV-AIDS).

10. Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target **SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketenagakerjaan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelatihan keterampilan kerja yang merupakan pekerjaan nasional bersifat lintas sektoral, pusat dan daerah, dan antar daerah melalui kegiatan reorientasi, revitalisasi dan pemenuhan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebijakan nasional;
- 2) Peningkatan efektifitas informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja khusus serta memperluas kesempatan kerja melalui model padat karya dan inkubasi bisnis;
- 3) Peningkatan efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui evaluasi peraturan-peraturan daerah yang teridentifikasi menimbulkan kemelut dan peningkatan profesionalisme serikat pekerja/buruh;
- 4) Peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan melalui pemberian fasilitas bagi usaha ekonomi informal agar menjadi formal serta pembinaan tentang perlindungan tenaga kerja dan syarat-syarat kerja kepada pengusaha-pengusaha ekonomi informal; dan
- 5) Pengawasan ketenagakerjaan dengan indikator besaran pemeriksaan perusahaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan.

11. Bidang Penanaman Modal

Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan dalam **Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota** dan **Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota**.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang penanaman modal, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal;
- 2) Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang penanaman modal yang harus diselenggarakan adalah :

- 1) Penyelesaian penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- 2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 4) Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia (MII) dalam rangka mempromosikan peluang investasi daerah; dan

- 5) Implementasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

12. Bidang Kesenian

Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/ MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang kesenian, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kajian kesenian berupa seminar, diskusi, bengkel seni dan kegiatan serupa lainnya;
- 2) Melakukan fasilitasi kesenian di daerah berupa pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kderisasi, penerbitan dan pendokumentasian dan kritik seni; dan
- 3) Mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerah berupa pertunjukan, pameran, festival atau lomba.

Selain itu, beberapa kegiatan dalam bidang kesenian dan budaya yang harus diselenggarakan adalah :

- 1) Registrasi budaya untuk melindungi dan mengembangkan warisan budaya;
- 2) pengembangan sejarah dan nilai budaya;
- 3) Pelestarian dan pengelolaan peninggalan puebakala;
- 4) Pelestarian sejarah dan nilai tradisional;
- 5) Rumah budaya dan diplomasi budaya berfungsi untuk menghadirkan Indonesia di mancanegara; dan
- 6) World Culture Forum untuk menjadikan kekuatan budaya dalam pembangunan berkelanjutan.

13. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam rangka pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri, telah ditetapkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pemerintahan dalam negeri, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melanjutkan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, melalui:
 - a. Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Sosialisasi dan bimbingan teknis oleh penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP Elektronik;
 - c. menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran; dan

- d. Menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kematian.
2. Meningkatkan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, melalui:
 - a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota melalui tindakan pre-emptive, preventir non yustisial, maupun penindakan yustisial;
 - b. Peningkatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepala desa/lurah dan kepala RW.
3. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, melalui:
 - a. Menyusun data profil kebakaran pada wilayah permukiman, gedung layanan publik, pabrik/industri, hutan, lahan dan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
 - c. Melakukan kerjasama antara kabupaten dan kota untuk pengurangan resiko kebakaran dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini BPBD Provinsi, serta nota kerjasama dengan pelaku usaha untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta kesatuan masyarakat adat;
 - d. Menyusun kriteria kondisi mendesak kejadian kebakaran pada Peraturan Daerah tentang APBD yang dapat memenuhi kriteria belanja tidak terduga dan penggunaan dana lain yang tersedia dalam APBD; dan
 - e. Penataan kelembagaan dan fungsi pemadam kebakaran, Peningkatan dan pengembangan kapasitas Institusi Pemadam kebakaran untuk mendukung desentralisasi dan Otonomi Daerah.

14. Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- 2) Penyusunan Peraturan Gubernur/Bupati mengenai SOP untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- 3) Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi; dan
- 4) Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten/Kota.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang komunikasi dan informasi yang harus diselenggarakan adalah :

- 1) Sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan di bidang pos dan informatika;
- 2) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi di daerah dan Pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 4) Pembentukan dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- 5) Pengembangan kemitraan media dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, bimtek, penyediaan bahan informasi dan format evaluasi.

15. Bidang Ketahanan Pangan

Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketahanan pangan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjamin Ketersediaan Pangan dan penanganan Kerawanan Pangan terkait dengan Penyediaan lumbung pangan;
- 2) penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; dan
- 3) Menjaga stabilitasi harga, distribusi dan keamanan pangan.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang ketahanan pangan yang harus diselenggarakan adalah :

- 1) Penyusunan kebijakan terkait tindak lanjut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang konversi lahan pertanian ke non pertanian termasuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum termasuk fragmentasi lahan karena proses pewarisan, serta mencantumkan Luas Lahan dan Lokasi Lahan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Khusus lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan (Konversi sawah menjadi lahan non pertanian), perlu pemberian insentif perlindungan lahan pertanian produktif;
- 2) Pengembangan usaha penangkaran benih/bibit serta klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan secara luas sesuai dengan Kebutuhan Benih Lokal daerah, sehingga benih/bibit dapat terjangkau petani, dan mencegah beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat sangat merugikan petani. Disamping itu, pemda juga harus memberikan insentif bagi petugas pembenihan/perbibitan;
- 3) Fasilitasi pemanfaatan skim kredit program yang sudah ada (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KKP-E, Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan/KPEN-RP, Kredit Usaha Pembibitan

Sapi/KUPS dan Kredit Usaha Rakyat/KUR) melalui sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi di tingkat lapangan;

- 4) Memperkuat peran penting Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui peningkatan jumlah petugas lapangan dan mendorong munculnya penyuluh swadaya; dan
- 5) Inventarisasi kelompok tani/gabungan kelompok tani, serta mengembangkan industri perdesaan yang melibatkan kelompok tani/gabungan kelompok tani.

B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, perumusan program/kegiatan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam RKPD Tahun 2017 antara lain meliputi:

- a. Pengawasan pelaksanaan perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. Pelaksanaan Strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi
- c. Pengawasan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

C. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur wajib mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, seperti Kapolda, Danrem dan unsur lain di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalam negeri dapat tetap terjaga.

Perumusan program/kegiatan penanganan gangguan keamanan dalam negeri dalam RKPD Tahun 2017 antara lain meliputi :

- a. Penuntasan penanganan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terorisme yang terjadi di beberapa daerah;
- b. perbaikan sistem penanganan gangguan keamanan agar lebih responsif dan dapat diandalkan;
- c. Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan; dan
- d. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

D. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan serta menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara Indonesia, diperlukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah agar merumuskan program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin kepada :
 - 1) Unsur-unsur organisasi politik
 - 2) Organisasi kemasyarakatan
 - 3) Lembaga nirlaba lainnya
 - 4) Lembaga pendidikan
- c. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas anggota dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah dan Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

E. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dibidang urusan administrasi kependudukan maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kebijakan tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain mencakup masa berlaku KTP elektronik yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data, pengurusan dan penerbitan dokumen untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, akta kelahiran, akta pengangkatan anak), dan hal-hal lain yang ditujukan untuk kemudahan dan kelancaran pengurusan administrasi kependudukan bagi setiap warga masyarakat;
- b. Penyesuaian Peraturan Daerah yang terkait dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Pencetakan, Penerbitan dan Pendistribusian dokumen kependudukan; dan
- d. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dengan memanfaatkan database kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peraturan menteri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

F. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan Pemilukada tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2015 yang diikuti oleh 22 Kabupaten dan Kota sehingga akan melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya (2016-2020);
- b. *Updating* data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;
- c. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan konsultasi dan koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2017) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Renja SKPD 2017 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2017) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- e. Gubernur melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi dan dokumen rencana SKPD provinsi serta dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Bupati/Walikota melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Gubernur;
- g. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disusun kedalam format Rekapitulasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD Se-Provinsi yang tercantum pada Format I.A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014.
- h. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun ke dalam format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum pada format I.B. dan format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana SKPD Kabupaten/Kota yang tercantum pada format I.C. Peraturan Menteri ini;
- i. Penyampaian laporan dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat pada bulan Oktober 2017;
- j. Penyampaian laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f paling lambat pada bulan September 2017;

- k. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- l. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

G. Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) beserta perubahannya. Pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

APFP Provinsi mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPA SKPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota beserta perubahannya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh APFP kabupaten/kota mencakup RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD lingkup kabupaten/kota beserta perubahannya.

Laporan hasil pengawasan APFP provinsi menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Laporan hasil pengawasan APFP kabupaten/kota menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup kabupaten/kota serta pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, perumusan program/ kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memprioritaskan kebijakan untuk:

- a. Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan kabupaten/kota untuk membina aparat pemerintahan desa untuk mengantisipasi pemberlakuan undang-undang tentang desa yang efektif paling lambat tahun 2015;
- b. Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa;
- d. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- e. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan;
- f. Dukungan dana urusan bersama untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

- g. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan;
- h. Pengembang adat istiadat dan budaya masyarakat desa; dan
- i. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

I. Pengembangan Wilayah

Dalam rangka pengembangan wilayah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
- b. Mendorong keterpaduan dan konsistensi kesepakatan perjanjian kerjasama antar daerah/wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil;
- c. Pengembangan sektor/komoditas unggulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategi Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah;
- d. Pengembangan Wilayah Terpadu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- e. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengembangan wilayah, wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan kelautan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah;
- f. Pengelolaan dan perlindungan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil pada area segitiga terumbu karang (*Coral Triangle Initiative*) dan pembangunan kelautan dalam menghadapi dampak perubahan iklim sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/290/III/Bangda tentang Tindaklanjut Hasil *World Ocean Conference* (WOC) dan *Coral Triangle Initiative* (CTI);
- g. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penanggulangan kekurangan gizi mikro pada ibu dan anak, termasuk Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKI) secara cepat dan terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
- h. Dukungan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, dan Tindaklanjut Pengelolaan Penyu dan Habitatnya; dan
- i. Penyusunan perencanaan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut yaitu Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.

J. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2017, dilakukan upaya pengembangan ekonomi daerah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

- b. pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah;
- c. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah;
- d. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- e. peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah;
- f. Pengembangan kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED);
- g. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012;
- h. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD); dan
- i. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

K. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan urusan bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu sehingga dinyatakan bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam skala provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam skala kabupaten/ kota.

Penerapan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup, membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, pemerintah daerah agar mengutamakan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dalam kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;
- b. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Pengembangan potensi ekowisata daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah;
- d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

- Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Perencanaan pembangunan Daerah;
- e. Pengembangan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi;
 - f. Pengembangan dan perlindungan hutan mangrove sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (SNPEM);
 - g. Penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan Pendamping Tenaga Masyarakat (PTM), penguatan fungsi komisi irigasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi;
 - i. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - j. Penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca.

L. Penataan Perkotaan

Belum tertatanya pembangunan kawasan perkotaan sesuai dengan standar pelayanan perkotaan, menimbulkan permasalahan perkotaan seperti masih luasnya kawasan kumuh perkotaan, sanitasi perkotaan yang belum optimal, dan sering timbulnya banjir di perkotaan. Selain itu, tingginya angka urbanisasi yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja telah menyebabkan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah perkotaan, yang bila tidak ditata juga akan menambah kesemrawutan kota.

Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Bagi Provinsi, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan melalui fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya, fasilitasi kerjasama penataan PKL, antar kabupaten/kota di wilayahnya, dan pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya, sedangkan bagi kabupaten/kota penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan melalui penataan dan pemberdayaan PKL dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL, dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL;

- b. Pengelolaan sampah dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- c. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan perkotaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/4371/SJ tentang Cara Perhitungan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan;
- d. Pembangunan perkotaan dengan standar pelayanan perkotaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
- e. Penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- f. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;
- g. Peningkatan dan pengawasan dalam penerbitan ijin Mendirikan Bangunan; dan
- h. Pengembangan kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga dan kerjasama jaringan lintas perkotaan (*sister city dan city sharing*) sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan mengakomodasi program/kegiatan kerjasama pembangunan perkotaan dalam dokumen perencanaan daerah.

M. Peningkatan Kualitas Pengelolaan keuangan Daerah

Dalam rangka rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 agar memperhatikan antara lain :

- a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD;
- b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;

- d. Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut;
- e. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK;
- f. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan petunjuk teknis kementerian/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
- g. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan non permanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- h. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012.

N. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan kegiatan kelitbang yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan RKPDP Tahun 2017, langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa;
- b. peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/kota melalui sosialisasi jabatan fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan; dan

- c. Penelitian pengkajian terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

O. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berbasis kompetensi secara terarah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan.
- c. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah.
- d. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi.
- e. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

Selain itu, sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Badan Diklat Provinsi melaksanakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

P. Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Evaluasi mandiri terhadap LPPD Kabupaten/Kota sebelum Tim Nasional melakukan validasi;
- b. Pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait dengan pelaporan (memerankan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah);
- c. Pemeliharaan dokumen pendukung/dokumen capaian kinerja SKPD;

- d. Pemetaan kapasitas daerah dalam segi kebijakan, kelembagaan sumberdaya manusia dan penyusunan rencana tindak hasil pemetaannya;
- e. Penyusunan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan rencana capaian SPM untuk 5 (lima) tahun mendatang;
- f. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun serta menyampaikan laporan umum dan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait;
- h. Penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan rencana pencapaian SPM diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- i. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- j. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan LPNK dan menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Q. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari 15 bidang kegiatan meliputi: (1) Periklanan, Desain Art dan Seni Grafis; (2) Arsitektur; (3) Pasar Seni dan Barang Antik; (4) Kerajinan; (5) Desain; (6) Fashion (mode); (7) Film, video dan fotografi; (8) Permainan interaktif; (9) Musik; (10) Seni Pertunjukan; (11) Penerbitan dan Percetakan; (12) Layanan Komputer dan Piranti lunak; (13). Radio dan televisi; (14) Riset dan Pengembangan; dan (15) Kuliner.

Untuk mendukung pengembangan kreativitas pada kelimabelas bidang kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pada RKPD Tahun 2017 diarahkan untuk:

- a. Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui system Hak kekayaan Intelektual (HKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan, pemodalannya usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif di pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif;
- b. penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan
- d. Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif.

R. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 antara lain :

- a. Antisipasi prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, terdiri dari kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
- c. Penanggulangan pascabencana mencakup :
 - 1) Rehabilitasi, terdiri dari kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - 2) Rekonstruksi, terdiri dari kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 - 3) Dukungan terhadap penanganan pasca bencana gunung berapi Sinabung, meliputi penyediaan fasilitas lingkungan hunian permukiman bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

S. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain :

- a. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, Swasta, Kementerian/Lembaga dan Lembaga Badan Hukum) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Juknis Tatacara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
- b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi;
- c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
- f. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran di Daerah.

T. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara

Dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang aman, maju dan tertib sebagai halaman terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka perumusan kegiatan dalam RKPDP Tahun 2017 agar memperhatikan antara lain :

- a. Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan;
 - 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan;
 - 3) Penyusunan kebijakan pemerintahan fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk dukungan sarpras bagi produksi dan pengolahan komoditas akses pasar ke negara tetangga, peningkatan kualitas SM, penguatan KISS lintas sektor, kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi, perlindungan hak warga negara, serta kebijakan dan strategi khusus bagi penguatan sosial budaya perbatasan Negara;
 - 4) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama; dan
 - 5) Kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam rangka dukungan permodalan pembangunan akses transportasi, telekomunikasi, dan energi.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan;
 - 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan;
 - 3) Menjaga dan memelihara tanda batas; dan
 - 4) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama.

U. Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Dalam rangka percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan mempedomani **Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/II/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/43794/SJ dan Nomor 21/MPP.PA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).**

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah agar mempertimbangkan :

- a. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's terkait kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria;
- b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan pencapaian SPM;
- c. Analisis gender melalui analisis kesenjangan gender dalam output kegiatan dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) atau analisis lainnya; dan
- d. Penyusunan Gender Budgeted Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG).

V. Pembangunan Gedung Negara

Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

4.7. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja pembangunan daerah diperlukan sinkronisasi antara arahan kebijakan pembangunan dengan arahan fungsi peruntukan ruang. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan antara kebutuhan ekonomi maupun sosial dengan alokasi peruntukan ruang yang tersedia. Kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan didalam rencana kerja pemerintah daerah dengan jangka waktu tahunan, diimplementasikan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan kewilayahan. Dengan keterpaduan ruang, maka interaksi antar wilayah atau kawasan di Sumatera Utara, baik berupa aktifitas ekonomi maupun sosial masyarakat, dapat semakin ditingkatkan dan saling memberikan dampak positif bagi daerah khususnya peningkatan daya saing daerah dalam berkompetisi dengan daerah lain, secara nasional maupun internasional.

Seiring dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi dan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara di Sumatera Utara tersebut, dibutuhkan pengembangan konsep pembangunan melalui pendekatan kajian pengembangan kewilayahan yang bertumpu pada peningkatan daya saing daerah. Pengembangan kajian pengembangan kewilayahan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan, terutama terhadap substansi pembangunan yang bersifat strategis, antara

lain mendukung ketahanan pangan, kemandirian energi, pembangunan infrastruktur transportasi dan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mitigasi bencana.

Pengembangan kajian pada tahun 2017 ini, difokuskan terhadap pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terdapat di Sumatera Utara maupun rencana pengembangan kawasan baru yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan nilai strategis ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Nilai strategis wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh dinamika perubahan yang berasal dari luar wilayah, seperti globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan. Untuk itu, konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari adanya kebutuhan daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika perubahan yang berubah dengan cepat sangat mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Bila daerah lamban dalam merespon perubahan tersebut, maka pembangunan di daerah itu akan semakin tertinggal dan tidak mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Untuk menjawab hal tersebut, maka konsep perencanaan penataan ruang dan pengembangan wilayah yang berdaya saing, merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah terutama di kawasan perkotaan yang cepat berkembang maupun di kawasan perdesaan yang sangat rentan menghadapi gejala perubahan karena keterbatasan sumber daya. Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah yang baik dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi akan berakibat pada semakin bertambahnya kawasan kumuh perkotaan dan desa-desa tertinggal di Sumatera Utara.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika perubahan pembangunan yang terjadi dan meningkatkan kemampuan berkompetisi daerah, maka pengembangan penataan ruang daerah dalam meningkatkan daya saing pengembangan kewilayahan difokuskan antara lain pada:

- Penguatan peran kota-kota yang ditetapkan sebagai pusat-pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat kegiatan lokal yang terkoneksi dalam satu kesatuan sistem wilayah
- Pengembangan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dengan memperhatikan hubungan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan
- Pengembangan implementasi pembangunan berbasis kewilayahan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan budaya masyarakat
- Pengembangan konsep tata ruang di kawasan-kawasan strategis provinsi, yang memiliki nilai strategis ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup, antara lain di kawasan Mebidangro, kawasan agropolitan dan agromarinopolitan.
- Pengembangan kualitas layanan dasar permukiman baik perkotaan maupun di perdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, yaitu sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan ruang terbuka hijau, serta dukungan pembebasan lahan terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di kawasan perkotaan MEBIDANG.
- Penguatan dukungan dari Pemerintah Provinsi terkait pembangunan bidang air minum dan sanitasi khususnya terkait pelaksanaan Program PAMSIMAS, SANIMAS (IDB dan Reguler), PPSP dalam rangka pencapaian target RPJMN Universal Access Bidang Air Minum dan Sanitasi di akhir Tahun 2019.

- Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya dalam meningkatkan kualitas hunian yang lebih layak bagi masyarakat dan penyediaan rumah tinggal yang sehat, baik pembangunan secara horizontal di kawasan-kawasan yang fungsi peruntukan permukiman maupun pembangunan vertikal melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan buruh/pekerja industri.
- Pengembangan konsep kota baru sebagai kawasan permukiman yang terintegrasi dengan interaksi multi fungsi sektoral didalam kawasan.
- Pengembangan konsep integrasi pembangunan infrastruktur pendukung kawasan yang bernilai strategis ekonomi, KEK Sei Mangkei, dan koridor pengembangan Simalungun-Batubara-Asahan.
- Pengembangan konsep ruang interaksi jaringan sumberdaya air dan pertanian/perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing kawasan.
- Pengembangan konsep tata ruang berwawasan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan konservasi energi, antara lain difokuskan di kawasan Danau Toba, DAS Asahan dan sekitarnya.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

5.1. SASARAN DAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN

Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, ditetapkan sasaran dan target kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1. Meningkatnya kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama	1) Terselenggaranya kegiatan keagamaan khususnya aparatur, pemuda/pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan agama, lembaga pemuda, lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, 100 lembaga 3) Terlaksananya perbaikan kualitas rumah ibadah, 100 unit
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat	4) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan untuk peningkatan wawasan kebangsaan.
3. Meningkatnya iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum	5) terselesainya tata batas antar kabupaten/kota (7 Kab/Kota) dalam wilayah Provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan dengan Sumatera Utara (Riau, Sumatera Barat) 6) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan hukum dan politik, 3 kegiatan.
4. Meningkatnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	7) Terwujudnya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
	<p>8) Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>9) Terlaksananya Penilaian dan penghargaan kepada SKPD Provinsi dan Kab/Kota atas prestasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, 4 jenis penghargaan (akumulasi total kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Utara)</p> <p>10) Terwujudnya Program Legislasi Daerah (Prolegda), 5 Perda</p>
5. Terciptanya persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum	11) Terlaksananya pembinaan hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan hukum 4 kegiatan
6. Terwujudnya iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah	12) Ditetapkannya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mendukung peningkatan investasi daerah, 1 perda
7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan	13) Meningkatnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif
8. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	14) Terwujudnya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	15) Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan	<p>16) Terselaraskannya program perencanaan dan penganggaran minimal 90 %</p> <p>17) Tersedianya hasil kajian perencanaan dan pengendalian pembangunan, 8 dokumen perencanaan</p> <p>18) Terwujudnya peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, sarana/prasarana dan penataan ruang/lingkungan hidup, 10 kegiatan</p>
11. Terwujudnya Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	19) Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) secara elektronik (e-Planning) untuk mendukung e-Government, 1 Sistem Informasi

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
12. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah	20) Terlaksananya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
13. Meningkatnya kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan dengan swasta	21) Terselenggaranya pertemuan dan forum kerjasama antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, luar negeri dan swasta (<i>public private partnership</i>)

2. Prioritas 2 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan mengacu kepada PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Tercapainya Indeks Pendidikan 2) Meningkatnya Partisipasi Sekolah	1) Angka Melek Huruf penduduk usia >15 tahun 99,0 %
	2) Rata-Rata Lama Usia Sekolah 10,65 Tahun
	1) Angka Putus Sekolah 1,50 %
	2) IPM menjadi 70,61
	3) APK PAUD 50,25 %
	4) APK SD/MI 107,50 %
	5) APM SD/MI 95,80 %
	6) APK SMP/MTs 94,01 %
	7) APM SMP/MTs 79,00 %
	8) APK SLTA /MA/SMK 88,6 %
	9) APM SLTA /MA/SMK 72,85 %
	10)APK Perguruan Tinggi 34,36 %
3) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan Pasca Sarjana	11) S1/D-IV 61,45 %
	12)Pasca Sarjana (S2/S3) 21 %

3. Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Tercapainya Indeks Kesehatan	1) Rata-Rata Usia Harapan Hidup 72,15 tahun
	2) Angka Kematian Bayi (AKI)/1000 KH : 19

	<p>3) Angka Kematian Ibu Melahirkan menjadi 235/100.000 KH</p> <p>4) Prevalensi balita kekurangan gizi menjadi 19%</p>
2) Layanan Kesehatan Dasar	<p>5) Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menjadi 95 %</p> <p>6) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi menjadi 99 %</p> <p>7) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100%</p> <p>8) Desa/kelurahan Universal Child Immunization menjadi 90 %</p> <p>9) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menjadi 100 %</p> <p>10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menjadi 100%</p> <p>11) Cakupan kunjungan bayi menjadi 98 %</p> <p>12) Persentase Case Detection Rate (CDR) TB, 89 % dan persentase keberhasilan pengobatan 98 %</p> <p>13) Cakupan Puskesmas menjadi Puskesmas ISO, Puskesmas Model Pelayanan Prima, dan Puskesmas Perkotaan menjadi 30 Unit</p> <p>14) Cakupan atau ratio puskesmas/jumlah penduduk : 1 : 23.000</p> <p>15) Cakupan atau ratio puskesmas pembantu (Pustu)/jumlah penduduk menjadi = 1 : 6.700</p>
3) Pelayanan Kesehatan Rujukan	<p>16) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 %</p> <p>17) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 %</p>
4) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	18) Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam menjadi 100 %
5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	19) Cakupan desa siaga aktif menjadi 35 %
6) Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	20) Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi 59 %

7) Upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin	21) Subsidi Jamkesmas 33 Kab/Kota 22) Subsidi Jampersal 33 Kab/Kota
8) Meningkatkan upaya lingkungan sehat di perumahan dan permukiman perbaikan sarana sanitasi dasar untuk pemukiman kumuh dan keluarga miskin perkotaan	23) Perbaikan sarana sanitasi dasar permukiman bagi keluarga miskin perkotaan 20 rumah
9) Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui revitalisasi Pos Yandu	24) Penyuluhan dan pelatihan bagi kader pelayanan kesehatan di pos yandu 2 kali 25) Penyebarluasan informasi melalui TV 12 kali, Radio 100 Kali, dan leaflet, sticker, poster, 33 Kab/Kota.

4. Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing perekonomian adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Meningkatkan daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan terutama pada Kawasan Andalan, Daerah Tujuan Wisata, Daerah yang cepat berkembang serta jalan Lintas Timur, Tengah, Barat dan Diagonal	1) Pembangunan/peningkatan jalan mantap provinsi sepanjang 338,50 Km 2) Pemeliharaan berkala ruas jalan provinsi sepanjang 69 Km 3) Pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.838,64 Km 4) Pembangunan/ rehab jembatan 440,50 m 5) Pemeliharaan rutin jembatan 12115,00 m 6) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 89,08% 7) Mendorong pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/ <i>Public Private Partnership</i>
2) Meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, terpencil maupun kepulauan serta wilayah perkotaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan prasarana jalan	8) Pembangunan Jalan Produksi 25 km (lebar 3 m) 9) Pembangunan Jalan Usaha Tani 50 km (lebar 3m)
3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10) Rasio jaringan irigasi rawa kondisi baik 78,00% 11) Berfungsinya jaringan irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan Rawa seluas 64.339 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi 74,93%

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
4) Penyediaan dan pengelolaan air baku	12) Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku di 50 embung/waduk
5) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	13) Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan pengurangan luas genangan banjir 83,67%
6) Pembangunan dan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai	14) Normalisasi/Pelurusan alur sungai/Perbaikan/Pembuatan Tanggul 433.562m
7) Terbinanya perencanaan pengembangan sumber daya air	15) Inventarisasi daerah irigasi, rawa, kewenangan provinsi serta SID untuk perencanaan dan perbaikan sumber daya air
8) Penguatan KPI dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	16) 8 Kabupaten/Kota
9) Rumah tangga pengguna air bersih	17) Peningkatan akses air minum perpipaan 4,0%
10) Rumah layak huni	18) Terehabilitasinya rumah tidak layak huni 1500

5. Prioritas 5 : Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas **Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan** diarahkan kepada sasaran utama yakni :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	<p>a. Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan target peningkatan produksi diarahkan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 3.935.668 ton 2). Produktivitas Padi sebesar 50,5Kw/ha 3). Produksi jagung mencapai 1.697.315 ton 4). Produktifitas jagung mencapai 58,2Kw/ha 5). Produksi kedelai mencapai 15.578 ton 6). Produktifitas kedelai mencapai 11,90Kw/Ha 7). Meningkatnya Produksi Hortikultura utama lokal lainnya : <ul style="list-style-type: none"> - Sayuran sebesar 14,35 ton/ha

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
	<ul style="list-style-type: none"> - Buah-buahan sebesar 49,75 ton/ha - Tanaman Obat(Biofarma) sebesar 16.958 ton - Tanaman Hias Bunga Potong 17.824.231 potong - Tanaman Hias satuan produksi 154.122 pohon - Melat 28.270 kg 8). Perbanyak Benih Tanaman Pangan 1,6 % 9). Perbanyak Benih Hortikultura 1,6 % 10). Kontribusi sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB 6,82 % 11). Cakupan Bina Kelompok Petani 8,0 % <p>b. Sub-sektor Perkebunan, dengan target peningkatan ekspor sebesar 2,57%, diarahkan kepada tercapainya :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Luas areal perkebunan rakyat di Sumatera Utara mencapai 1.102.461,67 hektar. 2) Produksi perkebunan Sumatera Utara mencapai 6.739.181,22 ton. 3) Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan sebesar 2.57 % 4) Peremajaan areal tanaman tidak produktif (TTM) khususnya pada areal tanaman rakyat seluas 1.500 Ha. <p>c. Sub-sektor Peternakan, dengan target:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Produksi daging 153.239,65 Ton 2) Produksi Susu 983,42 Ton/Tahun 3) Produksi telur 151.161,63 Ton/Tahun 4) Jumlah Akseptor IB 67.441 ekor 5) Jumlah Kelahiran IB 48.558 ekor 6) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan (ASUH) 7) Terkendalinya dan terbebasnya penyakit hewan menular strategis (Rabies, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza) dan penyakit lainnya <p>d. Sub-sektor Perikanan dan Kelautan, diarahkan kepada terpenuhinya target :</p>

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Produksi Perikanan Tangkap sebesar 477.293,8ton 2) Produksi Perikanan Budidaya sebesar 210.020ton 3) Konsumsi ikan per kapita sebesar 42,0 kg/kapita/tahun 4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan 11,91(%) 5) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 228,16 ton 6) Ekspor hasil perikanan sebesar 61.662,7 ton
<p>2) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan</p>	<p>A. Ketersediaan Pangan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan energi per kapita minimal 3.880 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 77,38 gram/hari; 2) Ketersediaan Cadangan Pangan sebesar 186 ton 3) Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 369 lumbung pangan 4) Kelompok Lumbung Pangan sebanyak 99 Gapoktan <p>B. Distribusi Akses Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem distribusi Harga tercapai 100 % 2) Akses Pangan Masyarakat 101 kelompok <p>C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penganekaragaman konsumsi Pangan dan Penurunan konsumsi beras perkapita 1,5 % menjadi 124,82 Kg/Kapita/Tahun untuk memenuhi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2017 sebesar 85,8 2) Konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan energy , karbohidrat sebesar 2.200 Kilokalori/hari dan protein sebesar 57,0 gr/kapita/hari 3) System penanganan keamanan pangan segar 80 % 4) Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota sebanyak 20 kelompok sayuran/buah

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
	D. Penanganan Kerawanan Pangan 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan minimal 8,91 % pada tahun 2017 2) Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan pada 75 desa E. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Ketahanan Pangan Efektivitas koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor	1) Peningkatan ekspor komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh), komoditi hortikultura (kentang, kubis, jeruk, pisang, nenas) rata-rata sebesar 5%
4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peternak, Pekebun dan Nelayan	1) Nilai Tukar Petani 100,56 2) NTP peternakan 108,30 3) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB sebesar 20,79 %
4) Terpeliharanya hutan dan penanganan lahan kritis	1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 15.000 hektar 2) Berkurangnya Kerusakan Kawasan Hutan seluas 5.000 hektar menjadi 66.500 hektar

6. Prioritas 6 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Alokasi dana APBD untuk pengembangan penelitian terapan	1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi / diseminasi TTG 3 kali 2) Jumlah pelaksanaan kajian TTG 9 kajian
2) Riset dan pengembangan teknologi spesifik mendukung pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Andalan dan Kawasan Ekonomi Khusus	3) Jumlah kajian teknologi spesifik 7 kajian 4) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri dan Lembaga Riset lainnya

7. Prioritas 7: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
3) Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1) 2.290.764 unit
2) Pertambahan jumlah KUKM yang mengakses sumber daya produktif	2) 266 KUKM
3) Pertambahan jumlah UMKM yang memanfaatkan sertifikasi HaKI, IRT atau Halal	3) 75 UKM
4) Pertumbuhan jumlah koperasi	4) 12.529 unit
5) Pertambahan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	5) 150 unit
6) Pertambahan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh koperasi	6) 680 orang
7) Pertambahan jumlah Volume Usaha Koperasi	8) Rp. 365.741.381.462
8) Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM pariwisata	9) 3 Destinasi wisata utama (Danau Toba, Nias dan Berastagi) 10) 100 orang tenaga terlatih pariwisata
9) Peningkatan kunjungan wisatawan	11) Peningkatan jumlah kunjungan minimal 10%
10) Kontribusi sub sektor pariwisata	12) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 2,31 %
11) Meningkatnya ratio elektrifikasi	13) 92,72 %
12) Jumlah daya listrik	14) 3.300 MW

8. Prioritas 8 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	1) Persentase Pengangguran Terbuka menjadi 5,80%
2) Penurunan Persentase Penduduk Miskin	2) Persentase penduduk miskin menjadi 9,55%- 10%
3) Penciptaan kesempatan kerja baru	3) Optimalisasi rumah produktifitas daerah bagi sarjana yang belum bekerja untuk 100 sarjana belum bekerja
	4) Mendorong penciptaan pengusaha pemula 12.000 pengusaha.

9. **Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah, yakni :**
 Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan Penanggulangan Penangguran dan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)	1) Penurunan tingkat kemiskinan koridor sumatera yang menjadi quick wins pada lokasi yang akan di tentukan
2) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	2) Mendorong Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 3) Mendorong Terfasilitasinya pembangunan di KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun dan sekitarnya.
3) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs)	
a. Tujuan (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan	4) Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari menjadi 8,75 pada tahun 2017 dan menurunkan Indeks kedalaman kemiskinan 5) Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 80.18% 6) Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015, untuk pencapaian target 2017 : <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi 14.05% • Prevalensi balita gizi buruk 21% • Prevalensi balita gizi kurang 11,90% Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: <ul style="list-style-type: none"> • 1.400 kkal/kapita/hari 8.50 %

	<ul style="list-style-type: none"> • 2.000 kkal/kapita/hari 35.32%
b. Tujuan (2) mewujudkan pendidikan dasar	<p>7) Target 2A : Menjamin pada 2017 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dengan target 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A sebesar 100% • Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas akhir (kelas 6) SD/ MI sebesar 100% • Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun sebesar 98,8%
c. Tujuan (3) meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	<p>8) Target 3 A : menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/Paket A sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan Tinggi sebesar 100% - Rasio Melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 100% - Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebesar 57% - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD minimal sebesar 25%
d. Tujuan (4) Penurunan angka kematian anak	<p>9) Target 4 (a) Menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 2017. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematian anak di bawah lima tahun • Tingkat kematian bayi

	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi
e. Tujuan (5) Meningkatkan kesehatan ibu	<p>10) Menurunnya dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 2017. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratio kematian ibu • Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
f. Tujuan (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya	<p>11) Pada tahun 2017 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun. • Tingkat prevalensi kontrasepsi • Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS <p>12) Tahun 2017 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria • Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan. • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC • Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan pengobatan.
g. Tujuan (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	<p>Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang. Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2017 Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2016, dengan target :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan <p>Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.</p>
<p>h. Tujuan (8) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan erdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂)e Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 	<p>Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2017, dengan target :</p> <ul style="list-style-type: none"> Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan <p>Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.</p>
<p>4) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terpenuhinya kebutuhan energi minimal 2.200 Kkal/kap/hari 2) Terwujudnya penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita menjadi 18 % 3) Terwujudnya penurunan prevalensi ukuran tubuh pendek balita menjadi 34% 4) Terwujudnya penurunan daerah dengan kondisi rawan pangan menjadi 35 % 5) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal 6) Terwujudnya peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat 7) Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat 8) Terwujudnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 9) Terciptanya Kelembagaan Pangan dan Gizi yang kuat
<p>5) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 10) Terlaksananya kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca,

6) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)	11) Terwujudnya penyempurnaan/ Perbaikan Sistem Pelayanan Publik 12) Terwujudnya perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah 13) Terwujudnya penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan 14) Terwujudnya penetapan dan pembinaan Program dan Wilayah Bebas Korupsi
7) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD - PUG)	15) Terbentuknya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG
8) Mendukung sasaran pembangunan lainnya	16) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 17) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan 18) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rumusan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang direncanakan untuk mendukung Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran-2.

5.3. PAGU INDIKATIF UNTUK TIAP SKPD

Dengan berpedoman kepada Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab-III bahwa total dana Pagu Indikatif untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 11.006.218792.215,-. Maka dengan mengacu kepada anggaran tahun berjalan (APBD TA.2016), dengan memperhatikan sasaran/target prioritas dan program/kegiatan pada tahun anggaran 2017, maka dapat diuraikan Pagu Indikatif untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB	10,495,830,147,465	2,797,912,408,987	7,697,917,738,478
1	Pendidikan	594,976,767,908	237,386,719,956	357,590,047,952
	1 Dinas Pendidikan	594,976,767,908	237,386,719,956	357,590,047,952
2	Kesehatan	520,041,502,729	338,974,784,029	181,066,718,700
	1 Dinas Kesehatan	348,456,350,000	200,000,000,000	148,456,350,000
	2 Rumah Sakit Jiwa Daerah	58,563,771,729	25,953,403,029	32,610,368,700
	3 Rumah Sakit Haji Medan	113,021,381,000	113,021,381,000	-
3	Pekerjaan Umum	1,285,486,290,200	1,124,900,000,000	160,586,290,200
	1 Dinas Bina Marga	974,750,000,000	904,400,000,000	70,350,000,000
	2 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	310,736,290,200	220,500,000,000	90,236,290,200
5	Penataan Ruang	149,368,997,050	101,500,000,000	47,868,997,050
	1 Dinas Penataan Ruang & Permukiman	149,368,997,050	101,500,000,000	47,868,997,050
6	Perencanaan Pembangunan	38,982,475,750	23,500,000,000	15,482,475,750
	1 Bappeda	38,982,475,750	23,500,000,000	15,482,475,750
7	Perhubungan	114,165,564,000	30,000,000,000	84,165,564,000
	1 Dinas Perhubungan	114,165,564,000	30,000,000,000	84,165,564,000
8	Lingkungan Hidup	43,796,512,950	27,000,000,000	16,796,512,950
	1 Badan Lingkungan Hidup	43,796,512,950	27,000,000,000	16,796,512,950
13	Sosial	104,542,825,285	41,472,736,735	63,070,088,550
	1 Dinas Kesejahteraan dan Sosial	104,542,825,285	41,472,736,735	63,070,088,550
14	Tenaga Kerja	40,286,868,400	8,500,000,000	31,786,868,400
	1 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	40,286,868,400	8,500,000,000	31,786,868,400
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	56,210,211,700	43,000,000,000	13,210,211,700
	1 Dinas Koperasi dan UKM	56,210,211,700	43,000,000,000	13,210,211,700
16	Penanaman Modal	29,161,862,100	14,700,000,000	14,461,862,100
	1 Badan Penanaman Modal dan Promosi	13,396,122,350	6,575,000,000	6,821,122,350
	2 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	15,765,739,750	8,125,000,000	7,640,739,750

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
17	Kebudayaan	54,639,796,550	30,698,000,000	23,941,796,550
	1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	54,639,796,550	30,698,000,000	23,941,796,550
18	Pemuda dan Olah Raga	78,886,479,850	67,000,000,000	11,886,479,850
	1 Dinas Pemuda dan Olahraga	78,886,479,850	67,000,000,000	11,886,479,850
19	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	59,026,068,900	33,918,954,000	25,107,114,900
	1 Badan Kesbang Linmas	23,000,486,650	13,000,000,000	10,000,486,650
	2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	18,982,020,700	11,500,000,000	7,482,020,700
	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17,043,561,550	9,418,954,000	7,624,607,550
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	7,136,100,149,143	550,506,214,267	6,585,593,934,876
	1 DPRD	50,181,194,700	-	50,181,194,700
	2 KDH & WKDH	7,280,972,000	-	7,280,972,000
	3 Sekretariat Daerah	6,385,698,062,088	135,750,999,067	6,249,947,063,021
	4 Sekretariat DPRD	158,457,559,450	144,010,625,200	14,446,934,250
	5 Badan Litbang	12,606,326,250	5,250,000,000	7,356,326,250
	6 Inspektorat Daerah	45,672,615,550	27,400,000,000	18,272,615,550
	7 Kantor Perwakilan Jakarta	21,086,359,500	13,978,290,000	7,108,069,500
	8 Dinas Pendapatan	394,370,395,006	190,000,000,000	204,370,395,006
	9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	36,109,175,450	23,000,000,000	13,109,175,450
	10 Badan Kepegawaian Daerah	18,956,540,400	8,616,300,000	10,340,240,400
	11 Sekretariat KORPRI	5,680,948,750	2,500,000,000	3,180,948,750
	12 Badan Penanggulangan Narkotika Provsu	-	-	-
21	Ketahanan Pangan	89,415,691,100	66,788,000,000	22,627,691,100
	1 Badan Ketahanan Pangan	48,858,970,150	35,788,000,000	13,070,970,150
	2 Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian	40,556,720,950	31,000,000,000	9,556,720,950
22	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	15,529,336,400	5,912,000,000	9,617,336,400
	1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15,529,336,400	5,912,000,000	9,617,336,400
25	Komunikasi dan Informatika	54,541,747,450	35,155,000,000	19,386,747,450
	1 Dinas Informasi dan Komunikasi	47,563,864,450	31,000,000,000	16,563,864,450
	3 Komisi Penyiaran & Informasi Daerah	6,977,883,000	4,155,000,000	2,822,883,000
26	Perpustakaan	30,671,000,000	17,000,000,000	13,671,000,000
	1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	30,671,000,000	17,000,000,000	13,671,000,000

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
	URUSAN PILIHAN	510,388,644,750	279,732,378,000	230,656,266,750
1	Pertanian	263,662,424,650	150,313,378,000	113,349,046,650
	1 Dinas Pertanian	162,944,408,200	81,886,378,000	81,058,030,200
	2 Dinas Perkebunan	64,317,625,800	45,060,000,000	19,257,625,800
	3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36,400,390,650	23,367,000,000	13,033,390,650
2	Kehutanan	66,644,899,300	17,500,000,000	49,144,899,300
	1 Dinas Kehutanan	66,644,899,300	17,500,000,000	49,144,899,300
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	29,557,997,250	17,715,000,000	11,842,997,250
	1 Dinas Pertambangan dan Energi	29,557,997,250	17,715,000,000	11,842,997,250
5	Kelautan dan Perikanan	97,318,223,400	78,000,000,000	19,318,223,400
	1 Dinas Perikanan dan Kelautan	97,318,223,400	78,000,000,000	19,318,223,400
7	Industri	53,205,100,150	16,204,000,000	37,001,100,150
	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53,205,100,150	16,204,000,000	37,001,100,150

Rumusan Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pencapaian target kinerja pada masing-masing program Prioritas Pembangunan berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel Lampiran 3.

5.4. KAJIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2017 merupakan acuan bagi SKPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara 2017 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2017 menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD, dan Lembaga Pemerintah Daerah Non-Struktural dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing SKPD perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan pagu sementara Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Bab-III, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Perda;
 - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, maupun tugas yang berkaitan dengan pencapaian prioritas/program/kegiatan pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. Bagi Pemerintah Kabupaten/kota, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa

kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota ;

- b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat;
 - d) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Rancangan RKPD Tahun 2017, untuk memastikan keselarasan pembangunan di Kabupaten/Kota dengan prioritas, sasaran, target dan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dengan mendapatkan masukan dari SKPD Provinsi Sumatera Utara, dalam merumuskan matriks rencana program/kegiatan pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana program/kegiatan menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017;
5. Pelaksanaan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender.
 6. Alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Kepada Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan wajib menyesuaikan dengan Prioritas Pembangunan dan Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang pada Bab-IV dan Bab-V RKPD Tahun 2017.
 7. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

7. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

8. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 bulan (triwulan) kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB - VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, akan sangat menentukan jalannya Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder dan pemerintah Kabupaten/Kota. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional umumnya dan daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya, untuk itu diharapkan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mempedomani target-target dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan pada lampiran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini dengan sepenuh tenaga guna mewujudkan Visi Sumatera Utara yakni **MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA YANG SEJAHTERA**.

Dengan semangat dan memohon ridho dan kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita wujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka “**SINERGITAS PEMBANGUNAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**”.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

TENGGU ERRY NURADI